



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019**

**KLUNGKUNG
2018**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 41 TAHUN 2018

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung.
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 2

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai dasar perumusan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan menjadi pedoman, penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Naskah dan Tabel RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2018



BUPATI KLUNGKUNG,

NYOMAN SUWIRTA



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Untuk terwujudnya penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka perencanaan pembangunan disusun dengan menyinergikan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam tiga kelompok yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan, 3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian halnya dengan pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan daerahnya baik jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun tahunan (1 tahun). Dokumen rencana pembangunan daerah tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung setiap tahunnya juga berkewajiban untuk menyusun RKPD. RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang akan ditetapkan pada tahun 2019 juga.

Mengingat belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten dan mengacu pada RPJMD Provinsi Bali untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten dengan pembangunan Daerah Provinsi.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD. RKPD tahun 2019

menetapkan prioritas percepatan pencapaian target RPJPD menggunakan pendekatan berorientasi proses dan berorientasi substansi. Pendekatan yang berorientasi proses mencakup pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.

Pendekatan berorientasi Substansi mencakup pendekatan holistik-tematik, integrative dan spasial. Pendekatan holistik-tematik adalah pendekatan penyusunan perencanaan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan factor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integrative dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 juga mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 serta RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2019.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD 2019 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat. Dengan demikian RKPD memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
- b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.
- c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD.

- d. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
2. Sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019;
3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); dan
4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi hasil pelaksanaan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi uraian ringkas mengenai hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan capaian realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

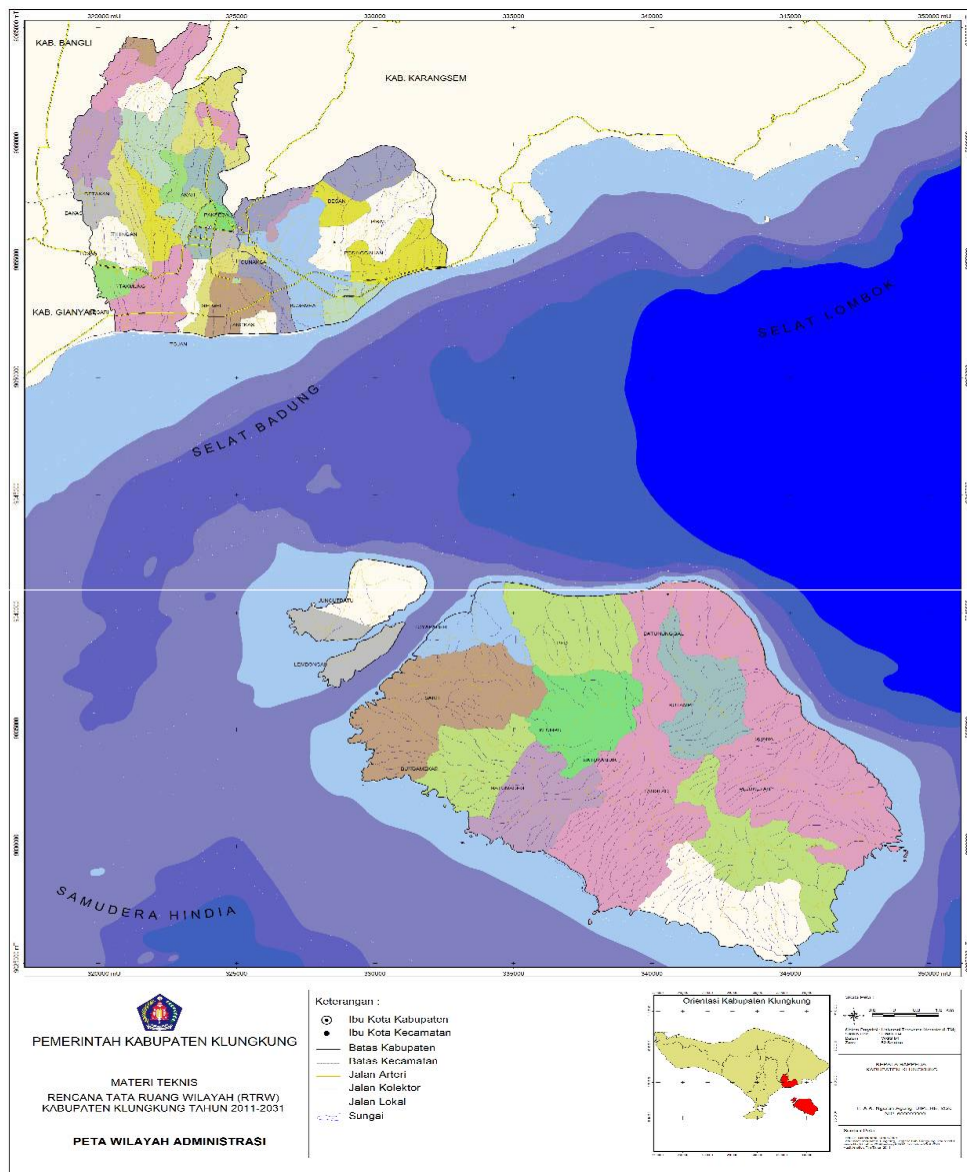
LAMPIRAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Klungkung terletak diantara 1150 21' 28" – 1150 37' 43" Bujur Timur dan 800 27' 37" – 800 49' 00" Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah yaitu : di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Samudra Hindia dan sebelah barat Kabupaten Gianyar.

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali, yaitu dengan luas wilayah 31.500 Ha (315 km²) atau 5,60 % dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Sepertiga luas wilayah Kabupaten Klungkung terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya (20.284 Ha) terletak di Kepulauan Nusa Penida. Adapun wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Klungkung

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung kalau ditinjau dari ketinggian permukaan air laut sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500m dengan luas 227,48 km² sedangkan di atas ketinggian 500 m hanya 1,25 km². Selengkapnya disajikan seperti tabel berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Klungkung dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (Meter)	Luas Wilayah	
	km ²	Persentase (%)
0 - 7	8,33	2,64
7 - 25	23,61	7,50
25 - 50	21,27	6,75
50 - 100	33,06	10,49
100 - 500	227,48	72,22
>500	1,25	0,40
Jumlah	315	100

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung Dalam Angka 2017)

Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai 77,7 km dan sebagian besar ada di wilayah kepulauan Nusa Penida yaitu sepanjang 67,20 km dan di Klungkung daratan hanya sepanjang 10,5 km seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Panjang Pantai Kabupaten Klungkung

Wilayah	Panjang (km)
Di Klungkung Daratan	10,5
Di Kepulauan Nusa Penida	67,2
Jumlah	77,7

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung Dalam Angka 2017)

Luas lahan Kabupaten Klungkung menurut penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah seluas 27.655 Ha, sedangkan luas sawah hanya 3.845 Ha. Lahan bukan sawah sebagian besar merupakan lahan kering seluas 27.655 Ha, sedangkan sisanya 5 Ha adalah lahan lainnya. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Klungkung, 2013-2017 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	2013 (ha)	2014 (ha)	2015 (ha)	2016 (ha)	2017 (ha)
1	Lahan Pertanian	23.175	23.175	23.174	23.144	23.125,2
1.1	Lahan Sawah	3.843	3.843	3.843	3.843	3.779,5
a.	Irigasi	-	-	-	-	-
b.	Tadah Hujan	-	-	-	-	-
c.	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
d.	Rawa Lebak	-	-	-	-	-
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah			19.331	19.301	19.345,7
a.	Tegal/Kebun	4.140	4.140	4.139	4.139	4.224
b.	Ladang/Huma	-	-	-	-	-

No.	Penggunaan Lahan	2013 (ha)	2014 (ha)	2015 (ha)	2016 (ha)	2017 (ha)
c.	Perkebunan	6.025	6.025	6.025	6.024	9.134
d.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	9.163	9.163	9.163	9.134	5.987
e.	Padang Pengembalaan/Padang Rumput	-	-	-	-	-
f.	Sementara Tidak Diusahakan	-	-	-	-	-
g.	Lainnya	4	4	4	4	0,5
2	Lahan Bukan Pertanian	8.325	8.325	8.326	8.356	8.375
	Jumlah	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Klungkung, 2018

Topografi wilayah Kabupaten Klungkung dengan panjang pantai 77,7 km, terdiri atas panjang pantai di daratan Klungkung sepanjang 10,5 km dan panjang pantai di Kepulauan Nusa Penida sepanjang 67,2 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi dan luasnya terbagi menjadi daerah datar (kemiringan 0-2^o) seluas 42,21 km² atau 13,08% dari luas kabupaten, landai (kemiringan 2-15^o) seluas 113,05 km² atau 35,89% luas kabupaten, miring (kemiringan 15-40^o) seluas 144,27 km² atau 45,80% luas kabupaten, dan terjal (kemiringan diatas 40^o) seluas 16,47 km² atau 5,23% dari luas Kabupaten Klungkung. Di Nusa Penida, secara umum kondisi topografi tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 - 3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3 - 8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30% dengan kondisi tanah bergelombang dan berbukit. Walaupun topografi wilayah Kabupaten Klungkung yang sebagian besar berupa bukit, di Kabupaten Klungkung kemungkinan terjadi banjir tetap ada.

Wilayah pemerintahan Kabupaten Klungkung meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa, 6 (enam) kelurahan, 244 (dua ratus empat puluh empat) dusun/lingkungan. Secara adat terdiri dari 113 desa adat dan 394 banjar adat. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Banjarangkan	: 45,73 Km ² atau 14,52%
Kecamatan Klungkung	: 29,05 Km ² atau 9,22%
Kecamatan Dawan	: 37,38 Km ² atau 11,87%
Kecamatan Nusa Penida	: 202,84 Km ² atau 64,39%

Penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan, karena penduduk itu sendiri berperan penting dalam proses pembangunan. Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2017 berjumlah 214.938 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 107.302 jiwa atau 49,92 persen dan penduduk perempuan berjumlah 107.636 jiwa atau 50,08 persen. Jumlah penduduk tahun 2017 menurun sebanyak 16.524 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2016 yang berjumlah sebesar 231.462 jiwa. Adapun gambaran jumlah penduduk Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2017 (jiwa)

Sedangkan jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2017 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

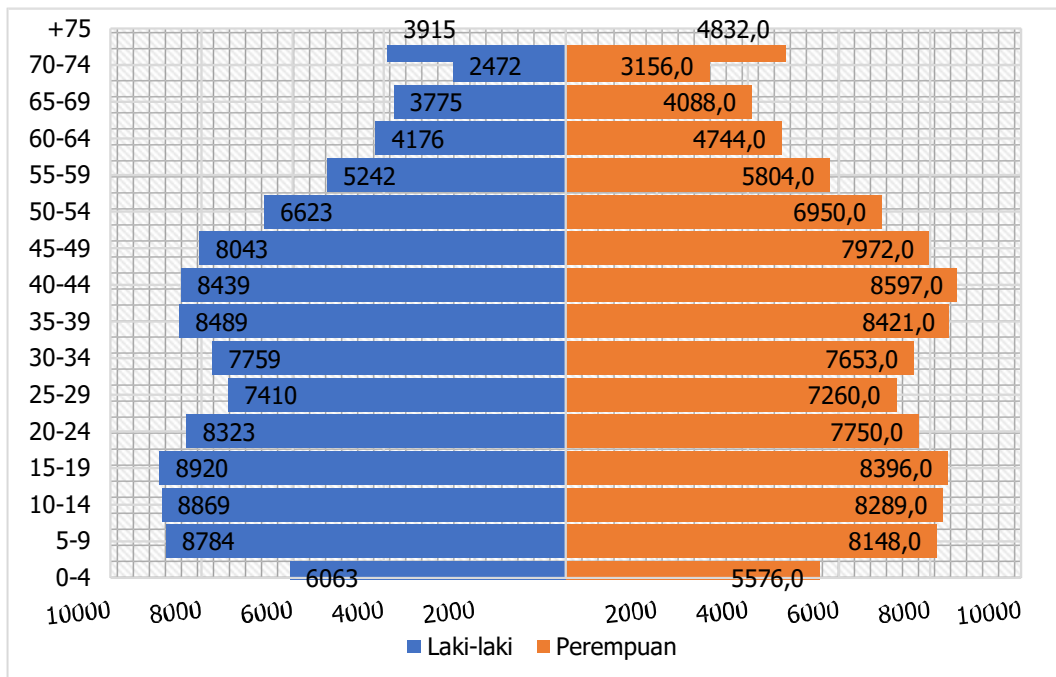
Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Nusa Penida	30.237	30.042	60.279
2	Banjarangkan	23.551	23.522	47.073
3	Klungkung	31.797	32.133	63.930
4	Dawan	21.717	21.939	43.656
	Jumlah	107.302	107.636	214.938

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah penduduk tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Klungkung sebanyak 63.930 jiwa (29,74%) dan yang terendah pada Kecamatan Dawan yaitu sebesar 43.656 jiwa (20,31%). Sedangkan jika dilihat dari kelompok umur, maka piramida penduduk Klungkung menunjukkan bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan kelompok umur muda (0-14 tahun) dan kelompok umur tua (65-75+ tahun). Kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 21,28% dari keseluruhan penduduk, sedangkan kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,38% dan kelompok umur tua (65-75+ tahun) sebanyak 10,35 persen dari keseluruhan penduduk Kabupaten Klungkung.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Gambar 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2017 menurut Kelompok Umur (jiwa)

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan maka *sex ratio* penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2017 sebesar 98% yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur maka penduduk Kabupaten Klungkung membentuk piramida penduduk ekspansif yang menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok produktif.

Penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan terbesar masih Belum/Tidak Sekolah yaitu 27,21 % dan Tamat SD sebesar 22,32%, Kabupaten Banyuwangi masih memiliki potensi penduduk yang memiliki pendidikan menengah keatas sampai pendidikan tinggi yang cukup besar yaitu sebesar 39,63%. Potensi tersebut setiap tahunnya akan terus berkembang seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi serta berkembangnya program pembiayaan / beasiswa bagi pendidikan.

Tabel 2.5

Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum/Tidak Sekolah	58.475	27,21
2.	SD/Sederajat	23.324	10,85
3.	Tamat SD	47.969	22,32
4.	Tamat SLTP/Sederajat	25.435	11,83
5.	Tamat SLTA/Sederajat	45.041	20,96
6.	Tamat Diploma	6.223	2,90
7.	Strata I	7.980	3,71
8.	Strata II	467	0,22
9.	Strata III	24	0,01
	Total	214.938	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 dengan Tahun 2010 maka dapat dijelaskan pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 0,95 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kecamatan Banjarangkan sebesar 1,41 persen dan Kecamatan Klungkung sebesar 1,40 persen. Adapun selengkapnya gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung per kecamatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan berdasarkan hasil Sensus Penduduk

No	Kecamatan	Penduduk		Pertumbuhan (Growth)
		2000	2010	
1	Nusa Penida	44,886	45,110	0,05
2	Banjarangkan	32,307	37,115	1,41
3	Klungkung	48,017	55,141	1,40
4	Dawan	29,954	33,177	1,00
Jumlah		155,164	170,543	0,95

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2016 (Klungkung dalam Angka 2016)

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka terjadi peningkatan kepadatan penduduk. Pada tahun 2010, kepadatan penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 541 jiwa/km² bertambah menjadi 560,95 jiwa/km² pada tahun 2016. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Klungkung yang mencapai 1.992,43 jiwa/km² dan yang terendah terdapat di Kecamatan Nusa Penida yang hanya mencapai 224,17 jiwa/km².

Tabel 2.7

Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	Penduduk/km ²				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nusa Penida	224	224	224	224,17	304,92
2	Banjarangkan	834	839	845	851,08	1032,16
3	Klungkung	1947	1962	1974	1992,43	1713,43
4	Dawan	905	910	915	921,08	1492,42
Jumlah		552	555	557	560,95	687,15

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung dalam Angka 2017)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi diukur dari laju pertumbuhan PDB/PDRB. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 5,98 persen di tahun 2014 menjadi 6,26 persen di tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung sedikit lebih tinggi dari Provinsi Bali yang mencapai 6,24 persen di tahun 2016.

Pada perhitungan PDRB dengan tahun dasar 2010 terjadi perubahan struktur perekonomian, dimana struktur ekonomi atas tahun dasar 2000 ditinjau dari lapangan usaha masih dibentuk oleh 9 (sembilan) sektor, yakni pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Pada tahun dasar 2010, struktur ekonomi berubah menjadi 19 kategori, bukan lagi menurut sektor. Kategori informasi dan komunikasi ditambahkan, kemudian sektor perdagangan dipecah menjadi beberapa kategori, begitu juga dengan sektor jasa-jasa. Transportansi dan pergudangan juga menjadi kategori baru dalam perhitungan itu. Sementara struktur ekonomi menurut pengeluaran tak mengalami perubahan. Data pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha secara rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Laju pertumbuhan riil ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata – Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,73	1,94	4,84	5,51	0,88	3,18
Pertambangan dan Penggalian	14,98	7,21	-0,96	-7,53	-4,69	1,8
Industri Pengolahan	5,81	8,67	8,64	6,63	7,38	7,43
Pengadaan Listrik dan Gas	10,11	7,99	3,63	5,3	3,38	6,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,48	5,37	6,48	0,17	4,12	3,72
Konstruksi	18,52	5,79	1	6,14	14,96	9,28
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25	8,87	6,5	6,58	7,07	6,86
Transportasi dan Pergudangan	5,57	7,13	9,19	5,43	5,47	6,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,41	8,51	5,23	5,64	10,18	7,39
Informasi dan Komunikasi	7,35	5,59	6,32	6,86	8,52	6,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,3	13,34	8,86	8,98	8,13	9,52
Real Estate	5,63	6,78	8,14	6,28	4,66	6,3
Jasa Perusahaan	1,33	9,04	6,84	7,15	3,19	5,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	-0,25	10,07	9,66	6,62	5,29
Jasa Pendidikan	-0,43	13,58	9,95	11,5	8,28	8,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,26	12,61	11,73	11,63	8,45	9,94
Jasa Lainnya	4,18	3,97	7,04	7,56	7,43	6,04
PDRB	6,25	6,05	5,98	6,11	6,26	6,13

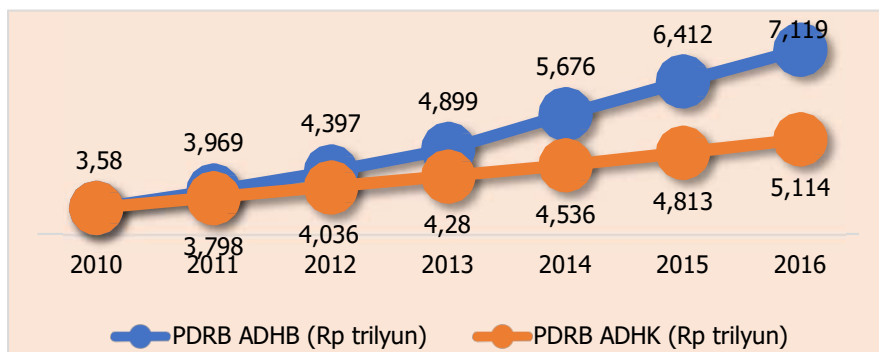
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung dalam Angka 2017)

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mencapai 6,13 persen. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan tersebut maka lapangan usaha yang laju pertumbuhannya di atas 6,13 adalah Industri Pengolahan (7,43%), Konstruksi (9,28%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,86%), Transportasi dan Pergudangan (6,56%) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,39%), Informasi dan Komunikasi (6,93%), Jasa Keuangan dan Asuransi (9,52%), Real Estate (6,30%), Jasa Pendidikan (8,57%), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,94%). Sedangkan yang dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi adalah jasa lainnya (6,04%), pengadaan listrik dan gas (6,08%), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib (5,29%) jasa perusahaan (5,51%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (3,72%), Pertambangan dan Galian (1,80%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,18%).

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi

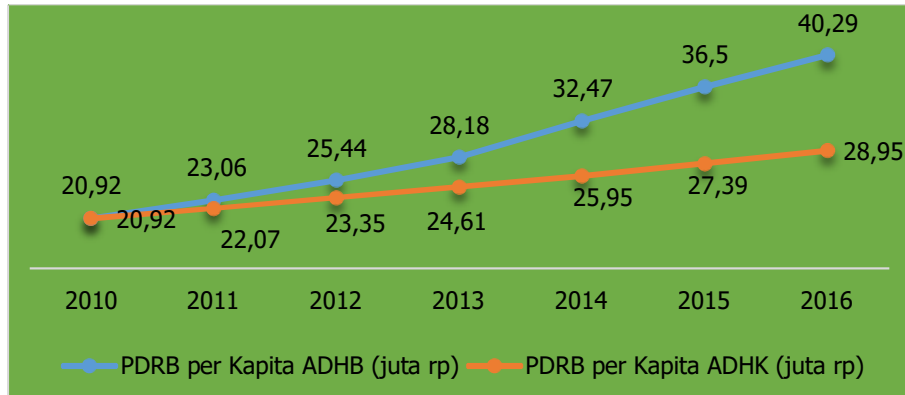
yang dimiliki residen atau non residen (BPS Kab. Klungkung, 2015:3). Dijelaskan lebih lanjut oleh BPS Kabupaten Klungkung (2015:4) bahwa pendekatan penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Mulai tahun 2015, perhitungan PDRB atas harga konstan menggunakan tahun dasar yaitu tahun 2010 menggantikan penggunaan tahun dasar tahun 2000 untuk perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun-tahun sebelumnya. Adapun PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017

Gambar 2.4. PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Berdasarkan gambar di atas, maka PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada PRDB atas dasar harga berlaku terjadi peningkatan yaitu Rp 6,412 trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp 7,119 trilyun pada tahun 2016. Sedangkan untuk PDRB Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2010, pada tahun 2016 mencapai Rp 5,114 trilyun atau meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 4,813 trilyun. Sedangkan pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016 dapat dijelaskan dari grafik di bawah ini.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017

Gambar 2.5. Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Berdasarkan gambar di atas, maka perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku mengalami peningkatan jauh lebih signifikan yaitu dari Rp 20,92 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 40,29 juta pada tahun 2016. Sedangkan PDRB per Kapita Harga Konstan dari Rp 20,92 juta di tahun 2010 menjadi Rp 28,95 juta di tahun 2016.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bahan makanan tertinggi berada pada kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 29,65 persen. Selanjutnya persentase pengeluaran terbesar setelah kelompok makanan dan minuman jadi yaitu kelompok padi-padian

dengan persentase sebesar 17,69 persen. Pengeluaran terbesar ketiga dan keempat yaitu konsumsi rokok dan buah-buahan dengan nilai persentase masing-masing sebesar 9,21 persen dan 7,68 persen. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa pengeluaran rokok masih menduduki peringkat tiga besar pengeluaran kelompok makanan bahkan masih di atas pengeluaran untuk buah-buahan.

Pada kelompok bukan makanan, pengeluaran pada kelompok sewa, kontrak dan perkiraan sewa rumah merupakan kelompok tertinggi pengeluaran penduduk Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,58 persen, disusul oleh kelompok transportasi sebesar 15,72 persen.

Bila dilihat konsumsi dari kelompok pendapatan penduduk dapat dilihat bahwa konsumsi per kapita kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sebesar 44,48 persen. Konsumsi per kapita kelompok penduduk 40 persen berpendapatan menengah dan 40 persen berpendapatan rendah masing-masing sebesar 36,52 persen dan 18,99 persen. Ini artinya masih terjadi ketimpangan antara ketiga kelompok penduduk ini.

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Klungkung dapat digunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini Tahun 1912, yaitu koefisien yang digunakan untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan diantara populasi. Gini ratio memiliki nilai antara 0 – 1 dimana semakin kecil nilainya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata.

Gini ratio Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan tren menurun yaitu dari 0,3777 tahun 2011 menjadi 0,3601 pada tahun 2016 atau masih dibawah Gini ratio Provinsi Bali yang mencapai 0,366. Capaian gini ratio terendah terjadi tahun 2012 yaitu mencapai 0,347. Kemudian jika dibandingkan dengan Gini ratio Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali, maka dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Bali, 2011-2016

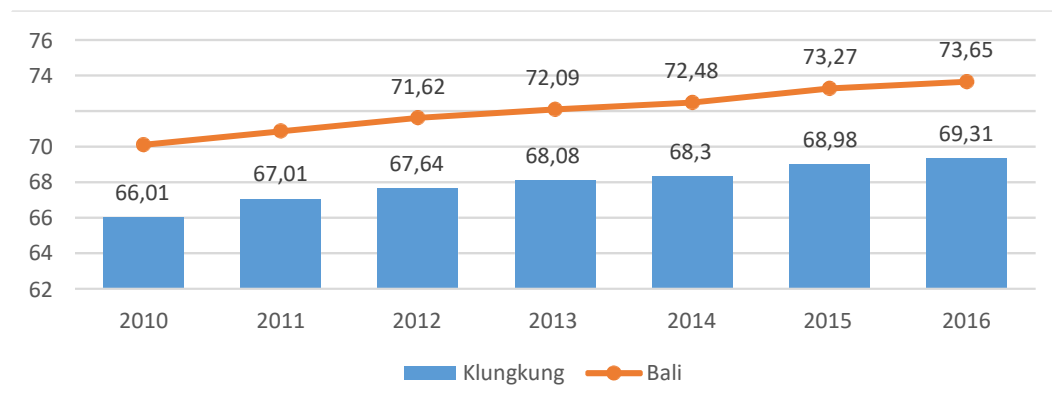
Kabupaten/Kota		T a h u n					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jembrana	0.4020	0.3706	0,3710	0,3863	0,3079	0,367
2.	Tabanan	0.3648	0.3473	0,3862	0,4026	0,3557	0,3444
3.	Badung	0.3385	0.3258	0,3468	0,3404	0,3147	0,3151
4.	Gianyar	0.3279	0.3362	0,3254	0,3774	0,3249	0,3049
5.	Klungkung	0.3777	0.3473	0,3599	0,3543	0,3695	0,3601
6.	Bangli	0.2678	0.3053	0,3073	0,3285	0,3838	0,3527
7.	Karangasem	0.2916	0.2877	0,3293	0,3371	0,3089	0,293
8.	Buleleng	0.3434	0.333	0,3755	0,3931	0,3373	0,336
9.	Denpasar	0.3399	0.4248	0,3638	0,3809	0,3589	0,3307
B A L I		0,37*)	0,41*)	0,403	0,415	0,377	0,366

Sumber : website BPS Provinsi Bali, 2017, *) angka revisi

Gini Ratio Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 berada di posisi 2 tertinggi dimana Kabupaten dengan gini ratio tertinggi adalah Kabupaten Jembrana yaitu 0,3627 dan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 0,2930.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Sebagai indikator pembangunan dalam tujuh tahun terakhir perkembangan IPM Kabupaten Klungkung menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Gambaran peningkatan IPM Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2016

Gambar 2.6. IPM Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2010-2016

Jika diperhatikan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung mengalami perubahan yang cukup positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IPM tahun 2016 sebesar 69,31 meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 68,98. Peningkatan IPM Kabupaten Klungkung didukung oleh peningkatan komponen-komponen pembentuk IPM sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

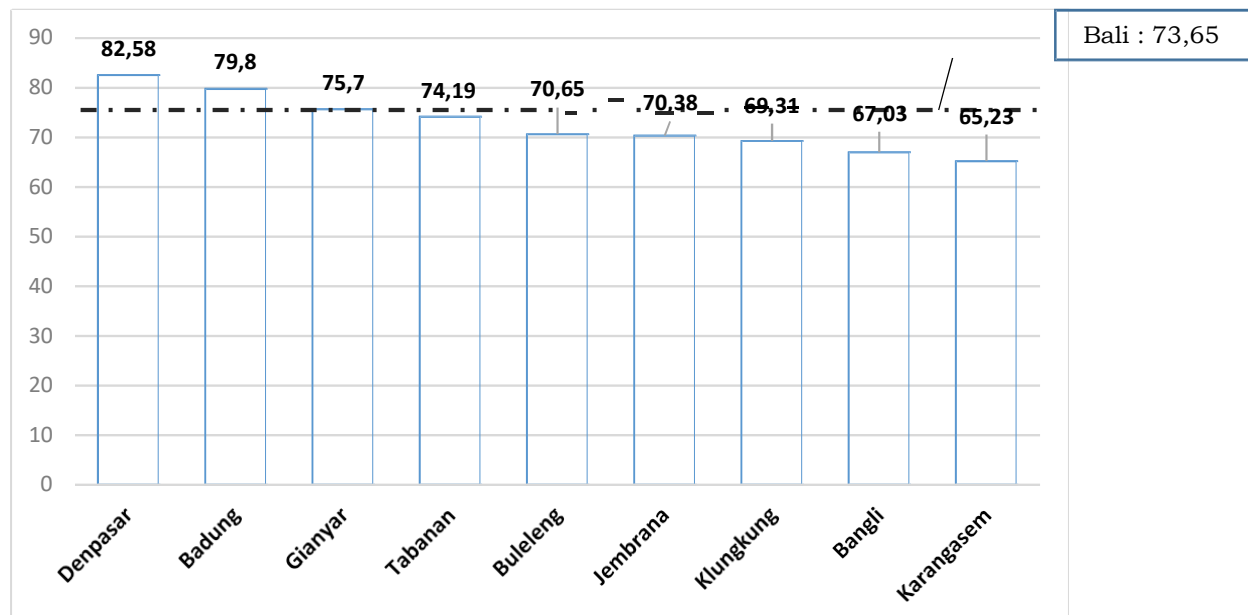
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Klungkung, 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,26	69,45	69,66	69,84	69,91	70,11	70,28
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,55	12,17	12,30	12,43	12,57	12,85	12,86
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,60	6,68	6,81	6,88	6,90	6,98	7,06
Pengeluaran Yang Disesuaikan (000)	10.006	10.129	10.358	10.488	10.501	10.711	10.852

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dari empat uraian komponen pembentuk IPM Kabupaten Klungkung semua komponen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komponen kesehatan yaitu angka harapan hidup meningkat dari tahun 2015 menjadi 70,28 tahun pada tahun 2016. Sedangkan pada komponen pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah meningkat dari 12,85 tahun pada tahun 2015 menjadi 12,86 tahun pada tahun 2016. Komponen pendidikan yang lain yaitu rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dimana rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 selama 6,98 tahun meningkat menjadi 7,06 tahun pada tahun 2016. Untuk komponen ekonomi yaitu paritas daya beli (pengeluaran riil) Kabupaten Klungkung juga mengalami peningkatan dari 10.711 ribu rupiah setahun pada tahun 2015 mencapai 10.852 ribu rupiah setahun pada tahun 2016.

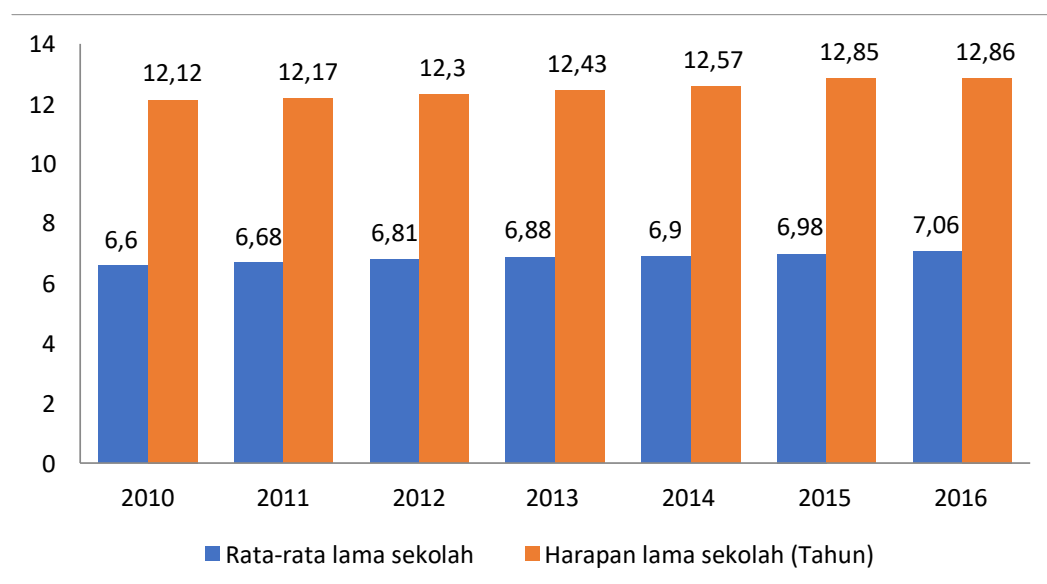
Dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi maka IPM Kabupaten Klungkung masih berada di bawah IPM Provinsi yang pada tahun 2016 mencapai 73,65. Sedangkan dibandingkan kabupaten/kota di Bali, IPM Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 di atas Kabupaten Bangli yang mencapai 66,24 dan Kabupaten Karangasem yang mencapai 64,68 di tahun 2015.



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2017

Gambar 2.7. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2015

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Untuk persentase rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

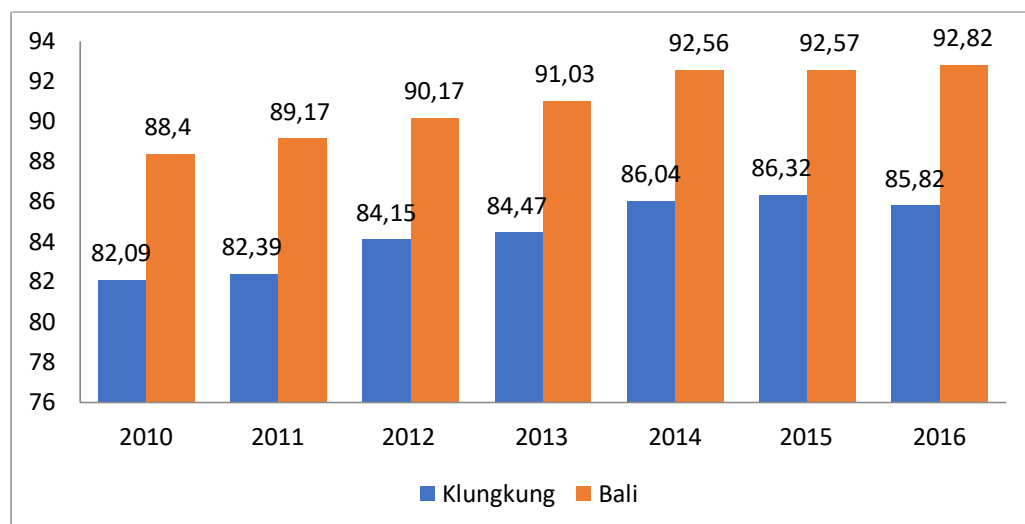


Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017

Gambar 2.8. Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Berdasarkan gambaran diatas, untuk rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 baru mencapai 7,06 tahun atau rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Klungkung baru berada pada tingkat kelas I SMP (masih dibawah wajib belajar 9 tahun). Sedangkan untuk harapan lama sekolah di Kabupaten Klungkung sudah cukup tinggi yaitu dari 12,12 tahun di tahun 2010 menjadi 12,86 di tahun 2016.

Berdasarkan data tersebut diatas maka cenderung terjadi peningkatan capaian kinerja bidang urusan pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari indikator persentase melek huruf di Kabupaten Klungkung sebagaimana ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

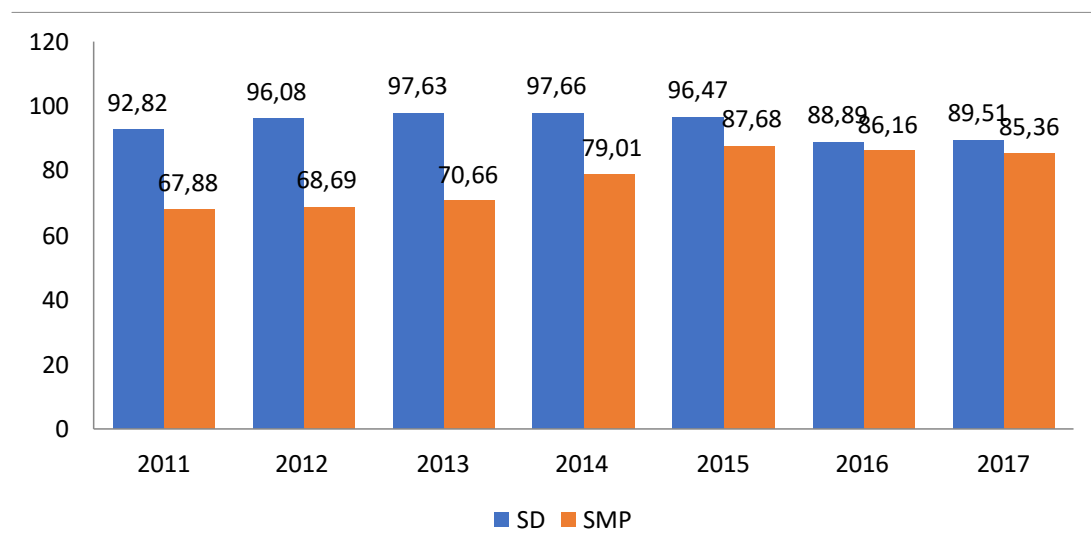


Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017

Gambar 2.9. Persentase melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Berdasarkan gambar di atas, maka persentase melek huruf di Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir terus meningkat yaitu dari 82,09 persen di tahun 2010 menjadi 86,32 persen di tahun 2015 namun mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 85,82 persen dan masih tetap di bawah capaian provinsi Bali.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Tahun 2014 sebesar 97,66 menurun menjadi 89,51 di Tahun 2017. Sedangkan APM pendidikan SMP pada tahun 2014 sebesar 79,01 persen meningkat menjadi 87,68 di tahun 2015 dan menurun menjadi 85,36 persen di tahun 2017. Adapun perbandingan APM SD dan SMP adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017

Gambar 2.10. Perkembangan APM Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2017

Data mengenai penduduk Kabupaten Klungkung menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung, 2014 - 2017

Ijazah Tertinggi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat	16,06	31,50	29,41	30,04	26,72
Tamat SD/Sederajat	25,88	22,52	20,63	31,61	19,30
Tamat SMP/Sederajat	20,95	16,61	16,81	6,32	16,09
Tamat SMA/Sederajat	29,32	22,06	25,48	23,62	28,14
Tamat DI/DII/DIII	2,76	-	2,19	2,41	2,80
Tamat DIV/S1/S2/S3	5,03	-	5,48	6,01	6,95

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2018

AKHB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi untuk Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)/1000 LH, 2013-2016

Kecamatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	AKHB (1000-AKB)
Banjarangkan	7,82	992
Dawan	5,06	995
Klungkung	2,27	998
Nusa Penida	15,92	984
Jumlah	2016	7,67
	2015	6,10
	2014	6,88
	2013	8,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2016

Penyebab kematian bayi terbesar didominasi oleh Kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Adapun jumlah kasus BBLR, BBLR dirujuk dan bergizi buruk di Kabupaten Klungkung tahun 2012-2016 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Klungkung, 2012-2016

Tahun	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
2012	2.977	113	-	7
2013	2.950	112	-	7
2014	2.915	102	-	7
2015	2.972	129	-	12
2016	2.884	92	-	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2017

Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian balita. Angka Kematian Balita di Kabupaten Klungkung tahun 2016 sudah di bawah target SPM. Adapun perkembangan angka kematian balita di Kabupaten Klungkung dari tahun 2013-2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Angka Kematian Balita (AKABA) / 1.000 Bali, 2013-2016

Kecamatan	Jumlah Balita	Kematian Balita	AKABA/1.000 Balita
Banjarangkan	2.537	5	1,97
Dawan	2.705	4	1,48
Klungkung	3.888	3	0,77
Nusa Penida	3.183	12	3,77
Jumlah	2016	12.313	24
	2015	10.450	23
	2014	12.138	28
	2013	10.602	31

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2017

kondisi gizi balita di Kabupaten Klungkung 2013-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

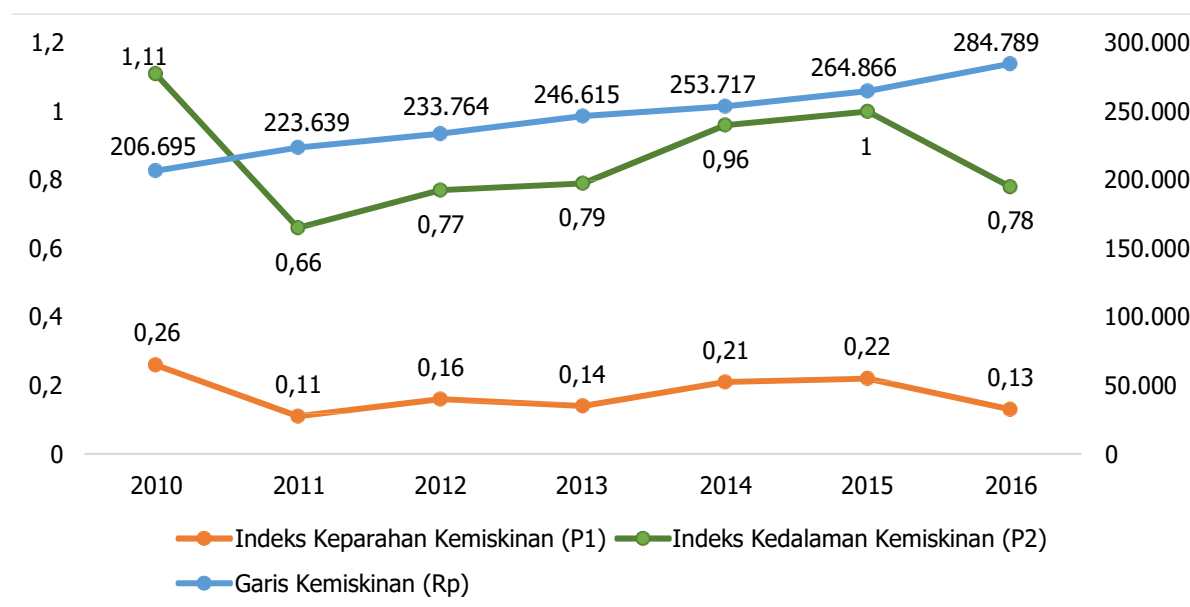
Tabel 2.15

Jumlah dan Persentase Balita Gizi Kurang (Jiwa), 2013- 2016

Kecamatan	Balita	Balita Gizi Kurang	%
Banjarangkan	2.537	46	1,81
Dawan	2.705	43	1,59
Klungkung	3.888	69	1,77
Nusa Penida	3.183	82	2,58
Jumlah	2016	12.313	1,95
	2015	10.450	2,33
	2014	12.138	2,16
	2013	10.602	2,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2017

Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan.

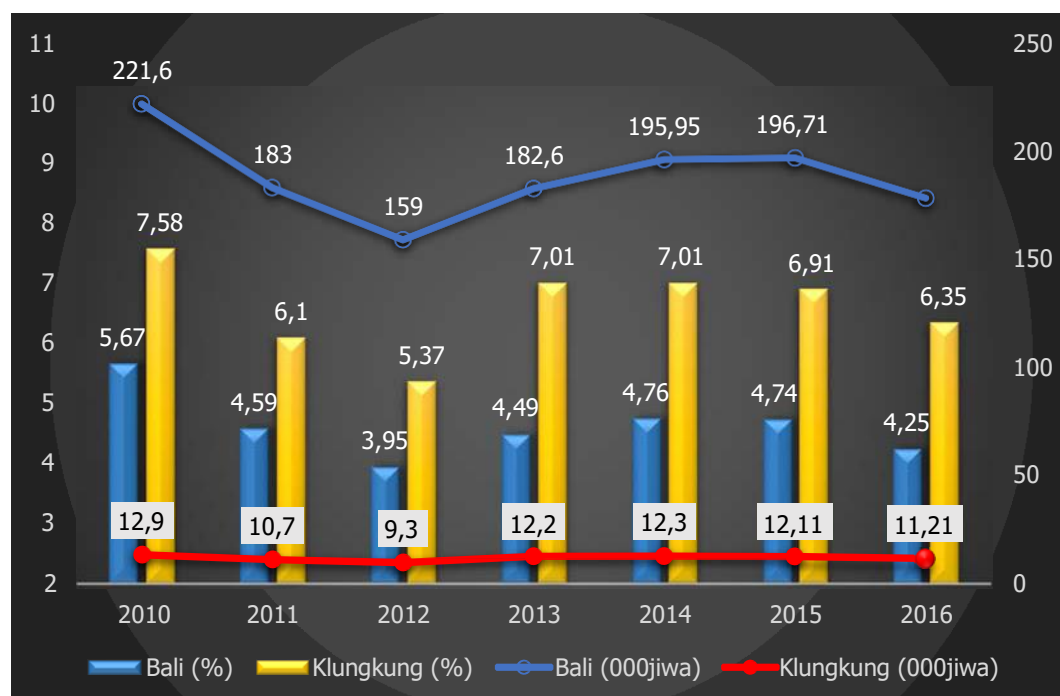


Sumber :BPS Kabupaten Klungkung, 2011-2017

Gambar 2.11. Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Garis kemiskinan di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan sejalan dengan inflasi. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, maka dapat dihitung persentase penduduk miskin. Tahun 2010 garis kemiskinan Kabupaten Klungkung ditetapkan sebesar Rp 206.695,00 menjadi Rp 284.789,00 di tahun 2016. Berdasarkan garis kemiskinan dapat diukur indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dimana semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan berarti semakin jauh pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Klungkung di tahun 2016 adalah sebesar 0,78 persen atau menurun dibandingkan kondisi empat tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Kabupaten Klungkung mengalami perbaikan dan bergerak mendekati garis kemiskinan.

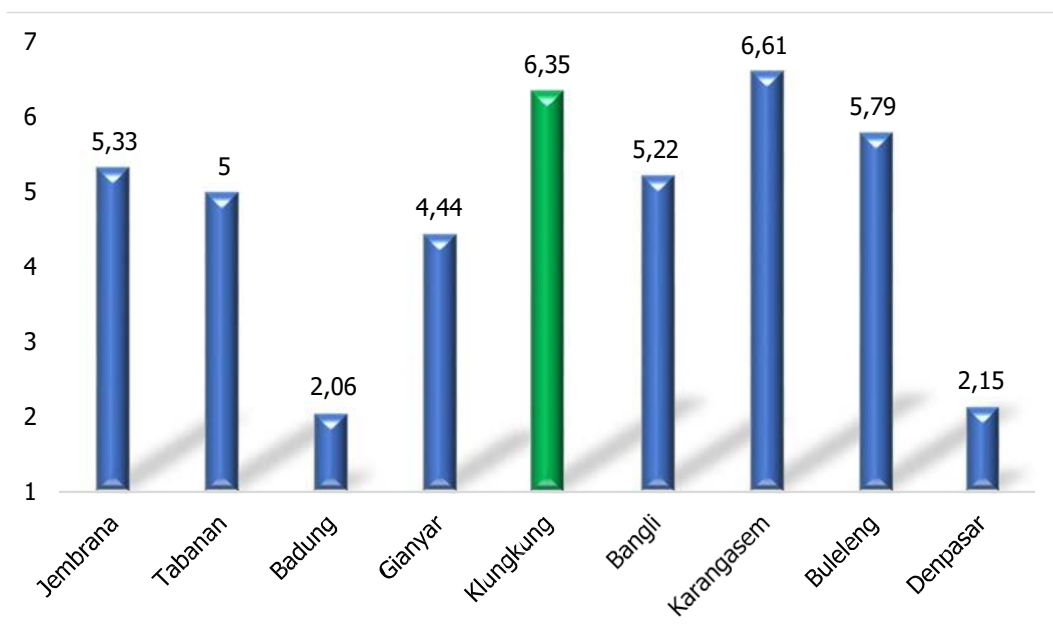
Indikator kemiskinan penting lainnya yang dipergunakan adalah indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Klungkung tahun 2016 mencapai 0,13 persen dan terjadi tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan diantara penduduk miskin semakin rendah dan terjadi perbaikan kesejahteraan yang semakin merata diantara penduduk miskin Kabupaten Klungkung.



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2017

Gambar 2.12. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Dalam 3 tahun (2010-2012) di Kabupaten Klungkung terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 12.200 jiwa atau mencapai 7,01 persen atau masih di atas persentase kemiskinan provinsi yang mencapai 4,49 persen. Sedangkan pada tahun 2014-2016, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan yaitu dari 12.300 jiwa atau 7,01 persen di tahun 2014 menjadi tinggal 11.210 jiwa atau 6,35% di tahun 2016. Sedangkan perbandingan persentase kemiskinan antar Kabupaten Kota se-Bali adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2017

Gambar 2.13. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

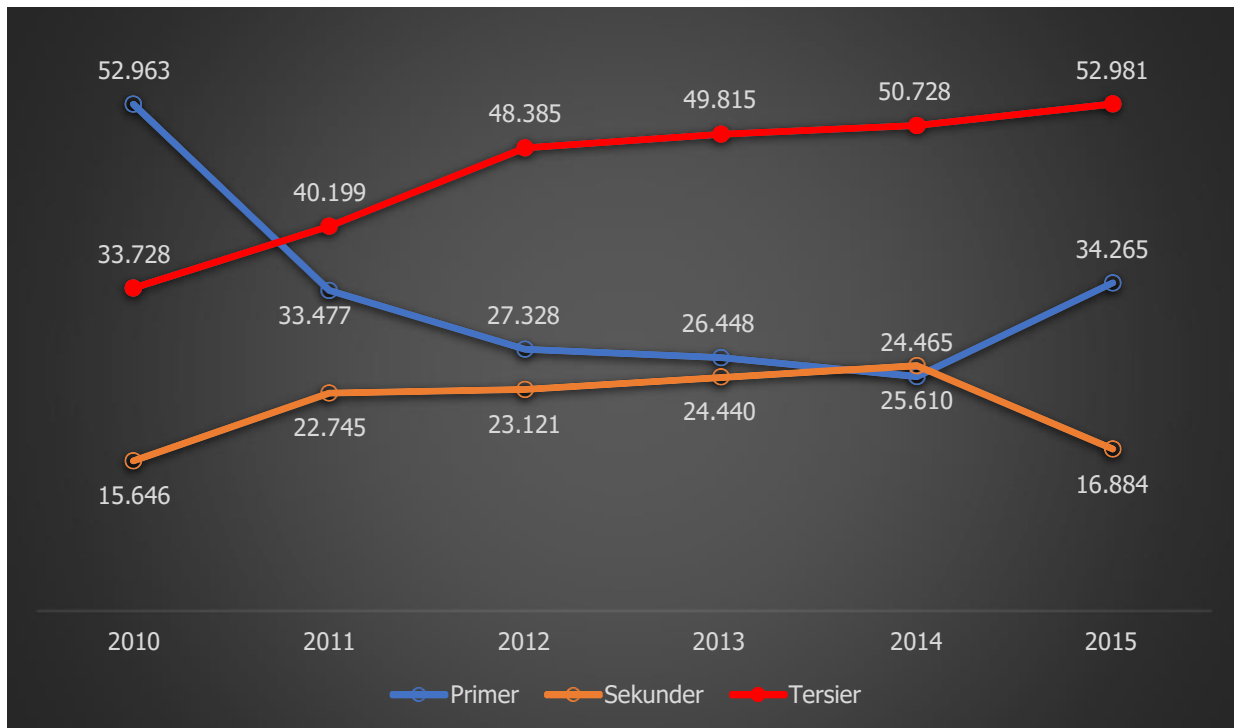


Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2017

Gambar 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2015

Berdasarkan gambar di atas, maka dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung cenderung menurun. Pada tahun 2010, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,72 persen menurun menjadi 1,39 persen di tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terus mengalami penurunan yaitu dari 3.809 jiwa pada tahun 2010 menjadi tinggal 1.471 jiwa pada tahun 2015.

Jenis mata pencaharian angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2017

Gambar 2.15. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2015

Penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan yaitu dari 52.963 jiwa di tahun 2010 menjadi tinggal 24.465 jiwa di tahun 2014 tetapi meningkat di tahun 2015 menjadi 34.265 jiwa. Peningkatan di sektor tersier dalam beberapa tahun terus meningkat dan menjadi sektor tertinggi yang menyerap angkatan kerja. Lapangan usaha yang menyerap angkatan kerja tertinggi adalah pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan rumah makan yaitu sebesar 25.738 jiwa dan jasa kemasyarakatan yang mencapai 20.301 jiwa di tahun 2014. Lapangan usaha pertanian masih menjadi penyerap angkatan kerja nomor 2 terbesar secara keseluruhan yaitu mencapai 22.988 jiwa di tahun 2014.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Klungkung dari tahun 2014 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16

Jumlah Grup Kesenian di Kab. Klungkung, 2014-2016

Kecamatan	Jumlah	Jumlah Penduduk	Grup Kesenian /10.000 Penduduk
Banjarangkan	60	38.920	15,42
Dawan	33	34.430	9,58
Klungkung	20	57.880	3,46
Nusa Penida	13	45.470	2,86
2016	126	176.700	7,13
2015	124	175.700	7,06
2014	140	174.800	8,01

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung, 2017

Jumlah organisasi olahraga di di Kabupaten Klungkung sampai dengan bulan Juni tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

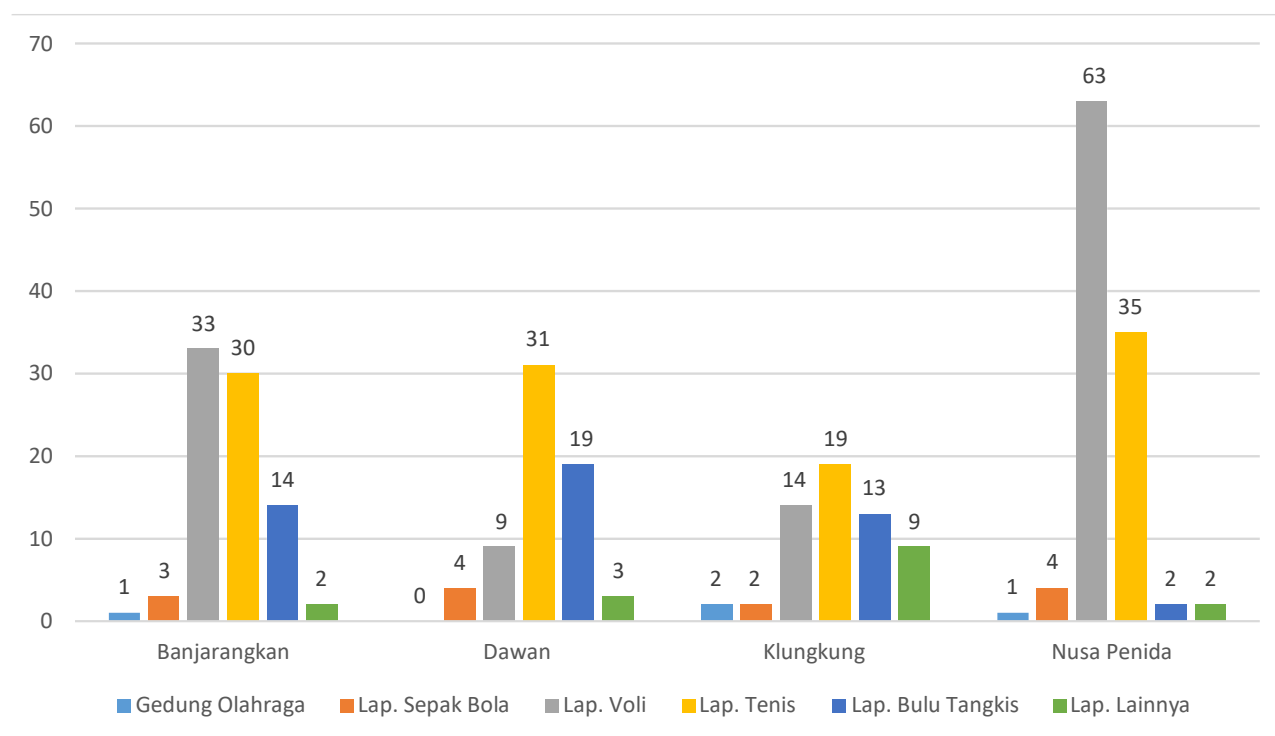
Tabel 2.17

Organisasi Olahraga Menurut Kecamatan, 2014-2016

Kecamatan	Organisasi Olahraga		
	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
Banjarangkan	1	-	1
Dawan	1	-	1
Klungkung	32	1	33
Nusa Penida	1	-	1
2016	35	1	36
2015	44	-	44
2014	26	-	26

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2017

Jumlah sarana olahraga menurut Kecamatan sampai dengan bulan Juni tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2017

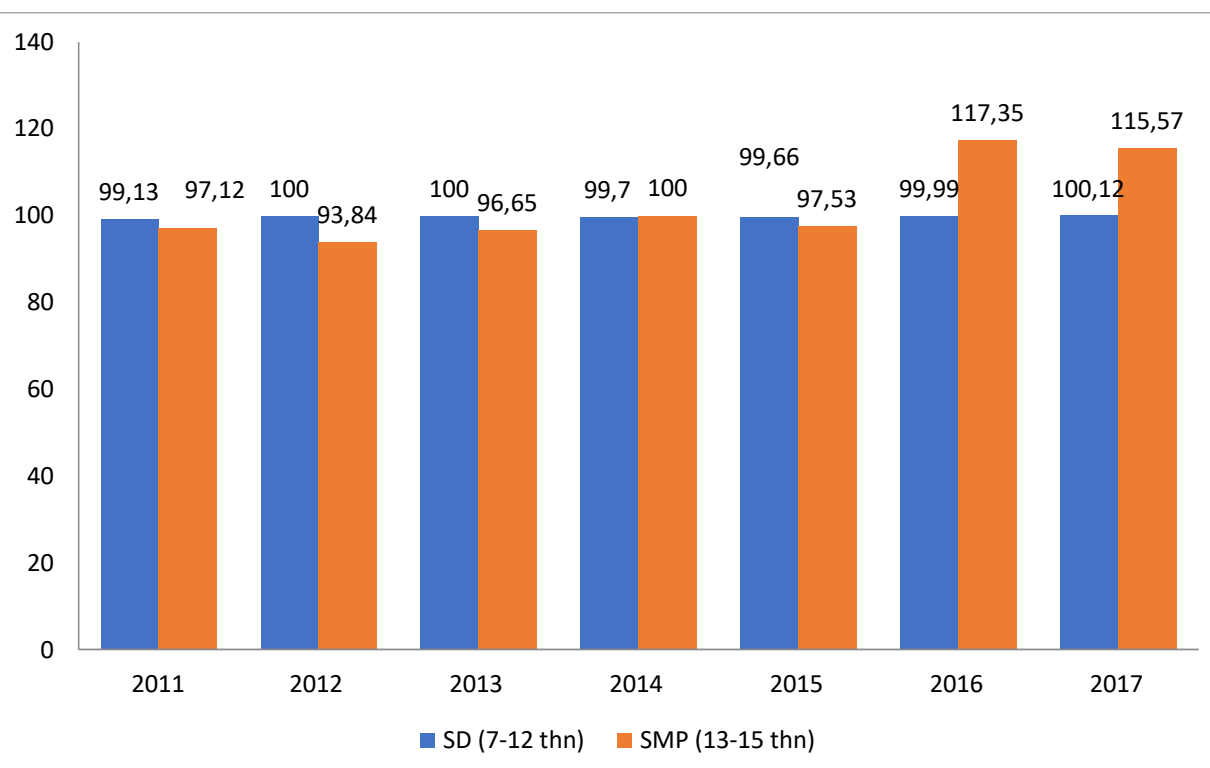
Gambar 2.16. Sarana olahraga menurut Kecamatan, 2016

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Klungkung dapat digambarkan melalui keberhasilan pelaksanaan pembangunan melalui aspek pelayanan umum sebagai berikut :

2.1.3.1. Fokus Pelayanan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Adapun pertumbuhan APS di Kabupaten Klungkung berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2017

Gambar 2.17. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk partisipasi sekolah tingkat SD pada tahun 2017 mencapai 100,12 persen, meski berfluktuasi tetapi mengalami tren peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 99,13 persen. Sedangkan APS Tingkat Pendidikan SMP juga berfluktuasi tetapi memiliki tren meningkat yaitu dari 97,12 persen di tahun 2011 menjadi 117,35 persen di tahun 2016 namun mengalami penurunan menjadi 115,57 persen di tahun 2017.

Sedangkan pada partisipasi kasar penduduk dalam kelompok umur SD, dan SMP sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.18

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2017

Kelompok Umur	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07-12 (SD/MI)	103,29	107,87	105,42	107,57	105,96	99,92	100,12
13-15 (SMP/MTs)	88,65	75,16	80,89	90,91	94,29	113,91	111,83

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2017

Angka Partisipasi Kasar untuk kelompok usia 07-12 tahun/SD-MI mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 103,29 persen menjadi 100,12 persen di tahun 2017. Pada kelompok usia 13-15 tahun/SMP-MTs angka partisipasi kasar mengalami peningkatan dari 80,89 persen pada tahun 2013 menjadi 113,91 persen pada tahun 2016, namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 111,83 persen.

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Klungkung dilihat dari Rasio Puskesmas, Pustu, Pusling, Poliklinik.10.000 penduduk dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.19

Rasio Puskesmas, Pustu, Pusling, Poliklinik /10.000 Penduduk, 2013-Juni 2016

Kecamatan	Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes Poliklinik	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas, Pustu, Polindes, Poliklinik /10.000 Penduduk
Banjarangkan	29	38.920	7,45
Dawan	25	34.430	7,26
Klungkung	40	57.880	6,91
Nusa Penida	34	45.470	7,48
Juni 2016	128	176.700	7,24
2015	127	175.700	7,22
2014	128	174.800	7,32
2013	126	173.900	7,24

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2016

Sedangkan untuk rasio rumah sakit/10.000 penduduk dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

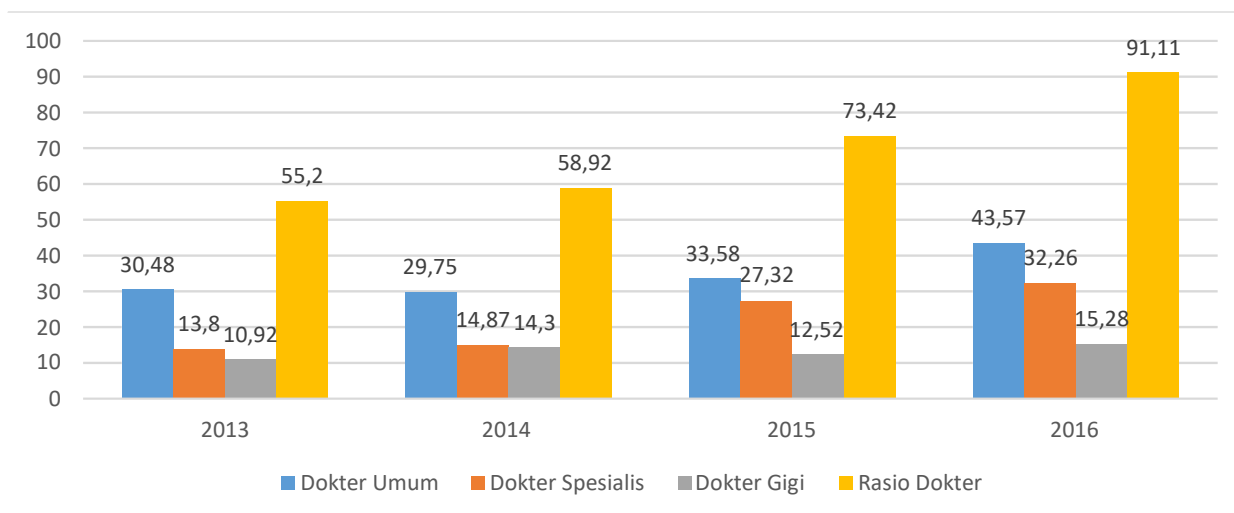
Tabel 2.20

Rasio Rumah Sakit/10.000 Penduduk, 2013-2016

Jenis Rumah Sakit	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	1
Rumah Sakit Umum	1
Rumah Sakit Khusus	1
Jumlah Rumah Sakit	3
Rasio Rumah Sakit/10.000 Penduduk 2016	0,17
2015	0,17
2014	0,17
2013	0,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2017

Rasio Dokter per jumlah 100.000 penduduk dari tahun 2013 s/d 2016 di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2016

Gambar 2.18. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk, 2013-2016

Rasio Dokter Per Jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

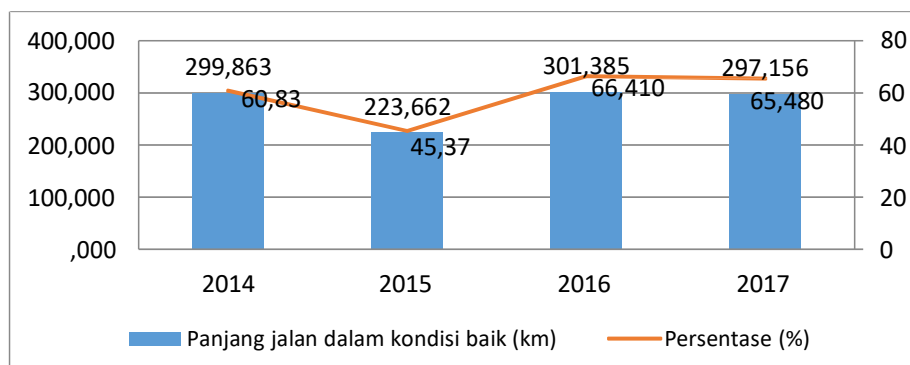
Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2017 adalah 453,805 km terdiri dari Jalan Kabupaten di Klungkung daratan sepanjang 224,798 km dan Jalan Kabupaten di Klungkung Kepulauan sepanjang 229,007 km. Untuk jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sepanjang 297,156 km. Khususnya di Kec. Nusa Penida persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan karena umur jalan dan tipe permukaan yang digunakan sebelumnya menggunakan lapen dan burda masuk kondisi baik dan mulai tahun 2015 tipe permukaan sudah dapat menggunakan AC cold mix sehingga kondisi jalan berubah menjadi sedang, sehingga data kondisi jalan dalam kondisi baik (lapisan cold mix) menjadi menurun (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya). Untuk tahun 2017 rencana peningkatan jalan sepanjang 17,00 km dan realisasinya sepanjang 15,50 km. Panjang jalan dalam kondisi baik dalam 4 tahun terakhir yaitu sebagaimana tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.21

Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2017

No	Tahun	Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	2014	299,863	60,83
2	2015	223,662	45,37
3	2016	301,385	66,41
4	2017	297,156	65,48

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2018



Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2018

Gambar 2.19. Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2017

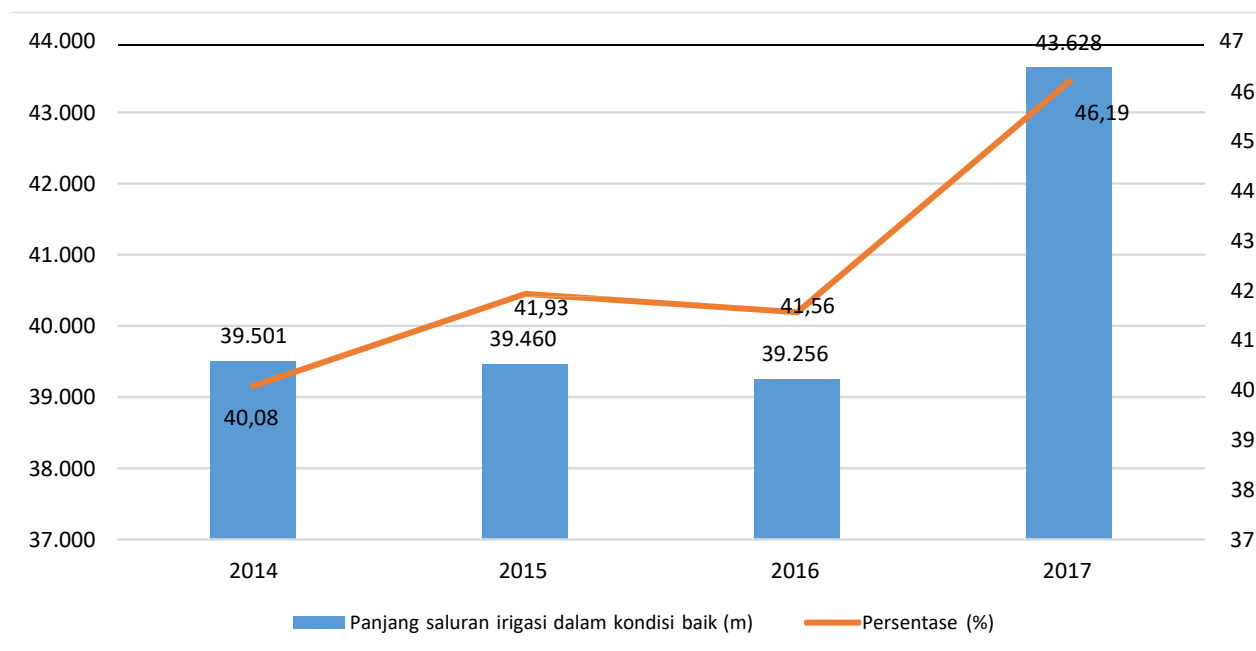
Jumlah jembatan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 54 buah dan sudah dibangun sebanyak 54 buah. Untuk tahun 2017 rencana pembangunan jembatan 2 bh (33 m') dan realisasinya 2 bh (30 m').

Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m', dimana 2 Daerah Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (DI unda dan DI bajing) yang sebelumnya 1 DI (DI unda). Sehingga target jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum) per 31 Desember 2015 sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.114,00 m' (yang sebelumnya per 31 Desember 2014 sebanyak 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m'). Data per 31 Desember 2017 jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.459,00 m (terjadi penambahan panjang saluran pada DI. Cai dari saluran tersier menjadi saluran sekunder). Rencana peningkatan jaringan irigasi tahun 2017 sepanjang 4.120,00 m' dan realisasinya sepanjang 4.120,00 m' dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2017 sepanjang 602,00 m' dan realisasinya sepanjang 602,00 m' dari target yang direncanakan sepanjang 94.459,00 m' dan realisasi sepanjang 43.628,38 m'. Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dalam 4 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.22
Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2017

No	Tahun	Panjang keseluruhan saluran irigasi (m)	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	Perentase (%)
1	2	3	4	5
1	2014	98.557,00	39.500,95	40,08
2	2015	94.114,00	39.459,85	41,93
3	2016	94.459,00	39.255,65	41,56
4	2017	94.459,00	43.628,38	46,19

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2018



Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2018

Gambar 2.20. Perkembangan Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2017

Pemeluk agama dan tempat ibadah menurut agama di Kabupaten Klungkung 2012-2016 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.23

Pemeluk Agama dirinci menurut Agama di Kabupaten Klungkung, 2012-2016

Agama	2012	2013	2014	2015	2016
1 Hindu	201.421	193.493	195.628	216.996	298.398
2 Buddha	1.162	1.175	1.530	1.670	1.031
3 Islam	5.261	8.030	8.129	9.679	9.737
4 Katholik	205	210	210	155	155
5 Kristen	374	367	381	392	392
6 Konghucu	18	18	18	18	18

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Klungkung, 2017

Tabel 2.24

Tempat Ibadah menurut Agama di Kabupaten Klungkung, 2012-2016

Tempat Ibadah	2012	2013	2014	2015	2016
1 Hindu					
- Kahyangan Tiga	346	346	363	363	363
- Dang Kahyangan	82	82	18	18	18
- Paibon	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
2 Buddha					
- Klenteng Satya	18	18	18	18	18
- Wihara	1	1	1	1	1
3 Islam					
- Masjid	7	7	7	7	7
- Mushola	9	9	9	9	9
4 Katholik					
- Gereja	1	1	1	1	1
5 Kristen					
- Pos Pembinaan	1	5	5	6	6

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Klungkung, 2017

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Klungkung tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kab. Klungkung, 2015

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	55.209	50.392	105.601
Bekerja	54.587	49.543	104.130
Pengangguran Terbuka	622	849	1.471
Bukan Angkatan Kerja	9.953	18.135	28.088
Sekolah	5.457	4.019	9.476
Mengurus Rumah Tangga	2.338	11.428	13.766
Lainnya	2.158	2.688	4.846
Jumlah	65.162	68.527	133.689
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84,73	73,54	78,99
Tingkat Pengangguran	1,13	1,68	1,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung dalam Angka 2017)

Dalam upaya menekan kelahiran telah diupayakan dengan program keluarga berencana dengan penyediaan klinik-klinik KB. Akseptor baru keluarga berencana tahun 2016 mencapai 1.480 orang. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Klungkung, jumlah pasangan usia subur (PUS) 33.906 dimana sekitar 12 % belum menjadi akseptor. Secara lengkap data PUS disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Jumlah dan Persentase PUS yang belum menjadi Akseptor 2016

Kecamatan	Jumlah PUS	PUS yang belum jadi Akseptor	Persentase yang belum menjadi Akseptor (%)
1. Nusa Penida	9.786	1.072	10,95
2. Banjarangkan	6.936	701	10,11
3. Klungkung	10.554	1.238	11,73
4. Dawan	6.630	1.168	17,62
Jumlah			
2016	33.906	4.179	12,33
2015	33.631	3.376	10,04
2014	33.795	4.474	13,24
2013	33.110	4.770	14,41
2012	32.527	4.030	12,39

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, Pemdes, 2017

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap – tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata – rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun. Berikut ini disajikan tabel tentang nilai PDRB per kapita menurut harga berlaku dan konstan Kabupaten Klungkung

Tabel 2.27

Nilai PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2016

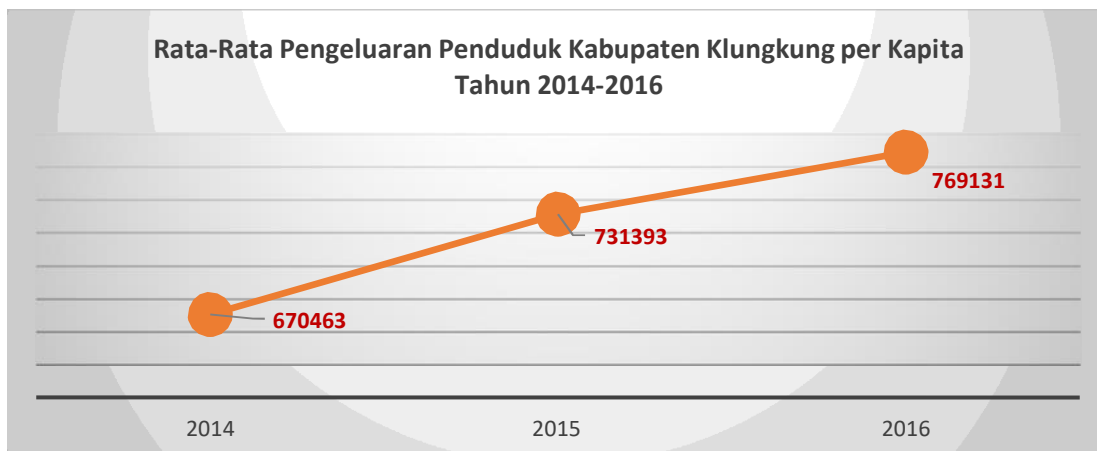
No.	Tahun	PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rp.)	PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rp.)	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	PDRB per Kapita Harga Berlaku (Rp.)	PDRB per Kapita Harga Konstan (Rp.)
1	2011	3.022.786,71	1.383.890,23	174.073	17.365.052,08	7.950.056,75
2	2012	3.347.198,61	1.467.352,42	175.053	19.121.058,25	8.382.332,33
3	2013	4.899.877,40	4.280.452,80	173.900	28.180.000,00	24.610.000,00
4	2014	5.676.419,30	4.536.261,30	174.800	32.470.000,00	25.950.000,00
5	2015	6.412.462,20	4.813.029,50	175.700	36.500.000,00	27.390.000,00
6	2016	7.119.515,60	5.114.699,30	176.700	40.291.542,73	28.945.666,67

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung dalam Angka 2017)

Nilai PDRB per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB per kapita mengindikasikan bagaimana produktivitas dicapai dengan pemanfaatan teknologi, kapital dan tenaga kerja, sehingga menjadi lebih efektif dan bernilai lebih. Peningkatan PDRB per kapita ini nantinya dapat digunakan untuk mengukur secara kasar tingkat kemajuan ekonomi dan nilai tambah secara rata – rata tiap – tiap penduduk Klungkung dalam melakukan kegiatan ekonomi.

B. Pengeluaran Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah rata - rata pengeluaran per kapita. Rata - rata pengeluaran per kapita adalah rata - rata pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap orang atau penduduk. Kemampuan daya beli dan ketahanan ekonomi setiap penduduk dapat dilihat dari pengeluaran per kapita.

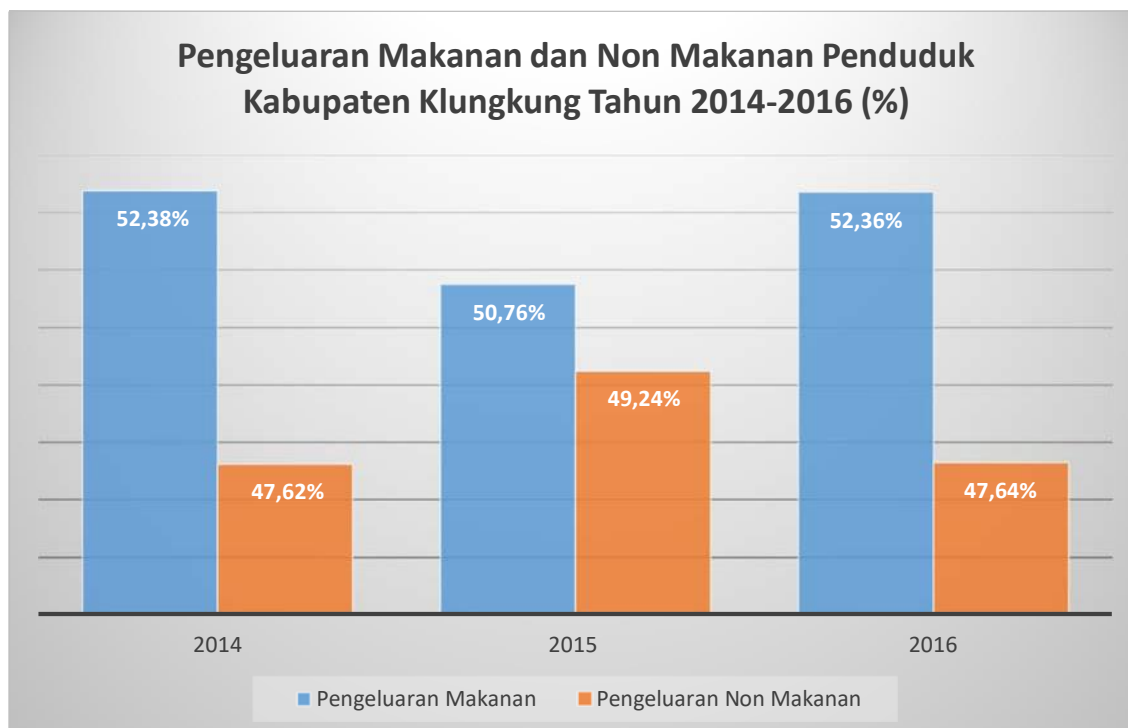


Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 dan 2017 (Klungkung dalam Angka 2016 dan 2017)

Gambar 2.21. Grafik Rata-rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Klungkung Per Kapita Tahun 2014-2016 (Rp/bulan)

Pada tahun 2016 rata - rata pengeluaran penduduk Klungkung sebesar Rp 769.131,- meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp 670.463,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan harga komoditi baik makanan dan non makanan atau kenaikan konsumsi barang dan jasa. Jika dilihat berdasarkan jenis pengeluaran, persentase pengeluaran makanan menurun dari 52,38% pada tahun 2014 menjadi 50,76% pada tahun 2015, namun meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 52,36%. Hal sebaliknya terjadi pada pengeluaran non makanan.

Pada pengeluaran makanan, persentase terbesar adalah pengeluaran makanan pokok dan makanan jadi masing - masing sebesar 18% dan 30%. Pada non makanan, persentase terbesar terdapat pada pengeluaran sewa rumah, transportasi, utilitas (listrik, air dan energi) dan upacara dengan masing - masing sebesar 20%, 16%, 13% dan 10%.



Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 dan 2017 (Klungkung dalam Angka 2016 dan 2017)

Gambar 2.22. Grafik Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2016 (dalam %)

C. Produktivitas Daerah

Produktivitas merupakan perbandingan jumlah output dibagi dengan input. Produktivitas daerah mencerminkan sumber daya manusia (angkatan kerja) untuk menghasilkan sejumlah produk. Semakin tinggi jumlah produk yang dihasilkan oleh sumber daya tertentu berarti semakin tinggi tingkat produktivitas. Produktivitas suatu daerah dapat dihitung berdasarkan indikator pendapatan daerah (PDRB) yang mampu dihasilkan oleh sejumlah angkatan kerja yang berkeja pada sektor tersebut. Produktivitas daerah adalah output yang dihasilkan dari sembilan sektor lapangan usaha pembentuk PDRB dibagi dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor tersebut.

Berdasarkan lapangan pekerjaan dari 104.130 orang yang bekerja, 32,34% bekerja di sektor pertanian (atau 33.680 orang); 28,05% bekerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan (atau 29.211 Orang); 9,98% di sektor industri pengolahan (atau 10.387 Orang); 19,13% di sektor jasa (atau 19.916 Orang). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Berlaku sektor pertanian tahun 2015 mencapai 1.512.946,30 (juta rupiah); Penyediaan Akomodasi Makan Minum 857.073,70 (juta rupiah); sektor industri pengolahan 597.206,00 (juta rupiah); sektor konstruksi 555.023,30 (juta rupiah); sector informasi dan komunikasi 538.448,60; sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 515.121,10 (juta rupiah). Berdasarkan data di atas dapat dihitung produktivitas masing masing lapangan usaha tahun 2015 dan 2016 seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Produktivitas Daerah Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun 2015 dan 2016

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (jutaan Rupiah)		Tenaga Kerja (Orang)	Produktivitas Daerah	
		2015	2016		2015	2016
1	Pertanian	1.512.946,33	1.644.326,55	33.680	44.921,21	48.822,05
2	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	857.073,70	979.424,78	14.606	58.679,56	67.056,33
3	Industri Pengolahan	597.206,02	661.806,63	10.387	57.495,52	63.714,89
4	Konstruksi	555.023,30	657.774,46	6.256	88.718,55	105.142,98
5	Informasi dan Komunikasi	538.448,55	592.293,41	1.721	312.869,61	344.156,54
6	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	515.121,08	566.633,19	14.605	35.270,20	38.797,21

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung Dalam Angka 2017)(Data diolah)

Dengan asumsi jumlah tenaga kerja yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2015-2016, dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 produktivitas sektor Informasi dan Komunikasi paling tinggi, disusul sektor konstruksi di urutan kedua, dan sektor Penyediaan akomodasi Makan Minum di urutan ketiga, agak berbeda dengan tahun 2015 dimana sektor konstruksi berada di urutan ke-3.

D. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkatkemampuan/daya beli petani di daerah pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar (term oftrade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Dalam konteks ini, indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk semua barang/jasa yang diproduksi petani, terdiri dari indeks harga tanaman bahan makanan (padi, palawija, sayuran dan buah buahan),tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk semua barang/jasa yang dikonsumsi petani, baik untuk konsumsi rumah tangga (makanan, perumahan, pakaian dan aneka barang/jasa) maupun untuk keperluan biaya produksi dan penambahan barang modal.Ada 3 (tiga) kondisi yang ditunjukkan dari besarnya NTP, yakni :

- 1) $NTP > 100$, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata lebih baik (petani mengalami surplus) dibanding tahun dasar.
- 2) $NTP = 100$, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata tidak untung dan tidak rugi (petani mengalami impas).
- 3) $NTP < 100$, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata kurang menguntungkan (petani mengalami defisit) dibanding tahun dasar.

Nilai NTP tahun 2017 tercatat masih berada di atas level 100. Hal ini mencerminkan bahwa daya tukar/pejuang petani untuk menjadi sejahtera masih lebih baik dibanding tahun dasar akibat harga produk yang dihasilkan masih lebih tinggi dibanding harga barang kebutuhannya baik untuk konsumsi maupun biaya produksinya. Perkembangan NTP per bulan juga relatif stabil, nilai indeks diatas 100 dengan indeks rata-rata 104,69. NTP tertinggi berturut-turut terjadi pada bulan Januari

dan Februari yaitu sebesar 106,25 persen dan 105,79 persen. Pada bulan-bulan tersebut permintaan terhadap komoditi pertanian khususnya tanaman pangan cenderung meningkat karena dipengaruhi oleh adanya hari raya keagamaan dan peringatan tahun baru sehingga meningkatkan harga jual komoditas pertanian yang dapat meningkatkan penerimaan petani. Perkembangan NTP di Provinsi Bali tahun 2017 menurut BPS Pusat menunjukkan tingkat NTP yang lebih tinggi dari rata-rata nasional setiap triwulan maupun nilai rata-rata NTP/bulan selama setahun (NTP Provinsi Bali=104,69, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 101,28).

Tabel 2.29
Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017

	Rata-Rata/Bulan Triwulan I			Rata-Rata/Bulan Triwulan II			Rata-Rata/Bulan Triwulan III			Rata-Rata/Bulan Triwulan IV			Rata-Rata		
	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP	IT	IB	NTP
Bali	130,82	123,91	105,59	130,18	124,36	104,68	129,58	124,38	104,18	130,35	124,96	104,31	130,23	124,40	104,69
Nasional	127,63	127,12	100,39	127,96	127,66	100,23	130,12	128,21	101,49	132,43	128,61	102,97	129,53	127,90	101,28

Sumber: BPS, 2018 (Statistik Nilai Tukar Petani 2017)

Indeks Harga yang Diterima Petani (IT),
 Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB),
 Nilai Tukar Petani (NTP) menurut Provinsi (2007=100)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Sarana transportasi

Jalan merupakan sarana infrastruktur wilayah yang penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang antar daerah. Panjang jalan menurut status jalan kabupaten di Kabupaten Klungkung tahun 2015 mencapai 492,920 km, dengan permukaan aspal sepanjang 461,210 km, tidak diaspal sepanjang 31,710 km. Pada tahun 2015 di Kabupaten Klungkung masih terdapat jalan rusak berat sepanjang 88,647 km.

Tabel 2.30

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 - 2016

Kondisi Jalan	Tahun		
	2014	2015	2016
a. Baik (km)	299,863	224,762	288,905
b. Sedang (km)	90,437	116,082	83.364
c. Rusak (km)	41,130	63,429	31,615
d. Rusak Berat (km)	61,490	88,647	49,920
Jumlah (km)	492,920	492,920	453,804

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 dan 2017 (Klungkung Dalam Angka 2016 dan 2017)

Panjang jalan menurut status jalan di Kabupaten Klungkung tahun 2016 mencapai 453,804 km, dengan permukaan aspal sepanjang 429,560 km (BPS Kab. Klungkung, 2017). Sejak tahun 2009 tidak terdapat perubahan panjang jalan baik menurut status jalan, dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengembangan sarana jalan di Kabupaten Klungkung (BPS Kab. Klungkung, 2016). Sarana untuk menunjang kebutuhan mobilitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase kendaraan pada tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.31

Statistik Transportasi Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Panjang Jalan (km)				
Jalan Nasional	17,40	17.40	17.40	32,23
Jalan Provinsi	18,19	18.19	18.19	9,34
Jalan Kab/ kota	492,92	492.92	492.92	453,804
Jalan Desa	303,69	303,69	303,69	*
Jumlah Kendaraan				
Mobil Penumpang	641	672	751	703
Mobil barang	4.890	5.004	5.535	5610
Mobil Bus	108	112	107	83

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 dan 2017 (Klungkung Dalam Angka 2016 dan 2017) * tidak ada data

B. Perbankan

Perbankan merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Klungkung. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Investasi atau penanaman modal merupakan pembelian atau produksi barang modal yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Berdasarkan data BPS. Kabupaten Klungkung 2016 (BPS. Kab. Klungkung 2016), peningkatan transaksi perbankan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada jumlah penabung dan jumlah simpanan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32

Penabung dan Jumlah Simpanan di BRI Cabang Semarang Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2016

Rincian	2013	2014	2015	2016
Deposito				
Nasabah	1.223	1.345	1.562	1.509
Besarnya (jutaan rupiah)	77.518	108.792	136.744	154.502
Giro				
Nasabah	185	620	709	738
Besarnya (jutaan rupiah)	17.647	15.729	41.623	38.283
Tabungan				
Nasabah	36.416	47.146	51.237	57.457
Besarnya (jutaan rupiah)	258.980	292.843	303.968	235.668

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung Dalam Angka 2017)

C. Koperasi dan LPD

Koperasi adalah soko guru perekonomian masyarakat dan jenis koperasi dapat dibedakan antara lain Koperasi Sekunder/Pusat dan Koperasi Primer. Pada tahun 2015 jumlah koperasi Primer mencapai 465 buah dengan anggota 46.194 orang.

Tabel 2.33

Koperasi dan Jumlah Anggota Kabupaten Klungkung Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Koperasi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Koperasi Sekunder/Pusat					
	a. Banyaknya (unit)	1	1	1	1	1
	b. Anggota (Orang)	19	19	19	19	19
2	Koperasi Primer					
	a. Banyaknya (unit)	124	125	129	465	136
	b. Anggota (Orang)	42.313	43.320	45.143	46.194	49.188

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2017 (Klungkung Dalam Angka 2017).

LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mikro di tingkat desa adat, tahun 2016 berjumlah 107 buah yang tersebar di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 35 buah, Kecamatan Banjarangkan 30 buah, Kecamatan Klungkung sebanyak 22 buah dan Kecamatan Dawan sebanyak 20 buah. (BPS Kab. Klungkung 2017, Klungkung Dalam Angka 2017).

D. Hotel

Sebagai destinasi wisata, fasilitas akomodasi tentu sangat diperlukan guna mendukung pariwisata. Pada tahun 2016 Kabupaten Klungkung memiliki sebanyak 101 hotel, yang terdiri dari 4 hotel berbintang dan 97 hotel non berbintang. Tingkat Penghunian kamar (TPK) hotel bintang dan non bintang secara umum sebesar 43,39%. Nilai total TPK yang masih rendah ini kemungkinan disebabkan oleh jarak antara Denpasar dan Klungkung yang cukup dekat, sehingga tamu lebih cenderung menginap di hotel yang ada di Denpasar (BPS. Kab. Klungkung 2017, Klungkung Dalam Angka 2017).

Tabel 2.34

Statistik Hotel Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah Akomodasi				
Hotel Berbintang	7	5	4	4
Hotel non Berbintang	97	100	97	97
Total	104	105	101	101
Tingkat Penghunian Kamar				
Total TPK Bintang dan Non Bintang (%)	32,22	35,54	43,24	43,39

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2016 dan 2017 (Klungkung Dalam Angka 2016 dan 2017)

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Penanaman modal

Penanaman modal di Kabupaten Klungkung didominasi oleh PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar 74% dan sisanya 26% adalah PMA (Penanaman Modal Asing). Sektor pariwisata menjadi tujuan utama penanaman modal ini. Pembangunan hotel dan restoran di Lembongan sebagai destinasi wisata utama Klungkung menyerap investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di sana. (BPS. Kab. Klungkung 2016). Keamanan dan ketertiban merupakan syarat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif. Berkenaan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur melalui penegakan Perda dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman.

B. Tingkat Kriminal

Pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Salah satu indikasi kondisi ini adalah jumlah wisatawan manca negara yang datang langsung ke Bali terus meningkat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, berbagai permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang profesional. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada

nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Statistik dan indikator rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur rasa aman adalah angka kriminalitas total (total crime). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Berdasarkan catatan Polda Bali 2013-2016 jumlah tindak pidana di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi, yakni mengalami kenaikan pada tahun 2014 kemudian mengalami penurunan dari tahun 2015-2016. Jika melihat faktor utama tingginya angka kriminalitas, yakni masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, dan pengangguran, maka penurunan angka kriminalitas ini dapat dikaitkan dengan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat khususnya di bidang sosial dan ekonomi.

Dari data statistik kriminalitas Kabupaten Klungkung tahun 2013-2016, terjadi perbaikan dalam angka kriminalitas (tindak pidana yang dilaporkan), risiko penduduk terkena tindak pidana, dan selang waktu terjadinya tindak pidana yang terus mengalami perbaikan dari tahun 2014 – 2016, serta rasio penduduk per polisi yang mencukupi (281; menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa rasio ideal adalah satu personil polisi untuk 400 penduduk). Namun demikian, hal sebaliknya terjadi pada angka penyelesaian tindak pidana, yang cenderung menurun sejak tahun 2014 (BPS. Prov. Bali 2017).

Tabel 2.35
Statistik Kriminalitas Kabupaten Klungkung 2013-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total)	398	408	299	231
2.	Tindak Pidana yang Diselesaikan (Crime Cleared)	291	304	216	156
3.	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk	228,87	233,41	170,18	130,73
4.	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock)	22°00'36"	21°28'14"	29°17'52"	37°55'19"
5.	Angka Penyelesaian Tindak Pidana (Clearance Rate)	73,12	74,51	72,24	67,53
6.	Rasio Penduduk per Polisi	*	281	273	281

Sumber: BPS Prov. Bali, 2017 (Statistik Kriminal Provinsi Bali 2016) *tidak ada data

Jumlah perkara yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung pada tahun 2016 sebanyak 6.873 kasus, yang terdiri dari 98 kasus tindak pidana umum, 2 tindak pidana khusus (korupsi), dan 6.773 tindak pidana cepat (pelanggaran lalu-lintas). Sedangkan jumlah perkara yang diputus oleh pengadilan negeri Klungkung adalah sebanyak 8.848 perkara pidana dan 238 perkara perdata. Tertuduh yang diputus per jenis hukuman yang terbanyak adalah hukuman denda 8.714 dan hukuman penjara 91. Narapidana yang selesai menjalankan hukuman tahun 2016 sebanyak 134 orang. Pada bagian lain jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan ke Polres Klungkung sebanyak 168 perkara dan yang baru diselesaikan sebanyak 120 perkara (66,67%) (BPS Kab. Klungkung 2017).

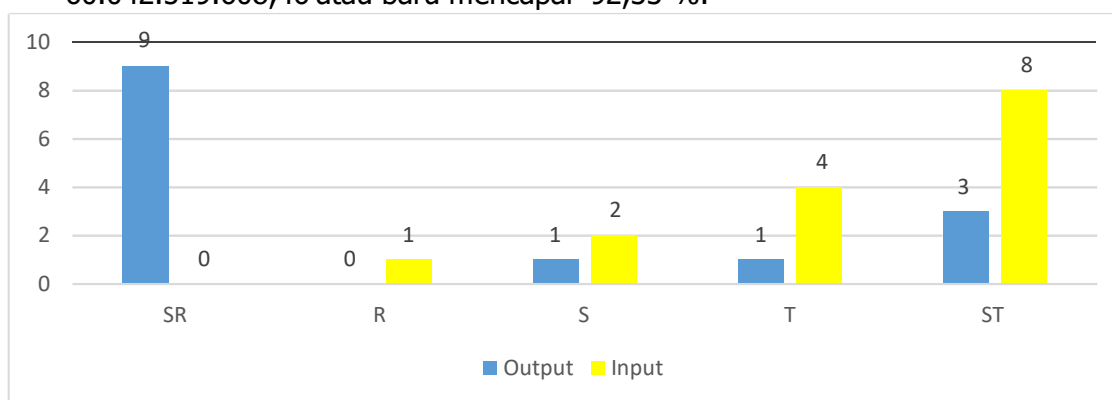
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDP sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan dalam RKPDP tahun 2017 dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdik, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan pendidikan adalah sebesar 32,13 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Bidang urusan pendidikan dalam RKPDP tahun 2017 dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdik, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut : Realisasi Keuangan Bidang Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp. 55.439.905.329,00 dari total pagu anggaran bidang urusan pendidikan dalam RKPDP Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60.042.519.608,46 atau baru mencapai 92,33 %.



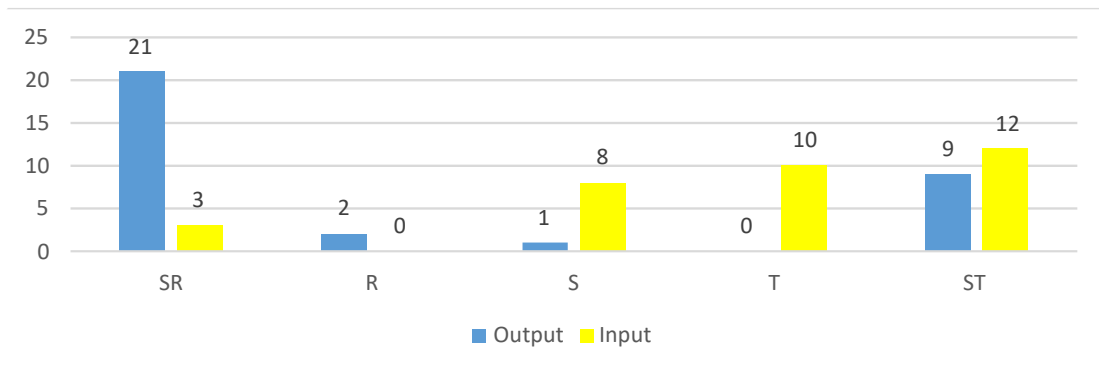
Gambar 2.23. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pendidikan

2) Bidang Urusan Kesehatan

SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2017 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan.

Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata tingkat capaian kinerja outcome program bidang urusan kesehatan baru mencapai 40,12 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Adapun gambaran rata-rata tingkat capaian output kegiatan per program bidang urusan kesehatan adalah sebagaimana dalam grafik di bawah ini.
- SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2017 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Total anggaran kegiatan Bidang Urusan Kesehatan mencapai total Rp 149.363.344.531,81 dalam RKPDP dengan realisasi mencapai Rp. 133.162.417.218,78 atau baru mencapai 89,15 persen.

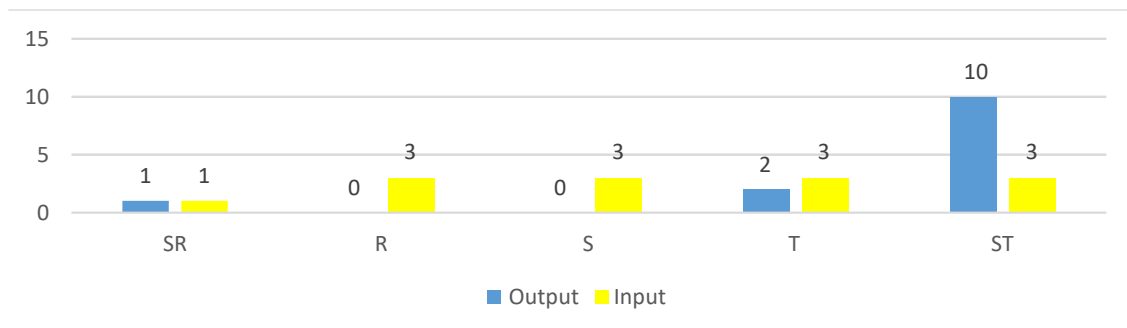


Gambar 2.24. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kesehatan

3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

- Rata-rata capaian kinerja outcome program mencapai 78,96 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi "T". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung. Total anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2017 adalah Rp 109.265.033.599,27 dan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 99.940.441.803,49 atau sebesar 91,47 persen.



Gambar 2.25. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat

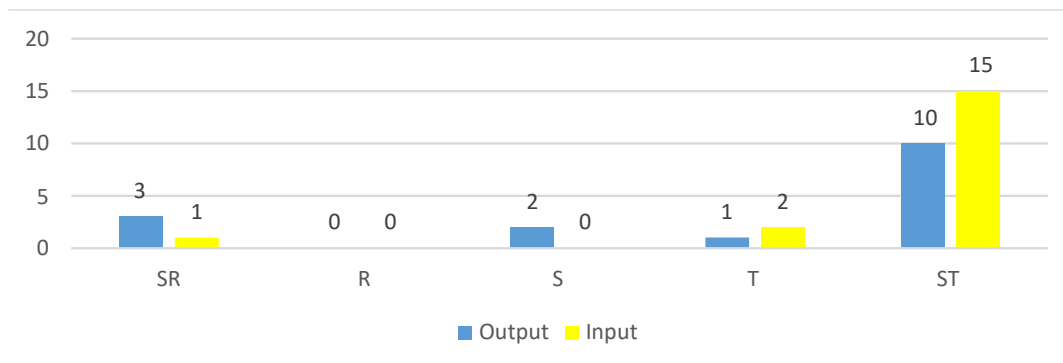
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 506.529.000,00 yang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 313.886.828,00 atau sebesar 61,97 persen. Capaian indikator kinerja outcome program 325 persen dengan predikat "ST".

5) Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Adapun capaian kinerja dan

penyerapan anggaran program kegiatannya sampai Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagaimana uraian berikut :

- Rata-rata Capaian Program sebesar 120,59 dengan predikat Sangat Tinggi "ST", untuk capaian output masing -masing kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung. Untuk penyerapan anggaran terealisasi Rp. 5.946.556.914,00 atau mencapai 91,26 persen dari total anggaran Rp 6.515.982.576,00.

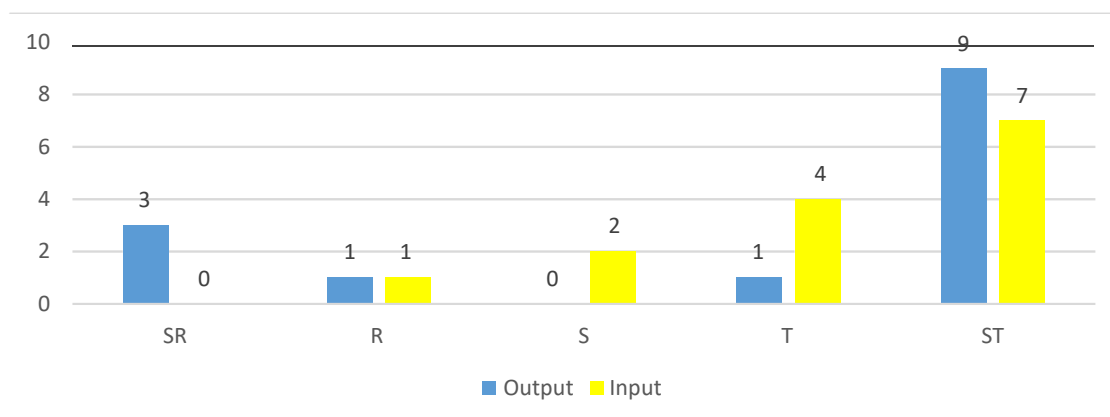


Gambar 2.26. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertuiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

6) Bidang Urusan Sosial

Dalam RKPDP Tahun 2017 telah ditetapkan SKPD pelaksana bidang urusan sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 106,07 persen dengan predikat Sangat Tinggi "ST". Sedangkan rata-rata capaian output kegiatan per program sesuai predikat kinerjanya dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Dalam RKPDP Tahun 2017 telah ditetapkan SKPD pelaksana bidang urusan sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Anggaran untuk bidang urusan sosial adalah sebesar Rp. 23.520.111.701,00 dengan serapan mencapai 80,93 persen dari total pagu yaitu sebesar Rp. 19.034.501.315,00.



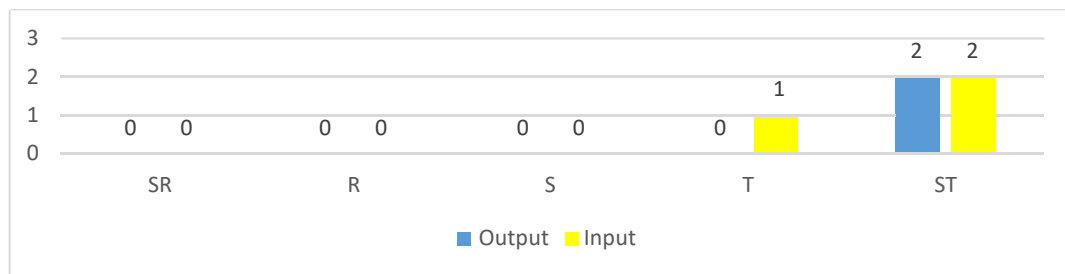
Gambar 2.27. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Sosial.

2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Bidang Urusan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja per akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 97,41 persen atau dengan predikat "ST." Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.178.493.390,00 atau sebesar 95,12 persen dari total anggaran sebesar Rp. 1.238.925.535,00.

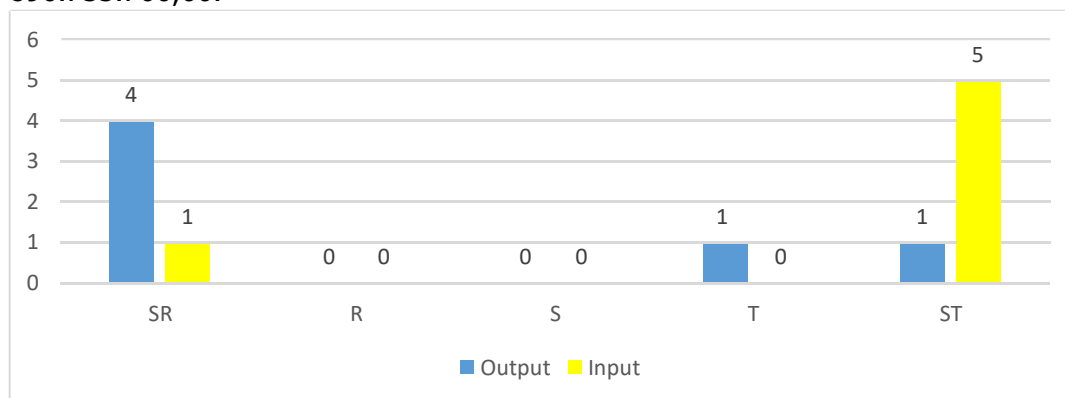


Gambar 2.28. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Tenaga Kerja.

2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun pencapaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 74,12 persen atau dengan predikat "S." Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Realisasi serapan anggaran bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.059.331.600,00 atau sebesar 118,13 persen dari total anggaran sebesar Rp. 896.755.700,00.

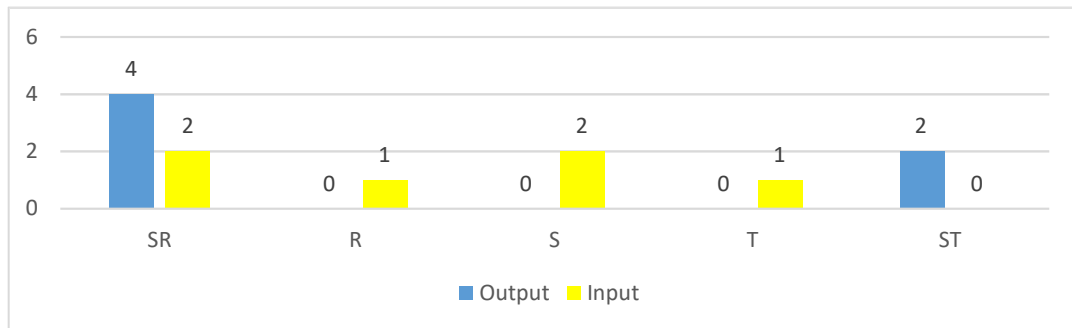


Gambar 2.29. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3) Bidang Urusan Pangan

Bidang Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pangan per akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 81,33 persen atau dengan predikat "Tinggi." Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada table dibawah ini.
- Realisasi serapan anggaran bidang urusan pangan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.610.166.459,00 atau mencapai 85,51 persen dari total anggaran RKPDP sebesar Rp. 3.052.291.695,00.

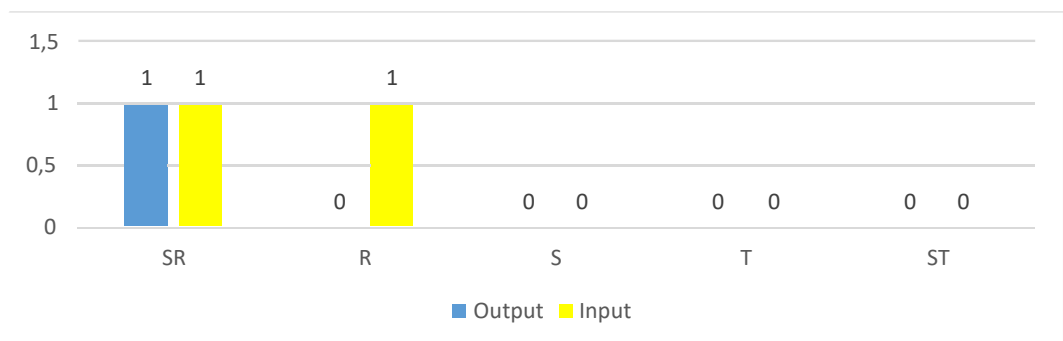


Gambar 2.30. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pangan.

4) Bidang Urusan Pertanian

Bidang Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pertanian per akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 16,67 persen atau dengan predikat "Sangat Rendah." Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Bidang Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran bidang urusan pertanian sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 38.527.000,00 atau baru mencapai 16,40 persen dari total anggaran RKPDP sebesar Rp. 234.901.600,00.

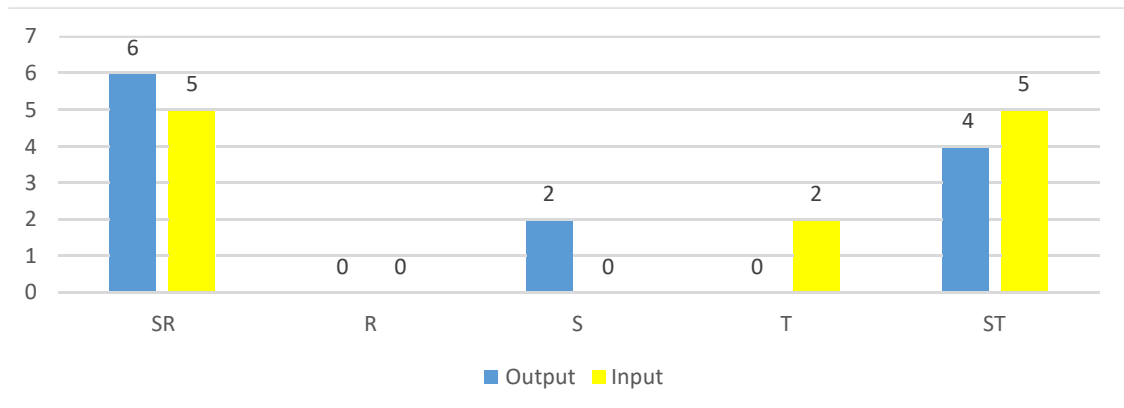


Gambar 2.31. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pertanian.

5) Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Capaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja program bidang urusan lingkungan hidup adalah sebesar 44,62 persen atau masih dengan predikat "SR". Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 14.432.203.987,00 atau sebesar 55,51 persen dari total anggaran bidang urusan lingkungan hidup tahun 2017 dirancang sebesar Rp. 26.001.543.358,00.

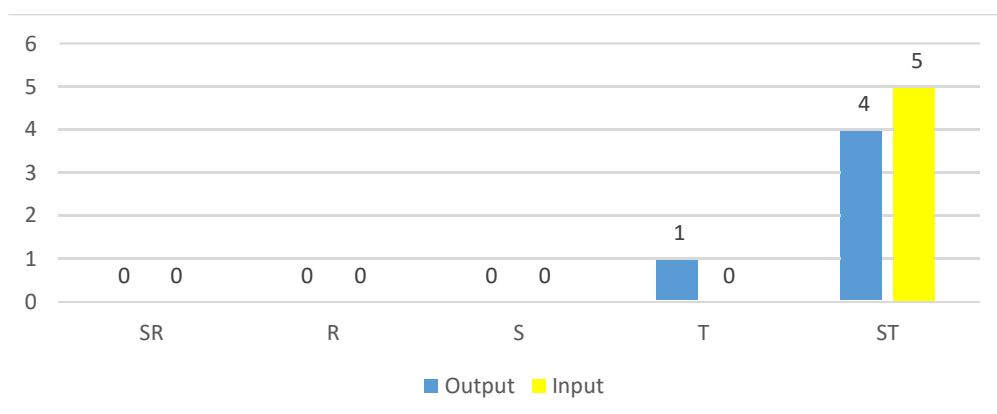


Gambar 2.32. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Lingkungan Hidup.

6) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Capaian kinerja bidang urusan administrasi kependudukan dan Capil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar 60,00 persen. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Realisasi serapan anggaran bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil mencapai Rp. 2.967.220.550,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.112.386.618,00 atau sebesar 95,34 persen.

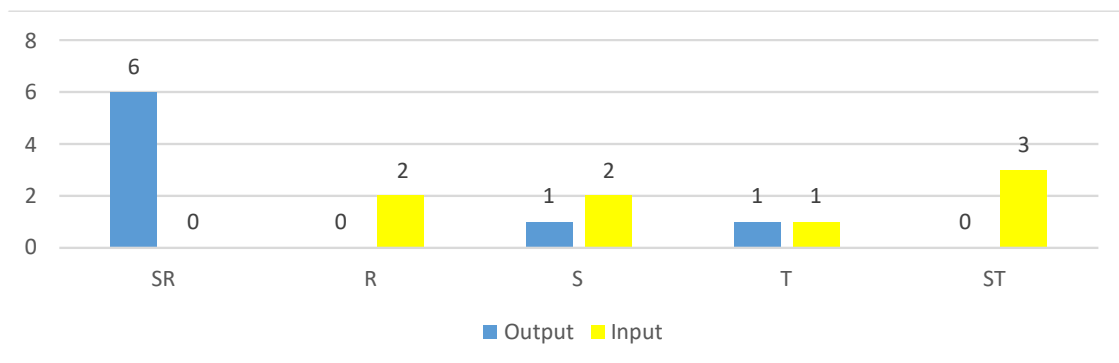


Gambar 2.33. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

7) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM DPPKB), Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar 20,47 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Uraian predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Realisasi anggaran bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa mencapai Rp. 3.073.300.721,00 dari total pagu RKPDP sebesar Rp. 3.719.926.014,00 atau mencapai 82,62 persen.

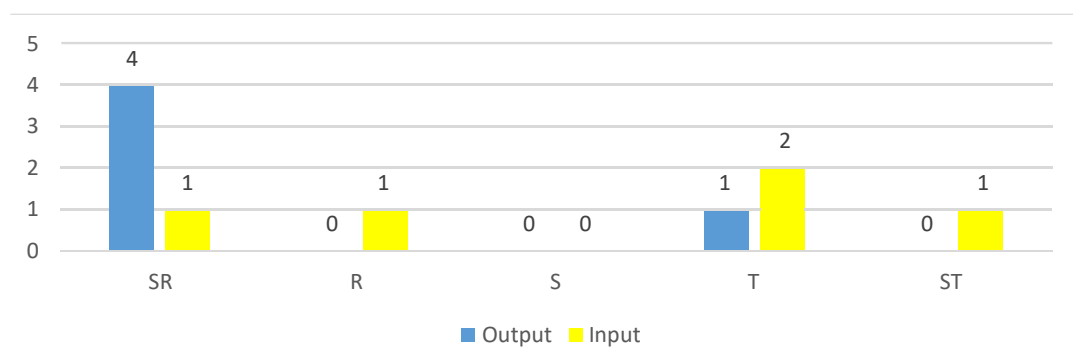


Gambar 2.34. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

8) Bidang Urusan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM DPPKB). Capaian kinerja bidang urusan keluarga berencana per akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 39,91 persen atau dengan predikat "Sangat Rendah" Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran bidang urusan keluarga berencana mencapai Rp. 1.206.142.318,00 atau mencapai 65,14 persen dari pagu anggaran dalam RKPDP Tahun 2017 sebesar Rp. 1.851.605.737,00.

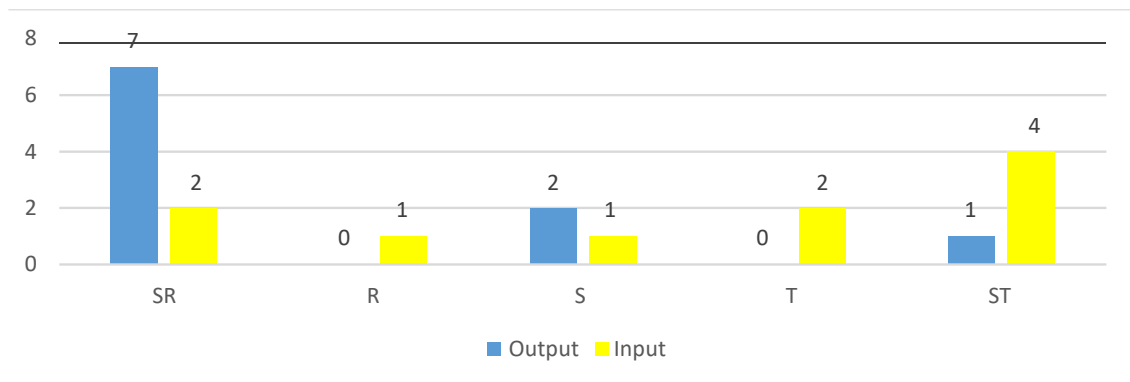


Gambar 2.35. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

9) Bidang Urusan Perhubungan

Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perhubungan pada akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 176,26 persen atau dengan predikat "Sangat Tinggi." Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 19.865.842.081,00 dari pagu dalam RKPD Rp. 21.841.898.351,00 atau baru mencapai 90,95 persen.

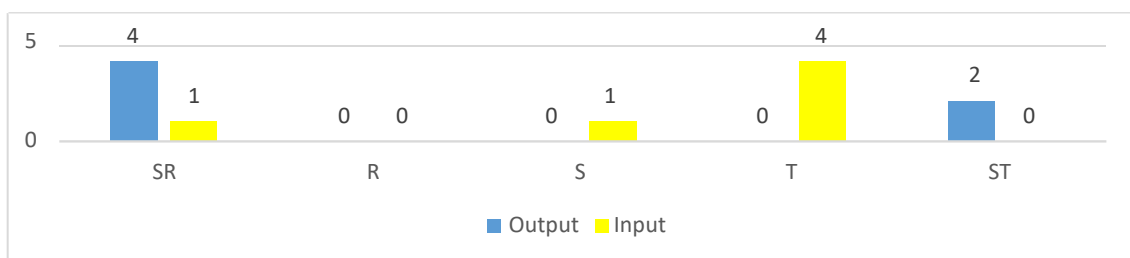


Gambar 2.36. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Perhubungan.

10) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika pada akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 94,99 persen atau dengan predikat kinerja "ST." Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagai mana dalam gambar di bawah ini.
- Bidang urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Realisasi anggaran bidang urusan komunikasi dan informatika adalah sebesar Rp. 3.062.417.081,00 dari total pagu sebesar Rp. 3.683.095.287,00 atau baru mencapai 83,15 persen dari total pagu anggaran dalam RKPD.

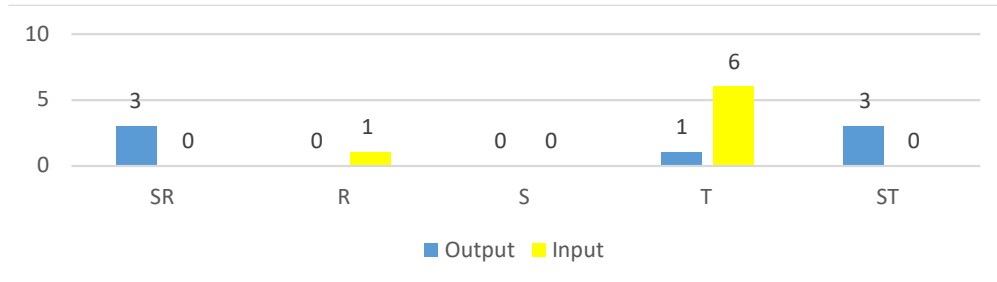


Gambar 2.37. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika.

11) Bidang Urusan Koperasi dan UKM

Bidang Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan koperasi dan UKM per Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan koperasi dan UKM adalah baru sebesar 56,15 persen atau dengan predikat "SR." Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang urusan koperasi dan UKM baru mencapai Rp. 2.320.766.061,00 dari pagu dalam RKPDP sebesar Rp. 2.954.204.026,00 atau sudah mencapai 78,56 persen.

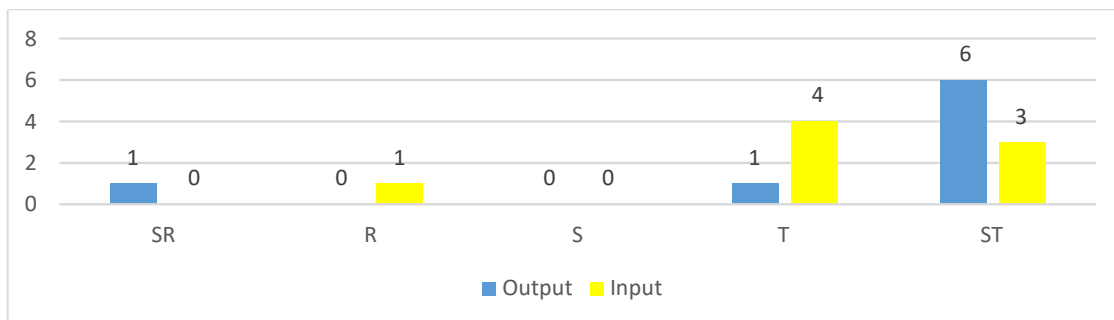


Gambar 2.38. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Koperasi dan UKM.

12) Bidang Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Capaian indikator kinerja kegiatan bidang Urusan Penanaman Modal pada akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 86,03 persen dengan predikat "T". Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.
- b. Realisasi serapan anggaran s/d Triwulan IV Tahun 2017 untuk bidang urusan penanaman modal adalah sebesar Rp. 2.169.026.579,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPDP sebesar Rp. 2.402.931.248,00 (90,27% dari total pagu).



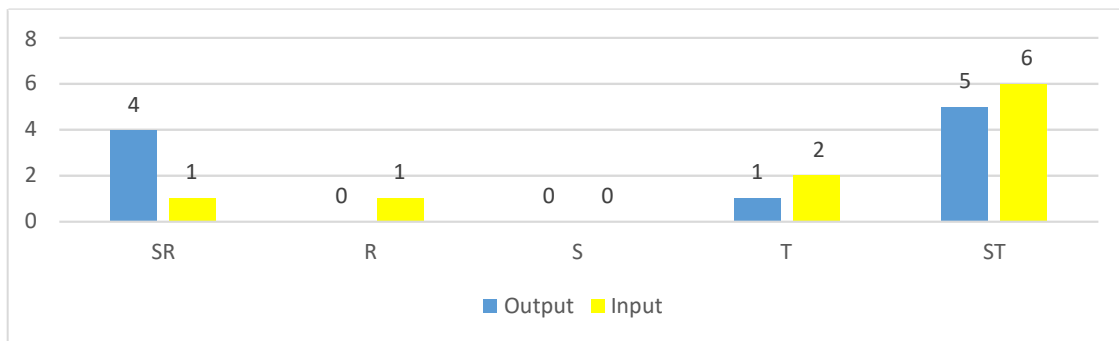
Gambar 2.39. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Penanaman Modal.

13) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga s/d Triwulan IV Tahun 2017 adalah sbb:

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar 93,75 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi "ST". Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja ouput kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

- b. Serapan anggaran bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar Rp. 2.832.726.895,00 atau sebesar 94,30 persen dari total pagu anggaran RKPDP sebesar Rp. 3.003.838.246,00.

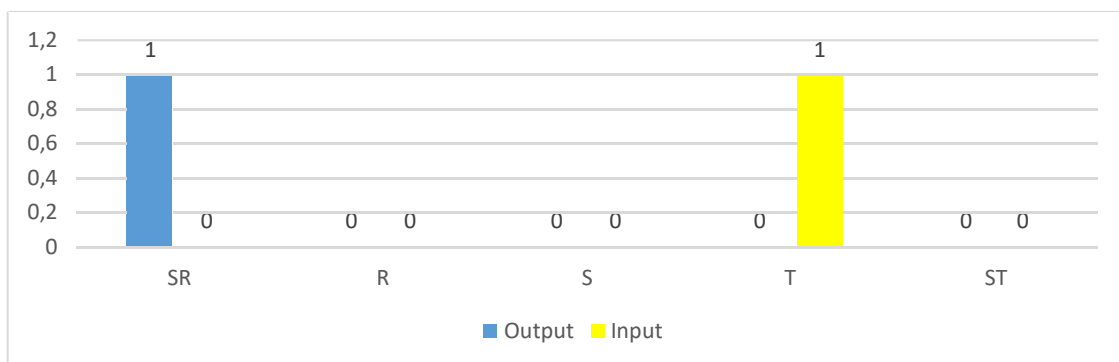


Gambar 2.40. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

14) Bidang Urusan Statistik

Bidang Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan statistik sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan IV Tahun 2017 baru mencapai baru mencapai Rp. 65.500.933,00 atau mencapai 87,52 persen dari total pagu anggaran bidang urusan statistik sebesar Rp. 74.842.500,00.



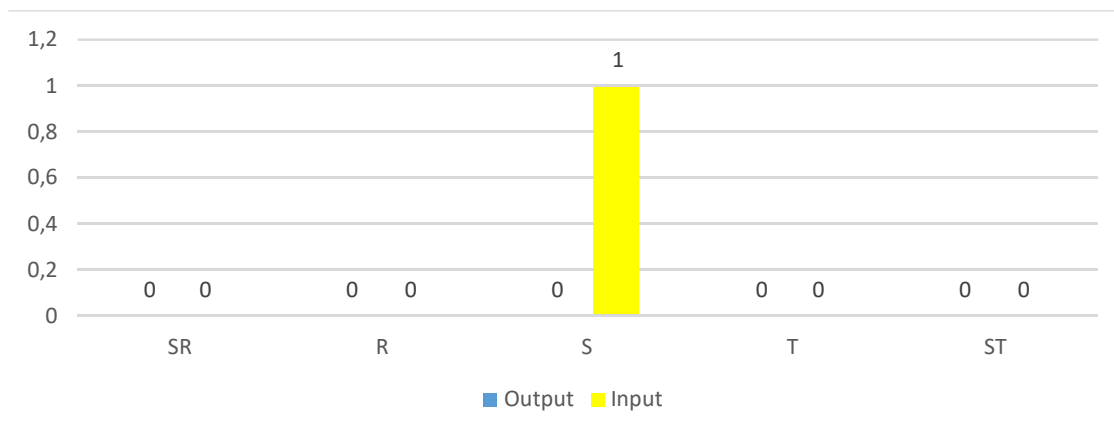
Gambar 2.41. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Statistik.

15) Bidang Urusan Persandian

Bidang urusan persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan persandian sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 95,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi "ST". Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

- b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan IV Tahun 2017 mencapai Rp. 139.361.856,00 atau mencapai 89,45 persen dari total pagu anggaran bidang urusan persandian sebesar Rp. 155.799.500,00.

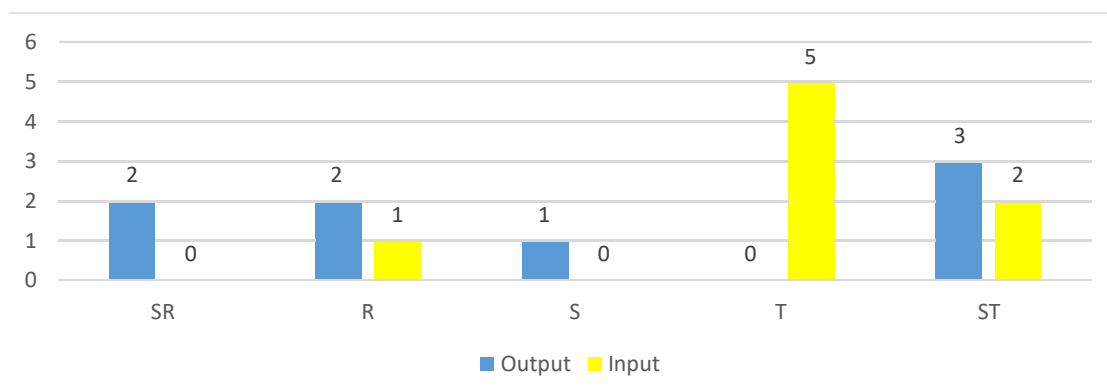


Gambar 2.42. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Persandian.

16) Bidang Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan kebudayaan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 56,17 persen atau dengan predikat kinerja Rendah "R". Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 12.116.634.762,26 atau 95,18 persen dari total pagu anggaran bidang urusan kebudayaan pada RKPDP sebesar Rp. 12.729.967.556,00.



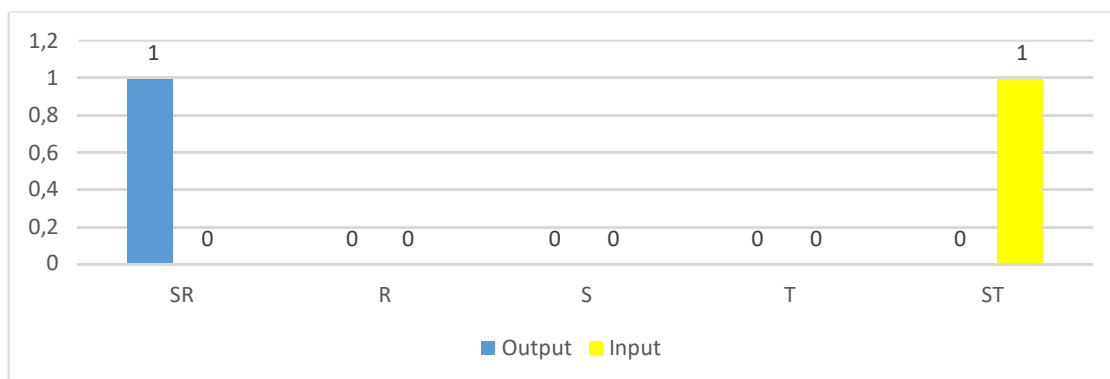
Gambar 2.43. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kebudayaan.

17) Bidang Urusan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perpustakaan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 100,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi "ST". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 350.263.642,00 atau mencapai 98,81 persen dari total anggaran bidang urusan perpustakaan sebesar Rp. 354.484.192,00.

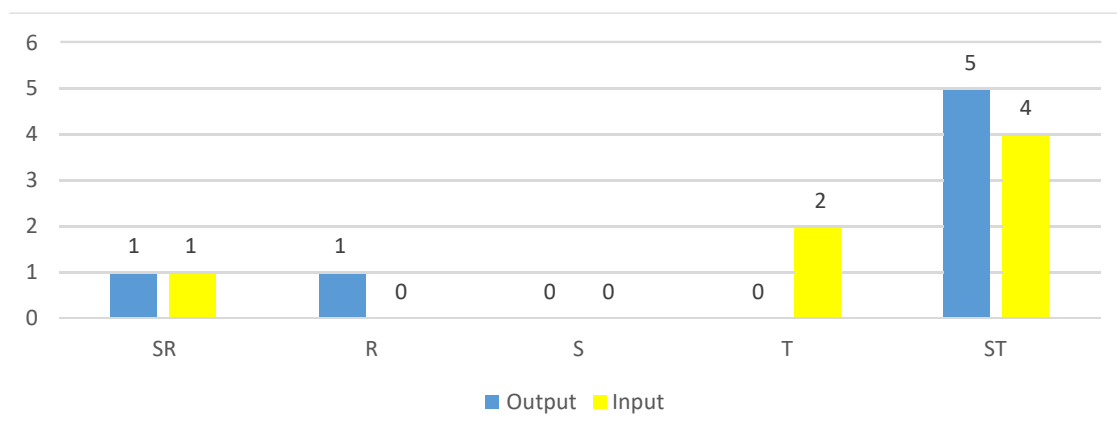


Gambar 2.44. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Perpustakaan.

18) Bidang Urusan Kearsipan

Bidang urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan kearsipan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 69,82% atau dengan predikat kinerja Sedang "S". Untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Untuk bidang urusan kearsipan realisasi anggaran Rp. 610.161.117,00 dari total anggaran bidang urusan kearsipan sebesar Rp. 637.500.920,00 atau sekitar 95,71 persen dari anggaran dalam RKPDP.



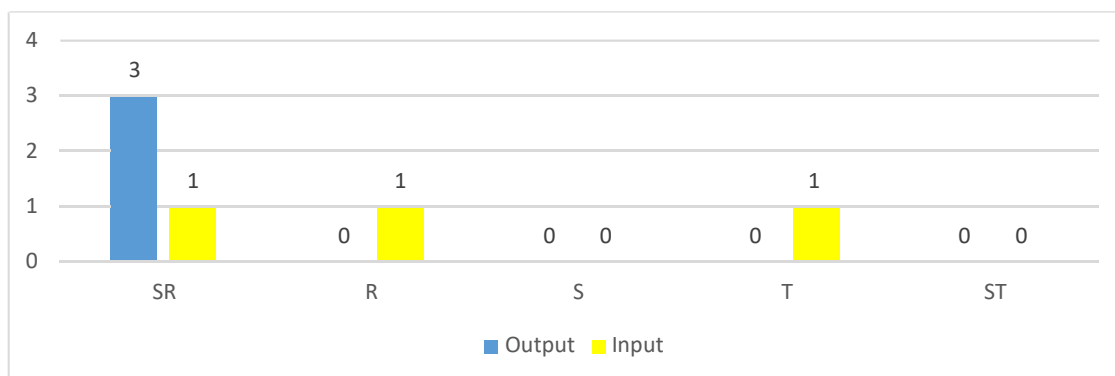
Gambar 2.45. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kearsipan.

2.2.3 Urusan Pilihan

1) Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Bidang urusan kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pertanian adalah sebesar 66,67 persen atau dengan predikat kinerja Sedang "S". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 4.294.972.438,00 atau sebesar 85,34 persen dari total pagu anggaran bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 5.032.958.315,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

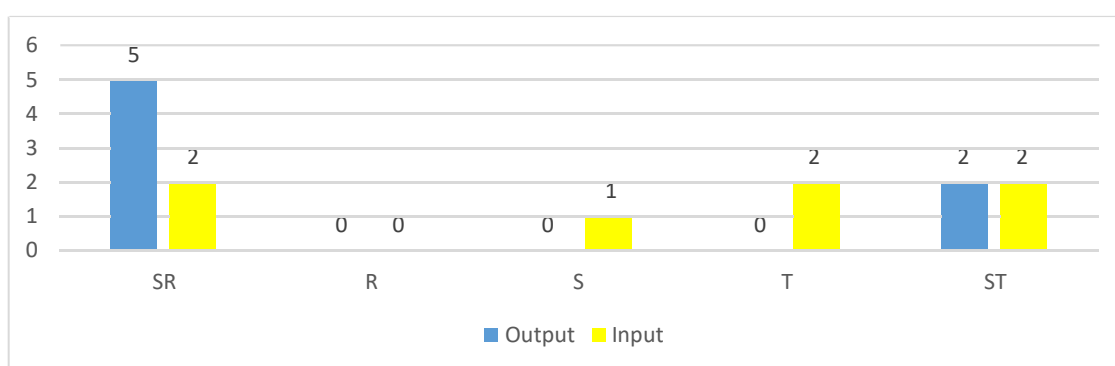


Gambar 2.46. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan.

2) Bidang Urusan Pariwisata

Bidang Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pariwisata adalah sebesar 42,68 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pariwisata adalah sebesar Rp. 8.352.569.164,00 atau sebesar 87,39 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pariwisata adalah sebesar Rp. 9.558.026.726,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

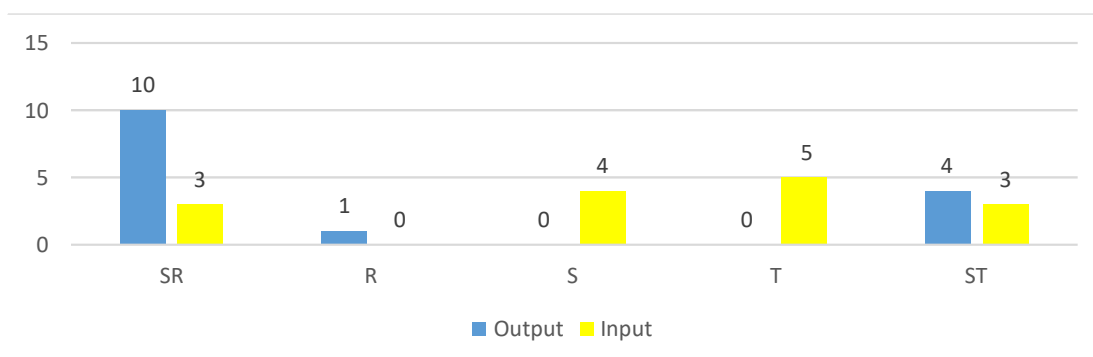


Gambar 2.47. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pariwisata.

3) Bidang Urusan Pertanian

Bidang Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pertanian adalah sebesar 44,83 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 8.113.091.914,00 atau sebesar 83,32 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 9.855.883.065,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

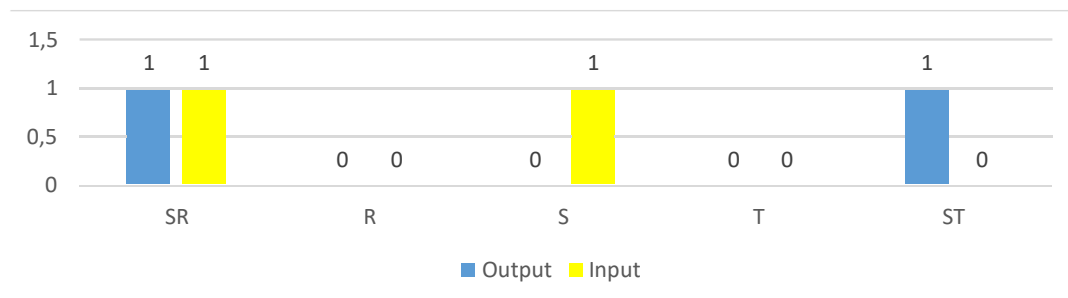


Gambar 2.48. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pertanian.

4) Bidang Urusan Kehutanan

Bidang Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pariwisata sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 15,00 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 203.570.300,00 atau 33,03 persen dari total anggaran bidang urusan kehutanan pada RKPDP sebesar Rp. 616.283.300,00.



Gambar 2.49. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kehutanan.

5) Bidang Urusan Energi

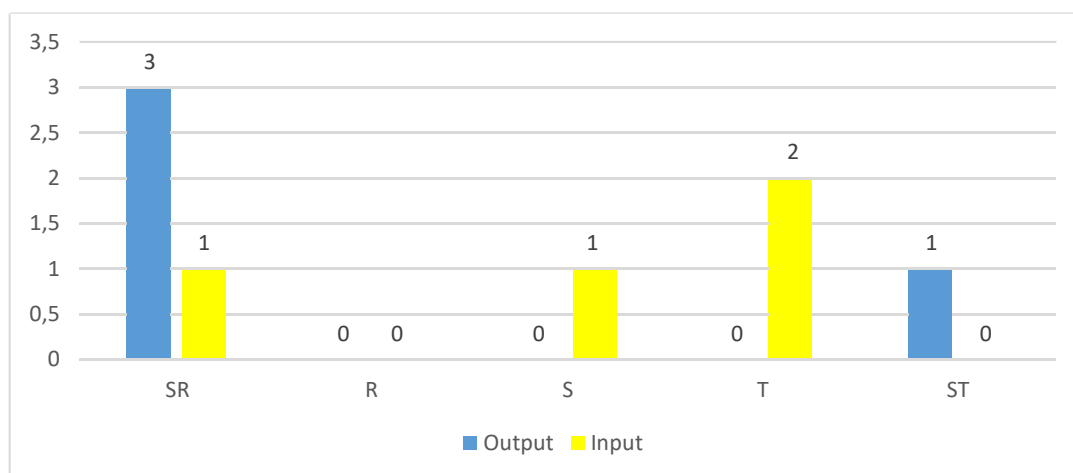
Bidang Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang urusan energi pada akhir Triwulan IV Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan energi masih sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur.
- Untuk realisasi keuangan bidang urusan energy dan sumberdaya mineral sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari total anggaran sebesar Rp. 17.391.500,00.

6) Bidang Urusan Perdagangan

Bidang urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perdagangan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 75,00 persen atau dengan predikat kinerja Sedang "S". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran sampai Triwulan IV Tahun 2017 mencapai Rp. 9.771.519.598,00 atau mencapai 88,59 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 11.029.521.330,00.

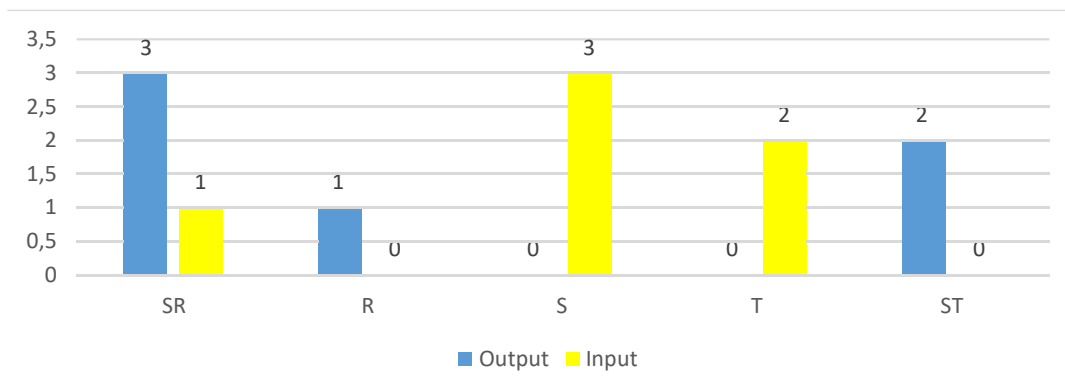


Gambar 2.50. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Perdagangan.

7) Bidang Urusan Industri

Bidang Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 78,55 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi "T". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran bidang urusan industri mencapai Rp. 1.454.581.017,00 atau mencapai 80,10 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 1.815.911.720,00.

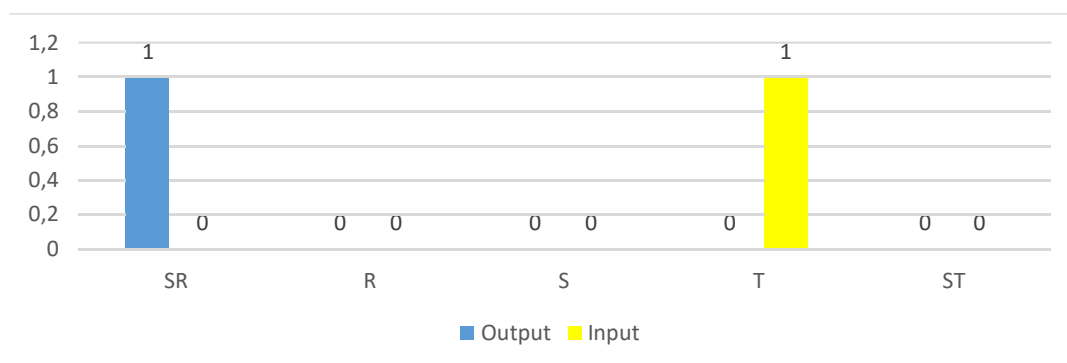


Gambar 2.51. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Industri.

8) Bidang Urusan Ketrasmigrasian

Bidang Urusan ketrasmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan ketrasmigrasian sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya (1 program) masih dengan predikat Sangat Rendah seperti dibawah ini.
- Realisasi anggaran bidang urusan ketrasmigrasian baru mencapai Rp. 67.725.550,00 atau baru mencapai 82,27 persen dari total anggaran bidang urusan ketrasmigrasian sebesar Rp 82.324.000,00.



Gambar 2.52. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Ketrasmigrasian.

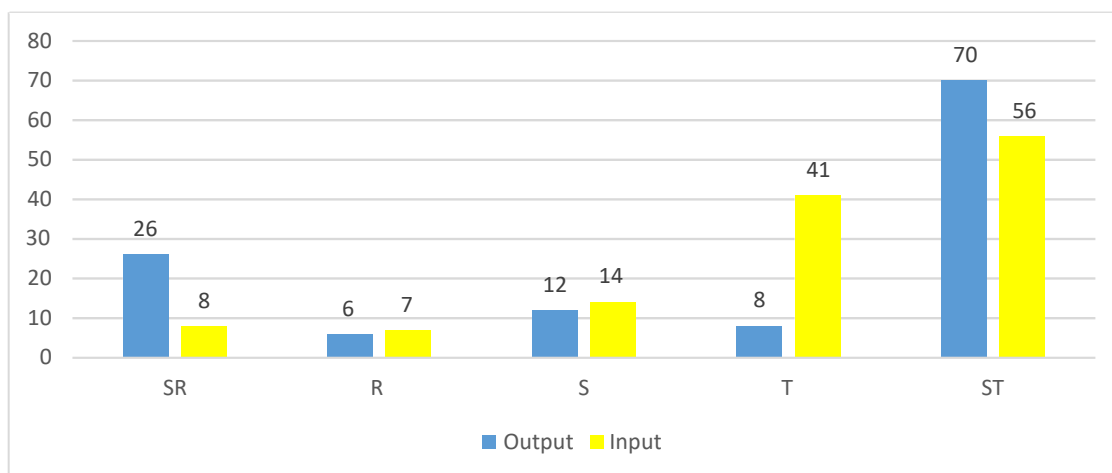
2.2.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang

1) Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

Bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpolinmas dan BPBD. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar 87,08 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi "T". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 67.645.683.043,00 atau sebesar 83,26 persen dari total pagu anggaran

bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 81.243.702.504,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

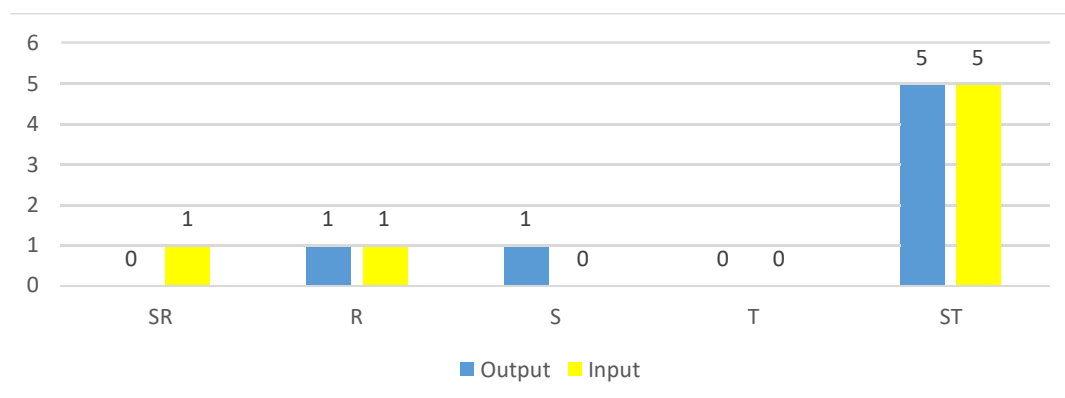


Gambar 2.53. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan.

2) Bidang Urusan Pengawasan

Bidang Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung.. Adapun capaian kinerja bidang urusan pengawasan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program samapai Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar 114,73 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi "ST". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 2.034.854.422,00 atau 94,15 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata pada RKPD sebesar Rp. 2.161.364.144,00.

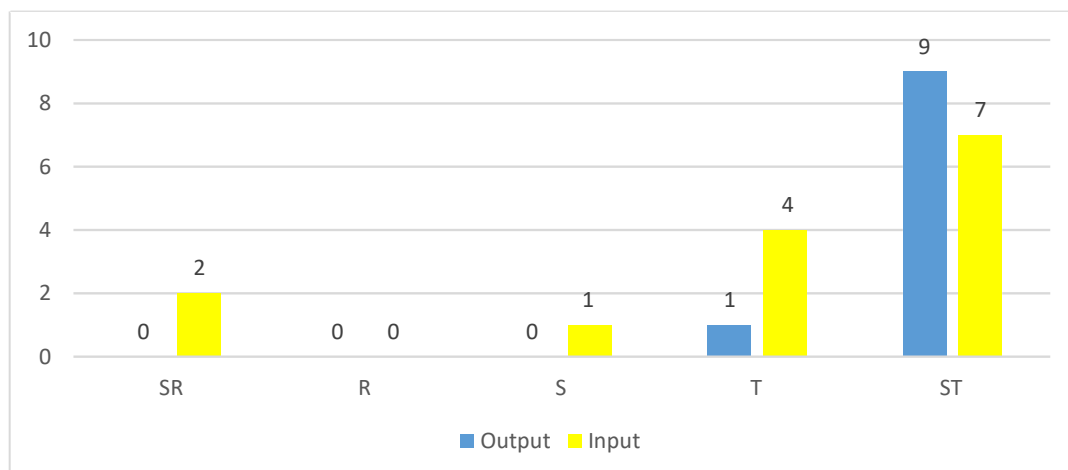


Gambar 2.54. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Pengawasan.

3) Bidang Urusan Perencanaan

Bidang Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun capaian kinerja bidang urusan perencanaan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sampai Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar 67,12 persen atau dengan predikat Sedang "S". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- b. Sedangkan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 3.087.208.721,00 atau 83,70 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata pada RKPDP sebesar Rp. 3.688.303.430,96.

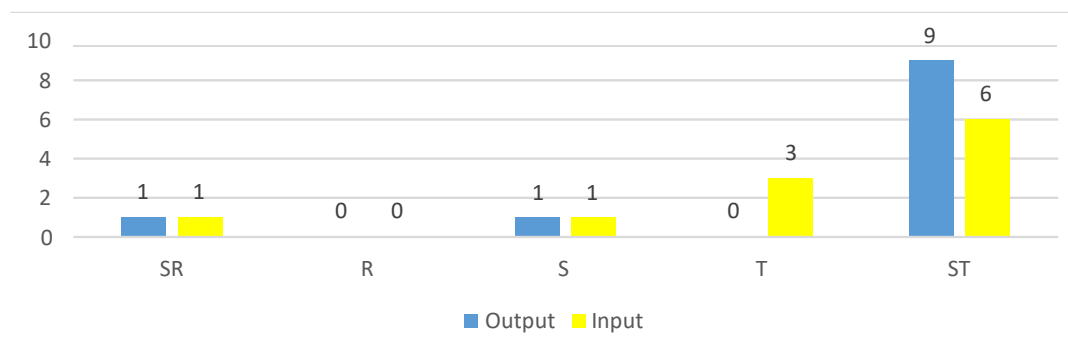


Gambar 2.55. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Perencanaan.

4) Bidang Urusan Keuangan

Bidang Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan keuangan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 96,66 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi "ST". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 9.458.766.226,00 atau 91,70 persen dari total anggaran bidang urusan keuangan pada RKPDP sebesar Rp. 10.314.739.475,00.

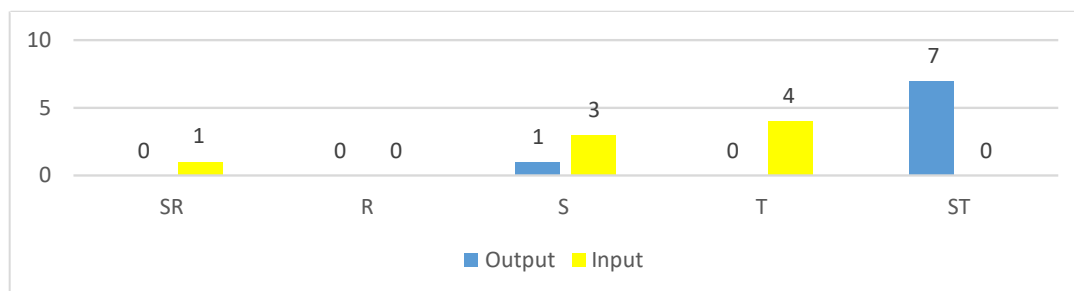


Gambar 2.56. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Keuangan.

5) Bidang Urusan Kepegawaian

Bidang Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang urusan kepegawaian pada akhir Triwulan IV Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kepegawaian mencapai sebesar 81,85 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi "T". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Untuk realisasi keuangan pada bidang urusan kepegawaian sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 sebesar Rp. 1.810.902.669,00 atau mencapai 75,97 persen dari total anggaran sebesar Rp. 2.383.648.400,00.

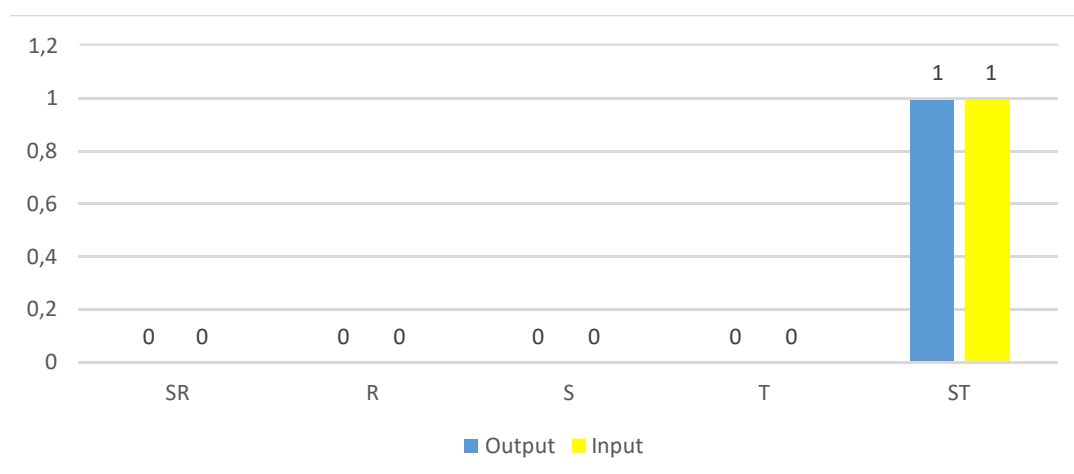


Gambar 2.57. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Kepegawaian.

6) Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang urusan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan pendidikan dan pelatihan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 81,75 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi "T". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran masih Rp. 2.033.040.600,00 atau baru mencapai 88,82 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 2.288.899.500,00.

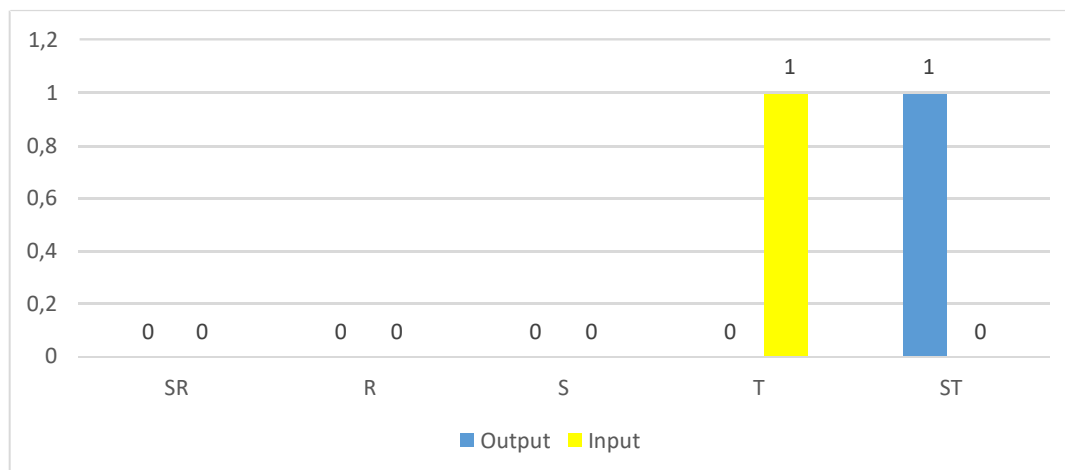


Gambar 2.58. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan.

7) Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 125 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi "ST". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya (1 program) juga dengan predikat Sangat Tinggi.
- b. Realisasi anggaran bidang urusan penelitian dan pengembangan mencapai Rp. 874.748.750,00 atau baru mencapai 93,75 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 933.036.250,00



Gambar 2.59. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Penelitian dan Pengembangan.

2.2.5 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan adalah diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya serapan anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2017 diakibatkan karena kegiatan dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk masalah rendahnya serapan anggaran Adanya beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan proses tender diakibatkan keterlambatan pengajuan RPP ke ULP sehingga ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena masih dalam tahap tender.
- b. Adanya perubahan kegiatan yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan akibat menunggu dilaksanakannya perubahan mendahului (Dinas Pendidikan), akibat dari perubahan Juknis Pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2017.

Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi hasil RKPDP Triwulan IV Tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Laporan Evaluasi Renja SKPD Triwulan IV Tahun 2017 yang dilaksanakan belum optimal sehingga masih terdapat beberapa permasalahan seperti :
 - 1) Masih terdapat Tidak konsistennya pemasangan indikator kinerja dan target baik dalam RKPDP dan DPA, sehingga banyak capaian indikator kinerja program dan kegiatan tidak terukur karena adanya perbedaan indikator kinerja walaupun tidak sebanyak pada waktu RKPDP dan APBD induk tahun 2017.
 - 2) Beberapa SKPD belum mengumpulkan Renstra dan Renja SKPD Tahun 2017 sehingga sulit melakukan evaluasi Renstra SKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD, sehingga banyak capaian indikator kinerja program dan kegiatan tidak terukur.
- b. Beberapa SKPD belum melaporkan evaluasi Renja Tahun 2017 sehingga sulit melakukan evaluasi.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi dan rumusan permasalahan pembangunan daerah maka dapat disajikan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan analisa atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2017, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama-sama dengan segenap masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Adapun hasil analisa atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

2.3.1.1. Sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum intensifnya pendataan, pengkajian, dan pendaftaran kekayaan budaya secara valid.
2. Kerjasama pengembangan budaya dengan para pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan budaya sering mengalami hambatan disebabkan belum tercetusnya komitmen bersama pengelolaan budaya berupa cagar budaya.

Tercapainya target sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah pada tahun 2017 didukung oleh pelaksanaan program aksi "KLUNGKUNG MENARI". Klungkung Menari memberikan kesempatan kepada sanggar pemuda/sekaa teruna untuk menampilkan kemampuan seninya dalam gelar seni di panggung terbuka yang diselenggarakan setiap bulan. Dengan Klungkung Menari masyarakat diberikan kesempatan menikmati beragam kesenian yang ditampilkan oleh pemuda Klungkung sendiri. Selain pelaksanaan Klungkung menari, hal lain yang menjadi faktor pendukung tercapainya sasaran tersebut adalah adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung. Selain itu, penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas berbagai suku dan agama saling mendukung dalam melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung.

2.3.1.2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klungkung

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Sayangnya massifnya pembangunan yang tidak terarah memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan

pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Untuk mencapai peningkatan Angka Harapan Hidup sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berupaya melaksanakan pembangunan kesehatan dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan "KRIS 118". KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. Keberadaan Tim AGD KRIS 118 telah mendapat respon yang positif oleh masyarakat untuk itu perlu lebih dikembangkan kegiatannya bukan hanya melayani kasus emergensi di masyarakat tetapi juga tetap memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menangani kasus Gawat Darurat Pra Hospital menghubungi petugas. Tetapi berkat adanya call center (0366) 118 yang mudah diingat oleh masyarakat sehingga lebih cepat mendapat repon oleh petugas. Kegiatan ini juga dapat meringankan tugas-tugas dari AGD KRIS Puskesmas kendala kurangnya tenaga sopir ambulans sehingga kasus Gawat Darurat diluar jam kerja telah dibantu oleh TIM AGD KRIS 118. Kasus-kasus kegawatdaruratan dari Nusa Penida juga sangat dibantu oleh respon cepat TIM AGD KRIS 118, kasus emergensi kebidanan dan neonatal dapat segera dibawa oleh TIM AGD KRIS 118 guna mendapat pertolongan segera dari Rumah Sakit sehingga ikut berdampak pula pada penurunan angka kematian Ibu dan Bayi. AGD KRIS 118 merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. Lounching inovasi AGD KRIS 118 ke masyarakat dilakukan oleh Bupati Klungkung pada tanggal 11 Pebruari 2016 bertempat di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek time management sebagai implementasi time saving is life and limb saving yang mengandung unsur kecepatan atau quick respons dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi basic life suport (BLS) dan advance life suport (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah kepada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas manfaat pelayanan.

2. Pemenuhan Universal Health Coverage

Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

3. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga terus mengupayakan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klungkung dengan meningkatkan kelas rumah sakit menjadi

Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur ditempuh dengan memenuhi jenis pelayanan sesuai standar RSUD kelas B. Dalam mencapai pemenuhan pelayanan Rumah Sakit Tipe B, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan program aksi yang disebut "GENI ASTU" (Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu). Geni Astu menargetkan lima keluaran kongkret yang mendukung keberhasilan yaitu :

- a. Menciptakan peningkatan motivasi, kerjasama, kerja keras, rasa memiliki serta komitmen jajaran RSUD Kabupaten Klungkung
- b. Terwujudnya standar pelayanan prima
- c. Terwujudnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna Rumah Sakit
- d. Menyelesaikan survei akreditasi Rumah Sakit dengan target berhasil lulus paripurna
- e. Memperoleh ijin operasional RSUD kelas B

Dengan kerja keras seluruh jajaran, target ijin operasional RSUD Kelas B dapat dicapai. Program Aksi GENI ASTU telah berhasil mengurangi keluhan pengguna Rumah Sakit dan meningkatkan tingkat pemanfaatan rumah sakit.

2.3.1.3. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas daratan dan kepulauan mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan yang dipicu oleh terbatasnya akses di beberapa sekolah di kepulauan.
2. Kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan merupakan fokus baru yang belum tergarap, hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lulusan sekolah.
3. Kemiskinan menjadi salah satu sumber penyebab rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, mempengaruhi penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan dan membatasi harapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan berupa perbaikan ruang kelas, perbaikan sarana laboratorium dan prasarana sekolah lainnya.
 - b. Untuk meningkatkan akses ke lembaga pendidikan dasar khususnya SMP, mulai tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan program aksi yaitu penyediaan **ANGKUTAN SISWA GRATIS** bagi siswa SMP. Siswa SMP yang bersekolah di wilayah perkotaan mendapatkan layanan angkutan siswa tanpa membayar. Hal tersebut, selain sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan pengguna kendaraan yang berasal dari siswa SMP juga turut mengarahkan siswa agar pulang dan berangkat sekolah tepat waktu. Orang tua siswa tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan dapat mengecek keberangkatan dan kepulangan anak mereka di pos – pos penjemputan angkutan siswa gratis.
 - c. Perluasan akses pendidikan dasar juga dilakukan dengan menerapkan sistem penempatan siswa menggunakan rayon atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Hal tersebut selain menjamin kedekatan pelayanan dengan siswa juga untuk mengurangi kesenjangan sebaran siswa di sekolah yang bertempat di desa dan di perkotaan. Isu bahwa sekolah di perkotaan lebih berkualitas daripada sekolah di pedesaan telah menyebabkan sebaran siswa di sekolah yang berlokasi di wilayah pedesaan menjadi jarang/sedikit dan di sekolah perkotaan justru terlampaui

padat/berlebihan.

2. Peningkatan Mutu Sekolah dan Lulusan Sekolah

Peningkatan mutu sekolah dan lulusan sekolah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar
- b. Meningkatkan minat dan budaya baca yang dilakukan dengan semakin meningkatkan tingkat kunjungan ke perpustakaan dan menggalakkan rencana aksi **GEMA ARCA**. Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca) adalah suatu rencana aksi yang bertujuan untuk mengkampanyekan gemar membaca di kalangan masyarakat. Rencana aksi Gema Arca direalisasikan dengan penyediaan perpustakaan daerah, perpustakaan di desa-desa, perpustakaan di sekolah-sekolah dan juga penyediaan perpustakaan dalam bentuk mobil keliling yang menyediakan layanan perpustakaan di tempat-tempat keramaian di Kabupaten Klungkung. Masyarakat yang mengunjungi mobil perpustakaan keliling dapat membaca atau melakukan peminjaman buku di mobil perpustakaan keliling tersebut.
- c. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat usia produktif dilaksanakan dengan peningkatan akses pendidikan kepada masyarakat melalui pola pendidikan informal dan non formal. Pola pendidikan ini direalisasikan dengan adanya rencana aksi **GEMA PLATUK**. Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) dirancang untuk menyelesaikan masalah tata kelola layanan masyarakat buta aksara dan drop out yang belum optimal. Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) bertujuan mewujudkan optimalisasi tata kelola layanan belajar masyarakat secara menyeluruh dengan cara memberi layanan keaksaraan fungsional dan layanan kesetaraan dalam bentuk penyediaan kesempatan warga belajar untuk belajar di sanggar belajar dan kesempatan warga belajar untuk belajar di rumah sendiri dengan didatangi tutor keluarga secara berkala sesuai jadwal yang telah disepakati serta Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) didesain juga dengan memberi layanan kecakapan hidup. Indikator output yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai warga belajar, meningkatnya kelompok warga belajar yang bermuara nantinya pada peningkatan rata-rata lama belajar masyarakat. Outcome dari Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) adalah pada terserapnya lulusan di dunia kerja. Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) merupakan inovasi tata kelola layanan publik dalam bentuk program keaksaraan dan kesetaraan yang implementasinya dikreasi dengan pola layanan tutor keluarga. Sebelum dicanangkan Gema Shanti Klungkung Mengajar Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK), layanan program keaksaraan dan kesetaraan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tatap muka di tempat belajar saja bagi warga belajar yang mau datang ke tempat belajar. Pola Layanan Tutor Keluarga pada gerakan implementasi program keaksaraan dan kesetaraan yang implementasinya didesain dengan pemberian program kecakapan hidup bagi warga belajar dan pelayanan tutor keluarga dalam bentuk kegiatan tutor yang secara aktif terjadwal melakukan kunjungan rumah (Home Visit) ke tempat warga belajar yang tidak bisa atau tidak mau datang ke tempat belajar. Hal ini terlaksana karena para tutor yang digerakkan berasal dari daerah sekitar warga belajar berada. Kreasi implementasi program ini ditujukan untuk memaksimalkan partisipasi warga belajar dalam mengikuti program keaksaraan dan kesetaraan secara kuantitas maupun kualitas layanan tanpa dibarengi dengan peningkatan pembiayaan. Waktu belajar efektif dimanfaatkan karena start pembelajaran ditentukan oleh kedatangan tutor yang sesuai jadwal.

3. Peningkatan Prestasi Atlit Dan Seniman.

Peningkatan prestasi atlit dan seniman juga merupakan faktor pendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung. Atlit dan seniman memberikan motivasi terhadap pelajar dan pemuda untuk terus berupaya meningkatkan kemampuannya sehingga dapat memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga. Dengan memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka demikian pula kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

2.3.1.4. Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan

Dalam usaha mencapai sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Belum efektifnya pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat ketimpangan, disebabkan oleh beberapa penyimpangan yang ditemui dalam penyalurannya.
2. Inflasi harga bahan pangan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat yang rentan yang berada di perbatasan garis kemiskinan, menjadi miskin tatkala terdapat kenaikan harga bahan pangan pokok.
3. Lemahnya pendataan terkait kemiskinan berupa :
 - a. Data by name by address penduduk miskin yang sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat sampai kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan.
 - b. Profil kemiskinan by name by address yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan penyebab kemiskinannya.

Untuk mencapai penurunan Persentase Penduduk Miskin sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas rumah tinggal bagi Rumah Tangga Sasaran
Meningkatkan kualitas rumah tinggal Rumah Tangga Sasaran melalui program BEDAH RUMAH. Program Bedah Rumah memberikan bantuan pembangunan maupun rehab rumah bagi Rumah Tangga Sasaran yang datanya telah divalidasi. Pada tahun 2017, pelaksanaan bedah rumah pembangunan baru dilaksanakan sebanyak 198 rumah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung. Sementara bantuan Rehab Rumah bagi Rumah Tangga Sasaran telah dilaksanakan sebanyak 373 unit rumah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.
2. Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Bantuan kebutuhan dasar diberikan berupa pemberian bantuan sembilan bahan pokok terhadap 45 orang penyandang disabilitas, 50 orang Lanjut Usia Miskin dan bantuan lain bagi kelompok rentan. Penyaluran Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) kepada 8.560 Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran Bantuan Tetap Uang Non Tunai serangkaian Program Keluarga Harapan terutama kepada siswa SD, SMP, SMA, Ibu Hamil, Anak Pra Sekolah, Balita, Usia Lanjut dan Penyandang Disabilitas.
3. Mendorong Tercapainya Penduduk Yang Tumbuh Seimbang.
Penduduk yang tumbuh seimbang merupakan salah satu faktor penentu masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak akan menyebabkan berbagai permasalahan lain karena tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendorong tercapainya penduduk yang tumbuh seimbang ini dilakukan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan KB sehingga masyarakat sangat menyadari pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Selain hal tersebut juga dilakukan konseling dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka menurunkan angka perkawinan dibawah umur.
4. Menurunkan Angka Pengangguran
Pengangguran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kemiskinan, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dalam persaingan pasar tenaga kerja serta mengadakan kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha agar tenaga kerja di Kabupaten Klungkung dapat langsung tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan

tenaga kerja. Selain itu, upaya pengurangan angka pengangguran juga dilakukan dengan menggalakkan program transmigrasi ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya.

5. Peningkatan Peran Serta Perempuan.

Perempuan seringkali menjadi objek tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta perempuan dengan memberikan pelatihan wirausaha terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat memiliki keterampilan kerja dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan guna turut membantu menopang kehidupan keluarga.

6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.

Peningkatan kemandirian masyarakat desa dilakukan dengan terus aktif mendorong pemerintahan desa dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa masing-masing sesuai dengan karakteristik desanya, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

2.3.1.5. Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kemudahan berinvestasi belum sepenuhnya tercipta di Kabupaten Klungkung. Agenda reformasi birokrasi yang sedang berjalan belum dapat terlihat hasilnya dalam membantu meningkatkan iklim berinvestasi, sehingga hal ini merupakan suatu fokus utama yang harus dibenahi.
2. Infrastruktur publik yang mendukung perdagangan sedang dikembangkan dan telah sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun kedepannya perlu lebih ditingkatkan lagi demi menciptakan kondisi yang kondusif untuk terus meningkatkan omzet perdagangan di Kabupaten Klungkung.
3. Pemberdayaan koperasi belum dapat dimaksimalkan, beberapa koperasi yang baru dan sedang tumbuh terkendala terhadap proses legalitas kelembagaan yang tidak dapat diselesaikan di level kabupaten.
4. Sektor pariwisata yang sedang dikembangkan memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk pendanaan, kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan dunia usaha agar dapat benar-benar berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan ekonomi adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik di bidang perizinan, perdagangan, dan layanan publik lainnya.

Stigma masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang rumit dan berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang tidak pasti, tidak transparan serta sistem yang konvensional menyebabkan masyarakat masih enggan untuk mengurus perizinan. Oleh karena itu, dengan spirit GEMA SANTI (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif) Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya melaksanakan perbaikan pelayanan perizinan melalui program GEMA SARI (Gerakan Masyarakat Sadar Izin dan Investasi). Langkah-langkah yang telah diambil adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi perizinan kepada masyarakat sebagai langkah awal untuk membuka wawasan dan merubah pola pikir masyarakat terhadap perizinan yang rumit dan berbelit-belit.
- b. Mempermudah akses informasi perizinan melalui website Klungkung dan penyampaian formulir pendaftaran di tiap kecamatan dan desa sehingga lebih terbuka dan lebih dekat dengan masyarakat.
- c. Merevisi SOP Pelayanan Perizinan agar sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini,

lebih cepat, tepat dan terarah.

Dilaksanakannya program GEMA SARI telah memberi dampak positif terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Klungkung, yaitu : lebih terbukanya akses informasi pelayanan perizinan, meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengurus izin yang menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah penerbitan izin yang berimbang pada meningkatnya PAD, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, dan permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan dapat diantisipasi lebih dini. Penerapan program GEMA SARI dengan model pelayanan langsung melalui sosialisasi, sebar berkas, jemput berkas dan antar izin untuk usaha akomodasi baru yang mengurus izin tanpa calo semakin intensif dilaksanakan. Selain dengan metode yang telah dilaksanakan juga ditambah dengan pendekatan pelayanan melalui teknologi yaitu melalui website siCANTIK dengan alamat klungkungkab.sicantik.layanan.go.id. Nantinya diharapkan web ini dapat dikembangkan sehingga masyarakat dapat mendaftar secara online.

2. Perbaiki infrastruktur publik terutama yang mendukung akses perdagangan dan pariwisata seperti pasar umum, pasar komoditi, dan pasar desa serta jalan dan penataan obyek-obyek pariwisata baru.
3. Memfasilitasi koperasi-koperasi dan lembaga keuangan mikro dengan bantuan keuangan dan penataan manajemen keuangannya.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data serta pencarian sumber-sumber PAD.
5. Menggali dan meningkatkan produk-produk UKM lokal seperti peningkatan kualitas dan pemasaran garam lokal Klungkung, peningkatan kualitas dan pemasaran kain tradisional Klungkung serta produk-produk unggulan lainnya.
6. Promosi pariwisata yang dilaksanakan dengan berbagai penyelenggaraan event pariwisata seperti Festival Nusa Penida, Festival Semarapura Festival Layang – Layang tradisional yang dilaksanakan bulan Agustus 2017, Klungkung Internasional Surfing Festival, pelaksanaan City Tour dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa wisata sejarah dengan konsep mini touring yaitu dimulai dari Monumen Puputan Klungkung dilanjutkan ke puri Agung Klungkung ada atraksi Kesenian Barong Somi dan Atraksi Menenun kemudian lanjut ke Musium Semarajaya, Pemedal Agung, Balai kambang, Kertha Gosa ada atraksi melukis Kamasan lanjut ke Pasar Tradisional Klungkung. Pelaksanaan City Tour juga di Integrasikan dengan pengembangan Desa Wisata.

2.3.1.6. Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri sangat rendah, Kabupaten Klungkung sangat bergantung pada supply bahan pangan dari daerah lain di Provinsi Bali dan Luar Provinsi Bali, misal : kedelai datang dari Kabupaten lain dan luar Bali, daging ayam datang dari Kabupaten lain di Bali.
2. Harga pangan berkualitas lebih mahal sehingga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah memilih bahan pangan berdasarkan kemampuan membeli, bukan berdasarkan kebutuhan pangan yang seimbang, misal : memilih membeli ikan awetan yang cenderung lebih murah daripada membeli ikan segar.
3. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi. Kurangnya pemahaman terhadap bahan pangan yang berkualitas dan seimbang mengakibatkan bergesernya pemahaman masyarakat terhadap bahan pangan seimbang, dan lebih mementingkan prestise/gengsi saat memilih bahan pangan, misalnya : lebih memilih mengkonsumsi ayam daripada ikan karena mindset makan daging adalah makanan yang lebih

bergengsi, kekeliruan pemahaman terhadap fast food, kekeliruan pemahaman terhadap buah-buahan import.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan dari dalam Kabupaten Klungkung
 - a. Meningkatkan produksi hasil pertanian.

Peningkatan produksi hasil pertanian diupayakan melalui implementasi teknologi pertanian dengan terus mendorong penggunaan mesin-mesin pertanian melalui penyaluran bantuan kepada kelompok-kelompok tani yang memerlukan, mendorong penggunaan bibit unggul berkualitas, mendorong penggunaan pupuk ramah lingkungan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi pertanian. Peningkatan produksi hasil pertanian juga dilakukan dengan strategi pemasaran produk yang tepat. Pemerintah Kabupaten Klungkung membantu petani dengan program aksi BELI MAHAL JUAL MURAH. Program aksi ini adalah program perlindungan harga terhadap petani, sehingga petani tidak menjual gabahnya kepada pengepul luar Klungkung, namun menjual kepada Koperasi Tani di Kabupaten Klungkung. Melalui program aksi ini, petani mendapatkan harga jual termahal oleh Koperasi Pertanian dan Koperasi menjual beras dengan harga termurah diantara penjual lain. Hal ini mendatangkan dua keuntungan, yaitu perlindungan harga bagi petani dan konsumen serta pemenuhan kebutuhan pangan internal dari daerah sendiri.
 - b. Meningkatkan produksi hasil peternakan.

Peningkatan produksi hasil peternakan dilakukan dengan pemberian bantuan bibit ternak unggul terhadap kelompok petani, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak di masyarakat.
 - c. Meningkatkan produksi hasil perikanan.

Peningkatan produksi hasil perikanan dilakukan dengan peningkatan pengolahan hasil produksi perikanan berupa: pengawetan ikan hasil tangkapan masyarakat dan peningkatan produksi garam sebagai upaya pemenuhan garam dari produksi lokal. Pemenuhan garam dari produksi lokal ini dilakukan dengan iodisasi produk garam lokal sehingga memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Peningkatan produksi juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas nelayan melalui pemberian bantuan mesin dan peralatan tangkap. Selain peningkatan produksi perikanan tangkap, juga dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi perikanan budidaya dengan peningkatan kemampuan budidaya petani serta pemberian bantuan modal usaha maupun peralatan bagi petani ikan air tawar.
2. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Upaya peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan pelaksanaan program aksi GEMA PEKARANGAN. Melalui program aksi ini, masyarakat diberikan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan pangan dari pekarangan sendiri dengan memanfaatkan lahan atau media lain. Gema Pekarangan mengarahkan keluarga/rumah tangga untuk menanam sendiri bahan pangan berkualitas dan beragam agar agar konsumsi pangan dapat seimbang. Selain mendapatkan pangan berkualitas, hal tersebut juga membantu pemerintah dalam menekan angka inflasi komoditas tertentu seperti cabe merah dan sayur-sayuran. Selain pemanfaatan pekarangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga gencar melakukan kampanye peningkatan konsumsi ikan di masyarakat dengan program aksi GEMARIKAN. Program aksi ini mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan sebagai upaya konsumsi pangan berimbang. Program Gemarikan dimulai dengan penyajian menu ikan pada penyelenggaraan rapat-rapat atau acara lain serta pemberian penyuluhan cara penyajian ikan menjadi berbagai produk olahan yang menarik. Dengan program gemarikan ini diharapkan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi berimbang akan dapat ditingkatkan.

2.3.1.7. Sasaran Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Banyaknya penduduk pendatang yang hampir masuk ke semua wilayah Desa di Kabupaten Klungkung yang tidak memiliki Skill dan tujuan yang jelas akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan.
2. Maraknya peredaran narkoba yang tidak saja terjadi di kota bahkan sudah sampai ke desa-desa sampai menyasar anak-anak sekolah.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas pendataan penduduk pendatang terutama rumah-rumah kost dengan melibatkan seluruh komponen keamanan seperti kepolisian, TNI, satpol PP, satuan Linmas, Pecalang, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas Satuan Linmas dan Pecalang sebagai garda terbawah penjagaan keamanan lingkungan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tanggap keamanan lingkungan.

2.3.1.8. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja beserta data dukungannya dan belum berubahnya mind set bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.
3. Penerapan program aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam software aplikasi.
4. Penerapan reward and punishment yang berbasis kinerja belum dapat diselenggarakan dan dalam tahapan pengembangan.
5. Pengelolaan asset daerah belum berjalan dengan maksimal meskipun telah disediakan program aplikasi, namun pemahaman akan tata kelola asset yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap banyaknya kasus salah saji asset pada laporan keuangan.
6. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kerangka pengelolaan pemerintahan belum maksimal, seringkali kegiatan-kegiatan rutin dan bersifat administratif lebih mendominasi aktivitas perangkat daerah dibandingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
7. Rendahnya komitmen aparatur pemerintah dalam meningkatkan kinerja turut menjadi fokus permasalahan yang menyebabkan pengelolaan pemerintahan kurang efektif.
8. Lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditandai dengan maturitas SPIP di level 2 akibat kurang tersosialisasinya manfaat dan tata cara penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peranan Team Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melakukan penataan perencanaan kinerja di semua perangkat daerah yang meliputi : perumusan tujuan dan sasaran, perumusan indikator kinerja dari tujuan

sampai kegiatan, penetapan taret masing-masing indikator kinerja dan cara pengukuran indikator kinerja, penyusunan program dan kegiatan yang langsung mendukung sasaran serta reduksi atas program dan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran kinerja perangkat daerah.

2. Memaksimalkan perangan Team Gerakan Disiplin Nasional untuk melakukan penguatan SAKIP di semua perangkat daerah yang meliputi : penguatan pemahaman tugas dan fungsi, penguatan pemahaman sasaran kinerja dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kinerja serta target yang ditetapkan.
3. Mulai melakukan persiapan penerapan reward and punishment berbasis kinerja yang dilakukan dengan upaya persiapan program aplikasi e-kinerja dan e-sakip di tahun 2017 serta persiapan kajian teknis pemberian tunjangan kinerja di tahun 2018
4. Peningkatan pemahaman tata kelola keuangan daerah dengan berbagai pelatihan yang ditujukan kepada pelaksana di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten.

Peningkatan pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pelaksana di Perangkat Daerah.

2.3.1.9. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Dalam usaha mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Tatalaksana Pelayanan Publik di instansi-instansi pemberi layanan public belum tertata secara sistematis dan berorientasi terhadap kepentingan konsumen. Kendala-kendala yang ditemui adalah : proses bisnis antar pemberi layanan public belum terorganisir sehingga sangat memungkinkan adanya duplikasi aktivitas yang tidak diperlukan, ketidaknyamanan pengguna karena prosedur yang berbelit dan belum terintegrasinya pelayanan public dalam satu tempat pelayanan. Selain kendala antar instansi, di dalam internal instansi juga ditemui berbagai kendala seperti : belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur yang benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, minimnya pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan serta berbagai kendala sarana dan prasarana pelayanan.
2. Profesionalisme aparatur pemberi layanan public belum memenuhi standar-standar pelayanan prima.
3. Regulasi pelayanan public belum menciptakan iklim yang baik untuk berinvestasi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki tatalaksana pelayanan publik dengan menerapkan standar-standar pelayanan publik, penyederhanaan standar operasional prosedur dan perbaikan sarana dan prasarana di tempat-tempat pelayanan publik.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik dengan berbagai pelatihan teknis terkait.
3. Memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Program aksi "KAWI SMARA".
Kawi Smara merupakan suatu program aksi dimana setiap pasangan yang menikah langsung memperoleh akta perkawinan sesaat setelah pernikahan dilangsungkan.
 - b. Program Aksi Caling Tanduk.
Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari tiga pulau yang tersebar, menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Biaya untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi mahal karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat yaitu biaya transportasi. Caling Tanduk merupakan pelayanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan keliling mencetak dokumen kependudukan ini mewajibkan semua permohonan yang telah memenuhi syarat harus sudah selesai pada hari itu.

c. Program Aksi PREDATOR

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan inovasi dengan melakukan perekaman data menggunakan sepeda motor atau biasa disebut "PREDATOR". Pelayanan ini membantu masyarakat yang tidak dapat datang ke pusat pelayanan dapat menikmati layanan kependudukan di tempat tinggalnya.

d. Program Aksi BELA NANDA

Bela Nanda (Begitu Anak Lahir Langsung Dapat Akta) merupakan program aksi yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas guna mencatatkan sekaligus mendapatkan kutipan Akta Kelahiran. Dengan persyaratan yang ringan dan proses pengurusannya dilakukan oleh pihak rumah sakit dan puskesmas. Hal ini didasarkan analisis dimana penduduk sering lalai mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga saat dibutuhkan akta kelahiran belum dimiliki oleh penduduk.

2.3.1.10. Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

Dalam usaha mencapai sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa kepulauan mengakibatkan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan lebih tinggi dari di daratan. Selain permasalahan biaya, akses menuju wilayah pembangunan juga masih tertutup sehingga membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama. Permasalahan kondisi geografis ini telah berdampak luas pada berbagai prasarana publik tidak hanya penyediaan jalan, jembatan, air bersih bahkan juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
2. Kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan infrastruktur publik secara swadaya masih kurang.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan keseimbangan pembangunan infrastruktur di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan sehingga ketimpangan infrastruktur dapat ditanggulangi. Menggalakkan kembali penggunaan angkutan umum publik sebagai sarana transportasi, terutama telah diterapkan pada siswa SMP yang memperoleh layanan ANGKUTAN SISWA GRATIS. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat akan kelebihan transportasi publik dimulai dari para siswa.

2.3.1.11. Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kendala:

1. Tingginya alih fungsi lahan tegalan menjadi perumahan mengakibatkan berkurangnya vegetasi pohon di Kabupaten Klungkung
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman.
3. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas.
4. Terdapat industri rumah tangga makanan dan tekstil baik itu usaha skala rumah tangga, menengah maupun usaha skala besar belum melakukan pengolahan limbah industrinya dengan tepat sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan.
5. Kabupaten Klungkung tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, TPA yang masih menerapkan Sistem Open Dumping secara bertahap harus merubah metode Pengelolaaannya menjadi Sistim Sanitary Landfill ataupun Sistim Control Landfill terhitung sejak UU tersebut diundangkan, akan tetapi karena

terbatasnya Sumber Daya yang tersedia Pemerintah Kabupaten Klungkung masih menerapkan metode Open Dumping sehingga dampak buruk emisi Gas Methan tetap mengancam masyarakat. Secara langsung bahaya kebakaran timbunan sampah TPA mengakibatkan meningkatnya Penyakit ISPA.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa Gas Methan adalah termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca atau Green House Gas sebagai penyebab utama pemanasan global, bahkan Gas Methan memiliki kekuatan efek pemanasan 72 kali lebih kuat dari Gas Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh pembakaran BBM dari mesin-mesin kendaraan dan pabrik-pabrik. Bertitik tolak dari data dan kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak Tahun 2015 berinisiatif untuk mengendalikan emisi Gas Methan pada TPA Sente untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya bahkan lebih jauh lagi dimanfaatkan sebagai sumber Bahan Bakar bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan gas methan sebagai bahan bakar disalurkan dari jam 07.00 – 10.00 (4 jam) setiap harinya dirasakan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar minyak/gas.
2. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air tidak mengandung cemaran yang dapat membahayakan masyarakat. Di Kabupaten Klungkung pemantauan kualitas air dilakukan terhadap kualitas air di tiga sungai utama di Kabupaten Klungkung yaitu Tukad Unda, Tukad Jinah dan Tukad Bubuh pada tiga titik pengamatan yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Pengamatan dilakukan pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai penurunan beban pencemaran air di Kabupaten Klungkung.
3. Penanganan lahan kritis merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengingat lahan kritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon pada wilayah yang kritis melalui pemberian bantuan bibit pohon yang kemudian ditanam dan dipelihara oleh masyarakat.

Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Penerapan program ini akan menyebabkan tidak adanya proses pemilahan. Sampah akan diolah secara langsung melalui proses peyueumisasi, briketisasi/peletisasi, dan gasifikasi, dengan menggunakan bio aktivator. Dalam tiga hari, bau hilang, dan dalam sepuluh hari volume sampah sudah berkurang. Ini juga akan menghasilkan briket dan pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses memasak dan listrik.

2.3.1.12. Sasaran Meningkatkan Kualitas Permukiman

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Permukiman, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Belum tertatanya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan dukungan prasarana serta sarananya.
2. Belum mantapnya pelayanan dan akses terhadap hak atas tanah untuk perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Kapasitas pemerintah daerah juga masih relatif terbatas untuk dapat melaksanakan secara efektif penyelenggaraan administrasi pertanahan yang memadai, yang dapat menjamin kecukupan persediaan lahan, mengembangkan pasar lahan secara efisien dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, yang dapat mengurangi hambatan hukum dan sosial terhadap akses yang adil dan seimbang kepada lahan, terutama bagi penduduk yang difabel, perempuan, dan kelompok yang rentan, dan yang mampu memfasilitasi akses kepada lahan dan keamanan status kepemilikan bagi seluruh kelompok masyarakat.

3. Rendahnya kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau.
4. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman.
 - a. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan maupun sebagai kawasan permukiman yang berkelanjutan. Masih terdapat banyak kawasan yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan secara terbatas, fasilitas sosial dan fasilitas umum, disamping masih adanya keterbatasan di bidang prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
 - b. Secara fisik lingkungan, terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, menghadapi dampak kesalingterkaitannya dengan skala kawasan yang lebih luas, serta masalah keterpaduannya dengan sistem prasarana dan sarana baik di perkotaan maupun di perdesaan.
 - c. Secara visual wujud lingkungan, juga terdapat kecenderungan yang kurang positif bahwa sebagian kawasan perumahan dan permukiman telah mulai bergeser menjadi lebih tidak teratur, kurang berjati diri, dan kurang memperhatikan nilai-nilai kontekstual sesuai sosial budaya setempat serta nilai-nilai arsitektural yang baik dan benar.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pemukiman, adalah sebagai berikut:

1. Menggalakkan program aksi BEDAH RUMAH dan REHAB RUMAH.
Bedah Rumah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat membangun rumah di lahan miliknya sendiri, sementara rehab rumah memberikan bantuan untuk masyarakat yang telah memiliki rumah namun mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dijadikan tempat tinggal yang nyaman. Bedah Rumah dan Rehab Rumah
2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan penyediaan prasarana fisik seperti gorong-gorong, drainase, sanitasi umum dan penataan lingkungan permukiman.

2.3.1.13. Sasaran Menurunkan Potensi Konflik

Dalam usaha mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri dari kepulauan dengan kurang lebih 13 pelabuhan laut tradisional yang minim pengawasan dapat menjadi suatu kelemahan bagi Kabupaten Klungkung. Banyaknya alternative pelabuhan laut tradisional menjadi rawan penyelundupan dan penggelapan baik itu orang, narkoba, barang import dan berbagai kejahatan lainnya.
2. Masyarakat yang multi ras merupakan suatu tantangan tersendiri, dimana sangat rentan akan konflik antar umat beragama.
3. Didalam Lembaga adat sendiri, yang selama ini menjadi andalan dalam penyelesaian persoalan social di tingkat terbawah justru menjadi salah satu sumber pemicu konflik disebabkan perebutan hak tanah bahkan pura.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman dan Desa Pekraman, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan

Konflik Sosial kabupaten Klungkung dalam ikut menekan tumbuhnya potensi konflik.

2. Meningkatkan peranan masyarakat dalam memelihara situasi yang kondusif di lingkungan sekitarnya dengan memberikan sosialisasi pencegahan potensi konflik dan kegiatan monitoring lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dengan menguatkan peranan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung yang dikendalikan langsung oleh Bupati Klungkung.

2.3.1.14. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kebencanaan

Dalam usaha mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana tanggap darurat kebencanaan maupun pemulihan pasca bencana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Kurangnya SDM yang terdidik dan terlatih dalam penanganan bencana.
3. Manajemen penanggulangan bencana belum dikelola dengan baik sehingga penanganan bencana cenderung spontan dan belum mencapai hasil yang maksimal
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana sebagai upaya meminimalkan resiko bencana.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Kebencanaan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana dilakukan melalui Pembentukan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Klungkung sejak tahun 2016, melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bencana.
2. Peningkatan informasi dan sosialisasi potensi ancaman bencana dilakukan melalui pembuatan brosur kebencanaan dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat dan pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya dan larangan memasuki daerah rawan bencana.
3. Peningkatan simulasi/pelatihan penanggulangan bencana dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan simulasi tsunami yang melibatkan stakeholder terkait, pelatihan penanggulangan bencana kepada relawan penanggulangan bencana desa dan aparatur pemerintah, pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana.
4. Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Aspek penting untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari peningkatan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat, koordinasi peningkatan penanganan tanggap darurat dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana dengan mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dan jumlah korban yang terdampak. Hal ini terbukti dengan tindakan pengerahan pertolongan dari personil BPBD Kabupaten Klungkung terhadap para pengungsi yang berdatangan dari Kabupaten Karangasem terkait dengan peningkatan status Gunung Agung sejak bulan September 2017 sampai dengan pada saat laporan ini disusun masih berlangsung penanganannya dengan melibatkan stakeholder terkait.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan, perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kebencanaan.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap pemulihan merupakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Aspek penting dari meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana bisa dilihat antara lain dari perbaikan lingkungan daerah bencana,

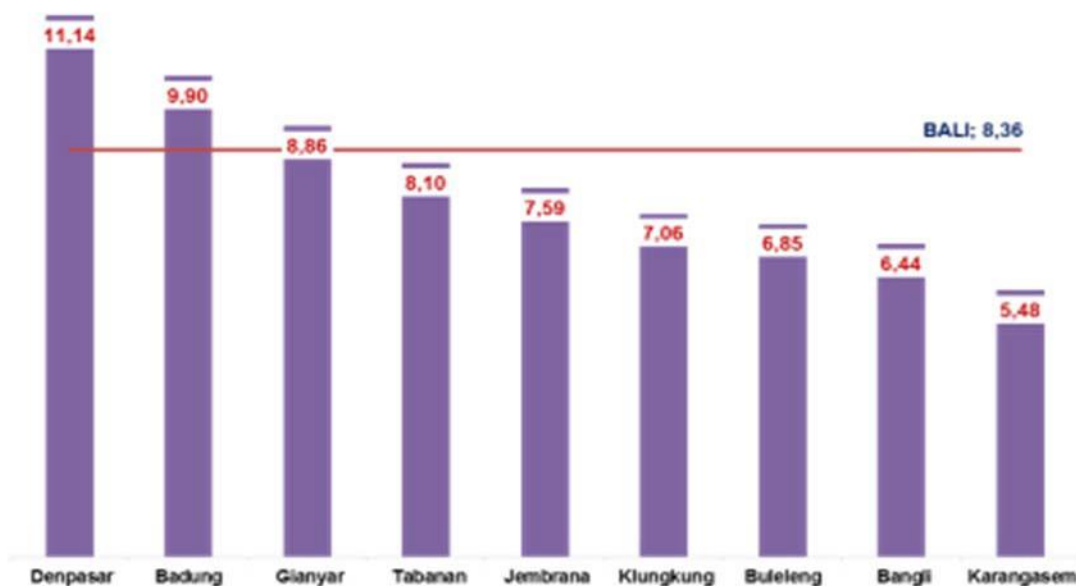
perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan di masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah konsisten dengan permasalahan yang nanti akan dijabarkan dalam permasalahan Perangkat Daerah pada Renja Perangkat Daerah.

1) Pendidikan

Dari 123 SD baru 34,3% akreditasi A, 48,2 % akreditasi B, 17,5 % belum terakreditasi. 23 SMP baru 47,8% terakreditasi A, 21,7% akreditasi B, 30,4% belum terakreditasi. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang memadai diperlukan tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan sistem kurikulum yang konsisten. Berbicara mengenai rasio murid dan guru, secara umum di Kabupaten Klungkung untuk jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMP sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari angka rasio murid dan guru yang sebesar 15 ke bawah. Persebaran guru dan murid menjadi penting diperhatikan karena untuk kualitas pendidikan yang lebih baik diperlukan jumlah guru yang memadai.

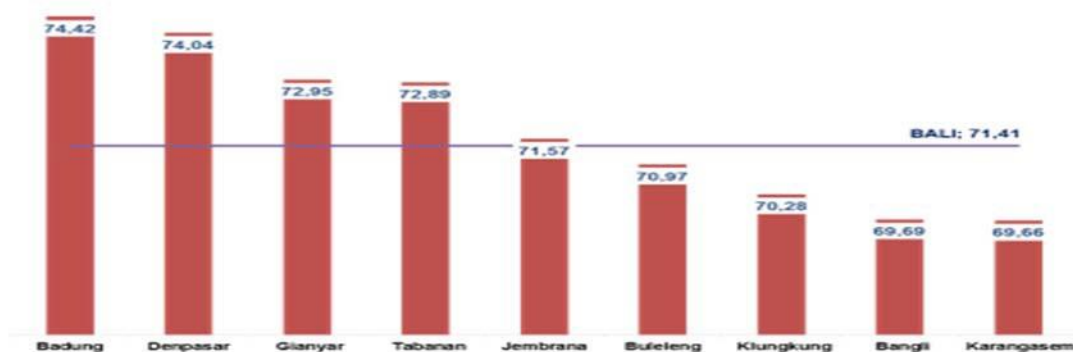


Sumber : BPS Kab. Klungkung 2017

Gambar 2.60. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali, 2016.

2) Kesehatan

Capaian SPM tahun 2016 pada RSUD Klungkung= 75%, IKP 2016 \geq 80%, pemenuhan sarana prasarana RS Pratama baru 50%). Jumlah penderita DBD dan diare pada tahun 2016 meningkat masing-masing menjadi 1.106 kasus dan 4.529 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat semakin menurun. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah terutama di bidang penyuluhan maupun pencegahan penyakit DBD dan diare. Meskipun jumlah penderita DBD dan diare meningkat, namun jumlah penderita TBC turun sebesar 8,11% menjadi 68 kasus.

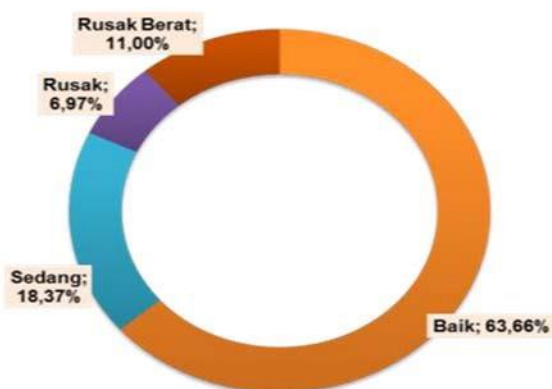


Sumber : BPS Kab. Klungkung 2017

Gambar 2.61. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Bali, 2016.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagian besar jalan di Kabupaten Klungkung sudah diaspal atau 94,66% dari total panjang jalan 453,804km. Jika ditinjau lagi menurut kecamatan, panjang jalan terpanjang terletak di Kecamatan Nusa Penida yang mencapai 229,007km. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, dan Dawan masing-masing sepanjang 80,570km, 78,517km, dan 65,710km. Tercatat bahwa terdapat perubahan panjang jalan menurut kondisi jalan, sehingga panjang jalan yang rusak terus berkurang. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan sarana jalan di Kabupaten Klungkung



Sumber : Dinas PUPR Kab. Klungkung

Gambar 2.62. Kondisi Jalan di Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

Dari gambar diatas dapat dilihat kondisi jalan yang rusak dan rusak berat mencapai 17,97% atau sekitar 77km dan sebagian besar terdapat di Kecamatan Nusa Penida.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Ditinjau dari beberapa aspek kualitas perumahan, terjadi kenaikan kualitas lantai bukan tanah sebesar 0,82%. Demikian juga untuk kondisi dinding permanen dan sumber penerangan listrik masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,59% dan 0,58%. Secara rata-rata terlihat tidak terjadi peningkatan kualitas yang signifikan terhadap kondisi perumahan tahun 2016 di Klungkung. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan harga konstruksi bahan bangunan yang tidak mampu dibeli oleh penduduk ekonomi bawah. Sementara jika mencermati rumah tangga yang mempunyai akses air minum bersih, tercatat bahwa sebagian besar rumah tangga sudah mempunyai akses terhadap air minum bersih yaitu sebesar 82,27%.

5) Sosial

Jumlah penduduk miskin tahun 2016 mencapai 11,21 ribu jiwa atau sebesar 6,35% dari jumlah penduduk Klungkung. Terlihat bahwa baik dari segi kuantitas maupun persentase

kemiskinan telah terjadi penurunan. Sebaran dari penduduk miskin dilihat dari konsumsinya relatif mendekati garis kemiskinan. Hal ini tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang secara umum turun dari 1,00 menjadi 0,78. Di sisi lain, tingkat heterogenitas bisa diamati pada indeks keparahan kemiskinan (P2) yang mencapai 0,13. Berdasarkan Gini Ratio terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Klungkung turun dari 0,37 pada tahun 2015 menjadi 0,36 pada tahun 2016. Dengan demikian, "kue" pembangunan yang diterima oleh kelompok 40% masyarakat berpenghasilan rendah semakin besar. Persentase penduduk miskin di Klungkung adalah peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Karangasem.

6) Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,39% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 1,94%. Hal yang perlu diperhatikan dari penurunan persentase pengangguran ini adalah bagaimana peran pertanian sebagai lapangan usaha utama sebagian besar penduduk Klungkung. Jika dilihat dari persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2015 naik menjadi 32,34%.

7) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- Anak sekolah tidak bisa melakukan perekaman data ke kantor
- Masih banyak masyarakat dgn keterbatasan (lansia, disabilitas) tidak bisa melakukan perekaman data ke kantor
- Masyarakat masih belum sadar/mau mengurus administrasi kependudukan secara rutin
- Masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman data kependudukan
- Masih banyak masyarakat yg enggan untuk mengurus administrasi kependudukan terutama akte kematian

8) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, jumlah kredit UMKM yang tersalurkan ke masyarakat mencapai 1.058,89 miliar rupiah atau naik sebesar 23,80% dibanding tahun sebelumnya. Kredit terbesar diberikan pada kelompok usaha kecil yang mencapai 474,96 miliar rupiah, kemudian diikuti oleh usaha mikro dan menengah masing-masing sebesar 305,95 miliar rupiah dan 277,98 miliar rupiah. Sementara jika dicermati menurut penggunaan kredit, tercatat bahwa kredit UMKM yang diberikan oleh bank umum sebagian besar digunakan untuk modal kerja oleh masyarakat yaitu sebesar 76,66%, sementara sisanya 23,34% digunakan untuk investasi.

9) Kebudayaan

- Banyaknya sekaa yang belum terbina
- Banyaknya kesenian yang tidak tergalai
- Klungkung kaya akan budaya, tapi belum jelas yang sudah ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya (prosesnya sampai dimana : identifikasi, pencatatan, penetapan)
- Identifikasi warisan budaya ; Berapa warisan budaya
- Rekonstruksi warisan budaya yang hampir punah (contoh tari jangkang, gandrung)
- Kekayaan non benda (contoh : babad puncak mundi)

10) Perpustakaan dan Kearsipan

- Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
- Rendahnya kunjungan ke perpustakaan
- Masih kurangnya tenaga yg tersedia
- Kurangnya sarana yg memadai
- Kurangnya inovasi untuk mengimbangi perkembangan teknologi
- Perlu dikembangkan pada daerah yang tertinggal

- Digitalisasi dokumen kuno

11) Pariwisata

Secara total jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 meningkat 1,84% yaitu menjadi 378.894 orang. Kenaikan tersebut cukup signifikan karena promosi pariwisata, perbaikan infrastruktur, nilai tukar dolar yang stabil, dan jaminan keamanan yang baik. Sementara rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara sebesar 2,94 hari dan wisatawan nusantara 2,33 hari. Dengan lama menginap sesuai angka tersebut akan dapat meningkatkan omset hotel dan restoran. Pemasukan berupa pajak hotel dan restoran akan meningkat yang dikelola untuk perbaikan sarana dan prasarana kepariwisataan.

12) Pertanian

Besar sumbangan lapangan usaha pertanian terhadap PDRB Klungkung tahun 2016 turun tipis menjadi 23,11% setelah sebelumnya sebesar 23,59%. Meskipun mengalami penurunan, lapangan usaha pertanian masih menjadi tumpuan dalam penyerapan tenaga kerja Klungkung. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang bekerja di Pertanian

13) Energi dan Sumberdaya Mineral

Hasil penggalian yang merupakan komoditas tak terbarukan produksinya semakin mengecil pada tahun 2016. Oleh karena itulah nilai tambah bruto yang dihasilkan juga semakin kecil. Untuk memenuhi kebutuhan bahan galian untuk pembangunan di Klungkung didatangkan dari Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Bangli. Untuk wilayah Nusa Penida kebutuhan bahan bangunan lebih banyak dipenuhi dari produksi lokal berupa batu paras putih.

14) Industri

Berdasarkan angka PDRB menurut harga konstan, pada tahun 2016 sektor ini mampu tumbuh sebesar 7,38%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri kecil sebesar 16,05%. Sementara pada industri besar sedang (IBS) tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

15) Pengawasan

- Pelaksanaan SPIP masih di level rendah
- Kapabilitas APIP masih di level rendah (level 2), jumlah auditor idealnya 25 org
- Pengawasan masih belum berbasis resiko
- Masih kurangnya pembinaan terhadap Desa dalam pengelolaan APBdes
- Masih kurangnya SDM pengawas dan petugas yang menangani kebijakan pusat dalam bidang pengawasan

16) Perencanaan

- Data kebutuhan perencanaan belum tersedia secara lengkap
- Konsistensi dokumen perencanaan masih rendah
- Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran
- Kapasitas aparatur perencanaan masih belum memadai

17) Keuangan

- Potensi pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal
- Kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis IT
- Inventarisasi aset belum dilakukan secara maksimal
- Pengamanan aset belum memadai
- Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah

Tabel 2.36
Perbandingan PDRB KABUPATEN/Kota di Bali

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Bali			
Uraian	2014	2015	2016
PDRB ADHB (Miliar Rp)			
Jembrana	9 019,99	10 274,19	11 303,56
Tabanan	15 065,93	17 202,96	18 769,93
Badung	37 273,28	41 384,28	46 147,88
Gianyar	17 909,15	20 053,94	22 216,97
Klungkung	5 676,49	6 412,81	7 119,52
Bangli	4 381,73	4 990,58	5 537,46
Karangasem	10 785,07	12 303,83	13 563,66
Buleleng	22 354,96	25 496,86	28 068,54
Denpasar	34 209,87	38 473,23	42 740,44
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp)			
Jembrana	33,43	37,83	41,36
Tabanan	34,77	39,47	42,80
Badung	61,84	67,14	73,25
Gianyar	36,51	40,50	44,47
Klungkung	32,47	36,50	40,29
Bangli	19,80	22,42	24,74
Karangasem	26,53	24,67	33,02
Buleleng	34,80	39,46	43,18
Denpasar	39,61	43,69	47,63

Sumber: BPS Provinsi Bali

18) Kepegawaian

Kompetensi PNS

- Jumlah PNS pada Perangkat Daerah belum proporsional disebabkan rekrutmen tidak diadakan lagi, pensiun dan mutasi ke daerah lain
- Masih kurangnya profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat

Hukuman Disiplin PNS

- Waskat masih kendor
- Sanksi/hukuman disiplin masih belum tegas

Kenaikan pangkat dan BOP

- Masih banyak administrasi yang terlambat diterima oleh pegawai

Permasalahan SDM non pegawai

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada Bab ini akan memaparkan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

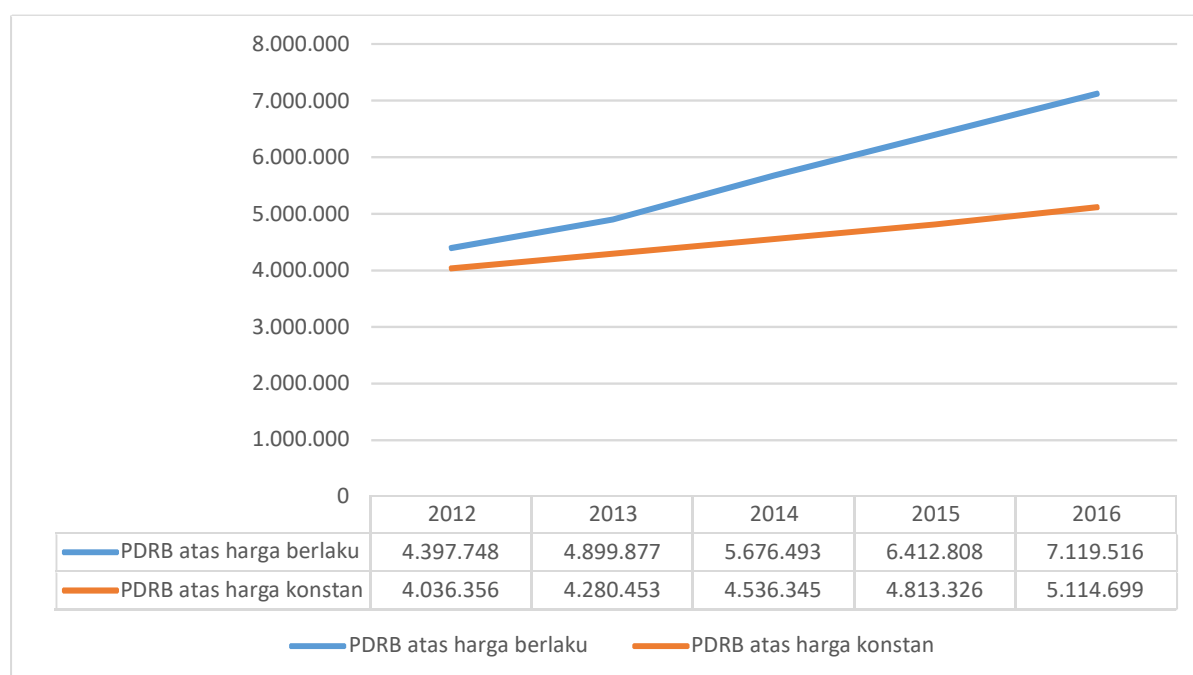
Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5-4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 809 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2019. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Bali berusaha mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 mencapai 7.119 miliar (atas dasar harga berlaku), meningkat 707 miliar dari tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2018

Gambar 3.1. PDRB Kab. Klungkung 2012-2016

Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di tahun 2016 nampaknya sektor pertanian masih mendominasi dengan nilai sebesar 23,11 persen, turun tipis dari tahun sebelumnya sebesar 23,59%. Meskipun mengalami penurunan, lapangan usaha pertanian masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di Klungkung. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Klungkung masih bercorak agraris.

Tabel 3.1

Persentase kontribusi Sektor Usaha dalam PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2016

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	25,19	24,38	23,91	23,39	23,59	23,11
2	Pertambangan dan Penggalian	4,85	5,15	5,2	5	4,29	3,90
3	Industri Pengolahan	8,95	8,95	9	9,1	9,31	9,30
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,1	0,08	0,07	0,08	0,10	0,12
5	Pengadaan Air	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20
6	Konstruksi	8,15	9,25	9,14	8,5	8,66	9,24
7	Perdagangan	8,12	7,81	7,74	7,84	8,03	7,96
8	Transportasi dan Pergudangan	2,8	2,78	2,92	3,08	3,08	3,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,08	10,84	11,82	13,15	13,37	13,76
10	Informasi dan Komunikasi	9,99	9,65	9,05	8,7	8,40	8,32
11	Jasa Keuangan	3,53	3,78	4,02	4,04	3,98	3,99
12	Real Estate	2,67	2,59	2,58	2,57	2,51	2,45
13	Jasa Perusahaan	1	0,97	0,97	0,96	0,98	0,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,28	5,71	5,15	5,12	5,16	5,11
15	Jasa Pendidikan	2,13	2,01	2,19	2,2	2,21	2,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,74	3,7	3,88	3,9	4,01	4,11
17	Jasa Lainnya	2,17	2,12	2,15	2,15	2,13	2,12
		100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2018

Sektor lain yang juga cukup besar kontribusinya yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan nilai sebesar 13,67 persen. Sektor ini menjadi penopang perekonomian Kabupaten Klungkung dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di kabupaten ini khususnya wilayah Kecamatan Nusa Penida. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi memberikan kontribusi yang hampir sepadan. Meskipun kontribusi industri pengolahan mengalami stagnasi yakni tetap pada kisaran 9,3% pada tahun 2015 dan 2016, sektor konstruksi mengalami peningkatan dari 8,66% tahun 2015 menjadi 9,24% tahun 2016. Peningkatan ini dapat mengkompensasi penurunan kontribusi sektor penggalian dan pertambangan yang secara konsisten mengalami tren penurunan sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, dari 5,20% menjadi 3,90%.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan, karena secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Sejak tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung tergolong sangat baik karena konsisten mengalami percepatan, dari 5,98% menjadi 6,11% pada tahun 2015 dan 6,26% pada tahun 2016. Apabila pertumbuhan ekonomi sebesar 6%/tahun ini diproyeksikan hingga tahun 2018, maka PDRB Kabupaten Klungkung berdasarkan harga konstan akan mencapai Rp. 5.750.000.000,-.

Salah satu indikator ekonomi yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Badan Pusat Statistik mengukur tingkat inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sejak tahun 2013 pengukuran inflasi secara keseluruhan di Provinsi Bali menggunakan pengukuran berdasarkan sampel di dua kota, yakni Kota Denpasar dan Singaraja. Oleh karena itu untuk melihat perkembangan harga pada 5 tahun terakhir di Provinsi Bali akan diwakili dengan inflasi Kota Denpasar dan Singaraja. Dengan demikian, mengingat kedekatan letak geografis Klungkung dengan Kota Denpasar, data tingkat inflasi di Kabupaten Klungkung dapat diwakili oleh tingkat inflasi Kota Denpasar. Laju inflasi di Bali secara umum dapat dikatakan

masih terkendali, yakni berada pada rentang inflasi yang ditargetkan yakni antara 3-5 persen sesuai data inflasi tahun 2014-2017 yang disajikan dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tingkat Inflasi Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2017 (%)

Bulan	2014			2015			2016			2017		
	Denpasar	Bali	Nasional	Denpasar	Bali	Nasional	Denpasar	Bali	Nasional	Denpasar	Bali*	Nasional
Jan	1.26	1.19	1.07	-0.08	-0.17	-0.24	0.49	0.57	0.51	1.39		0.97
Peb	0.37	0.37	0.26	-0.14	-0.04	-0.36	0.07	0.02	-0.09	0.42		0,23
Mar	0.32	0.29	0.08	0.14	0.17	0.17	0.06	0.17	0.19	0.02		0.05
Apr	0.13	0.13	-0.02	0.40	0.44	0.36	-0.20	-0.18	-0.45	0.07		0.09
Mei	0.31	0.49	0.16	0.39	0.35	0.50	0.11	0.10	0.24	0.11		0.39
Jun	-0.20	-0.27	0.43	0.14	0.08	0.54	0.39	0.35	0.66	-0.01		0.69
Jul	0.49	0.47	0.93	0.93	0.92	0.93	0.51	0.56	0.69	0.12		0.22
Ags	0.66	0.68	0.47	0.34	0.31	0.39	0.45	0.50	-0.02	0.26		-0.05
Sep	0.21	0.33	0.27	-0.22	-0.13	-0.05	0.26	0.23	0.22	-0.33		0.13
Okt	0.63	0.63	0.47	-0.56	-0.64	-0.08	-0.19	-0.21	0.14	-0.05		0.01
Nop	1.62	1.70	1.50	0.40	0.38	0.21	0.28	0.35	0.47	0.19		0.20
Des	1.99	2.13	2.46	0.95	1.05	0.96	0.69	0.68	0.42	1.07		0.71
Tahun Kalender	8.03	8.43	8.36	2.70	2.75	3.35	2.94	3.17	3.02	3.26		3.61

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2018

*data tidak tersedia

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan terus mengalami percepatan dari tahun 2014-2016, bukan berarti bahwa Kabupaten Klungkung telah mencapai kondisi idealnya. Sejumlah permasalahan struktural yang menghambat pencapaian pertumbuhan potensinya antara lain meliputi rentannya kecukupan pangan, energi, dan air, tidak berimbangannya pembangunan infrastruktur dan rendahnya produktivitas yang menyebabkan ketertinggalan, serta kesenjangan ekonomi yang meningkat.

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klungkung, tetapi persentasenya terus menurun setiap tahun karena faktor-faktor penghambat seperti alih fungsi lahan dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah sehingga bukan menjadi primadona tenaga kerja di Kabupaten Klungkung. Ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian tahun 2016 yang hanya tumbuh 0,88%. Laju pertumbuhan sektor pertanian yang rendah ini menjadi tantangan ke depan, karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat vital. Hal ini berkaitan dengan peran strategis sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan yang harus mampu menjamin ketahanan pangan bagi penduduk Kabupaten Klungkung. Pertumbuhan sektor pertanian harus diupayakan agar dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Cara yang bisa ditempuh adalah melalui revitalisasi sektor pertanian untuk mengembalikan produktivitas lahan dan meningkatkan keuntungan usaha tani.

Sektor yang mulai tumbuh sebagai penyumbang PDRB tertinggi adalah sektor akomodasi dan penyediaan makan minum serta sektor konstruksi yang juga berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung. Kedua sektor ini mengalami laju pertumbuhan PDRB tahun 2016 yang melebihi dua digit, yakni masing-masing sebesar 10,18% dan 14,96%. Hal ini mungkin berkaitan dengan geliat industri pariwisata di Kabupaten Klungkung dengan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan asing, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kunjungan wisatawan asing yang pada tahun 2014 baru mencapai 328.313 jiwa telah meningkat menjadi 378.894 jiwa pada tahun 2016, atau rata-rata meningkat sebesar 7,5%/tahun.

Meskipun pertumbuhan sektor pariwisata cukup menggembirakan, namun seluruh potensinya belum tergali secara optimal. Sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang menghambat akses dan waktu jelajah, terutama untuk objek wisata yang memiliki kekuatan daya tarik keindahan alam. Kabupaten Klungkung memiliki keunggulan komparatif dari sisi harga, daya tarik alam, dan dukungan pemerintah, namun memiliki kelemahan dari aspek infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti kesehatan dan higienitas, kemajuan teknologi, fasilitas wisata, dan kapasitas modal manusia. Selain itu, faktor keselamatan dan keamanan, juga masih menjadi pertimbangan wisatawan, sehingga mengurangi potensi wisata. Hal ini perlu dicermati, karena selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan langkah strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketepatan dalam memasang proyeksi keuangan akan mendorong terjadinya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kekurangcermatan dalam penentuan proyeksi keuangan terlihat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada Tahun 2015 dan 2016, terlihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam proyeksi keuangan yang dirancang dalam RKPD dengan yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan-perubahan pelaksanaan program kegiatan yang memicu adanya inkonsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek ekonomi daerah, dilaksanakan analisis dan proyeksi/target sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2019

NO	Uraian	REALISASI			ANGGARAN	RENCANA
		2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
I	Pendapatan Daerah	913.366.589.781,91	1.028.589.351.411,06	1.098.938.729.581,04	1.094.682.989.900,90	1.192.127.350.220,57
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.033.025.497,12	134.772.304.215,54	153.210.802.800,40	152.478.228.436,60	171.641.479.291,42
1	Hasil Pajak Daerah	34.353.934.155,48	43.744.803.049,05	53.457.736.428,00	44.515.847.409,39	53.238.750.258,86
2	Hasil Retribusi Daerah	21.776.640.809,00	22.095.170.145,00	22.978.426.232,00	25.751.986.159,00	24.680.046.076,64
3	Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.164.793.391,37	7.778.147.917,78	8.008.285.951,85	8.170.595.181,00	8.101.470.181,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56.737.657.141,27	61.154.183.103,71	68.766.354.188,55	74.039.799.687,21	85.621.212.774,92
B	Dana Perimbangan	542.012.559.933,00	699.514.521.030,00	653.544.538.710,00	680.647.356.100,00	763.659.332.158,00
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.233.392.933,00	19.439.467.106,00	20.319.281.603,00	21.784.414.100,00	17.961.885.106,00
2	Dana Alokasi Umum	484.541.151.000,00	539.855.201.000,00	530.371.681.000,00	530.371.681.000,00	543.263.172.403,00
3	Dana Alokasi Khusus	43.238.016.000,00	140.219.852.924,00	102.853.576.107,00	128.491.261.000,00	202.434.274.649,00
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	251.321.004.351,79	194.302.526.165,52	292.183.388.070,64	261.557.405.364,30	256.826.538.771,15
1	Pendapatan Hibah	30.000.728.638,00	24.629.750.000,00	26.622.520.000,00	27.736.320.000,00	27.680.000.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	115.063.230.713,79	117.416.482.165,52	95.060.572.410,80	86.364.063.904,90	87.145.146.296,75

N O	Uraian	REALISASI			ANGGARAN	RENCANA
		2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	105.854.045.000,00	34.259.137.000,00	95.883.195.000,00	78.016.021.000,00	78.026.499.000,00
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	403.000.000,00	17.997.157.000,00	74.617.100.659,84	69.441.000.459,40	63.974.893.474,40
II	Belanja Daerah	897.182.486.735,08	1.063.507.545.531,61	1.131.544.237.202,52	1.218.103.633.519,07	1.330.495.100.970,57
A	Belanja Tidak Langsung	568.015.111.495,67	580.407.200.384,62	631.599.480.913,94	631.536.090.368,47	677.247.357.251,28
1	Belanja Pegawai	439.638.758.105,00	459.677.256.429,00	438.931.646.799,00	475.157.150.918,47	521.080.945.802,78
2	Belanja Bunga					2.000.000.000,00
3	Belanja Hibah	46.321.917.155,00	9.828.070.711,00	69.930.684.464,25	42.082.278.608,00	41.256.015.453,50
4	Belanja Bantuan Sosial	1.511.500.000,00	8.033.660.860,00	10.918.955.500,00		-
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	8.354.294.304,00	6.650.220.662,58	7.827.433.456,00	7.028.000.000,00	7.791.881.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan	72.188.641.931,67	96.110.001.722,04	103.716.412.694,69	105.768.660.842,00	104.618.514.995,00
7	Belanja Tidak Terduga	-	107.990.000,00	274.348.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
B	Belanja Langsung	329.167.375.239,41	483.100.345.146,99	499.944.756.288,58	586.567.543.150,60	653.247.743.719,29
1	Belanja Pegawai	16.924.696.953,00	20.642.294.637,00	18.317.259.086,00	20.235.622.386,00	6.235.622.386,00
2	Belanja Barang Dan Jasa	192.295.468.301,41	247.608.533.822,75	292.831.195.405,12	394.557.980.305,65	434.013.778.336,22
3	Belanja Modal	119.947.209.985,00	214.849.516.687,24	188.796.301.797,46	171.773.940.458,95	212.998.342.997,08
	Surplus/(Defisit)	16.184.103.046,83	(34.918.194.120,55)	(32.605.507.621,48)	(123.420.643.618,17)	(138.367.750.750,00)
III	Pembiayaan Daerah					
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	142.277.226.812,93	155.556.329.859,76	115.919.135.739,21	131.420.643.618,17	141.567.750.750,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.802.226.812,93	154.861.329.859,76	115.644.135.739,21	130.670.643.618,17	120.817.750.750,00
2	Pinjaman Daerah					20.000.000.000,00
3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	475.000.000,00	695.000.000,00	275.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.600.000.000,00	4.994.000.000,00	7.325.000.000,00	8.000.000.000,00	3.200.000.000,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	4.994.000.000,00	7.325.000.000,00	8.000.000.000,00	3.200.000.000,00
C	Pembiayaan Netto	138.677.226.812,93	150.562.329.859,76	108.594.135.739,21	123.420.643.618,17	138.367.750.750,00
D	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	154.861.329.859,76	115.644.135.739,21	75.988.628.117,73	-	-
	Dana Tersedia	1.052.043.816.594,84	1.179.151.681.270,82	1.207.532.865.320,25	1.218.103.633.519,07	1.330.495.100.970,57

Sumber : SIMDA Kabupaten Klungkung, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Target pendapatan daerah tahun 2019 dirancang sebesar Rp 1,192 triliun lebih, lebih tinggi dari APBD Tahun Anggaran 2018 yang mencapai Rp 1,094 triliun lebih. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 171,641 milyar, meningkat dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018 yang dirancang sebesar Rp 152,478 milyar lebih. Proyeksi ini mempertimbangkan realisasi PAD yang terus meningkat dari Rp 120,033 milyar lebih pada tahun 2015 menjadi Rp. 153,21 milyar lebih pada tahun 2017.
- b. Target belanja dirancang sebesar Rp 1,330 triliun lebih dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 677,247 milyar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 653,247 milyar lebih.

Belanja tidak langsung dirancang untuk :

- Belanja pegawai sebesar Rp 521,08 milyar lebih yang peruntukannya adalah untuk belanja gaji pegawai, tunjangan pegawai, tunjangan kinerja, tambahan uang lauk dan lainnya.
 - Belanja hibah yaitu pemberian uang/barang kepada instansi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar 10 persen dari rancangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
 - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang sesuai dengan proyeksi transfer dana desa dan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun 2018.
- c. Bahwa anggaran dirancang defisit sebesar Rp 138,367 Milyar lebih yang dibiayai dari perkiraan Penerimaan Pembiayaan yaitu Silpa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 120,817 Milyar lebih, Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank sebesar 20 Miliar dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 750 juta. Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMD dan beberapa koperasi/LPD sebesar Rp. 3,2 Milyar.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah kabupaten Klungkung serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD,

- jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Proyeksi pendapatan dari DAU dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018, karena Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Proyeksi pendapatan DAK dan/atau DAK Tambahan pada tahun 2018 dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Penetapan proyeksi DAK diakibatkan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Proyeksi pendapatan Dana Desa Tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

- Proyeksi pendapatan Dana Transfer lainnya tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.
- Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Penetapan proyeksi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten Klungkung yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi

kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga

kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2015-2019

N O	Uraian	REALISASI			ANGGARAN	RENCANA
		2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
II	Belanja Daerah	897.182.486.735,08	1.063.507.545.531,61	1.131.544.237.202,52	1.218.103.633.519,07	1.330.495.100.970,57
A	Belanja Tidak Langsung	584.939.808.448,67	601.049.495.021,62	649.916.739.999,96	631.536.090.368,47	677.247.357.251,28
1	Belanja Pegawai	456.563.455.058,00	480.319.551.066,00	438.931.646.799,00	475.157.150.918,47	521.080.945.802,78
2	Belanja Bunga					2.000.000.000,00
3	Belanja Hibah	46.321.917.155,00	9.828.070.711,00	69.930.684.464,25	42.082.278.608,00	41.256.015.453,50
4	Belanja Bantuan Sosial	1.511.500.000,00	8.033.660.860,00	10.918.955.500,00		-
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	8.354.294.304,00	6.650.220.662,58	7.827.433.456,00	7.028.000.000,00	7.791.881.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan	72.188.641.931,67	96.110.001.722,04	103.716.412.694,69	105.768.660.842,00	104.618.514.995,00
7	Belanja Tidak Terduga	-	107.990.000,00	274.348.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
B	Belanja Langsung	312.242.678.286,41	462.458.050.509,99	499.944.756.288,58	586.567.543.150,60	653.247.743.719,29
1	Belanja Pegawai	16.924.696.953,00	20.642.294.637,00	18.317.259.086,00	20.235.622.386,00	6.235.622.386,00
2	Belanja Barang Dan Jasa	192.295.468.301,41	247.608.533.822,75	292.831.195.405,12	394.557.980.305,65	434.013.778.336,22
3	Belanja Modal	119.947.209.985,00	214.849.516.687,24	188.796.301.797,46	171.773.940.458,95	212.998.342.997,08

a. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2019 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

- memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2018.
 - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 - Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
 - Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 - Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b. Belanja Bunga
Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak mempunyai kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- c. Belanja Subsidi
Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya

belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/ lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak

- Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

f. Belanja Bantuan Keuangan

- Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
- Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal

dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

g. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2019 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja langsung dalam RKPD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

- b) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- c) Belanja Barang dan Jasa

- ❖ Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- ❖ Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- ❖ Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- ❖ Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- ❖ Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- ❖ Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- ❖ Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- ❖ Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- ❖ Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- ❖ Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom

- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.
- ❖ Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - ❖ Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan:
 - 1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
 - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau
 - 4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan
 - ❖ Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
 - ❖ Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d) Belanja Modal

- ❖ Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- ❖ Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- ❖ Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- ❖ Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2019, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan
- 4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- 5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2019, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).

- 4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.
Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
- 6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 – 2019

NO	Uraian	REALISASI			ANGGARAN	RENCANA
		2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
III	Pembiayaan Daerah					
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	142.277.226.812,93	155.556.329.859,76	115.919.135.739,21	131.420.643.618,17	141.567.750.750,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	141.802.226.812,93	154.861.329.859,76	115.644.135.739,21	130.670.643.618,17	120.817.750.750,00
2	Pinjaman Daerah					20.000.000.000,00
3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	475.000.000,00	695.000.000,00	275.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.600.000.000,00	4.994.000.000,00	7.325.000.000,00	8.000.000.000,00	3.200.000.000,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	4.994.000.000,00	7.325.000.000,00	8.000.000.000,00	3.200.000.000,00
C	Pembiayaan Netto	138.677.226.812,93	150.562.329.859,76	108.594.135.739,21	123.420.643.618,17	138.367.750.750,00
D	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeaan	154.861.329.859,76	115.644.135.739,21	75.988.628.117,73	(0,00)	-

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Klungkung pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Bali demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RKPD Tahun 2017, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang dapat menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Berikut ini merupakan keterkaitan hasil evaluasi dan isu strategis yang dapat dirumuskan.

Tabel 4.1
Keterkaitan Hasil Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Klungkung

No	Hasil Evaluasi	Isu Strategis
1	<p>Angka Harapan Hidup Kab. Klungkung tahun 2016 sebesar 70,28 tahun, masih di bawah angka Provinsi Bali sebesar 71,41 tahun</p> <p>Harapan Lama Sekolah Kab. Klungkung tahun 2016 sebesar 12,86 tahun, masih di bawah angka Provinsi Bali sebesar 13,04 tahun</p> <p>Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Klungkung sebesar 7,06 tahun, masih di bawah angka Provinsi Bali sebesar 8,36 tahun</p>	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung tahun 2016 sebesar 69,31, masih di bawah IPM Bali 73,65 (nomor 7 dari 9 kab/kota di Bali)
2	Kunjungan wisatawan tahun 2016 sebesar 378.894 orang, terbesar pengunjung kawasan Nusa Penida sebesar 265.545 orang (70%)	Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Klungkung sebagai penyumbang PDRB tertinggi kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3	<p>Kondisi jalan di Kec. Banjarangkan 66,91% baik, di Kec. Dawan 71,02% baik, di Kec. Klungkung 69,57% baik dan di Kec. Nusa Penida 58,39% baik</p> <p>Kondisi jembatan di Kec. Nusa Penida Cuma 88% baik, sedangkan di Kecamatan lain sudah seluruhnya baik</p>	Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2016 mencapai 63,66%, terendah ada di Kecamatan Nusa Penida sebesar 58,39%
4	<p>Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB tahun 2010 sebesar 26,33% menjadi 23,11% pada tahun 2016</p> <p>Produktivitas padi di Kec. Dawan tahun 2016 sebesar 63,22 Kw/Ha, di Kec. Klungkung sebesar 63,47 Kw/Ha, sedangkan di Kec. Banjarangkan Cuma sebesar 55,91 Kw/Ha</p>	Penurunan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB yang terus menurun dan produktivitas pertanian yang belum maksimal
5	<p>Hasil Evaluasi SAKIP belum mencapai target</p> <p>Persentase peringkat Daerah dengan SPIP masih di level 2</p>	Akuntabilitas Kinerja yang didukung reward punishment, pelayanan publik, SPIP, pengelolaan keuangan dan aset

Setelah mensintesiskan isu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2019, dengan hasil seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung tahun 2016 sebesar 69,31, masih di bawah IPM Bali 73,65	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Klungkung sebagai penyumbang PDRB tertinggi kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pariwisata dan Perdagangan yang didukung oleh Kebudayaan, Industri Kreatif dan Jasa Produktif
3	Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2016 mencapai 63,66%, terendah ada di Kecamatan Nusa Penida sebesar 58,39%	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan
4	Penurunan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB yang terus menurun dan produktivitas pertanian yang belum maksimal	Pemantapan Ketahanan Pangan melalui Pertanian yang Berkelanjutan
5	Akuntabilitas Kinerja yang didukung reward punishment, pelayanan publik, SPIP, pengelolaan keuangan dan aset	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Kesembilan prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2019 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan harapan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran beserta targetnya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	TARGET 2019	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung	Angka Harapan Hidup	70,36	70,82	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
					Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,08	7,3	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	13	
		Angka Melek Huruf	87,50	86	
3	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,61	6,00	Menurunkan Angka Kemiskinan
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,10	5,3	Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi
					Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi
5	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	82,77		Peningkatan Infrastruktur pada wilayah pengembangan strategis
					Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,20	62,00	Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	85,00	95,00	Meningkatkan Ketersediaan Pangan
					Meningkatkan ketahanan pangan daerah
8	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	71,00	75,00	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP	100	100	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Dalam penyusunan RKPD kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesenambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Berikut ini adalah prioritas-prioritas kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Bali, dan Kebijakan Kabupaten Klungkung.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional periode 2015-2019 memiliki visi "terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong". Visi besar ini dicapai melalui misi:

- M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
- M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
- M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional Indonesia difokuskan kedalam 9 agenda prioritas pembangunan yang disebut sebagai Nawa Cita. Prioritas pembangunan ini meliputi:

- C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
- C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
- C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" maka Prioritas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Angin dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan Bali yang menjadi landasan penentuan prioritas pembangunan Provinsi Bali yaitu :

1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal
2. Sinergitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal
3. Pengendalian dan evaluasi program belum optimal.

Berdasarkan isu strategis tersebut pada Provinsi Bali mengangkat tema “Memperkuat Sinergi dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan” . Dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2019 yaitu :

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif
4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Budaya
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) dan Provinsi Bali. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Bali dan Prioritas Nasional

Prioritas Daerah		Prioritas Provinsi Bali		Prioritas Nasional	
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	P1	Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar	N1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pariwisata dan Perdagangan yang didukung oleh Kebudayaan, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	P3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	N3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
3	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	P2	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	N2	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas
4	Pemantapan Ketahanan Pangan melalui Pertanian yang Berkelanjutan			N4	Pemantapan Ketahanan energi, Pangan dan Sumber Daya Air
5	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	P5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas	N5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
		P4	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Budaya		

4.2.4 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan ke-5 prioritas tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,3
			Angka Kelulusan	100
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 KH	34,86
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	7,67
			Angka Kematian Balita 0<59 bulan per 1.000 KH	8,37
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	82
		Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	6
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,15
			Indeks Keparahan Kemiskinan	0,03
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pariwisata dan Perdagangan yang didukung oleh Kebudayaan, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	14,2
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi	Kontribusi Kategori Perdagangan dalam PDRB	8
3	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	Peningkatan Infrastruktur pada wilayah pengembangan strategis	Cakupan layanan air minum (%)	100
			Cakupan layanan sanitasi	100
			Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	96
		Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang	Ketaatan pembangunan terhadap Perda Tata Ruang (%)	100
		Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	62
4	Pemantapan Ketahanan Pangan melalui Pertanian yang Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Produksi padi (ton)	32.027
			Produksi daging sapi (kg)	147.489
			Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	2.300
			Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	4.060
		Meningkatkan ketahanan pangan daerah	skor pola pangan harapan	95
5	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta ketentraman dan keteriban umum	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Keuangan WTP	100
			Pesentase Perangkat Daerah dengan SPIP Level 3	100
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	65
			Hasil Evaluasi SAKIP	75

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2017, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2019 yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase PAUD Terakreditasi A	12.00 persen	Rp11.974.430.350	Dinas Pendidikan
			APS 5-6 Tahun	72.00 %		
		Pembangunan Gedung Sekolah	% Jumlah Desa yang Sudah Memiliki TK Negeri	34.00 %	Rp7.573.219.750	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	100.00 %	Rp132.645.000	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Juara Lomba PAUD Minimal Pada Tingkat Provinsi	3.00 Juara	Rp2.568.739.500	Dinas Pendidikan
			Jumlah PAUD Siap Akreditasi	30.00 %		Dinas Pendidikan
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	% Serapan BOP PAUD (APBN)	66.00 %	Rp1.699.826.100	Dinas Pendidikan
		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	APS 7-12 Tahun	100.00 %	Rp25.780.498.306	Dinas Pendidikan
			APS 13-15 Tahun	100.00 %		
			Persentase SD Dengan Akreditasi A	35.00 %		
			Persentase SMP Dengan Akreditasi A	48.00 %		
			Nilai Rata-rata UASBN SD	75.00 Nilai		
			Nilai Rata-rata UN SMP	60.00 Nilai		
		Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah SD dan SMP Terpenuhi Kebutuhan Ruang Penunjang Sekolah (Perpustakaan/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah/Ruang UKS)	96.00 %	Rp17.647.603.890	Dinas Pendidikan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMP/MTs yang Memiliki Stu Set Peralatan Praktek IPA	6.00 Sekolah	Rp1.118.452.300	Dinas Pendidikan
			% Jumlah SD yang Memiliki Satu Set Peralatan Praktek (IPA, IPS, BAHASA INDONESIA, OLAHRAGA, MATEMATIKA)	22.06 %		
		Pengadaan Mebeluer Sekolah	% Jumlah SD/Mi yang telah memenuhi kebutuhan meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel dalam keadaan baik	50.00 %	Rp1.385.600.000	Dinas Pendidikan
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah SD dan SMP yang Menerapkan Kurikulum 2013	30.00 %	Rp15.379.600	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Serapan Dana BOS (APBD)	100.00 %	Rp495.000.000	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	% Jumlah SD Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap	49.26 %	Rp2.200.000.000	Dinas Pendidikan
% Jumlah SMP Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap	80.00 %					
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	Serapan Dana BOS (APBN)	100.00 %	Rp92.657.046	Dinas Pendidikan		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Jumlah Prestasi/Juara Lomba Minimal Pada Tingkat Provinsi/Nasional (FLS2N)	5.00 %	Rp505.498.600	Dinas Pendidikan
		Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Juara Lomba Sekolah Minimal Tingkat Propinsi dan Nasional	3.00 Juara/Piagam Penghargaan	Rp49.619.470	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Beasiswa Transisi	Angka Drop Out (DO) Siswa di Sekolah 0%	100.00 %	Rp2.049.524.200	Dinas Pendidikan
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Penyelenggaraan UN, UNBK dan UASBN	80.00 %	Rp221.163.200	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Kelulusan Pendidikan Keaksaraan	100.00 %	Rp738.934.500	Dinas Pendidikan
			Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100.00 %		
		Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Prestasi/Juara Lomba PTK PAUD Pada Tingkat Provinsi/Nasional	3.00 orang	Rp49.990.000	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	% Kelulusan Peserta Pendidikan Keaksaraan (KD, KF, KUM)	80.00 %	Rp164.264.000	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Angkatan Kerja Memiliki Kecakapan Wirausaha	50.00 Orang	Rp26.341.000	Dinas Pendidikan
			Lembaga Kursus Terakreditasi	2.00 Lembaga		
		Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	% Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Ijazah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	2.25 %	Rp390.926.500	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	% PAUD & DIKMAS Telah Menyusun Kurikulum	50.00 %	Rp47.119.000	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	% Lembaga Dikmas Siap Akreditasi	10.00 %	Rp16.137.000	Dinas Pendidikan
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan (Paket A, B, dan C)	100.00 %	Rp44.157.000	Dinas Pendidikan
			% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan	100.00 %		
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	61.37 %	Rp11.220.391.282	Dinas Pendidikan
		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik	71.75 %	Rp108.390.700	Dinas Pendidikan
		Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prestasi/ Juara PGKPSB, Widya Kusuma pada Tingkat Propinsi/ Nasional	5.00 Prestasi	Rp161.104.849	Dinas Pendidikan
		Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PTK	90.00 %	Rp10.782.941.000	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik	62.15 %	Rp51.001.996	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik	34.98 %	Rp116.952.737	Dinas Pendidikan
		PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	Serapan Anggaran BOS	100.00 %	Rp22.880.000.000	Dinas Pendidikan
		Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Serapan Dana BOS Sekolah	100.00 %	Rp22.880.000.000	Dinas Pendidikan
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM di Kabupaten	100.00 Persen	36.037.889.832,67	Dinas Kesehatan
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Terselenggaranya layanan, umu,jkn	100.00 Persen	289.774.697,67	Dinas Kesehatan
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase Terselenggaranya Layanan Umum Rs Pratama	100.00 %	707.200.000,00	Dinas Kesehatan
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	persentase Terselenggaranya layanan JKN RS Pratama	100.00 %	1.272.000.000,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan kinerja UKM Puskesmas	90.00 persen	916.869.000,00	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	universal coverage	100.00 Persen	32.852.046.135,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase status gizi baik	80.00 Persen	424.050.000,00	Dinas Kesehatan
		Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Persentase balita kurus yang mendapat PMT	85.00 Persen	424.050.000,00	Dinas Kesehatan
	cakupan D/S		89.00 persen			
	Cakupan asi eksklusif		50.00 persen			
	Persentase bumil kek yang mendapat PMT		85.00 persen			
		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase RT yang ber-PHBS	86.00 persen	851.011.600,00	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	persentase desa yang medklarasikan ODF	85.00 Persen	33.207.800,00	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan	persentase RT yang disuluh ber-PHBS	85.00 Persen	260.609.150,00	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan	Persentase sumber air yang dipantau memenuhi syarat kesehatan	100.00 persen	557.194.650,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insiden Rate DBD	51.00 /100.000 penduduk	1.456.772.900,00	Dinas Kesehatan
			tingkat kesembuhan TBC	90.00 persen		
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang dengan TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	1.257.510.700,00	Dinas Kesehatan
			persentase orang yang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan standar	100.00 persen		
		Peningkatan Imunisasi	Persentase desa UCI	100.00 Persen	10.387.200,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah	100.00 persen		
			cakupan pelayanan imunisasi wanita usia subur	100.00 persen		
			cakupan pelayanan imunisasi haji	100.00 persen		
		Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	capaian penanganan penyakit berpotensi wabah di bawah 24 jam	100.00 100	17.962.500,00	Dinas Kesehatan
			cakupan penemuan kasus AFP	2.00 100.000 penduduk		
		Kegiatan Penanggulangan Penyakit DBD	angka bebas jentik	95.00 Persen	170.912.500,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	cakupan puskesmas yang terakreditasi madya	100.00 Persen	1.241.210.792,00	Dinas Kesehatan
		Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	cakupan puskesmas yang memiliki SDM sesuai standar	80.00 Persen	583.640.392,00	Dinas Kesehatan
		Standarisasi Fasilitas Kesehatan	jumlah puskesmas yang siap diakreditasi	2.00 puskesmas	632.520.400,00	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Pelayanan Perizinan Kesehatan	Jumlah P-IRT yang memiliki ijin	20.00 serifikat	25.050.000,00	Dinas Kesehatan
			cakupan ijin tenaga kesehatan yang dikeluarkan sesuai dengan standar	100.00 persen		
		PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN LANSIA	Cakupan K4	100.00 Persen	318.619.200,00	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan bulin	100.00 persen		
			cakupan pelayanan bufas	100.00 persen		
			cakupan IMD	100.00 persen		
		Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi	Cakupan layanan ibu hamil miskin yang mendapat pembiayaan jampersal	100.00 Persen	173.119.200,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	persentase anak yang di SDIDTK	100.00 Persen	37.300.000,00	Dinas Kesehatan
			persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	100.00 persen		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Tersedianya data kesehatan lansia	9.00 puskesmas	108.200.000,00	Dinas Kesehatan
		PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)	cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar	100.00 Persen	752.489.070,00	Dinas Kesehatan
	cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar		100.00 persen			
	cakupan pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar		100.00 persen			
		Pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular	persentase pembinaan dan penemuan kasus ODGJ	3.00 kali	752.489.070,00	Dinas Kesehatan
	persentase penemuan kasus Hipertensi		30.00 persen			
	persentase penemuan kasus diabetes melitus		50.00 persen			
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	cakupan pelayanan rawat jalan	15.00 Persen	41.663.584.559,00	Dinas Kesehatan
	cakupan pelayanan rawat inap		1.50 persen			
	cakupan pelayanan rujukan		10.00 persen			
		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase terpenuhinya obat sesuai dengan standar	80.00 Persen	5.957.143.900,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan sarana fasilitas kesehatan	persentase terpenuhinya sarana kesehatan sesuai standar	80.00 Persen	13.677.740.172,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan	persentase terpenuhinya prasarana kesehatan sesuai dengan standar	80.00 Persen	13.951.440.000,00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kesehatan masyarakat	contac rate 15%	100.00 100	5.040.860.525,00	Dinas Kesehatan
	frekuensi kunjungan dokter spesialis ke puskesmas(4 spesialis dasar)		1.00 kali/tahun			
	cakupan puskesmas dengan UGD 24 jam		100.00 persen			
	cakupan pelayanan AGD kris 24 jam		100.00 persen			
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida	Cakupan rawat jalan	15.00 %	3.036.399.962,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan Rawat inap		1.50 %			
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka tidak adanya kejadian pasien jatuh	100.00 %	100.000.000,00	RSUD
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah bulan pelayanan pentipan, konservasi dan transportasi jenazah serta transportasi pulang pasien PBI peserta JKN asal Kab. Klungkung yang rawat inap di RSUD Kab. Klungkung	12.00 Bulan	100.000.000,00	RSUD
		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Cakupan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	80.00 %	64.155.924.245,00	RSUD
		Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Cakupan ketersediaan sarana bangunan gedung sesuai standar	80.00 %	20.484.480.000,00	RSUD
		Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan pemenuhan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar	80.00 %	39.372.937.745,00	RSUD
		Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah pemenuhan prasarana ambulans rumah sakit sesuai standar	2.00 unit	1.300.000.000,00	RSUD
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	Terpenuhinya kebutuhan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan	2.00 paket	2.998.506.500,00	RSUD
		PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Tidak ada kejadian tidak diduga dan kejadian potensi cedera	100.00 %	200.000.000,00	RSUD

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	80.00 %	200.000.000,00	RSUD
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Persentase pencapaian SPM BLUD RSUD	95.00 %	63.000.000.000,00	RSUD
			Indek Kepuasan Pelanggan	82.00 %		RSUD
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	100.00 %	63.000.000.000,00	RSUD
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM puskesmas Banjarangkan II	90.00 persen	2.004.491.200,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	68.400.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	1.364.491.200,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan II	90.00 %	571.600.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	90.00 persen	2.537.784.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	334.400.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	1.514.484.000,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	90.00 %	688.900.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	90.00 Persen	766.592.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida II	100.00 Persen	115.600.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan jkn dari dana JKN puskesmas Nusa Penida II	100.00 Persen	304.092.000,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	90.00 %	346.900.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	90.00 Persen	1.706.301.600,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	44.880.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	1.128.921.600,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	90.00 %	532.500.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan I	90.00 Persen	1.879.263.400,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan I	100.00 %	49.040.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Dawan I	100.00 %	1.302.623.400,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Dawan I	90.00 %	527.600.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan II	90.00 Persen	1.581.352.600,00	Puskesmas

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan II	100.00 %	42.320.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Dawan II	100.00 %	1.026.132.600,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Dawan II	90.00 %	512.900.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I	90.00 Persen	2.641.098.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung I	100.00 %	126.600.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Klungkung I	100.00 %	1.927.998.000,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I	90.00 %	586.500.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II	90.00 Persen	2.024.154.800,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung II	100.00 %	51.400.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Klungkung II	100.00 %	1.430.254.800,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II	90.00 %	542.500.000,00	Puskesmas
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	90.00 Persen	2.356.176.800,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	84.480.000,00	Puskesmas
		Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	1.695.196.800,00	Puskesmas
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	90.00 %	576.500.000,00	Puskesmas
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah yang layak huni	95.50 persen	1.546.295.100,00	Dinas PUPRPKP
		Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah penanganan rumah layak huni	3.00 dok	1.546.295.100,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase pelayanan sanitasi	95.50 persen	280.630.152,00	Dinas PUPRPKP
		Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah penanganan prasarana dan sarana sanitasi	6.00 unit	280.630.152,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Persentase penanganan kawasan kumuh	75.50 persen	63.271.500,00	Dinas PUPRPKP
		Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah penanganan kawasan kumuh	5.00 kws	63.271.500,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan Disabilitas Yang Mandiri	20.00 Persen	1.242.377.030,00	DinsosP3A
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100.00 persen	437.927.200,00	DinsosP3A
			jumlah disabilitas yang diberikan keterampilan kerja	20.00 orang		
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial	Cakupan Mr. X yang ditangani	100.00 Persen	198.863.000,00	DinsosP3A

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	100.00 Persen		
			cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100.00 Persen		
			cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100.00 Persen		
			cakupan rehabilitasi sosial dasar ODGJ	50.00 Persen		
			cakupan ke tunaan ditangani	100.00 Persen		
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan KPN yang mendapat rastra	85.00 Persen	605.586.830,00	DinsosP3A
			Cakupan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100.00 Persen		
			Cakupan KPN yang memiliki JKN/KIS	85.00 Persen		
		PROGRAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Cakupan Keluarga Rawan Mandiri Ekonomi	15.00 Persen	7.434.892.100,00	DinsosP3A
		Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Keluarga Rawan Yang Menindaklanjuti Pembinaan	60.00 Persen	7.434.892.100,00	DinsosP3A
			Jumlah RTS Memiliki Rumah Layak Huni	90.00 Persen		
			Cakupan Lansia Miskin Tertangani	40.00 Persen		
		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disediakan	60.00 %	970.851.000,00	Disperinaker
		Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan bekerja	40.00 %	144.397.000,00	Disperinaker
		Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya	persentase tenaga Kerja yang terserap dengan pola padat karya	20.00 orang	738.267.000,00	Disperinaker
		Pengendalian Tenaga Kerja Asing	Persentase TKA dengan TKI pendamping	100.00 %	56.548.000,00	Disperinaker
		Kegiatan Pembentukan Wirausaha Mandiri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui wirausaha mandiri	100.00 %	31.639.000,00	Disperinaker
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan peraturan perundang-undangan	70.00 %	139.253.000,00	Disperinaker
		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian kasus perselisihan internal perusahaan	100.00 %	36.205.000,00	Disperinaker
		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang ikut program perlindungan dan penjaminan sosial tenaga kerja	20.00 perusahaan	51.075.000,00	Disperinaker
		Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan	12.00 pp	51.973.000,00	Disperinaker
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih memperoleh pekerjaan	60.00 %	206.014.000,00	Disperinaker
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	80.00 %		
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	140.00 orang	152.345.000,00	Disperinaker

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi	persentase tenaga kerja yang disertifikasi	17.00 orang	53.669.000,00	Disperinaker
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi Usaha Kecil	6.50 persen	526.890.550,00	DiskopUKMdag
		Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Persentase UMKM yang mendapatkan bantuan modal	75.30 persen	334.842.800,00	DiskopUKMdag
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Persentase tumbuhnya kelompok usaha	1.80 persen	115.620.250,00	DiskopUKMdag
		Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan pendaftaran HAKI bagi UMKM	2.00 unit	76.427.500,00	DiskopUKMdag
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pariwisata dan Perdagangan yang didukung oleh Kebudayaan, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang lestari (ditetapkan dan lestari)	6.00 Situs	329.351.104,00	Disbudpora
		Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	2.00 Situs	43.576.800,00	Disbudpora
		Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Tingkat kunjungan museum	41000.00 Orang	36.358.000,00	Disbudpora
		Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipelihara	2.00 Situs	140.471.152,00	Disbudpora
		Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	Cakupan layanan Museum Semarang	100.00 Persen	108.945.152,00	Disbudpora
		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase rekonstruksi kesenian yang hampir punah	100.00 %	3.791.446.279,00	Disbudpora
			Jumlah kesenian yang lestari (seni ritual, seni kontemporer)	350.00 Jumlah		
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah musik yang lestari	3.00 Bulan	1.127.997.875,00	Disbudpora
		Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Sekaa santi yang aktif	226.00 kelompok	181.860.152,00	Disbudpora
			Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	185.00 Pucuk		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Event Kesenian Yang Tampil	22.00 Jenis	2.481.588.252,00	Disbudpora
		PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah budaya tak benda yang lestari (termasuk tradisi, desa pekraman, subak, sekaa teruna)	467.00 Kelompok	4.282.210.020,00	Disbudpora
		Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jumlah tradisi yang lestari	2.00 Jenis	2.000.702.020,00	Disbudpora
		Membangun kerjasama~ penggalan dan inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah	Buku Sejarah Baru	1.00 Paket	20.002.500,00	Disbudpora
		Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah sekaa teruna memiliki potensi lokal	261.00 Kelompok	2.261.505.500,00	Disbudpora
			Cakupan desa pekraman yang memiliki awig	100.00 Persen		
			Cakupan subak sawah dan subak abian yang memiliki awig	100.00 Jumlah		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	12.00 persen	4.435.533.208,00	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Promosi Pariwisata Dengan Pihak Ketiga	2.00 Kesepakatan	655.612.700,00	Dinas Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Dokumen Analisa Pasar	2.00 Dokumen	197.914.700,00	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Presentase Pengunjung Yang Berpotensi Berkunjung	60.00 Persen	3.582.005.808,00	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Berkualitas	100.00 Persen	2.047.959.650,00	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Cakupan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Sesuai Standar	100.00 Persen	911.283.650,00	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Cakupan Sarana dan Prasarana Pariwisata Sesuai Standar	100.00 %	1.040.805.250,00	Dinas Pariwisata
		Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi	Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai Standar	100.00 %	95.870.750,00	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataaan Yang Ditindaklanjuti	100.00 persen	880.756.552,00	Dinas Pariwisata
		Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah Database Pariwisata	1.00 buku	119.003.250,00	Dinas Pariwisata
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataaan yang Termonitor	100.00 %	68.972.750,00	Dinas Pariwisata
		Kegiatan Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kepariwisataaan yang Diterbitkan	30.00 Dokumen Rekomendasi Pariwisata	692.780.552,00	Dinas Pariwisata
		PROGRAM SUMBER DAYA PARIWISATA	Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru	1.00 Destinasi Desa Wisata	766.876.175,00	Dinas Pariwisata
		Standarisasi Pariwisata	Cakupan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Sesuai Standar	100.00 %	98.101.375,00	Dinas Pariwisata
		Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat	4.00 Kemitraan	332.247.900,00	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru yang Ditata	1.00 Destinasi Ditata	336.526.900,00	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase industri unggulan daerah yang dikembangkan	30.00 %	434.702.500,00	Disperinaker
		Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah kemitraan pengembangan industri kecil menengah	30.00 kemitraan	319.832.500,00	Disperinaker
		Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Jumlah Industri Rumah Tangga baru	120.00 industri	96.895.000,00	Disperinaker
		Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana pengembangan industri	2.00 %	17.975.000,00	Disperinaker
3	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	7.80 persen	7.341.650.000,00	Dinas PUPRPKP
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase dan trotoar yang dibangun/ditingkatkan	3000.00 m'	7.341.650.000,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai	91.00 persen	179.252.000,00	Dinas PUPRPKP
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Jumlah pendapatan dari sewa alat-alat berat	148000000.00 Rupiah	38.823.500,00	Dinas PUPRPKP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai	18.00 persen	75.017.500,00	Dinas PUPRPKP
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah jenis informasi jasa konstruksi yang tersedia di kabupaten klungkung/Jumlah dokumen hasil evaluasi jakon	7.00 Jenis	65.411.000,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	44.50 persen	6.865.104.345,00	Dinas PUPRPKP
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan peningktn/pemb jaringan irigasi	4.00 dokumen	483.485.510,00	Dinas PUPRPKP
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	200.00 m'	1.563.784.500,00	Dinas PUPRPKP
		Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi	1000.00 m	4.740.029.335,00	Dinas PUPRPKP
		Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	2.00 dokumen	77.805.000,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Persentase penduduk berakses air bersih	86.00 persen	5.584.452.956,00	Dinas PUPRPKP
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat	100.00 jiwa (SR)	5.584.452.956,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	52.60 persen	2.469.084.000,00	Dinas PUPRPKP
			Persentase tebing sungai dalam kondisi baik	1.65 persen		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai	50.00 m'	216.283.000,00	Dinas PUPRPKP
		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Panjang pemb/peningktn tanggul pengaman pantai	100.00 m	2.092.095.000,00	Dinas PUPRPKP
		Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan tanggul sungai	1.00 dokumen	14.196.000,00	Dinas PUPRPKP
		Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan pemb tanggul pengaman pantai	1.00 dokumen	146.510.000,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Jumlah penduduk yang berakses infrastruktur	4500.00 jiwa	727.707.500,00	Dinas PUPRPKP
		Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Panjang pemb/peningkatan jalan setapak, senderan dan jml pemb gedung	700.00 m	727.707.500,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Ketersediaan informasi penataan ruang	16.00 kawasan	379.772.250,00	Dinas PUPRPKP
		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan tata ruang	12.00 dok	379.772.250,00	Dinas PUPRPKP
		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan	97.60 persen	240.031.750,00	Dinas PUPRPKP
		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tata ruang	3.00 dok	139.675.750,00	Dinas PUPRPKP
		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	6.00 dok	100.356.000,00	Dinas PUPRPKP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi sedang-baik	81.00 persen	Rp80.875.218.843	Dinas PUPRKP
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi sedang-baik	100.00 persen		
		Kegiatan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan	10.00 dokumen	3.928.667.825,00	Dinas PUPRKP
		Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	3.00 km	Rp41.953.318.018	Dinas PUPRKP
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan Pemb/Peningkatan jembatan di kab. klungkung	1.00 buku	284.727.000,00	Dinas PUPRKP
		Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun dan dipelihara	5.00 20m	3.542.788.000,00	Dinas PUPRKP
		Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan	10.00 dokumen	3.545.777.000,00	Dinas PUPRKP
		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	10.00 km	26.910.754.000,00	Dinas PUPRKP
		Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jembatan	3.00 dokumen	88.641.000,00	Dinas PUPRKP
		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	3.00 unit	620.546.000,00	Dinas PUPRKP
		PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	presentase konflik tanah yang difasilitasi	57.00 %	181.178.400,00	DLHP
		Penataan dan Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat	laporan subyek dan obyek tanah ulayat	20.00 persen	80.778.400,00	DLHP
		Koordinasi dan sosialisasi Pendataan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan	laporan subyek dan obyek tanah pada kawasan yang berdampak pembangunan	57.00 persen	100.400.000,00	DLHP
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	peningkatan kualitas lingkungan hidup	100.00 persen	7.662.028.464,00	DLHP
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	sarana dan prasarana pengolahan sampah yang siap pakai	44.00 persen	3.715.805.608,00	DLHP
		Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Persentase desa dengan TPST aktif	45.00 persen	179.715.000,00	DLHP
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	cakupan pelayanan lingkungan hidup dan pertanahan di nusa penida	90.00 persen	1.846.887.576,00	DLHP
		Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan	Koordinasi dan penyelenggaraan lomba pengelolaan lingkungan hidup	100.00 persen	311.887.672,00	DLHP
			Meningkatnya target retribusi persampahan/kebersihan	10.00 persen		
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Pendapatan dari retribusi IPLT	35.00 persen	137.992.608,00	DLHP
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA	Jumlah TPA yang representatif	35.00 persen	1.469.740.000,00	DLHP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	59.00 persen	329.586.386,00	DLHP
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang taat peraturan lingkungan hidup (amdal)	35.00 persen	110.229.000,00	DLHP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80.00 persen	70.959.000,00	DLHP
		Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Persentase kajian lingkungan yang di terbitkan	80.00 persen	148.398.386,00	DLHP
		PROGRAM PENANGANAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN MELALUI PENANGANAN SAMPAH, LIMBAH DAN RTH	Persentase pengaduan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan	90.00 persen	7.189.228.092,00	DLHP
		Kegiatan Pemeliharaan RTH	Persentase kawasan RTH perkotaan yang terpelihara	65.00 persen	2.138.237.500,00	DLHP
		Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase sampah kawasan yang diangkut	90.00 persen	3.702.318.472,00	DLHP
		Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Persentase sampah kawasan perkotaan yang diolah	100.00 persen	1.348.672.120,00	DLHP
			Persentase sampah B3 kawasan perkotaan yang ditangani	35.00 persen		
		PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Cakupan pemenuhan prasarana transportasi Perhubungan sesuai standar (%)	100.00 %	1.729.645.116,00	Dishub
		Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan (%)	100.00 Persen	16.826.900,00	Dishub
		Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana Perhubungan sesuai standar yang dibangun (%)	100.00 Persen	235.989.000,00	Dishub
		Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Cakupan prasarana Perhubungan yang beroperasi sesuai standar (%)	100.00 persen	354.257.720,00	Dishub
		Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Cakupan operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang beroperasi sesuai Standar (%)	100.00 Persen	960.458.246,00	Dishub
		Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Prasarana Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	100.00 Persen	162.113.250,00	Dishub
		POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Load faktor angkutan darat (%)	70.00 persen	11.326.334.706,00	Dishub
			Load faktor angkutan laut (%)	83.37 persen		
		Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase angkutan tidak dalam trayek yang laik operasi (%)	100.00 persen	56.505.000,00	Dishub
			Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan tidak dalam trayek (%)	0.00 persen		
		Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	100.00 Persen	218.675.064,00	Dishub
			Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	100.00 persen		
		Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi (%)	100.00 Persen	11.051.154.642,00	Dishub
			Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan dalam trayek (%)	0.00 persen		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Titik jenuh Lalu lintas (%)	50.00 Persen	8.362.341.000,00	Dishub
		Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan pemenuhan rekayasa Lalu-lintas (%)	100.00 Persen	579.751.800,00	Dishub
		Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	100.00 Persen	22.524.000,00	Dishub
		Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas	Cakupan perencanaan pengaturan lalu-lintas terpenuhi (%)	100.00 Persen	7.760.065.200,00	Dishub

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Penurunan angka kecelakaan (%)	30.00 Persen	498.366.100,00	Dishub
		Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	1.00 inovasi	240.831.400,00	Dishub
		Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan (kerjasama)	3.00 Persen	94.215.500,00	Dishub
		Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi hasil audit keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	100.00 Persen	163.319.200,00	Dishub
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah Kunjungan Kewebsite Desa dan OPD	900.00 orang	1.651.654.000,00	Diskominfo
		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Rekomendasi Ijin Telekomunikasi yang di Terbitkan	95.00 Persentase	55.024.000,00	Diskominfo
		Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	jumlah Aplikasi OPD yan Terintegrasi	39.00 Jumlah	1.496.492.000,00	Diskominfo
			Julah OPD yang Menayangkan RUP Tepat waktu melalui LPSE	39.00 Jumlah		
		Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya Web OPD / Desa dan Kelurahan	90.00 Jumlah WEB	100.138.000,00	Diskominfo
		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Jumlah Informasi yang disebarakan	3.00 media	623.808.000,00	Diskominfo
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	jumlah Informasi pembangunan yang di sebarakan Melalui mobil keliling	55.00 Jumlah	139.447.000,00	Diskominfo
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan yang disebarakan Melalui Baliho,Spanduk, Selebaran dan Sejenisnya	12000.00 Jumlah	154.015.000,00	Diskominfo
		Penyebarluasan Informasi-informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah Informasi Program Pembangunan yang di Sebarakan Melalui Baliho, Selebaran dan Vidiotron	12.00 Lembaran	330.346.000,00	Diskominfo
4	Pemantapan Ketahanan Pangan melalui Pertanian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Tercapainya peningkatan ketahanan pangan	1.00 Laporan	Rp1.309.902.400	Dinas PPK
		Kegiatan Peningkatan Sistem Distribusi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Diketahuinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Klungkung	6.00 desa/sampel	233.050.000,00	Dinas PPK
		Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan	Diketahuinya situasi Ketersediaan pangan	12.00 laporan	Rp530.970.000	Dinas PPK
		Kegiatan Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	- Terpantaunya sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Terpantaunya daerah rawan pangan - Meningkatnya mutu dan keamanan pangan segar - Terlaksananya desa Mandiri pangan	4.00 KWT	Rp545.882.400	Dinas PPK
		PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Nilai Tambah Produksi Perikanan	6000.00 Rupiah/Kg	683.697.500,00	Dinas PPK
		Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produk olahan yang dipasarkan	4710.00 ton	424.176.500,00	Dinas PPK

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Pembinaan usaha kecil dan permodalan perikanan	Jumlah Pembinaan kelompok/pelaku usaha mikro penerima bantuan modal	2.00 kelompok	49.229.000,00	Dinas PPK
		Pembinaan mutu pengolahan hasil perikanan	Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro pengolahan dan pemasaran	2.00 kelompok	210.292.000,00	Dinas PPK
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	cakupan bina kelompok nelayan dan kelompok budidaya serta sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	1.809.406.292,00	Dinas PPK
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Pembinaan kelompok Budidaya	7.00 kelompok	128.259.300,00	Dinas PPK
		Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Tepat Guna	tersedianya sarana dan prasarana perikanan	6.00 unit	1.345.662.000,00	Dinas PPK
		Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Pembinaan kelompok nelayan/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)	79.00 kelompok	335.484.992,00	Dinas PPK
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian	4900.00 Ha	1.121.909.646,12	Dinas Pertanian
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen	6.00 kelompok	204.671.146,12	Dinas Pertanian
			Jumlah kelompok pengolahan hasil pertanian yang mandiri	1.00 Kelompok		
		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Persentase penerapan teknologi budidaya tanaman	1.20 %	448.931.000,00	Dinas Pertanian
		Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	Luas serangan OPT yang ditangani	825.00 Ha	468.307.500,00	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Indeks pertanaman (IP) padi	130.00 %	2.759.800.986,09	Dinas Pertanian
		Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Persentase terlayannya permohonan kajian	100.00 %	184.069.456,32	Dinas Pertanian
		Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	85.00 %	210.330.146,12	Dinas Pertanian
			Persentase penyaluran AUTP	60.00 %		
		Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	0.00 meter	2.190.601.883,65	Dinas Pertanian
			Jalan Usaha Tani (JUT)	750.00 meter		
			Embung	2.00 unit		
			Jalan produksi	1000.00 meter		
			Balai Subak	0.00 Unit		
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	70.00 %	174.799.500,00	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Angka kesakitan ternak	10.00 %	857.966.146,12	Dinas Pertanian
		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah hewan/ternak yang memperoleh pelayanan kesehatan	19380.00 ekor	502.340.146,12	Dinas Pertanian
		Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik	Jumlah hewan/ternak yang dimusnahkan	2000.00 ekor	355.626.000,00	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	Persentase peningkatan populasi sapi	0.50 %	1.325.674.127,36	Dinas Pertanian
		Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Persentase sapi dengan BCS (Body Condition Score) Lebih sama dengan 2	80.00 %	230.640.000,00	Dinas Pertanian
		Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah sapi betina yang menggunakan teknologi inseminasi buatan (IB)	10200.00 ekor	960.068.981,24	Dinas Pertanian
		Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok ternak yang mandiri	5.00 kelompok	134.965.146,12	Dinas Pertanian

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	Persentase rekomendasi pembangunan pertanian yang ditindaklanjuti	90.00 %	147.828.500,00	Dinas Pertanian
		Monitoring~ Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	12.00 dokumen	104.711.000,00	Dinas Pertanian
		Penyusunan Database Pertanian	Dokumen data statistik pertanian tersedia tepat waktu	2.00 dokumen	43.117.500,00	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH (AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL)	Persentase daging layak konsumsi yang beredar di pasaran	100.00 %	97.303.500,00	Dinas Pertanian
		Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	Cakupan daging yang diambil sampelnya	80.00 %	97.303.500,00	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN	Jumlah penyuluh dan kelompok tani berprestasi di tingkat provinsi	1.00 kandidat	2.490.552.542,24	Dinas Pertanian
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Persentase penyuluh berprestasi	71.00 %	2.322.035.542,24	Dinas Pertanian
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Persentase kelompok tani berprestasi	71.00 %	168.517.000,00	Dinas Pertanian
5	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta ketentraman dan keteriban umum	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	500.00 Peraturan	1.073.301.800,00	Setda
			Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.	100.00 persen		
		Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	100.00 Persen	310.785.000,00	Setda
			Persentase capaian RAD HAM.	100.00 Pseren		
		Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah tepat waktu	100.00 persen	385.754.800,00	Setda
		Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Sadar hukum	100.00 persen	376.762.000,00	Setda
			Persentase Desa Pakraman memiliki awig -awig tertulis yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 109, data awal 66)	100.00 Persen		
		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Cakupan Penegakkan Perda	100.00 %	274.942.129,00	Satpol PP
		Kegiatan Penyelidikan dan Penindakan	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak	50.00 pelanggar	175.185.129,00	Satpol PP
		Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelanggaran Perda berulang yang diselesaikan	100.00 %	48.218.000,00	Satpol PP
		Pendataan dan Deteksi Dini	Laporan Pelanggaran Perda	12.00 laporan	51.539.000,00	Satpol PP
		PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	150.00 pelanggar	1.870.096.400,00	Satpol PP
		Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Patroli Pol PP 3 x dalam 24 jam	100.00 %	1.695.747.900,00	Satpol PP
		Kegiatan Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Layanan Pengamanan Pimpinan dan tamu - tamu daerah	100.00 %	152.161.500,00	Satpol PP
		Pembinaan dan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota	100.00 %	22.187.000,00	Satpol PP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Cakupan Desa dengan Linmas Aktif	31.00 %	236.141.000,00	Satpol PP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat	Jumlah Linmas yang dilatih	124.00 orang	92.284.000,00	Satpol PP
		Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas	Laporan Pelaksanaan Tugas Linmas	20.00 Laporan	79.355.500,00	Satpol PP
		Penggerakan Satuan Linmas untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban	Cakupan layanan Linmas desa/kelurahan	100.00 %	64.501.500,00	Satpol PP
		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota	100.00 %	2.344.773.400,00	Satpol PP
		Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa yang disiapkan untuk melaksanakan mitigasi kebakaran	3.00 desa/kelurahan	67.868.000,00	Satpol PP
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai	Jumlah Peralatan kebakaran yang siap pakai	9.00 unit	1.279.180.000,00	Satpol PP
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15.00 menit	997.725.400,00	Satpol PP
		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Persentase korban terdampak yang dipulihkan	100.00 %	293.200.000,00	BPBD
		Verifikasi Kejadian Bencana	Kajian dan verifikasi kejadian bencana	12.00 laporan	81.390.000,00	BPBD
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi hasil kajian	1.00 laporan	211.810.000,00	BPBD
		PROGRAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA	Indeks kapasitas	20.00 %	1.243.831.900,00	BPBD
		Pemetaan dan Pengkajian Resiko Bencana Desa	Jumlah desa yang dilakukan pemetaan dan pengkajian resiko bencana	1.00 desa	129.935.000,00	BPBD
		Mitigasi Ancaman Bencana	Jumlah desa yang melakukan mitigasi	20.00 desa	866.307.000,00	BPBD
		Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM yang dilatih kebencanaan	40.00 orang	247.589.900,00	BPBD
		PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase penanganan kedaruratan sesuai standar respon time	100.00 %	2.062.170.000,00	BPBD
		Pelayanan Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Kedaruratan Bencana	100.00 %	1.986.530.000,00	BPBD
		Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat	Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik darurat bencana	100.00 %	75.640.000,00	BPBD
		PROGRAM PENATAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasda	320.00 indeks	886.795.000,00	Setda
		Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	100.00 persen	621.650.000,00	Setda
		Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang paham tentang perundang-undangan pengadaan barang/ jasa pemerintah	60.00 orang	190.000.000,00	Setda
		Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	60.00 Laporan	75.145.000,00	Setda
		PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	80.00 Nilai	437.110.500,00	Setda
		Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Buku Anjab dan ABK Tersedia Tepat Waktu	2.00 Dokumen	194.374.500,00	Setda
			Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	1.00 Dokumen		
		Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	1.00 Dokumen	162.675.500,00	Setda
			Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	6.00 Unit Kerja		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu	5.00 Aksi		
		Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM	Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu	1.00 Dokumen	80.060.500,00	Setda
		PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	80.00 Persen	75.478.700,00	Setda
		Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	1.00 Dokumen	75.478.700,00	Setda
		PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	90.00 Persen	479.031.400,00	Setda
		Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	2.00 Dokumen	204.128.200,00	Setda
		Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	1.00 Dokumen	274.903.200,00	Setda
		PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86.00 Persen	1.548.701.900,00	Inspektorat
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	12.00 LHP	156.701.900,00	Inspektorat
		Kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	2.00 Laporan	234.901.000,00	Inspektorat
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	21.00 Laporan	556.468.000,00	Inspektorat
		Pelaksanaan Audit Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	3.00 Laporan	62.068.900,00	Inspektorat
		Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjutan Temuan Hasil Pengawasan	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan	12.00 Laporan	538.562.100,00	Inspektorat
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penurunan jumlah temuan yang berulang-ulang	10.00 Persen	257.809.000,00	Inspektorat
		Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Terselamatkan Tepat Waktu	7.00 Dokumen	31.625.800,00	Inspektorat
		Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Reviu PA/PBJ Terselamatkan Tepat Waktu	4.00 Dokumen	20.425.800,00	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan Terselamatkan Tepat Waktu	2.00 Dokumen	31.035.800,00	Inspektorat
		Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Road Map Reformasi Birokrasi	Laporan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	40.00 Laporan	87.935.800,00	Inspektorat
		Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Presentase Perangkat Daerah Dengan Maturitas SPIP Level 3	100.00 Persen	86.785.800,00	Inspektorat
		PROGRAM PENINGKATAN PELEMBAGAAN PEMERINTAH YANG BERSIH	Persentase Capaian RAD PPK	100.00 persen	639.995.300,00	Inspektorat
		Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi	Laporan RAD PPK	4.00 laporan	382.927.900,00	Inspektorat
		Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah PD Dengan Predikat Menuju WBK/WBBM	1.00 PD	83.139.500,00	Inspektorat
		Pencegahan dan Penanggulangan Pungutan Liar	laporan Pelaksanaan Kegiatan UP Pungli Tersedia Tepat Waktu	12.00 Laporan	173.927.900,00	Inspektorat

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENDATAAN, PENATAAN DAN PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN DAERAH	Jumlah ketetapan pendapatan daerah	2189.00 ketetapan	640.375.000,00	BPKPD
		Pendataan Pendapatan Daerah	Jumlah data obyek pendapatan daerah yang terdata	196.00 Berkas	145.420.000,00	BPKPD
		Pengolahan Data Pendapatan Daerah	Jumlah berkas pajak yang memenuhi ketentuan untuk diproses	1993.00 Berkas	165.981.000,00	BPKPD
		Penetapan Pendapatan Daerah	Jumlah data obyek pendapatan daerah yang diverifikasi	2189.00 berkas	328.974.000,00	BPKPD
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan penyusunan laporan pengelolaan BMD	100.00 %	715.045.000,00	BPKPD
		Perencanaan dan Penggunaan BMD	Tersedianya buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	5.00 buku	90.290.000,00	BPKPD
		Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Persentase persetujuan pemusnahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen	268.025.000,00	BPKPD
		Penatausahaan dan Pengendalian BMD	Buku daftar aset tetap	5.00 buku	356.730.000,00	BPKPD
	Buku daftar aset lainnya		5.00 buku			
	Buku induk inventaris		5.00 buku			
	Laporan persediaan dan laporan aset ektrakontabel		1.00 laporan			
Total Nominal Pagu Prioritas Pembangunan					Rp501.571.614.934	

Berdasarkan tabel program/kegiatan prioritas pembangunan diatas kemudian disusun program/kegiatan perangkat daerah untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas tersebut berdasarkan urusan pemerintah daerah beserta target keluaran dan kebutuhan pendanaanya seperti tabel 5.2.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran dari perencanaan pembangunan daerah yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian strategis pada Tahun 2019.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,3
			Angka Kelulusan	100
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 KH	34,86
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	7,67
			Angka Kematian Balita 0<59 bulan per 1.000 KH	8,37
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	82
		Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	6
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,15			
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,03			
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pariwisata dan Perdagangan yang didukung oleh Kebudayaan, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	14,2
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi	Kontribusi Kategori Perdagangan dalam PDRB	8
3	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	Peningkatan Infrastruktur pada wilayah pengembangan strategis	Cakupan layanan air minum (%)	100
			Cakupan layanan sanitasi	100
			Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	96
		Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang	Ketaatan pembangunan terhadap Perda Tata Ruang (%)	100
		Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	62
4	Pemantapan Ketahanan Pangan melalui Pertanian yang Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Produksi padi (ton)	32.027
			Produksi daging sapi (kg)	147.489
			Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	2.300
			Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	4.060
		Meningkatkan ketahanan pangan daerah	skor pola pangan harapan	95

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
5	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta ketentraman dan keteriban umum	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Keuangan WTP	100
			Pesentase Perangkat Daerah dengan SPIP Level 3	100
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	65
			Hasil Evaluasi SAKIP	75

6.2. Indikator Kinerja Kunci

Untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
a	Pendidikan			
1	Persentase PAUD Terakreditasi A	9.36 persen	12.00	Dinas Pendidikan
2	APS 5-6 Tahun	69.81 %	72.00.00	
3	APS 7-12 Tahun	100.54 %	100.00.00	Dinas Pendidikan
4	APS 13-15 Tahun	115.57 %	100.00.00	
5	Persentase SD Dengan Akreditasi A	34.30 %	35.00.00	
6	Persentase SMP Dengan Akreditasi A	47.80 %	48.00.00	
7	Nilai Rata-rata UASBN SD	72.38 Nilai	75.00.00	
8	Nilai Rata-rata UN SMP	60.00 Nilai	60.00.00	
9	Persentase Kelulusan Pendidikan Keaksaraan	100.00 %	100.00.00	Dinas Pendidikan
10	Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100.00 %	100.00.00	
11	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	58.52 %	61.37.00	Dinas Pendidikan
12	Persentase Sekolah Dengan Penilaian Baik	50.00 persen	60.00.00	Dinas Pendidikan
b	Kesehatan			
1	Capaian Kinerja UKM di Kabupaten	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kesehatan
2	Persentase status gizi baik	80.00 Persen	80.00.00	Dinas Kesehatan
3	Persentase RT yang ber-PHBS	84.00 persen	86.00.00	Dinas Kesehatan
4	Insiden Rate DBD	51.00 /100.000 penduduk	51.00.00	Dinas Kesehatan
5	tingkat kesembuhan TBC	85.00 persen	90.00.00	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
6	cakupan puskesmas yang terakreditasi madya	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kesehatan
7	Persentase lansia yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kesehatan
8	tidak adanya KLB yang disebabkan oleh diare dna keracunan makanan	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kesehatan
9	Cakupan K4	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kesehatan
10	cakupan pelayanan bulin	100.00 persen	100.00.00	
11	cakupan pelayanan bufas	98.00 persen	100.00.00	
12	cakupan IMD	100.00 persen	100.00.00	
13	cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kesehatan
14	cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	100.00 persen	100.00.00	
15	cakupan pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar	100.00 persen	100.00.00	
16	cakupan pelayanan rawat jalan	15.00 Persen	15.00	Dinas Kesehatan
17	cakupan pelayanan rawat inap	1.50 persen	01.50	
18	cakupan pelayanan rujukan	10.00 persen	10.00	
19	cakupan ijin yang dikeluarkan sesuai dengan standar	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kesehatan
20	capaian kinerja UKM di Kabupaten	90.00 Persen	90.00.00	Dinas Kesehatan
21	Persentase status gizi baik	80.00 %	81.00.00	Dinas Kesehatan
22	persentase RT yang ber-PHBS	84.00 Persen	85.00.00	Dinas Kesehatan
23	insiden rate DBD	444.00 /100.000 penduduk	444.00.00	Dinas Kesehatan
24	Tingkat kesembuhan TBC	85.00 %	85.00.00	
25	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	0.00 puskesmas	04.00	Dinas Kesehatan
26	persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00 %	100.00.00	Dinas Kesehatan
27	Persentase Tidak adanya KLB yang disebabkan oleh diare dan atau keracunan makanan	100.00 %	100.00.00	Dinas Kesehatan
28	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100.00 %	100.00.00	Dinas Kesehatan
29	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100.00 %	100.00.00	
30	cakupan pelayanan bufas	98.00 %	98.00.00	
31	Cakupan IMD	100.00 %	100.00.00	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
32	persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00 %	100.00.00	Dinas Kesehatan
33	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00 %	100.00.00	
34	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00 %	100.00.00	
35	cakupan pelayanan rawat jalan	15.00 %	15.00	Dinas Kesehatan
36	cakupan pelayanan rawat inap	1.50 %	01.50	
37	cakupan pelayanan rujukan	10.00 %	10.00	
38	cakupan ijin yang dikeluarkan sesuai dengan standar	100.00 %	100.00.00	Dinas Kesehatan
39	Angka tidak adanya kejadian pasien jatuh	100.00 %	100.00.00	Rumah Sakit Umum Daerah
40	SIMRS terintegrasi sesuai standar	100.00 %	100.00.00	Rumah Sakit Umum Daerah
41	Cakupan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	80.00 %	80.00.00	Rumah Sakit Umum Daerah
42	Tidak ada kejadian tidak diduga dan kejadian potensi cedera	100.00 %	100.00.00	Rumah Sakit Umum Daerah
43	Persentase pencapaian SPM BLUD RSUD	95.00 %	95.00.00	Rumah Sakit Umum Daerah
44	Indek Kepuasan Pelanggan	82.00 %	82.00.00	
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	7.75 persen	0,347222222	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai	90.91 persen	91.00.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	44.13 persen	44.50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase penduduk berakses air bersih	85.00 persen	86.00.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	52.46 persen	52.60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Persentase tebing sungai dalam kondisi baik	1.60 persen	0,086805556	
7	Jumlah penduduk yang berakses infrastruktur	4000.00 jiwa	4500.00.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
8	Ketersediaan informasi penataan ruang	15.00 kawasan	16.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan	97.56 persen	97.60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi sedang-baik	80.00 persen	81.00.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi sedang-baik	100.00 persen	100.00.00	
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase rumah yang layak huni	95.00 persen	95.50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase pelayanan sanitasi	95.00 persen	95.50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase penanganan kawasan kumuh	75.00 persen	75.50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
e	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
1	Cakupan Penegakkan Perda	0.00 %	100.00.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	0.00 pelanggar	162.00.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Cakupan Desa dengan Linmas Aktif	0.00 %	31.00.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota	0.00 %	100.00.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	0.00 %	100.00.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase korban terdampak yang dipulihkan	0.00 %	100.00.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Indeks kapasitas	0.00 %	20.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Persentase penanganan kedaruratan sesuai standar respon time	0.00 %	100.00.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
f	Sosial			
1	Cakupan Disabilitas Yang Mandiri	0.00 Persen	20.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
2	Cakupan Keluarga Rawan Mandiri Ekonomi	0.00 Persen	15.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Cakupan Partisipasi Pilar-Pilar Kebangsaan	0.00 Persen	75.00.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Cakupan Partisipasi Masyarakat Terhadap Nilai Kepahlawanan	0.00 Persen	75.00.00	
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
a	Ketenagakerjaan			
1	Persentase tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disediakan	50.00 %	60.00.00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan peraturan perundang-undangan	70.00 %	70.00.00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	Persentase tenaga kerja yang dilatih memperoleh pekerjaan	60.00 %	60.00.00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	80.00 %	80.00.00	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Kasus KDRT	0.00 Persen	05.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Kecamatan Layak Anak	0.00 Kecamatan	03.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Desa dan Kelurahan Layak Anak	0.00 Desa/Layak	05.00	
2	Pangan			
1	Tercapainya peningkatan ketahanan pangan	0.00 Laporan	01.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Pertanahan			
1	presentase konflik tanah yang difasilitasi	46.00 %	57.00.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	Lingkungan Hidup			
1	cakupan pelayanan sampah di kabupaten	100.00 persen	100.00.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	cakupan pelayanan penanganan limbah cair	100.00 persen	100.00.00	
3	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	59.00 persen	59.00.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	Persentase pengaduan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan	90.00 persen	90.00.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	Administrasi Kependudukan dan Sipil			
1	Menurunnya Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	90.00 Persen	90.00.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90.00 persen	90.00.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	persentase lembaga ekonomi yang sehat dan berkembang	82.60 persen	83.00.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.00 persen	100.00.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase desa dengan capaian kinerja 100%	100.00 persen	100.00.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	persentase potensi yang dikerjasamakan	3.39 persen	05.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	menurunnya unmetneed	7.00 persen	05.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	menurunnya ASFR	44.00 persen	50.00.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Perhubungan			
1	Cakupan pemenuhan prasarana transportasi Perhubungan sesuai standar (%)	100.00 %	100.00.00	Dinas Perhubungan
2	Load faktor angkutan darat (%)	60.00 persen	70.00.00	Dinas Perhubungan
3	Load faktor angkutan laut (%)	75.00 persen	83.37.00	
4	Titik jenuh Lalu lintas (%)	60.00 Persen	50.00.00	Dinas Perhubungan
5	Penurunan angka kecelakaan (%)	25.00 Persen	30.00.00	Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
2	Komunikasi dan Informatika			
1	Jumlah Kunjungan Kewebsite Desa dan OPD	800.00 orang	900.00.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Jumlah Informasi yang disebarakan	3.00 media	03.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi Usaha Kecil	6.23 persen	06.50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya menjadi sehat	30.00 unit	05.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3	Persentase peningkatan SHU Koperasi	15.00 persen	17.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2	Penanaman Modal			
1	Cakupan Pengaduan yang diselesaikan	100.00 %	100.00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal / 100%	100.00 %	100.00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Penanaman Modal di Kab. Klungkung / 100 %	100.00 %	100.00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Cakupan investasi yang direalisasikan	100.00 %	100.00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan A sesuai SOP tercapai 100 %	93.41 %	100.00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Bidang B Sesuai SOP / 100%	93.41 %	100.00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi/ Nasional	20.00 Orang	20.00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Jumlah Atlet / Seniman yang Mendapatkan Medali Emas	20.00 Orang	20.00	
2	Statistik			
1	Jumlah Data Statistik Sektor yang Tersedia Tepat waktu	2.00 Buku	03.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persandian			

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Presentase Kebocoran data rahasia	5.00 Presen	05.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Kebudayaan			
1	Jumlah cagar budaya yang lestari (ditetapkan dan lestari)	6.00 Situs	06.00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Persentase rekontruksi kesenian yang hampir punah	100.00 %	100.00.00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Jumlah kesenian yang lestari (seni ritual, seni kontemporer)	350.00 Jumlah	350.00.00	
4	Jumlah budaya tak benda yang lestari (termasuk tradisi, desa pekraman, subak, sekaa teruna)	467.00 Kelompok	467.00.00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Perpustakaan			
1	Persentase kepuasan pemustaka	100.00 Persen	100.00.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Kearsipan			
1	Jumlah lembaga perangkat daerah yang memenuhi standar kearsipan	3.00 Instansi	02.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Urusan Pilihan			
3	Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai Tambah Produksi Perikanan	0.00 Rupiah/Kg	6000.00.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	cakupan bina kelompok nelayan dan kelompok budidaya serta sarana dan prasarana aparatur	0.00 %	100.00.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	Pariwisata			
1	Presentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0.00 persen	12.00	Dinas Pariwisata
2	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Berkualitas	0.00 Persen	100.00.00	Dinas Pariwisata
3	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisata Yang Ditindaklanjuti	0.00 persen	100.00.00	Dinas Pariwisata
4	Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru	0.00 Destinasi Desa Wisata	01.00	Dinas Pariwisata
3	Pertanian			
1	Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian	4500.00 Ha	4900.00.00	Dinas Pertanian
2	Indeks pertanaman (IP)	125.00 %	130.00.00	Dinas Pertanian
3	Angka kesakitan ternak	10.00 %	10.00	Dinas Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	Persentase peningkatan populasi sapi	0.50 %	00.50	Dinas Pertanian
5	Persentase rekomendasi pembangunan pertanian yang ditindaklanjuti	90.00 %	90.00.00	Dinas Pertanian
6	Persentase daging layak konsumsi yang beredar di pasaran	100.00 %	100.00.00	Dinas Pertanian
7	Jumlah penyuluh dan kelompok tani berprestasi di tingkat provinsi	1.00 kandidat	01.00	Dinas Pertanian
3	Kehutanan			
1	Lahan kritis	34.00 Ha	34.00.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
3	Energi dan Sumberdaya Mineral			
1	Cakupan Instalasi Energi Terbarukan Dalam Kondisi Baik	0.00 %	25.00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Perdagangan			
1	Persentase bapakting tersedia cukup di pasar Klungkung	100.00 persen	100.00.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3	Industri			
1	Persentase industri unggulan daerah yang dikembangkan	30.00 %	30.00.00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	Ketransmigrasian			
1	Persentase kuota transmigrasi yang terpenuhi	60.00 %	60.00.00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Persentase hak transmigran yang terpenuhi	100.00 %	100.00.00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
4	Administrasi Pemerintahan			
1	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	0.00 100	100.00.00	Bagian Pemerintahan
2	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	3067.00 Peraturan	500.00.00	Bagian Hukum dan HAM
3	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.	100.00 persen	100.00.00	
4	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	90.00 %	100.00.00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
5	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	100.00 Persen	100.00.00	Bagian Hubungan Masyarakat
6	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	100.00 persen	100.00.00	Bagian Perekonomian
7	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	100.00 persen	100.00.00	Bagian Administrasi Pembangunan
8	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan	100.00 persen	100.00.00	Bagian Administrasi Pembangunan
9	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasda	315.00 indeks	320.00.00	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
10	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	100.00 persen	100.00.00	Bagian Umum
11	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	25.00 Nilai	80.00.00	Bagian Organisasi
12	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	80.00 Persen	80.00.00	Bagian Organisasi
13	Persentase terpenuhinya skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	90.00 Persen	90.00.00	Bagian Organisasi
14	Terpublikasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00 %	100.00.00	Sekretariat DPRD
15	Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan	100.00 %	100.00.00	Sekretariat DPRD
16	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas	100.00 %	100.00.00	Sekretariat DPRD
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	50.00 persen	75.00.00	Kecamatan Klungkung
18	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100.00 Persen	100.00.00	Kecamatan Banjarangkan
19	Penurunan Potensi Konflik SARA	25.00 Persen	27.00.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20	% Pemilih Wanita Menggunakan Hak Pilih	70.00 Persen	72.00.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
21	% Konflik Sosial Yang Dtangani	85.00 Persen	87.00.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
22	Penurunan Kasus Narkoba Pada Generasi Muda	30.00 Persen	32.00.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4	Pengawasan			
1	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	0.00 Persen	86.00.00	Inspektorat

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
2	Penurunan jumlah temuan yang berulang-ulang	0.00 Persen	10.00	Inspektorat
3	Persentase Capaian RAD PPK	100.00 persen	100.00.00	Inspektorat
4	Perencanaan			
1	Rata-rata capaian kinerja output prioritas daerah koordinasi bidang pemerintah dan pembangunan manusia	90.00 persen	90.00.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	Rata-rata capaian kinerja output kegiatan prioritas daerah koordinasi bidang PSDAIK	90.00 persen	90.00.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00 %	100.00.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4	Rata-rata Capaian Output Kegiatan RKPD	90.00 %	90.00.00	
4	Keuangan			
1	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD	0.00 %	100.00.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	0.00 %	100.00.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	Jumlah ketetapan pendapatan daerah	0.00 ketetapan	2189.00.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4	Persentase realisasi penerimaan PAD	0.00 %	100.00.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD	0.00 %	100.00.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6	Persentase ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	0.00 %	100.00.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4	Kepegawaian			
1	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu (Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/ Karsu, Karpeg, dan Berita Acara Sumpah PNS)	0.00 100	100.00.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase Penurunan Kesalahan Data Pegawai	0.00 %	100.00.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin	0.00 %	100.00.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Persentase Penurunan Kesalahan data pegawai	0.00 %	100.00.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA 2018	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Persentase Kelulusan Diklat	0.00 %	100.00.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase rekomendasi kelitbangan yang dilaksanakan	75.00 persen	80.00.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

BAB VII. PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			Rp440.292.037.298			0,00		
1 01		PENDIDIKAN			Rp77.777.580.080			0,00		
DINAS PENDIDIKAN										
1 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan			90.00 persen			Rp5.183.325.642	92.00 persen	0,00
1 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan		62.00 %			Rp510.706.763 -	64.00 %	0,00
1 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Pendidikan		82.00 %			Rp4.404.184.000		
1 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Dokumen yang Telah Terklasifikasi Dengan Sesuai			80.00 %				80.00 %	
1 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Sekolah dengan Laporan Aset Kategori Baik	Dinas Pendidikan		84.00 Sekolah			Rp17.730.000 -	88.00 Sekolah	0,00
1 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan tersedia Tepat Waktu	Dinas Pendidikan		7.00 Dokumen			Rp58.233.059 -	7.00 Dokumen	0,00
1 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Dinas Pendidikan		12.00 Laporan			Rp103.394.210 -	12.00 Laporan	0,00
1 01 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Dinas Pendidikan		12.00 laporan			Rp89.077.610 -	12.00 laporan	0,00
1 01 15		Persentase PAUD Terakreditasi A			12.00 persen				15.00 persen	
1 01 15		APS 5-6 Tahun			72.00 %			Rp11.974.430.350	75.00 %	0,00
1 01 15 01	Pembangunan Gedung Sekolah	% Jumlah Desa yang Sudah Memiliki TK Negeri	Dinas Pendidikan		34.00 %			Rp7.573.219.750 -	48.00 %	0,00
1 01 15 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Dinas Pendidikan		100.00 %			Rp132.645.000 -	100.00 %	0,00
1 01 15 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Juara Lomba PAUD Minimal Pada Tingkat Provinsi			3.00 Juara				3.00 Juara	
1 01 15 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD Siap Akreditasi	Dinas Pendidikan		30.00 %			Rp2.568.739.500 -	35.00 %	0,00
1 01 16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	% Serapan BOP PAUD (APBN)	Dinas Pendidikan		66.00 %			Rp1.699.826.100 -	68.00 %	0,00
1 01 16		APS 7-12 Tahun			100.00 %				100.00 %	
1 01 16		APS 13-15 Tahun			100.00 %				100.00 %	
1 01 16		Persentase SD Dengan Akreditasi A			35.00 %				36.00 %	
1 01 16		Persentase SMP Dengan Akreditasi A			48.00 %				49.00 %	
1 01 16		Nilai Rata-rata UASBN SD			75.00 Nilai				75.00 Nilai	
1 01 16		Nilai Rata-rata UN SMP			60.00 Nilai			Rp25.780.498.306	60.00 Nilai	0,00
1 01 16 01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah SD dan SMP Terpenuhi Kebutuhan Ruang Penunjang Sekolah (Perpustakaan/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah/Ruang UKS)	Dinas Pendidikan		96.00 %			Rp17.647.603.890 -	96.00 %	0,00
1 01 16 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMP/MTs yang Memiliki Stu Set Peralatan Praktek IPA			6.00 Sekolah				7.00 Sekolah	
1 01 16 19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	% Jumlah SD yang Memiliki Satu Set Peralatan Praktek (IPA, IPS, BAHASA INDONESIA, OLAHKRAGA, MATEMATIKA)	Dinas Pendidikan		22.06 %			Rp1.118.452.300 -	33.09 %	0,00
1 01 16 59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	% Jumlah SD/Mi yang telah memenuhi kebutuhan meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel dalam keadaan baik	Dinas Pendidikan		50.00 %			Rp1.385.600.000 -	55.00 %	0,00
1 01 16 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah SD dan SMP yang Menerapkan Kurikulum 2013	Dinas Pendidikan		30.00 %			Rp15.379.600 -	30.00 %	0,00
1 01 16 65	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Serapan Dana BOS (APBD)	Dinas Pendidikan		100.00 %			Rp495.000.000 -	100.00 %	0,00
1 01 16 69	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	% Jumlah SD Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap			49.26 %				60.00 %	
1 01 16 69		% Jumlah SMP Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap	Dinas Pendidikan		80.00 %			Rp2.200.000.000 -	80.00 %	0,00
1 01 16 69		Serapan Dana BOS (APBN)	Dinas Pendidikan		100.00 %			Rp92.657.046 -	100.00 %	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1 01 16 70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Jumlah Prestasi/Juara Lomba Minimal Pada Tingkat Provinsi/Nasional (FLS2N)	Dinas Pendidikan	5.00 %	Rp505.498.600 -		5.00 %	0,00
1 01 16 73	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Juara Lomba Sekolah Minimal Tingkat Propinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan	3.00 Juara/Piagam Penghargaan	Rp49.619.470 -		3.00 Juara/Piagam Penghargaan	0,00
1 01 16 75	Penyediaan Beasiswa Transisi	Angka Drop Out (DO) Siswa di Sekolah 0%	Dinas Pendidikan	100.00 %	Rp2.049.524.200 -		100.00 %	0,00
1 01 16 78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Penyelenggaraan UN, UNBK dan UASBN	Dinas Pendidikan	80.00 %	Rp221.163.200 -		90.00 %	0,00
1 01 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Kelulusan Pendidikan Keaksaraan		100.00 %			100.00 %	0,00
		Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan		100.00 %	Rp738.934.500		100.00 %	0,00
1 01 18 01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Prestasi/Juara Lomba PTK PAUD Pada Tingkat Provinsi/Nasional	Dinas Pendidikan	3.00 orang	Rp49.990.000 -		3.00 orang	0,00
1 01 18 04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	% Kelulusan Peserta Pendidikan Keaksaraan (KD, KF, KUM)	Dinas Pendidikan	80.00 %	Rp164.264.000 -		85.00 %	0,00
1 01 18 05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Angkatan Kerja Memiliki Kecakapan Wirausaha		50.00 Orang			50.00 Orang	
		Lembaga Kursus Terakreditasi	Dinas Pendidikan	2.00 Lembaga	Rp26.341.000 -		2.00 Lembaga	0,00
1 01 18 08	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	% Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Ijazah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	2.25 %	Rp390.926.500 -		3.00 %	0,00
1 01 18 09	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	% PAUD & DIKMAS Telah Menyusun Kurikulum	Dinas Pendidikan	50.00 %	Rp47.119.000 -		50.00 %	0,00
1 01 18 10	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	% Lembaga Dikmas Siap Akreditasi	Dinas Pendidikan	10.00 %	Rp16.137.000 -		20.00 %	0,00
1 01 18 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan (Paket A, B, dan C)		100.00 %			100.00 %	
		% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan	Dinas Pendidikan	100.00 %	Rp44.157.000 -		100.00 %	0,00
1 01 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik		61.37 %	Rp11.220.391.282		63.59 %	0,00
1 01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Persentase Guru SD Bersertifikat Pedidik	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	71.75 %	Rp108.390.700 -		73.22 %	0,00
1 01 20 02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prestasi/ Juara PGKPSB, WIdya Kusuma pada Tingkat Propinsi/ Nasional	Dinas Pendidikan	5.00 Prestasi	Rp161.104.849 -		5.00 Prestasi	0,00
1 01 20 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PTK	Dinas Pendidikan	90.00 %	Rp10.782.941.000 -		92.00 %	0,00
1 01 20 07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan	62.15 %	Rp51.001.996 -		64.92 %	0,00
1 01 20 09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan	34.98 %	Rp116.952.737 -		38.16 %	0,00
1 01 25	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	Serapan Anggaran BOS		100.00 %	Rp22.880.000.000		100.00 %	0,00
1 01 25 01	Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Serapan Dana BOS Sekolah		100.00 %	Rp22.880.000.000 -		100.00 %	0,00
1 02	KESEHATAN				Rp231.339.464.249			0,00
DINAS KESEHATAN								
1 02 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	persentase rata-rata capaian out put kegiatan		90.00 Persen	3.269.197.665,36		90.00 Persen	0,00
1 02 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	dinas kesehatan	100.00 Persen	1.818.110.294,00 -		100.00 Persen	0,00
1 02 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	persentase capaian disiplin aparatur	dinas kesehatan	100.00 Persen	1.233.074.769,36 -		100.00 Persen	0,00
1 02 09 03	Pengelolaan Kearsipan	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	dinas kesehatan	100.00 Persen	15.256.300,00 -	-----	100.00 Persen	0,00
1 02 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 Persen	9.935.000,00 -	-----	100.00 Persen	0,00
1 02 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	persentase laporan kinerja terkirim tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 Persen	126.375.000,00 -	-----	100.00 Persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 Persen	66.446.302,00	-----	100.00 Persen	0,00
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM di Kabupaten		100.00 Persen	36.037.889.832,67		100.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Terselenggaranya layanan, umu,jkn	dinas kesehatan	100.00 Persen	289.774.697,67	-	100.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase Terselenggaranya Layanan Umum Rs Pratama	Nusa Penida	100.00 %	707.200.000,00	-	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	persentase Terselenggaranya layanan JKN RS Pratama	Nusa Penida	100.00 %	1.272.000.000,00	-----	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan kinerja UKM Puskesmas	dinas kesehatan	90.00 persen	916.869.000,00	-----	91.00 persen	0,00
1 02 16 15	Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	universal coverage	dinas kesehatan	100.00 Persen	32.852.046.135,00	-----	100.00 Persen	0,00
1 02 20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase status gizi baik		80.00 Persen	424.050.000,00		80.00 Persen	0,00
		Persentase balita kurus yang mendapat PMT		85.00 Persen			90.00 Persen	
		cakupan D/S		89.00 persen			90.00 persen	
		Cakupan asi eksklusif		50.00 persen			55.00 persen	
1 02 20 02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Persentase bumil kek yang mendapat PMT	dinas kesehatan	85.00 persen	424.050.000,00	-----	90.00 persen	0,00
1 02 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase RT yang ber-PHBS		86.00 persen	851.011.600,00		87.00 persen	0,00
1 02 21 03	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	persentase desa yang medklarasikan ODF	dinas kesehatan	85.00 Persen	33.207.800,00	-----	86.00 Persen	0,00
1 02 21 05	Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan	persentase RT yang disuluh ber-PHBS	dinas kesehatan	85.00 Persen	260.609.150,00	-	86.00 Persen	0,00
1 02 21 06	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan	Persentase sumber air yang dipantau memenuhi syarat kesehatan		100.00 persen	557.194.650,00	-	100.00 persen	0,00
1 02 22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insiden Rate DBD		51.00 /100.000 penduduk			51.00 /100.000 penduduk	
		tingkat kesembuhan TBC		90.00 persen	1.456.772.900,00		90.00 persen	0,00
		Persentase orang dengan TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100.00 Persen			100.00 Persen	
1 02 22 05	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	persentase orang yang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan standar	dinas kesehatan	100.00 persen	1.257.510.700,00	-	100.00 persen	0,00
		Persentase desa UCI		100.00 Persen			100.00 Persen	
		Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah		100.00 persen			100.00 persen	
		cakupan pelayanan imunisasi wanita usia subur		100.00 persen			100.00 persen	
1 02 22 08	Peningkatan Imunisasi	cakupan pelayanan imunisasi haji	dinas kesehatan	100.00 persen	10.387.200,00	----	100.00 persen	0,00
		capaian penanganan penyakit berpotensi wabah di bawah 24 jam		100.00 100 2.00 100.000 penduduk			100.00 100 2.00 100.000 penduduk	
1 02 22 09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	cakupan penemuan kasus AFP	dinas kesehatan		17.962.500,00	-----		0,00
1 02 22 12	Kegiatan Penanggulangan Penyakit DBD	angka bebas jentik	dinas kesehatan	95.00 Persen	170.912.500,00	---	95.00 Persen	0,00
1 02 23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	cakupan puskesmas yang terakreditasi madya		100.00 Persen	1.241.210.792,00		100.00 Persen	0,00
1 02 23 02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	cakupan puskesmas yang memiliki SDM sesuai standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	583.640.392,00	-----	80.00 Persen	0,00
1 02 23 07	Standarisasi Fasilitas Kesehatan	jumlah puskesmas yang siap diakreditasi	dinas kesehatan	2.00 puskesmas	632.520.400,00	-----	0.00 puskesmas	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
1	02	23	08	Kegiatan Pelayanan Perizinan Kesehatan	Jumlah P-IRT yang memiliki ijin cakupan ijin tenaga kesehatan yang dikeluarkan sesuai dengan standar		20.00 serifikat 100.00 persen	25.050.000,00		20.00 serifikat 100.00 persen	0,00	
1	02	32		PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN LANSIA	Cakupan K4 cakupan pelayanan bulin cakupan pelayanan bufas cakupan IMD		100.00 Persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen	318.619.200,00		100.00 Persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen	0,00	
1	02	32	04	Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi	Cakupan layanan ibu hamil miskin yang mendapat pembiayaan jampersal	dinas kesehatan	100.00 Persen	173.119.200,00		100.00 Persen	0,00	
1	02	32	05	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	persentase anak yang di SDIDTK persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 Persen 100.00 persen	37.300.000,00	-----	100.00 Persen 100.00 persen	0,00	
1	02	32	06	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Tersedianya data kesehatan lansia	dinas kesehatan	9.00 puskesmas	108.200.000,00		9.00 puskesmas	0,00	
1	02	35		PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)	cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar cakupan pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar		100.00 Persen 100.00 persen 100.00 persen	752.489.070,00		100.00 Persen 100.00 persen 100.00 persen	0,00	
1	02	35	01	Pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular	persentase pembinaan dan penemuan kasus ODGJ persentase penemuan kasus Hipertensi persentase penemuan kasus diabetes melitus	dinas kesehatan	3.00 kali 30.00 persen 50.00 persen	752.489.070,00		3.00 kali 40.00 persen 60.00 persen	0,00	
1	02	36		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	cakupan pelayanan rawat jalan cakupan pelayanan rawat inap cakupan pelayanan rujukan		15.00 Persen 1.50 persen 10.00 persen	41.663.584.559,00		15.00 Persen 1.50 persen 10.00 persen	0,00	
1	02	36	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase terpenuhinya obat sesuai dengan standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	5.957.143.900,00		80.00 Persen	0,00	
1	02	36	02	Penyediaan sarana fasilitas kesehatan	persentase terpenuhinya sarana kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	13.677.740.172,00	-----	80.00 Persen	0,00	
1	02	36	03	Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan	persentase terpenuhinya prasarana kesehatan sesuai dengan standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	13.951.440.000,00		80.00 Persen	0,00	
1	02	36	04	Peningkatan kesehatan masyarakat	kontak rate 15% frekuensi kunjungan dokter spesialis ke puskesmas(4 spesialis dasar) cakupan puskesmas dengan UGD 24 jam		100.00 100 1.00 kali/tahun 100.00 persen			100.00 100 1.00 kali/tahun 100.00 persen	0,00	
1	02	36	05	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida	cakupan pelayanan AGD kris 24 jam Cakupan rawat jalan Cakupan Rawat inap	dinas kesehatan Nusa Penida	100.00 persen 15.00 % 1.50 %	5.040.860.525,00 3.036.399.962,00	-----	100.00 persen 15.00 % 1.50 %	0,00	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH												
1	02	09		PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Terlaksananya pelayanan kesekretariatan		100.00 %	507.602.485,00		100.00 %	0,00	
1	02	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu		19.00 Dokumen	507.602.485,00		19.00 Dokumen	0,00	
1	02	16		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka tidak adanya kejadian pasien jatuh		100.00 %	100.000.000,00		100.00 %	0,00	
1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah bulan pelayanan pentipan, konservasi dan transportasi jenazah serta transportasi pulang pasien PBI peserta JKN asal Kab. Klungkung yang rawat inap di RSUD Kab. Klungkung	RSUD Kab. Klungkung	12.00 Bulan	100.000.000,00		12.00 Bulan	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Cakupan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar		80.00 %	64.155.924.245,00		82.00 %	0,00
1 02 26 17	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Cakupan ketersediaan sarana bangunan gedung sesuai standar	RSUD Kab. Klungkung	80.00 %	20.484.480.000,00		82.00 %	0,00
1 02 26 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan pemenuhan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar	RSUD Kab. Klungkung	80.00 %	39.372.937.745,00	----	82.00 %	0,00
1 02 26 20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah pemenuhan prasarana ambulans rumah sakit sesuai standar	RSUD Kab. Klungkung	2.00 unit	1.300.000.000,00		0,00 unit	0,00
1 02 26 22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	Terpenuhinya kebutuhan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan	RSUD Kab. Klungkung	2.00 paket	2.998.506.500,00	---	0,00 paket	0,00
1 02 27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Tidak ada kejadian tidak diduga dan kejadian potensi cedera		100.00 %	200.000.000,00		100.00 %	0,00
1 02 27 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD Kab. Klungkung	80.00 %	200.000.000,00	-	82.00 %	0,00
1 02 33	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Persentase pencapaian SPM BLUD RSUD Indek Kepuasan Pelanggan		95.00 % 82.00 %	63.000.000.000,00		95.00 % 82.00 %	0,00
1 02 33 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	RSUD Kab. Klungkung	100.00 %	63.000.000.000,00	-	100.00 %	0,00
PUSKESMAS BANJARANGKAN II								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM puskesmas Banjarangkan II		90.00 persen	2.004.491.200,00		90.00 persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	68.400.000,00	--	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	1.364.491.200,00	-----	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan II	banjarangkan II	90.00 %	571.600.000,00	-----	90.00 %	0,00
PUSKESMAS NUSA PENIDA I								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I		90.00 persen	2.537.784.000,00		90.00 persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	334.400.000,00	-	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	1.514.484.000,00	-	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	90.00 %	688.900.000,00	-----	91.00 %	0,00
PUSKESMAS NUSA PENIDA II								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II		90.00 Persen	766.592.000,00		90.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida II	dinas kesehatan	100.00 Persen	115.600.000,00	-----	100.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan jkn dari dana JKN puskesmas Nusa Penida II	puskesmas	100.00 Persen	304.092.000,00	-----	100.00 Persen	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	puskesmas Nusa Penida II	90.00 %	346.900.000,00	----	91.00 %	0,00
PUSKESMAS NUSA PENIDA III								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III		90.00 Persen	1.706.301.600,00		90.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	44.880.000,00	---	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	1.128.921.600,00	----	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	90.00 %	532.500.000,00	-----	91.00 %	0,00
PUSKESMAS DAWAN I								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan I		90.00 Persen	1.879.263.400,00		90.00 Persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan I	Puskesmas dawon I	100.00 %	49.040.000,00	-----	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Dawan I	Puskesmas Dawon I	100.00 %	1.302.623.400,00	-----	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Dawan I	puskesmas dawon I	90.00 %	527.600.000,00	-----	91.00 %	0,00
PUSKESMAS DAWAN II								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian kinerja UKM Puskesmas Dawan II		90.00 Persen	1.581.352.600,00		90.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan II	Puskesmas Dawan II	100.00 %	42.320.000,00	----	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Dawan II	Puskesmas Dawan II	100.00 %	1.026.132.600,00	-----	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Dawan II	puskesmas dawon II	90.00 %	512.900.000,00	-----	91.00 %	0,00
PUSKESMAS KLUNGKUNG I								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I		90.00 Persen	2.641.098.000,00		90.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	100.00 %	126.600.000,00	----	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Klungkung I	Puskesmas klungkung I	100.00 %	1.927.998.000,00	-----	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I	puskesmas dawon II	90.00 %	586.500.000,00	-----	91.00 %	0,00
PUSKESMAS KLUNGKUNG II								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II		90.00 Persen	2.024.154.800,00		90.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung II	Puskesmas klungkung II	100.00 %	51.400.000,00	---	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Klungkung II	Puskesmas klungkung II	100.00 %	1.430.254.800,00	-	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II	Puskesmas Klungkung II	90.00 %	542.500.000,00	-----	91.00 %	0,00
PUSKESMAS BANJARANGKAN I								
1 02 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I		90.00 Persen	2.356.176.800,00		90.00 Persen	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	84.480.000,00	----	100.00 %	0,00
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	1.695.196.800,00	-----	100.00 %	0,00
1 02 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	90.00 %	576.500.000,00	-----	90.00 %	0,00
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp105.373.542.894			0,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1 03 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 90%		100.00 persen	711.269.250,00		100.00 persen	0,00
1 03 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas PUPRPKP	91.00 persen	470.898.000,00	-----	92.00 persen	0,00
1 03 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Dinas PUPRPKP	100.00 persen	105.950.500,00	-----	100.00 persen	0,00
1 03 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas PUPRPKP	100.00 persen	6.962.500,00	---	100.00 persen	0,00
1 03 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	Dinas PUPRPKP	8.00 dok	29.882.500,00	---	8.00 dok	0,00
1 03 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas PUPRPKP	20.00 dok	30.663.000,00	--	20.00 dok	0,00
1 03 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dinas PUPRPKP	12.00 dok	66.912.750,00	----	12.00 dok	0,00
1 03 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		7.80 persen	7.341.650.000,00		7.85 persen	0,00
1 03 16 03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase dan trotoar yang dibangun/ditingkatkan	Dinas PUPRPKP	3000.00 m'	7.341.650.000,00	-----	3500.00 m'	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai		91.00 persen	179.252.000,00		91.10 persen	0,00
1 03 23 05	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Jumlah pendapatan dari sewa alat-alat berat	Dinas PUPRPKP	148000000.00 Rupiah	38.823.500,00	---	150000000.00 Rupiah	0,00
1 03 23 11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai	Dinas PUPRPKP	18.00 persen	75.017.500,00	----	18.00 persen	0,00
1 03 23 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah jenis informasi jasa konstruksi yang tersedia di kabupaten klungkung/Jumlah dokumen hasil evaluasi jakon	Dinas PUPRPKP	7.00 Jenis	65.411.000,00	---	7.00 Jenis	0,00
1 03 24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		44.50 persen	6.865.104.345,00		45.00 persen	0,00
1 03 24 01	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan peningktn/pemb jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	4.00 dokumen	483.485.510,00	--	4.00 dokumen	0,00
1 03 24 10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	200.00 m'	1.563.784.500,00	-	200.00 m'	0,00
1 03 24 18	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	1000.00 m	4.740.029.335,00	-----	1000.00 m	0,00
1 03 24 19	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	77.805.000,00	-----	2.00 dokumen	0,00
1 03 27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Persentase penduduk berakses air bersih		86.00 persen	5.584.452.956,00		87.00 persen	0,00
1 03 27 01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat	Dinas PUPRPKP	100.00 jiwa (SR)	5.584.452.956,00	-----	600.00 jiwa (SR)	0,00
1 03 28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik		52.60 persen			52.70 persen	
		Persentase tebing sungai dalam kondisi baik		1.65 persen	2.469.084.000,00		1.70 persen	0,00
1 03 28 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai	Dinas PUPRPKP	50.00 m'	216.283.000,00	-----	50.00 m'	0,00
1 03 28 09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Panjang pemb/peningktn tanggul pengaman pantai	Dinas PUPRPKP	100.00 m	2.092.095.000,00	-----	100.00 m	0,00
1 03 28 13	Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan tanggul sungai	Dinas PUPRPKP	1.00 dokumen	14.196.000,00	--	1.00 dokumen	0,00
1 03 28 14	Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan pemb tanggul pengaman pantai	Dinas PUPRPKP	1.00 dokumen	146.510.000,00	---	1.00 dokumen	0,00
1 03 29	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Jumlah penduduk yang berakses infrastruktur		4500.00 jiwa	727.707.500,00		5000.00 jiwa	0,00
1 03 29 02	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Panjang pemb/peningkatan jalan setapak, senderan dan jml pemb gedung	Dinas PUPRPKP	700.00 m	727.707.500,00	-----	500.00 m	0,00
1 03 32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Ketersediaan informasi penataan ruang		16.00 kawasan	379.772.250,00		17.00 kawasan	0,00
1 03 32 09	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan tata ruang	Dinas PUPRPKP	12.00 dok	379.772.250,00	-----	13.00 dok	0,00
1 03 33	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan		97.60 persen	240.031.750,00		97.70 persen	0,00
1 03 33 03	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tata ruang	Dinas PUPRPKP	3.00 dok	139.675.750,00	-----	4.00 dok	0,00
1 03 33 04	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	Dinas PUPRPKP	6.00 dok	100.356.000,00	-----	7.00 dok	0,00
1 03 35	PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi sedang-baik		81.00 persen			8300.00 persen	
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi sedang-baik		100.00 persen	Rp80.875.218.843		100.00 persen	0,00
1 03 35 01	Kegiatan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan	Dinas PUPRPKP	10.00 dokumen	3.928.667.825,00	-----	10.00 dokumen	0,00
1 03 35 02	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	Dinas PUPRPKP	3.00 km	Rp41.953.318.018	-----	3.00 km	0,00
1 03 35 03	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan Pemb/Peningkatan jembatan di kab. klungkung	Kabupaten Klungkung	1.00 buku	284.727.000,00	-----	1.00 buku	0,00
1 03 35 04	Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun dan dipelihara	Kabupaten Klungkung	5.00 20m	3.542.788.000,00	---	5.00 20m	0,00
1 03 35 05	Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan	Dinas PUPRPKP	10.00 dokumen	3.545.777.000,00	-----	10.00 dokumen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 35 06	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas PUPRPKP	10.00 km	26.910.754.000,00	----	10.00 km	0,00
1 03 35 07	Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jembatan	Dinas PUPRPKP	3.00 dokumen	88.641.000,00	---	3.00 dokumen	0,00
1 03 35 08	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas PUPRPKP	3.00 unit	620.546.000,00	--	3.00 unit	0,00
1 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				1.890.196.752,00			0,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1 04 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah yang layak huni		95.50 persen	1.546.295.100,00		96.00 persen	0,00
1 04 15 06	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah penanganan rumah layak huni	Dinas PUPRPKP	3.00 dok	1.546.295.100,00	--	4.00 dok	0,00
1 04 16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase pelayanan sanitasi		95.50 persen	280.630.152,00		96.00 persen	0,00
1 04 16 02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah penanganan prasarana dan sarana sanitasi	Dinas PUPRPKP	6.00 unit	280.630.152,00	---	7.00 unit	0,00
1 04 17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Persentase penanganan kawasan kumuh		75.50 persen	63.271.500,00		80.00 persen	0,00
1 04 17 02	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah penanganan kawasan kumuh	Dinas PUPRPKP	5.00 kws	63.271.500,00	----	6.00 kws	0,00
1 05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10.422.678.730,00			0,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								
1 05 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata - rata capaian output kegiatan		100.00 %	1.198.972.051,00		0.00 %	0,00
1 05 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Satpol PP dan PMK	50.00 %	394.555.166,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Satpol PP PMK	100.00 %	430.255.475,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Sat.Pol PP dan PMK	100.00 %	173.053.910,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	Sekretariat	9.00 Dokumen	180.400.500,00	-----	0.00 Dokumen	0,00
1 05 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	SatPol PP dan PMK	23.00 Dokumen	11.263.000,00	-----	0.00 Dokumen	0,00
1 05 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Sekretariat	12.00 Dokumen	9.444.000,00	-----	0.00 Dokumen	0,00
1 05 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Cakupan Penegakkan Perda		100.00 %	274.942.129,00		0.00 %	0,00
1 05 15 07	Kegiatan Penyelidikan dan Penindakan	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak	Satpol PP PMK	50.00 pelanggar	175.185.129,00	-----	0.00 pelanggar	0,00
1 05 15 08	Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelanggaran Perda berulang yang diselesaikan	Satpol PP PMK	100.00 %	48.218.000,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 15 09	Pendataan dan Deteksi Dini	Laporan Pelanggaran Perda	Satpol PP PMK	12.00 laporan	51.539.000,00	-----	0.00 laporan	0,00
1 05 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan		150.00 pelanggar	1.870.096.400,00		0.00 pelanggar	0,00
1 05 16 01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Patroli Pol PP 3 x dalam 24 jam	Satpol PP dan PMK	100.00 %	1.695.747.900,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 16 06	Kegiatan Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Layanan Pengamanan Pimpinan dan tamu - tamu daerah	Satpol PP dan PMK	100.00 %	152.161.500,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 16 07	Pembinaan dan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota	Satpol PP dan PMK	100.00 %	22.187.000,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Cakupan Desa dengan Linmas Aktif		31.00 %	236.141.000,00		0.00 %	0,00
1 05 19 01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat	Jumlah Linmas yang dilatih	Satpol PP dan PMK	124.00 orang	92.284.000,00	-----	0.00 orang	0,00
1 05 19 04	Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas	Laporan Pelaksanaan Tugas Linmas	Satpol PP dan PMK	20.00 Laporan	79.355.500,00	-----	0.00 Laporan	0,00
1 05 19 05	Pengerahan Satuan Linmas untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban	Cakupan layanan Linmas desa/kelurahan	Satpol PP dan PMK	100.00 %	64.501.500,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota		100.00 %	2.344.773.400,00		0.00 %	0,00
1 05 22 06	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa yang disiapkan untuk melaksanakan mitigasi kebakaran	Satpol PP dan PMK	3.00 desa/kelurahan	67.868.000,00	-----	0.00 desa/kelurahan	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 22 11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai	Jumlah Peralatan kebakaran yang siap pakai	Satpol PP dan PMK	9.00 unit	1.279.180.000,00	-----	0.00 unit	0,00
1 05 22 12	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Satpol PP dan PMK	15.00 menit	997.725.400,00	-----	0.00 menit	0,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1 05 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		100.00 %	898.551.850,00		0.00 %	0,00
1 05 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Kantor BPBD	100.00 %	755.732.750,00	-	0.00 %	0,00
1 05 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kantor BPBD	90.00 %	46.844.300,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai dengan klasifikasi	Kantor BPBD	100.00 %	12.909.300,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran yang tersedia tepat waktu	Kantor BPBD	7.00 dokumen	7.777.000,00	---	0.00 dokumen	0,00
1 05 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kantor BPBD	12.00 laporan	10.096.500,00	---	0.00 laporan	0,00
1 05 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kantor BPBD	12.00 laporan	65.192.000,00	----	0.00 laporan	0,00
1 05 23	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Persentase korban terdampak yang dipulihkan		100.00 %	293.200.000,00		0.00 %	0,00
1 05 23 01	Verifikasi Kejadian Bencana	Kajian dan verifikasi kejadian bencana	Kantor BPBD	12.00 laporan	81.390.000,00	-----	0.00 laporan	0,00
1 05 23 03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi hasil kajian	Kantor BPBD	1.00 laporan	211.810.000,00	-----	0.00 laporan	0,00
1 05 24	PROGRAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA	Indeks kapasitas		20.00 %	1.243.831.900,00		0.00 %	0,00
1 05 24 01	Pemetaan dan Pengkajian Resiko Bencana Desa	Jumlah desa yang dilakukan pemetaan dan pengkajian resiko bencana	Kantor BPBD	1.00 desa	129.935.000,00	-----	0.00 desa	0,00
1 05 24 02	Mitigasi Ancaman Bencana	Jumlah desa yang melakukan mitigasi	Kantor BPBD	20.00 desa	866.307.000,00	-	0.00 desa	0,00
1 05 24 03	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM yang dilatih kebencanaan	Kantor BPBD	40.00 orang	247.589.900,00	----	0.00 orang	0,00
1 05 25	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase penanganan kedaruratan sesuai standar respon time		100.00 %	2.062.170.000,00		0.00 %	0,00
1 05 25 01	Pelayanan Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Kedaruratan Bencana	Kantor BPBD	100.00 %	1.986.530.000,00	-----	0.00 %	0,00
1 05 25 02	Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat	Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik darurat bencana	Kantor BPBD	100.00 %	75.640.000,00	----	0.00 %	0,00
1 06	SOSIAL				13.488.574.592,80		0,00	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1 06 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		95.00 persen	795.619.812,80		0.00 persen	0,00
1 06 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	disosp3a	95.00 persen	670.896.899,56	-----	0.00 persen	0,00
1 06 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	disosp3a	80.00 Persen	6.866.500,00	-----	0.00 Persen	0,00
1 06 09 03	Pengelolaan Kearsipan	persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	disosp3a	95.00 persen	44.660.792,24	-----	0.00 persen	0,00
1 06 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	disosp3a	9.00 Dokumen	48.790.100,00	----	0.00 Dokumen	0,00
1 06 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	laporan kinerja terkirim tepat waktu	disosp3a	20.00 Laporan	15.022.021,00	--	0.00 Laporan	0,00
1 06 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	disosp3a	12.00 Laporan	9.383.500,00	-----	0.00 Laporan	0,00
1 06 16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan Disabilitas Yang Mandiri		20.00 Persen	1.242.377.030,00		0.00 Persen	0,00
1 06 16 12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		100.00 persen			0.00 persen	
		jumlah disabilitas yang di berikan keterampilan kerja	disosp3a	20.00 orang	437.927.200,00	-	0.00 orang	0,00
		Cakupan Mr. X yang ditangani		100.00 Persen			0.00 Persen	
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti		100.00 Persen			0.00 Persen	
		cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		100.00 Persen			0.00 Persen	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1	06	16	13	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial	cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti cakupan rehabilitasi sosial dasar ODGJ cakupan ke tunaan ditangani	disosp3a	100.00 Persen 50.00 Persen 100.00 Persen	198.863.000,00	0,00	0,00
1	06	16	14	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan KPN yang mendapat rastra Cakupan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Cakupan KPN yang memiliki JKN/KIS	disosp3a	85.00 Persen 100.00 Persen 85.00 Persen	605.586.830,00	0,00	0,00
1	06	25		PROGRAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Cakupan Keluarga Rawan Mandiri Ekonomi		15.00 Persen	7.434.892.100,00	0,00	0,00
1	06	25	03	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Keluarga Rawan Yang Menindaklanjuti Pembinaan Jumlah RTS Memiliki Rumah Layak Huni Cakupan Lansia Miskin Tertangani	DISOSP3A	60.00 Persen 90.00 Persen 40.00 Persen	7.434.892.100,00	0,00	0,00
1	06	26		PROGRAM PEMBERDAYAAN PILAR-PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN	Cakupan Partisipasi Pilar-Pilar Kebangsaan Cakupan Partisipasi Masyarakat Terhadap Nilai Kepahlawanan		75.00 Persen 75.00 Persen	4.015.685.650,00	0,00	0,00
1	06	26	01	Kegiatan Pendataan dan Pembinaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Tersedianya Data PMKS Cakupan PSKS Aktif	DISOSP3A	4.00 Dokumen 75.00 Persen	263.242.400,00	0,00	0,00
1	06	26	02	Kegiatan Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengenang Pahlawan	DISOSP3A	250.00 Orang	3.752.443.250,00	0,00	0,00
2	01			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				Rp76.206.772.599	0,00	320.280.200,00
2	01			KETENAGAKERJAAN				1.316.118.000,00	0,00	0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA										
2	01	16		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disediakan		60.00 %	970.851.000,00	60.00 %	0,00
2	01	16	02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan bekerja	Dispernaker Kab.Klungkung	40.00 %	144.397.000,00	40.00 %	0,00
2	01	16	08	Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya	persentase tenaga kerja yang terserap dengan pola padat karya	Dispernaker Kab.Klungkung	20.00 orang	738.267.000,00	20.00 orang	0,00
2	01	16	09	Pengendalian Tenaga Kerja Asing	Persentase TKA dengan TKI pendamping	Dispernaker Kab.Klungkung	100.00 %	56.548.000,00	100.00 %	0,00
2	01	16	10	Kegiatan Pembentukan Wirusaha Mandiri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui wirusaha mandiri	Dispernaker Kab.Klungkung	100.00 %	31.639.000,00	100.00 %	0,00
2	01	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan peraturan perundang-undangan		70.00 %	139.253.000,00	70.00 %	0,00
2	01	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian kasus perselisihan internal perusahaan	Dispernaker Kab.Klungkung	100.00 %	36.205.000,00	100.00 %	0,00
2	01	17	03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang ikut program perlindungan dan penjaminan sosial tenaga kerja	Dispernaker Kab.Klungkung	20.00 perusahaan	51.075.000,00	20.00 perusahaan	0,00
2	01	17	05	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan	Dispernaker Kab. Klungkung	12.00 pp	51.973.000,00	12.00 pp	0,00
2	01	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih memperoleh pekerjaan Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		60.00 % 80.00 %	206.014.000,00	60.00 % 80.00 %	0,00
2	01	18	06	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Dispernaker Kab.Klungkung	140.00 orang	152.345.000,00	155.00 orang	0,00
2	01	18	10	Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi	persentase tenaga kerja yang disertifikasi	Dispernaker Kab. Klungkung	17.00 orang	53.669.000,00	17.00 orang	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.346.171.700,00			0,00
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2 02 16		PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5.00 Persen	792.348.400,00		0,00
2 02 16 02		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	% Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Pelayanan	DISOSP3A	85.00 Persen	143.973.000,00		0,00
2 02 16 05		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga yang Responsif Gender	DISOSP3A	85.00 Persen	371.205.000,00		0,00
2 02 16 09		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data Gender dan Anak	DISOSP3A	1.00 Dokumen	33.155.000,00		0,00
2 02 16 10		Kegiatan Peningkatan Peranan Organisasi Wanita Dalam Bidang Pembangunan	Cakupan Pengangguran Perempuan Memiliki Usaha	DISOSP3A	20.00 Persen	244.015.400,00		0,00
2 02 20		PROGRAM Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	Kecamatan Layak Anak		3.00 Kecamatan			0,00
2 02 20 01		Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak	Desa dan Kelurahan Layak Anak		5.00 Desa/Layak	553.823.300,00		0,00
2 02 20 02		Upaya Peningkatan Perlindungan Anak	Profil Anak	DISOSP3A	100.00 Persen	141.758.000,00		0,00
2 02 20 03		Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat	Jumlah Desa dan Kelurahan Memiliki Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Aktif	DISOSP3A	85.00 Persen	246.265.400,00		0,00
2 03		PANGAN	Cakupan Lembaga Yang Mendukung Kecamatan Layak Anak	DISOSP3A	85.00 Persen	165.799.900,00		0,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN								
2 03 09		PROGRAM Pelayanan Kesejahteraan	Prosentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan		100.00 %	Rp1.587.166.423		0,00
2 03 09 01		Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	DKPP	100.00 %	Rp814.781.179		0,00
2 03 09 02		Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.00 %	605.597.244,00		0,00
2 03 09 03		Pengelolaan Kearsipan	Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	100.00 %	48.094.000,00		0,00
2 03 09 04		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penggunaan tersedia tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	8.00 dokumen	31.753.000,00		0,00
2 03 09 05		Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	23.00 Dokumen	73.796.000,00		0,00
2 03 09 06		Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.00 %	13.145.000,00		0,00
2 03 16		PROGRAM Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya peningkatan ketahanan pangan		1.00 Laporan	Rp1.309.902.400		0,00
2 03 16 01		Kegiatan Peningkatan Sistem Distribusi dan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Diketahuinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Klungkung	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	6.00 desa/sampel	233.050.000,00		0,00
2 03 16 02		Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan	Diketahuinya situasi Ketersediaan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	12.00 laporan	Rp530.970.000		0,00
2 03 16 03		Kegiatan Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	- Terpantaunya sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Terpantaunya daerah rawan pangan - Meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar - Terlaksananya desa Mandiri pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4.00 KWT	Rp545.882.400		0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 04		PERTANAHAN			181.178.400,00			0,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN								
2 04 16		PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH						
		presentase konflik tanah yang difasilitasi		57.00 %	181.178.400,00		68.00 %	0,00
2 04 16 03		Penataan dan Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat	DLHP	20.00 persen	80.778.400,00	-	40.00 persen	0,00
2 04 16 04		Koordinasi dan sosialisasi Pendataan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan	DLHP	57.00 persen	100.400.000,00	-	68.00 persen	0,00
2 05		LINGKUNGAN HIDUP			17.951.521.284,00			0,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN								
2 05 09		PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN						
		Persentase rata-rata capaian output kegiatan		100.00 persen	2.770.678.342,00		100.00 persen	0,00
2 05 09 01		Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	DLHP	60.00 persen	593.330.912,00	-----	60.00 persen	0,00
2 05 09 02		Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	DLHP	100.00 persen	2.078.222.550,00	----	100.00 persen	0,00
2 05 09 04		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	DLHP	9.00 dokumen	58.455.580,00	-----	9.00 dokumen	0,00
2 05 09 06		Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		12.00 dokumen	40.669.300,00	-----	12.00 dokumen	0,00
2 05 15		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
		peningkatan kualitas lingkungan hidup		100.00 persen	7.662.028.464,00		100.00 persen	0,00
2 05 15 02		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	DLHP	44.00 persen	3.715.805.608,00	-----	44.00 persen	0,00
2 05 15 10		Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	DLHP	45.00 persen	179.715.000,00	-	45.00 persen	0,00
2 05 15 11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	UPT Nusa Penida	90.00 persen	1.846.887.576,00	-	90.00 persen	0,00
2 05 15 13		Koordinasi dan penyelenggaraan lomba pengelolaan lingkungan hidup		100.00 persen			100.00 persen	
2 05 15 13		Meningkatnya target retribusi persampahan/kebersihan	DLHP	10.00 persen	311.887.672,00	-----	20.00 persen	0,00
2 05 15 15		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	DLHP	35.00 persen	137.992.608,00	-----	35.00 persen	0,00
2 05 15 16		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA	DLHP	35.00 persen	1.469.740.000,00	-----	35.00 persen	0,00
2 05 16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
		indeks kualitas air dan indeks kualitas udara		59.00 persen	329.586.386,00		59.00 persen	0,00
2 05 16 03		Pemantauan Kualitas Lingkungan	DLHP	35.00 persen	110.229.000,00	-----	35.00 persen	0,00
2 05 16 04		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	DLHP	80.00 persen	70.959.000,00	-----	80.00 persen	0,00
2 05 16 05		Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	DLHP	80.00 persen	148.398.386,00	-----	80.00 persen	0,00
2 05 25		PROGRAM PENANGANAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN MELALUI PENANGANAN SAMPAH, LIMBAH DAN RTH						
		Persentase pengaduan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan		90.00 persen	7.189.228.092,00		90.00 persen	0,00
2 05 25 01		Kegiatan Pemeliharaan RTH	DLHP	65.00 persen	2.138.237.500,00	-----	65.00 persen	0,00
2 05 25 02		Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	DLHP	90.00 persen	3.702.318.472,00	-----	90.00 persen	0,00
2 05 25 03		Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	DLHP	100.00 persen			100.00 persen	
2 05 25 03		Persentase sampah kawasan perkotaan yang diolah		35.00 persen	1.348.672.120,00	-----	35.00 persen	0,00
2 06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			2.003.664.447,00			0,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2 06 09		PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN						
		Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		100.00 persen	1.097.624.947,00		100.00 persen	0,00
2 06 09 01		Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Disdukcapil	100.00 persen	801.263.503,00	-	100.00 persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 06 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Disdukcapi	100.00 persen	247.678.344,00		100.00 persen	0,00
2 06 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Disdukcapi	85.00 Persen	14.129.000,00		90.00 Persen	0,00
2 06 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Disdukcapi	7.00 dokumen	5.047.000,00		7.00 dokumen	0,00
2 06 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Disdukcapi	21.00 Dokumen	10.867.300,00		21.00 Dokumen	0,00
2 06 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu	Disdukcapi	12.00 Dokumen	18.639.800,00		12.00 Dokumen	0,00
2 06 15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Menurunnya Tingkat Data Ganda dan Anomali Data		100.00 Persen	182.001.500,00		100.00 Persen	0,00
2 06 15 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Cakupan Layanan Perubahan Data dan Jaringan SIAK	Disdukcapi	100.00 Persen	110.931.000,00	-----	100.00 Persen	0,00
2 06 15 05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Sesuai Rencana	Disdukcapi	85.00 Persen	42.564.500,00		85.00 Persen	0,00
2 06 15 06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	Disdukcapi	3.00 Laporan	28.506.000,00	-----	3.00 Laporan	0,00
2 06 16	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	CakupanKepemilikan Dokumen Kependudukan		90.00 Persen	526.432.000,00		90.00 Persen	0,00
2 06 16 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	Cakupan Layanan KK dan KTP sesuai SOP	Disdukcapi	90.00 persen	470.646.000,00		95.00 persen	0,00
2 06 16 02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	Disdukcapi	100.00 persen	37.407.000,00		100.00 persen	0,00
2 06 16 03	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	Disdukcapi	100.00 persen	18.379.000,00		100.00 persen	0,00
2 06 17	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		90.00 persen	197.606.000,00		90.00 persen	0,00
2 06 17 01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Cakupan layanan akta kelahiran sesuai SOP	Disdukcapi	100.00 Persen	78.268.000,00		100.00 Persen	0,00
2 06 17 02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Cakupan layanan akta perkawinan dan perceraian sesuai SOP	Disdukcapi	100.00 Persen	78.306.000,00		100.00 Persen	0,00
2 06 17 03	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya	Cakupan layanan akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya	Disdukcapi	100.00 Persen	41.032.000,00		100.00 Persen	0,00
2 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				3.163.564.650,22			0,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2 07 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	persentase rata-rata capaian output kegiatan		100.00 persen	615.709.678,52		100.00 persen	0,00
2 07 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	DPMDPPKB	100.00 persen	398.522.884,48	-----	100.00 persen	0,00
2 07 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	persentase capaian disiplin aparatur	DPMDPPKB	75.00 persen	67.754.130,00	-----	80.00 persen	0,00
2 07 09 03	Pengelolaan Kearsipan	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	DPMDPPKB	100.00 persen	24.375.146,12	-----	100.00 persen	0,00
2 07 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	DPMDPPKB	9.00 dokumen	29.150.296,12	-----	9.00 dokumen	0,00
2 07 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	laporan kinerja terkirim tepat waktu	DPMDPPKB	23.00 dokumen	4.817.500,00	-----	23.00 dokumen	0,00
2 07 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	laporan keuangan terkirim tepat waktu	DPMDPPKB	12.00 dokumen	91.089.721,80	-----	12.00 dokumen	0,00
2 07 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	persentase lembaga ekonomi yang sehat dan berkembang		83.00 persen	1.281.464.340,00		0.00 persen	0,00
2 07 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	persentase LPM yang aktif		100.00 persen	1.281.464.340,00		0.00 persen	0,00
		persentase jumlah PKK yang aktif		100.00 persen		0.00 persen		
		persentase jumlah posyandu yang mandiri	DPMDPPKB	10.00 persen		0.00 persen		
2 07 16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100.00 persen	128.066.000,00		0.00 persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 07 16 09	Kegiatan Pengembangan Lembaga Perekonomian Desa	Jumlah BUMDes yang tidak berkembang menjadi berkembang Jumlah LPD yang tidak sehat menjadi sehat Jumlah kelompok usaha yang menerapkan TTG		45.00 BUMDes 107.00 LPD 30.00 kelompok	128.066.000,00		0.00 BUMDes 0.00 LPD 0.00 kelompok	0,00
2 07 18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Persentase desa dengan capaian kinerja 100%		100.00 persen	1.118.694.681,70		100.00 persen	0,00
2 07 18 02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase desa yang menetapkan perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tepat waktu	DPMDPPKB	100.00 persen	344.728.147,24		100.00 persen	0,00
2 07 18 03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase desayang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan /peraturan		100.00 persen	124.523.000,00	-----	100.00 persen	0,00
2 07 18 05	Kegiatan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan struktur kelembagaan pemerintahan desa lengkap	DPMDPPKB	100.00 persen	315.456.888,34		100.00 persen	0,00
2 07 18 06	Kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa	persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	DPMDPPKB	100.00 persen	333.986.646,12		100.00 persen	0,00
2 07 20	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	persentase potensi yang dikerjasamakan		5.00 persen	19.629.950,00		0.00 persen	0,00
2 07 20 01	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Potensi Desa	Jumlah kerja sama desa	DPMDPPKB	3.00 kerjasama	19.629.950,00	-----	0.00 kerjasama	0,00
2 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.833.821.380,38			0,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2 08 15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	menurunnya unmetneed		5.00 persen	2.312.890.492,24		0.00 persen	0,00
2 08 15 01	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Cakupan layanan KB	DPMDPPKB	100.00 persen	1.432.512.000,00	-----	100.00 persen	0,00
2 08 15 02	Pelayanan KIE	Persentase peserta KB aktif	DPMDPPKB	78.00 persen	79.085.092,24	-----	0.00 persen	0,00
2 08 15 06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	persentase terpenuhinya layanan sarana prasarana KB pada Passyankes	DPMDPPKB	100.00 persen	595.854.400,00	-----	0.00 persen	0,00
2 08 15 07	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi MKJP	DPMDPPKB	49.00 persen	205.439.000,00	-----	0.00 persen	0,00
2 08 16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	menurunnya ASFR		50.00 persen	520.930.888,14		0.00 persen	0,00
2 08 16 01	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	persentase PIK remaja yang tegar	DPMDPPKB	50.00 persen	35.831.000,00	-----	0.00 persen	0,00
2 08 16 03	Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	persentase BKB yang purnama	DPMDPPKB	20.00 persen	204.921.500,00	-----	0.00 persen	0,00
2 08 16 04	Kegiatan Pembinaan PLKB	Persentase capaian kinerja PLKB		100.00 persen			0.00 persen	
2 09	PERHUBUNGAN	Persentase desa/kelurahan menjadi kampung KB	DPMDPPKB	40.00 persen	280.178.388,14		0.00 persen	0,00
2 09	PERHUBUNGAN				23.151.564.771,00			0,00
DINAS PERHUBUNGAN								
2 09 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)		95.00 persen	1.234.877.849,00		95.00 persen	0,00
2 09 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Dishub	100.00 Persen	979.512.992,00		100.00 Persen	0,00
2 09 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	Dishub	100.00 Persen	110.638.000,00	-----	100.00 Persen	0,00
2 09 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	Dishub	100.00 Persen	18.371.500,00	---	100.00 Persen	0,00
2 09 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	Dishub	9.00 dok	72.140.475,00	-----	9.00 dok	0,00
2 09 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dok)	Dishub	23.00 dok	30.398.882,00	-----	23.00 dok	0,00
2 09 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dok)	Dishub	12.00 dok	23.816.000,00		12.00 dok	0,00
2 09 15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Cakupan pemenuhan prasarana transportasi Perhubungan sesuai standar (%)		100.00 %	1.729.645.116,00		100.00 %	0,00
2 09 15 01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan (%)	Dishub	100.00 Persen	16.826.900,00	----	100.00 Persen	0,00
2 09 15 03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana Perhubungan sesuai standar yang dibangun (%)	Dishub	100.00 Persen	235.989.000,00		100.00 Persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 09 15 12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Cakupan prasarana Perhubungan yang beroperasi sesuai standar (%)	Dishub	100.00 persen	354.257.720,00	-----	100.00 persen	0,00
2 09 15 13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Cakupan operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang beroperasi sesuai Standar (%)	Dishub	100.00 Persen	960.458.246,00	----	100.00 Persen	0,00
2 09 15 14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Prasarana Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	Dishub	100.00 Persen	162.113.250,00	--	100.00 Persen	0,00
2 09 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Load faktor angkutan darat (%)		70.00 persen			75.00 persen	
2 09 17		Load faktor angkutan laut (%)		83.37 persen	11.326.334.706,00		85.00 persen	0,00
2 09 17 18	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase angkutan tidak dalam trayek yang laik operasi (%) Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan tidak dalam trayek (%)		100.00 persen 0.00 persen			100.00 persen 0.00 persen	0,00
2 09 17 21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%) Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	Dishub	100.00 Persen 100.00 persen	218.675.064,00	----	100.00 Persen 100.00 persen	0,00
2 09 17 22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi (%) Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan dalam trayek (%)	Dishub	100.00 Persen 0.00 persen			100.00 Persen 0.00 persen	0,00
2 09 19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Titik jenuh Lalu lintas (%)		50.00 Persen	8.362.341.000,00		45.00 Persen	0,00
2 09 19 06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan pemenuhan rekayasa Lalu-lintas (%)	Dishub	100.00 Persen	579.751.800,00	-	100.00 Persen	0,00
2 09 19 09	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	Dishub	100.00 Persen	22.524.000,00	-	100.00 Persen	0,00
2 09 19 10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas	Cakupan perencanaan pengaturan lalu-lintas terpenuhi (%)	Dishub	100.00 Persen	7.760.065.200,00	-	100.00 Persen	0,00
2 09 25	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Penurunan angka kecelakaan (%)		30.00 Persen	498.366.100,00		33.00 Persen	0,00
2 09 25 01	Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	Dishub	1.00 inovasi	240.831.400,00	-	1.00 inovasi	0,00
2 09 25 02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan (kerjasama)	Dishub	3.00 Persen	94.215.500,00	---	3.00 Persen	0,00
2 09 25 03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi hasil audit keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	Dishub	100.00 Persen	163.319.200,00	-	100.00 Persen	0,00
2 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.185.616.000,00			0,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2 10 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Presentase rata-rata capaian Output Kegiatan		95.00 Presen	910.154.000,00		95.00 Presen	0,00
2 10 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur	Diskominfo	12.00 bulan	481.120.000,00	-	12.00 bulan	0,00
2 10 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Diskominfo	12.00 bulan	130.505.500,00	-	12.00 bulan	0,00
2 10 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Berjalan lancar	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD Berjalan lancar	Diskominfo	9.00 Dokumen	61.526.500,00	-----	9.00 Dokumen	0,00
2 10 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	tersusun Laporan Pelaksana Kegiatan Tepat waktu	Diskominfo	23.00 jumlah Dokumen	43.669.500,00	----	23.00 jumlah Dokumen	0,00
2 10 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Diskominfo	12.00 Jumlah Laporan	193.332.500,00	-----	12.00 Jumlah Laporan	0,00
2 10 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah Kunjungan Kewebsite Desa dan OPD		900.00 orang	1.651.654.000,00		1000.00 orang	0,00
2 10 15 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Rekomendasi Ijin Telekomunikasi yang di Terbitkan	Diskominfo	95.00 Persentase	55.024.000,00	-	0.00 Persentase	0,00
2 10 15 05	Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aplikasi OPD yan Terintegrasi Julah OPD yang Menayangkan RUP Tepat waktu melalui LPSE	Diskominfo	39.00 Jumlah 39.00 Jumlah	1.496.492.000,00	-	39.00 Jumlah 39.00 Jumlah	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 10 15 06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya Web OPD / Desa dan Kelurahan	Diskominfo	90.00 Jumlah WEB	100.138.000,00		90.00 Jumlah WEB	0,00
2 10 18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Jumlah Informasi yang disebarakan		3.00 media	623.808.000,00		3.00 media	0,00
2 10 18 01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi pembangunan yang di sebarakan Melalui mobil keliling	Diskominfo	55.00 Jumlah	139.447.000,00		55.00 Jumlah	0,00
2 10 18 02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Informasi pembangunan yang disebarakan Melalui Baliho,Spanduk, Selebaran dan Sejenisnya	Diskominfo	12000.00 Jumlah	154.015.000,00		12000.00 Jumlah	0,00
2 10 18 03	Penyebarluasan Informasi-informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah Informasi Program Pembangunan yang di Sebarakan Melalui Baliho, Selebaran dan Vidiotron	Diskominfo	12.00 Lembaran	330.346.000,00		0.00 Lembaran	0,00
2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				2.931.842.358,00			0,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN								
2 11 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata- Rata Capaian Output Kegiatan		100.00 Persen	1.442.790.018,00		100.00 Persen	0,00
2 11 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Klungkung	100.00 persen	829.981.700,00		100.00 persen	0,00
2 11 09 02	Pelayanan Administrasi Kewagawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	Kab Klungkung	100.00 persen	76.657.260,00		100.00 persen	0,00
2 11 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kab Klungkung	100.00 persen	51.107.260,00		100.00 persen	0,00
2 11 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	Kab Klungkung	6.00 dokumen	156.251.600,00		6.00 dokumen	0,00
2 11 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	Kab Klungkung	100.00 persen	159.354.298,00		100.00 persen	0,00
2 11 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kab Klungkung	12.00 Laporan	169.437.900,00		12.00 Laporan	0,00
2 11 16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUINGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi Usaha Kecil		6.50 persen	526.890.550,00		6.80 persen	0,00
2 11 16 05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Persentase UMKM yang mendapatkan bantuan modal	Kab Klungkung	75.30 persen	334.842.800,00		75.70 persen	0,00
2 11 16 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirusahaan	Persentase tumbuhnya kelompok usaha	Kab Klungkung	1.80 persen	115.620.250,00		2.10 persen	0,00
2 11 16 08	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan pendaftaran HAKI bagi UMKM	Kab Klungkung	2.00 unit	76.427.500,00		2.00 unit	0,00
2 11 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya menjadi sehat		5.00 unit	672.056.290,00		5.00 unit	0,00
2 11 18 01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah koperasi baru terbentuk	Kab Klungkung	3.00 unit	418.713.200,00		3.00 unit	0,00
2 11 18 05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah laporan kesehatan koperasi	Kab Klungkung	136.00 dokumen	163.480.090,00		139.00 dokumen	0,00
2 11 18 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai ijin	Kab Klungkung	100.00 persen	89.863.000,00		100.00 persen	0,00
2 11 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI	Persentase peningkatan SHU Koperasi		17.00 persen	290.105.500,00		19.00 persen	0,00
2 11 19 01	Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	persentase meningkatnya modal koperasi	Kab Klungkung	6.00 persen	86.692.500,00		7.00 persen	0,00
2 11 19 02	Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah kerjasama/kemitraan koperasi	Kab Klungkung	24.00 kali	160.326.500,00		26.00 kali	0,00
2 11 19 03	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	Persentase koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri		20.00 persen	43.086.500,00		23.00 persen	0,00
2 12	PENANAMAN MODAL				2.136.044.110,00			0,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
2 12 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		80.00 %	869.315.960,00		0.00 %	0,00
2 12 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 persen	415.254.800,00		0.00 persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 12 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 %	227.360.660,00		0,00 %	0,00
2 12 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.00 Dokumen	28.908.000,00		0,00 Dokumen	0,00
2 12 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu (12dok)		12.00 dok	25.190.000,00		0,00 dok	0,00
2 12 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (12dok)	DPMPPTSP	12.00 dok	172.602.500,00		0,00 dok	0,00
2 12 19	PROGRAM PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAYANAN LAYANAN	Cakupan Pengaduan yang diselesaikan		100.00 %	123.322.800,00		0,00 %	0,00
2 12 19 01	Pengaduan dan Informasi Layanan	Terpenuhinya pelayanan perijinan dan non perijinan yang dapat memuaskan masyarakat	DPMPPTSP	12.00 laporan	46.361.900,00		0,00 laporan	0,00
2 12 19 02	Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Tersedianya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan dan non perijinan	DPMPPTSP	12.00 laporan	37.008.500,00		0,00 laporan	0,00
2 12 19 03	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Tersedianya data terkait perijinan dan non perijinan	DPMPPTSP	12.00 laporan	39.952.400,00		0,00 laporan	0,00
2 12 20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan iklim Penanaman Modal / 100%		100.00 %	250.381.500,00		0,00 %	0,00
2 12 20 01	Perencanaan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen potensi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal / 1 Dokumen	DPMPPTSP	1.00 dok	57.396.500,00		0,00 dok	0,00
2 12 20 02	Pemberdayaan Usaha	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kerjasama antara UMKM dengan usaha sedang/besar / 1 Laporan	DPMPPTSP	1.00 laporan	63.027.000,00		0,00 laporan	0,00
2 12 20 03	Deregulasi Penanaman Modal	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal pengusaha/investasi / 1 laporan 100 %	DPMPPTSP	1.00 laporan	129.958.000,00		0,00 laporan	0,00
2 12 21	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Penanaman Modal di Kab. Klungkung / 100 %		100.00 %	470.537.850,00		0,00 %	0,00
2 12 21 01	Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya potensi dan strategi promosi Penanaman Modal	DPMPPTSP	3.00 laporan	60.750.000,00		0,00 laporan	0,00
2 12 21 02	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Promosi Investasi	DPMPPTSP	4.00 kali	222.203.000,00		0,00 kali	0,00
2 12 21 03	Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Persentase terpenuhinya bahan, sarana dan prasarana promosi	DPMPPTSP	100.00 %	187.584.850,00		0,00 %	0,00
2 12 22	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan investasi yang direalisasikan		100.00 %	108.957.000,00		0,00 %	0,00
2 12 22 01	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan PMA dan PMDN Terpantau	DPMPPTSP	100.00 %	38.566.000,00		0,00 %	0,00
2 12 22 02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pemahaman penanam modal tentang kewajibannya sesuai aturan	DPMPPTSP	100.00 %	41.154.000,00		0,00 %	0,00
2 12 22 03	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Laporan informasi Data Statistik Penanaman Modal	DPMPPTSP	12.00 laporan	29.237.000,00		0,00 laporan	0,00
2 12 23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	Persentase penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan A sesuai SOP tercapai 100 %		100.00 %	180.318.000,00		0,00 %	0,00
2 12 23 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / I	Persentase penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan A I sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	129.617.500,00		0,00 %	0,00
2 12 23 02	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / II	Persentase penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan A II sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	24.899.000,00		0,00 %	0,00
2 12 23 03	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / III	Persentase penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan A III sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	25.801.500,00		0,00 %	0,00
2 12 24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Bidang B Sesuai SOP / 100%		100.00 %	133.211.000,00		0,00 %	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.12.24.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / I	Persentase ijin yang dikeluarkan dengan pemohon ijin yang diproses di B I /100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 Presentase	43.205.100,00		0,00 Presentase	0,00
2.12.24.02	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / II	Persentase Ijin Yang di Keluarkan Dengan Pemohon Ijin yang Diproses di B II/100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 Presentase	44.634.100,00		0,00 Presentase	0,00
2.12.24.03	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / III	Persentase Ijin yang Dikeluarkan dengan Pemohon Ijin yang Di proses Di B III/100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 Presentase	45.371.800,00		0,00 Presentase	0,00
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				2.061.985.164,00			0,00
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
2.13.22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRESTASI KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi/ Nasional Jumlah Atlet / Seniman yang Mendapatkan Medali Emas		20.00 Orang 20.00 Orang			20.00 Orang 20.00 Orang	0,00
2.13.22.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi yang diusulkan ke tingkat provinsi dan nasional	Disbudpora	200.00 Orang	368.684.804,00		200.00 Orang	0,00
2.13.22.02	Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Cakupan cabang olahraga yang diikuti dalam porjar provinsi	Disbudpora	16.00 cabang	1.273.586.004,00		16.00 cabang	0,00
2.13.22.03	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Cakupan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang ditingkatkan	Disbudpora	100.00 Persen	419.714.356,00		100.00 Persen	0,00
2.14	STATISTIK				87.124.500,00			0,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.14.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektor yang Tersedia Tepat waktu		3.00 Buku	87.124.500,00		3.00 Buku	0,00
2.14.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah data Statistik Sektor yang Tersedia Tepat Waktu	Diskominpo	100.00 data	87.124.500,00		100.00 data	0,00
2.15	PERSANDIAN				308.812.000,00			0,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.15.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PENGAMANAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Kebocoran data rahasia		5.00 Presen	308.812.000,00		5.00 Presen	0,00
2.15.15.01	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	cakupan Layanan Persandian dan Non Persandian Sesuai SOP	Diskominfo	95.00 Presentase	168.403.000,00		0,00 Presentase	0,00
2.15.15.02	Pengelolaan Informasi Berklasifikasi	Cakupan Layanan Kebutuhan pengamanan Persandian	Diskominfo	95.00 Presentase	83.397.500,00		0,00 Presentase	0,00
2.15.15.04	Pengawasan dan Evaluasi Persandian	Jumlah Bulan Pelayanan Persandian Terlaksana	Diskominfo	12.00 bulan	57.011.500,00		0,00 bulan	0,00
2.16	KEBUDAYAAN				8.868.829.765,00			0,00
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
2.16.09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		100.00 Persen	465.822.362,00		100.00 Persen	0,00
2.16.09.01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Disbudpora	100.00 %	327.010.456,00		100.00 %	0,00
2.16.09.02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	Disbudpora	100.00 Persen	105.208.656,00		100.00 Persen	0,00
2.16.09.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dokumen)	Disbudpora	12.00 Dokumen	6.792.500,00		12.00 Dokumen	0,00
2.16.09.05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen)	Disbudpora	12.00 Dokumen	4.346.000,00		12.00 Dokumen	0,00
2.16.09.06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dokumen)	Disbudpora	12.00 Dokumen	22.464.750,00		12.00 Dokumen	0,00
2.16.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang lestari (ditetapkan dan lestari)		6.00 Situs	329.351.104,00		6.00 Situs	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 16 04	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Disbudpora	2.00 Situs	43.576.800,00	-	2.00 Situs	0,00
2 16 16 05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Tingkat kunjungan museum	Disbudpora	41000.00 Orang	36.358.000,00	-	41000.00 Orang	0,00
2 16 16 10	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipelihara	Disbudpora	2.00 Situs	140.471.152,00	-	2.00 Situs	0,00
2 16 16 11	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	Cakupan layanan Museum Semarang	Disbudpora	100.00 Persen	108.945.152,00	-	100.00 Persen	0,00
2 16 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase rekonstruksi kesenian yang hampir punah Jumlah kesenian yang lestari (seni ritual, seni kontemporer)		100.00 % 350.00 Jumlah	3.791.446.279,00		100.00 % 350.00 Jumlah	0,00
2 16 17 01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah musik yang lestari	Disbudpora	3.00 Bulan	1.127.997.875,00	-	3.00 Bulan	0,00
2 16 17 04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Disbudpora	185.00 Pucuk	181.860.152,00	-	185.00 Pucuk	0,00
2 16 17 05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Event Kesenian Yang Tampil	Disbudpora	22.00 Jenis	2.481.588.252,00	-	22.00 Jenis	0,00
2 16 18	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah budaya tak benda yang lestari (termasuk tradisi, desa pekraman, subak, sekaa teruna)		467.00 Kelompok	4.282.210.020,00		467.00 Kelompok	0,00
2 16 18 03	Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jumlah tradisi yang lestari	Disbudpora	2.00 Jenis	2.000.702.020,00	-	2.00 Jenis	0,00
2 16 18 06	Membangun kerjasama penggalan dan inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah	Buku Sejarah Baru	Disbudpora	1.00 Paket	20.002.500,00	-	1.00 Paket	0,00
2 16 18 07	Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah sekaa teruna memiliki potensi lokal Cakupan desa pekraman yang memiliki awig Cakupan subak sawah dan subak abian yang memiliki awig	Disbudpora	261.00 Kelompok 100.00 Persen 100.00 Jumlah	2.261.505.500,00	-	261.00 Kelompok 100.00 Persen 100.00 Jumlah	0,00
2 17	PERPUSTAKAAN				1.264.270.300,00			0,00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								
2 17 16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kepuasan pemustaka		65.00 Persen	1.264.270.300,00		71.00 Persen	0,00
2 17 16 01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	Cakupan lembaga perpustakaan yang memenuhi NSP buku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	94.767.900,00	-	0.00 Persen	0,00
2 17 16 02	Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Cakupan lembaga perpustakaan yang memenuhi standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.00 Persen	73.565.500,00	-	0.00 Persen	0,00
2 17 16 03	Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Cakupan Layanan Perpustakaan sesuai standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.00 Perpustakaan	1.095.936.900,00	0	0.00 Perpustakaan	0,00
2 18	KEARSIPAN				517.574.946,00			320.280.200,00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								
2 18 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		95.00 Persen	384.266.546,00		0.00 Persen	320.280.200,00
2 18 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	65.00 Persen	299.366.000,00	-	0.00 Persen	320.280.200,00
2 18 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	4.942.000,00	-	0.00 Persen	0,00
2 18 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	1.603.000,00	-	0.00 Persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2 18 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.00 dokumen	22.532.646,00 -		0,00 dokumen	0,00
2 18 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.00 dokumen	1.840.000,00 ----		0,00 dokumen	0,00
2 18 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.00 dokumen	53.982.900,00 ----		0,00 dokumen	0,00
2 18 19	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Jumlah lembaga perangkat daerah yang memenuhi standar kearsipan		2.00 Instansi	133.308.400,00		0,00 Instansi	0,00
2 18 19 01	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	Cakupan lembaga yang dibina menerapkan arsip sesuai standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.50 Persen	86.861.500,00 -		0,00 Persen	0,00
2 18 19 02	Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Cakupan lembaga yang menindaklanjuti laporan hasil audit	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.50 persen	28.060.500,00 -		0,00 persen	0,00
2 18 19 03	Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	Jumlah arsip peristiwa penting yang ditemukan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.00 dokumen	18.386.400,00 -		0,00 dokumen	0,00
3	URUSAN PILIHAN				Rp41.244.365.355			0,00
3 01	KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.493.103.792,00			0,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN								
3 01 23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Nilai Tambah Produksi Perikanan		6000.00 Rupiah/Kg	683.697.500,00		6000.00 Rupiah/Kg	0,00
3 01 23 03	Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produk olahan yang dipasarkan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4710.00 ton	424.176.500,00 0		4710.00 ton	0,00
3 01 23 04	Pembinaan usaha kecil dan permodalan perikanan	Jumlah Pembinaan kelompok/pelaku usaha mikro penerima bantuan modal	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.00 kelompok	49.229.000,00 0		2,00 kelompok	0,00
3 01 23 05	Pembinaan mutu pengolahan hasil perikanan dan pemasaran	Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro pengolahan dan pemasaran	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.00 kelompok	210.292.000,00 0		2,00 kelompok	0,00
3 01 26	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	cakupan bina kelompok nelayan dan kelompok budidaya serta sarana dan prasarana aparatur		100.00 %	1.809.406.292,00		100.00 %	0,00
3 01 26 03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Pembinaan kelompok Budidaya	DKPP Kab. Klungkung	7.00 kelompok	128.259.300,00 0		7,00 kelompok	0,00
3 01 26 04	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Tepat Guna	tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Klungkung	6.00 unit	1.345.662.000,00 0		6,00 unit	0,00
3 01 26 05	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Pembinaan kelompok nelayan/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Klungkung	79.00 kelompok	335.484.992,00 0		79,00 kelompok	0,00
3 02	PARIWISATA				9.243.944.953,00			0,00
DINAS PARIWISATA								
3 02 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		100.00 %	1.112.819.368,00		100.00 %	0,00
3 02 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pariwisata	100.00 %	322.961.000,00 -		100.00 %	0,00
3 02 09 02	Pelayanan Administrasi Kependidikan SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Pariwisata	95.00 %	502.472.118,00 -		95.00 %	0,00
3 02 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klarifikasi	Dinas Pariwisata	100.00 %	6.343.000,00 -----		100.00 %	0,00
3 02 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Pariwisata	9.00 Dokumen	88.931.000,00 -----		9,00 Dokumen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3 02 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat waktu	Dinas Pariwisata	23.00 Dokumen	47.929.500,00	-----	23.00 Dokumen	0,00
3 02 09 06	Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu	Dinas Pariwisata	12.00 Laporan	144.182.750,00	-----	12.00 Laporan	0,00
3 02 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		12.00 persen	4.435.533.208,00		12.00 persen	0,00
3 02 15 03	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Promosi Pariwisata Dengan Pihak Ketiga	Bidang Pemasaran	2.00 Kesepakatan	655.612.700,00	-----	2.00 Kesepakatan	0,00
3 02 15 04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Dokumen Analisa Pasar	Bidang Pemasaran	2.00 Dokumen	197.914.700,00	-----	2.00 Dokumen	0,00
3 02 15 05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Presentase Pengunjung Yang Berpotensi Berkunjung	Bidang Pemasaran	60.00 Persen	3.582.005.808,00	-----	60.00 Persen	0,00
3 02 16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Berkualitas		100.00 Persen	2.047.959.650,00		100.00 Persen	0,00
3 02 16 01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Cakupan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Sesuai Standar	Dinas pariwisata	100.00 Persen	911.283.650,00	-----	100.00 Persen	0,00
3 02 16 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Cakupan Sarana dan Prasarana Pariwisata Sesuai Standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	1.040.805.250,00	-----	100.00 %	0,00
3 02 16 07	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi	Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai Standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	95.870.750,00	-----	100.00 %	0,00
3 02 17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisata Yang Ditindaklanjuti		100.00 persen	880.756.552,00		100.00 persen	0,00
3 02 17 01	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah Database Pariwisata	Dinas Pariwisata	1.00 buku	119.003.250,00	-----	1.00 buku	0,00
3 02 17 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisata yang Termonitor	Dinas Pariwisata	100.00 %	68.972.750,00	-----	100.00 %	0,00
3 02 17 10	Kegiatan Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kepariwisata yang Diterbitkan	Dinas Pariwisata	30.00 Dokumen Rekomendasi Pariwisata	692.780.552,00	-----	30.00 Dokumen Rekomendasi Pariwisata	0,00
3 02 18	PROGRAM SUMBER DAYA PARIWISATA	Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru		1.00 Destinasi Desa Wisata	766.876.175,00		1.00 Destinasi Desa Wisata	0,00
3 02 18 01	Standarisasi Pariwisata	Cakupan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Sesuai Standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	98.101.375,00	-----	100.00 %	0,00
3 02 18 02	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat	Dinas Pariwisata	4.00 Kemitraan	332.247.900,00	-----	4.00 Kemitraan	0,00
3 02 18 03	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru yang Ditata	Dinas Pariwisata	1.00 Destinasi Ditata	336.526.900,00	-----	1.00 Destinasi Ditata	0,00
3 03	PERTANIAN				10.263.503.700,93			0,00
DINAS PERTANIAN								
3 03 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		95.00 %	1.462.468.253,00		95.00 %	0,00
3 03 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pertanian	85.00 %	1.192.655.253,00	0	85.00 %	0,00
3 03 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Dinas Pertanian	95.00 %	70.828.000,00	0	95.00 %	0,00
3 03 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Pertanian	100.00 %	8.200.000,00	0	100.00 %	0,00
3 03 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Pertanian	9.00 dokumen	144.181.000,00	0	8.00 dokumen	0,00
3 03 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Pertanian	12.00 Dokumen	46.604.000,00	0	12.00 Dokumen	0,00
3 03 16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian		4900.00 Ha	1.121.909.646,12		5300.00 Ha	0,00
3 03 16 12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	6.00 kelompok			6.00 kelompok	
		Jumlah kelompok pengolahan hasil pertanian yang mandiri	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	1.00 Kelompok	204.671.146,12	0	1.00 Kelompok	0,00
3 03 16 15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Persentase penerapan teknologi budidaya tanaman	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	1.20 %	448.931.000,00	0	1.20 %	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3 03 16 32	Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	Luas serangan OPT yang ditangani	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	825.00 Ha	468.307.500,00		800.00 Ha	0,00
3 03 19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Indeks pertanaman (IP) padi		130.00 %	2.759.800.986,09		135.00 %	0,00
3 03 19 05	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Persentase terlayannya permohonan kajian	Dinas Pertanian	100.00 %	184.069.456,32		100.00 %	0,00
3 03 19 07	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	Dinas Pertanian	85.00 %	210.330.146,12		85.00 %	0,00
		Persentase penyaluran AUP	Dinas Pertanian	60.00 %		60.00 %		
3 03 19 08	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)		0.00 meter			750.00 meter	
		Jalan Usaha Tani (JUT)		750.00 meter			750.00 meter	
		Embung		2.00 unit			1.00 unit	
		Jalan produksi		1000.00 meter			1000.00 meter	
3 03 19 08	Balai Subak	Balai Subak	Dinas Pertanian	0.00 Unit	2.190.601.883,65		1.00 Unit	0,00
3 03 19 09	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian	70.00 %	174.799.500,00		75.00 %	0,00
3 03 21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Angka kesakitan ternak		10.00 %	857.966.146,12		10.00 %	0,00
3 03 21 02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah hewan/ternak yang memperoleh pelayanan kesehatan	Dinas Pertanian	19380.00 ekor	502.340.146,12		19768.00 ekor	0,00
3 03 21 03	Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik	Jumlah hewan/ternak yang dimusnahkan	Dinas Pertanian	2000.00 ekor	355.626.000,00		2000.00 ekor	0,00
3 03 24	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	Persentase peningkatan populasi sapi		0.50 %	1.325.674.127,36		0.50 %	0,00
3 03 24 07	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Persentase sapi dengan BCS (Body Condition Score) Lebih sama dengan 2	Dinas Pertanian	80.00 %	230.640.000,00		80.00 %	0,00
3 03 24 08	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah sapi betina yang menggunakan teknologi inseminasi buatan (IB)	Dinas Pertanian	10200.00 ekor	960.068.981,24		10400.00 ekor	0,00
3 03 24 09	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok ternak yang mandiri	Dinas Pertanian	5.00 kelompok	134.965.146,12		7.00 kelompok	0,00
3 03 26	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	Persentase rekomendasi pembangunan pertanian yang ditindaklanjuti		90.00 %	147.828.500,00		90.00 %	0,00
3 03 26 01	Monitoring~ Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas Pertanian	12.00 dokumen	104.711.000,00		11.00 dokumen	0,00
3 03 26 02	Penyusunan Database Pertanian	Dokumen data statistik pertanian tersedia tepat waktu	Dinas Pertanian	2.00 dokumen	43.117.500,00		2.00 dokumen	0,00
3 03 27	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH (AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL)	Persentase daging layak konsumsi yang beredar di pasaran		100.00 %	97.303.500,00		100.00 %	0,00
3 03 27 01	Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	Cakupan daging yang diambil sampelnya		80.00 %	97.303.500,00		85.00 %	0,00
3 03 32	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN	Jumlah penyuluh dan kelompok tani berprestasi di tingkat provinsi		1.00 kandidat	2.490.552.542,24		1.00 kandidat	0,00
3 03 32 01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Persentase penyuluh berprestasi	Dinas Pertanian	71.00 %	2.322.035.542,24		72.00 %	0,00
3 03 32 02	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Persentase kelompok tani berprestasi	Dinas Pertanian	71.00 %	168.517.000,00		72.00 %	0,00
3 04	KEHUTANAN				108.500.400,00			0,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN								
3 04 16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Lahan kritis		34.00 Ha	108.500.400,00		34.00 Ha	0,00
3 04 16 06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	luasnautupan lahan hijau di lahan kritis	DLHP	34.00 Ha	108.500.400,00		34.00 Ha	0,00
3 05	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				10.862.000,00			0,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
3 05 17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Cakupan Instalasi Energi Terbarukan Dalam Kondisi Baik		25.00 %	10.862.000,00		0.00 %	0,00
3 05 17 01	Pengembangan Ketenaga Listrikian	Cakupan Rekomendasi	DPMPSTP	100.00 %	10.862.000,00		0.00 %	0,00
3 06	PERDAGANGAN				18.001.515.581,00			0,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN								
3 06 20	PROGRAM PEMBINAAN PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI	Persentase bapokting tersedia cukup di pasar Klungkung		100.00 persen	18.001.515.581,00		100.00 persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3 06 20 01	Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan	Persentase UTPP yang ditera, pelanggaran dstr brg subsidi yg ditangani, pelanggaran distribusi mikol yg ditangani	Kabupaten Klungkung	25.00 persen	2.138.626.900,00		25.00 persen	0,00
3 06 20 02	Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang	Kabupaten Klungkung	52.00 laporan	59.910.500,00		52.00 laporan	0,00
3 06 20 03	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Kab Klungkung	65.00 persen	10.359.702.821,00		70.00 persen	0,00
3 06 20 04	Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	Persentase peningkatan omzet penjualan di Pasar Umum	Kab Klungkung	10.00 persen	5.443.275.360,00		10.00 persen	0,00
3 07	INDUSTRI				992.036.928,16			0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA								
3 07 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		80.00 %	557.334.428,16		80.00 %	0,00
3 07 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Dispernaker Kab. Klungkung	50.00 %	305.558.212,16		50.00 %	0,00
3 07 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum dan kepegawaian	Dispernaker Kab. Klungkung	3.00 dokumen	96.785.000,00		3.00 dokumen	0,00
3 07 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Disperinaker Kab. Klungkung	50.00 %	6.010.000,00	----	50.00 %	0,00
3 07 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	Dispernaker Kab. Klungkung	23.00 dokumen	48.225.000,00		23.00 dokumen	0,00
3 07 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Dokumen kinerja SKPD tersedia tepat waktu	Disperinaker	46.00 dokumen	23.100.000,00		46.00 dokumen	0,00
3 07 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan pengelolaan keuangan skpd	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Dispernaker Kab. Klungkung	12.00 laporan	77.656.216,00		12.00 laporan	0,00
3 07 16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase industri unggulan daerah yang dikembangkan		30.00 %	434.702.500,00		30.00 %	0,00
3 07 16 02	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah kemitraan pengembangan industri kecil menengah	Dispernaker Kab. Klungkung	30.00 kemitraan	319.832.500,00		30.00 kemitraan	0,00
3 07 16 09	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Jumlah Industri Rumah Tangga baru	Dispernaker Kab. Klungkung	120.00 industri	96.895.000,00		120.00 industri	0,00
3 07 16 10	Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana pengembangan industri	Dispernaker Kab. Klungkung	2.00 %	17.975.000,00		2.00 %	0,00
3 08	KETRANSMIGRASIAN				130.898.000,00			0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA								
3 08 17	PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL	Persentase kuota transmigrasi yang terpenuhi Persentase hak transmigran yang terpenuhi		60.00 % 100.00 %	130.898.000,00		60.00 % 100.00 %	0,00
3 08 17 01	Penyuluhan Transmigrasi Regional	persentase transmigran terseleksi	Dispernaker Kab. Klungkung	12.00 %	130.898.000,00		12.00 KK	0,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				Rp91.638.983.179			0,00
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				71.234.384.563,00			0,00
BAGIAN HUKUM DAN HAM								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		100.00 Persen	208.567.600,00		100.00 Persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Bagian Hukum dan HAM	100.00 Persen	190.435.300,00	-----	100.00 Persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Dokumen)	Bagian Hukum dan HAM	9.00 Dokumen	5.773.000,00	---	9.00 Dokumen	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (laporan)	Bagian Hukum dan HAM	12.00 Laporan	12.359.300,00	---	12.00 Laporan	0,00
4 01 26	PROGRAM PENATAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.		500.00 Peraturan 100.00 persen	1.073.301.800,00		500.00 Peraturan 100.00 persen	0,00
4 01 26 01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	Setda Kab. Klungkung	100.00 Persen			100.00 Persen	
4 01 26 01		Persentase capaian RAD HAM.	Setda Kab. Klungkung	100.00 Ppersen	310.785.000,00	-----	100.00 Ppersen	0,00
4 01 26 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Setda Kab. Klungkung	100.00 persen	385.754.800,00	-----	100.00 persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 26 05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Sadar hukum Persentase Desa Pakraman memiliki awig-awig tertulis yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 109, data awal 66)	Setda Kab. Klungkung	100.00 persen 100.00 Persen	376.762.000,00	-----	100.00 persen 100.00 Persen	0,00
BAGIAN PEMERINTAHAN								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan		100.00 persen	220.624.000,00		100.00 persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	165.124.000,00	----	100.00 persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	3.600.000,00	----	100.00 persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	8.00 dokumen	5.400.000,00	---	8.00 dokumen	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	5.500.000,00	---	12.00 Laporan	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	41.000.000,00	----	12.00 Laporan	0,00
4 01 33	PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan		100.00 100	1.013.440.000,00		100.00 100	0,00
4 01 33 04	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	2.00 Laporan	65.800.000,00	----	2.00 Laporan	0,00
4 01 33 11	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	59.260.000,00	----	4.00 Rekomendasi	0,00
4 01 33 14	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	569.950.000,00	----	4.00 Rekomendasi	0,00
4 01 33 15	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	Kabupaten Klungkung	16.00 kerjasama	131.550.000,00	---	16.00 kerjasama	0,00
4 01 33 17	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	61.930.000,00	---	4.00 Rekomendasi	0,00
4 01 33 18	Faslitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Klungkung	13.00 Kebijakan	124.950.000,00	---	13.00 Kebijakan	0,00
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan		100.00 Persen	463.150.500,00		100.00 Persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	435.706.000,00	-----	0.00 Persen	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	27.444.500,00	----	0.00 Laporan	0,00
4 01 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar		100.00 Persen	5.987.815.000,00		0.00 Persen	0,00
4 01 16 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolanan Sesuai SOP	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	1.428.570.000,00	-----	0.00 Persen	0,00
4 01 16 10	Dialog Interaktif	Jumlah Berita Yang Ditanggapi	Kabupaten Klungkung	60.00 Berita	984.630.000,00	---	0.00 Berita	0,00
4 01 16 11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	Kabupaten Klungkung	360.00 Informasi	3.574.615.000,00	-----	0.00 Informasi	0,00
BAGIAN UMUM								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan		100.00 Persen	1.304.915.800,00		100.00 Persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	466.834.000,00	-----	0.00 persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bagian Umum Setda Kab.Klungkung	100.00 Persen	748.491.900,00	----	0.00 Persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	Setda Kab.Klungkung	17000.00 surat	24.866.000,00	----	0,00 surat	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Setda Kab.Klungkung	8.00 Dokumen	6.913.400,00	----	0,00 bulan	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	5.492.500,00	----	0,00 laporan	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	52.318.000,00	----	0,00 laporan	0,00
4 01 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu		100.00 persen	3.632.033.692,00		0,00 persen	0,00
4 01 16 12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	926.089.500,00	-----	0,00 bulan	0,00
4 01 16 13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	677.110.664,00	---	0,00 12	0,00
4 01 16 14	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	Setda Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	2.028.833.528,00	-----	0,90 Persen	0,00
SEKRETARIAT DPRD								
4 01 08	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA SKPD	Persentase serapan anggaran SKPD		100.00 %	574.260.608,00		100.00 %	0,00
4 01 08 01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tersedia Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	8.00 Dukumen	88.262.608,00	-----	0,00 Dukumen	0,00
4 01 08 02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	13.00 Dokumen	4.956.000,00	-----	0,00 Dokumen	0,00
4 01 08 03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Evaluasi dan Kinerja Terkirim Tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	21.00 Dokumen	481.042.000,00	-----	0,00 Dokumen	0,00
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Terpublikasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD		100.00 Persen	3.398.785.084,00		0,00 Persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	95.00 persen	2.508.749.928,00	-----	0,00 persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	70.00 Persen	890.035.156,00	-----	0,00 Persen	0,00
4 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Terpublikasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD		100.00 %	26.036.534.376,00		100.00 %	0,00
4 01 15 05	Kegiatan Reses	Laporan Hasil Reses DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	3.00 Laporan	1.216.205.652,00	-----	0,00 Laporan	0,00
4 01 15 11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	96.00 Kegiatan	925.015.608,00	-----	0,00 Kegiatan	0,00
4 01 15 13	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	21.00 Laporan	23.895.313.116,00	-----	0,00 Laporan	0,00
4 01 69	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan		100.00 %	900.921.672,00		100.00 %	0,00
4 01 69 01	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedia Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab Klungkung	185.00 Stel	900.921.672,00	-----	0,00 Stel	0,00
4 01 70	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas		100.00 %	2.357.090.020,00		100.00 %	0,00
4 01 70 01	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pesentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 Persen	1.653.805.260,00	-----	0,00 Persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 70 02	Kegiatan Pelaksanaan Rapat-rapat dan Persidangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	187.00 Laporan	703.284.760,00	-----	0,00	Laporan 0,00
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan		90.00 Persen	422.715.796,00		92.00 Persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	85.00 Persen	273.060.000,00	0	85.00 Persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	7.407.166,00	0	90.00 Persen	0,00
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kabupaten Klungkung	70.00 Persen	38.000.000,00	0	70.00 Persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	6.00 Dokumen	5.412.900,00	0	6.00 Dokumen	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu (Dokumen)	Kabupaten Klungkung	23.00 Dokumen	78.886.800,00	0	23.00 Dokumen	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (Dokumen)	Kabupaten Klungkung	16.00 Dokumen	19.948.930,00	0	16.00 Dokumen	0,00
4 01 49	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Penurunan Potensi Konflik SARA		35.00 Persen	125.252.450,00		40.00 Persen	0,00
4 01 49 02	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan Kegiatan FKUB dan FPK	Kabupaten Klungkung	4.00 Laporan	125.252.450,00	0	4.00 Laporan	0,00
4 01 50	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	% Pemilih Wanita Menggunakan Hak Pilih		72.00 Persen	223.755.950,00		73.00 Persen	0,00
4 01 50 03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Peserta Paham Demokrasi	Kabupaten Klungkung	170.00 Orang	70.724.150,00	0	170.00 Orang	0,00
4 01 50 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Perkembangan Politik Daerah	Kabupaten Klungkung	4.00 Laporan	107.138.700,00	0	4.00 Laporan	0,00
4 01 50 06	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Ormas dan LSM Yang Aktif	Kabupaten Klungkung	40.00 Persen	45.893.100,00	0	45.00 Persen	0,00
4 01 54	PROGRAM KOORDINASI KEWASPADAAN DINI DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	% Konflik Sosial Yang Dtangani		87.00 Persen	1.044.035.800,00		87.00 Persen	0,00
4 01 54 01	Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini	Cakupan Pemantauan Dtata Potensi Konflik	Kabupaten Klungkung	80.00 Persen	112.037.400,00	0	80.00 Persen	0,00
4 01 54 02	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Jumlah Konflik Sosial Yang Ditangani	Kabupaten Klungkung	15.00 Konflik Sosial	931.998.400,00	0	15.00 Konflik Sosial	0,00
4 01 55	PROGRAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN	Penurunan Kasus Narkoba Pada Generasi Muda		35.00 Persen	115.344.500,00		40.00 Persen	0,00
4 01 55 01	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Peserta Bahaya Narkoba	Kabupaten Klungkung	175.00 Orang	115.344.500,00	0	180.00 Orang	0,00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		100.00 %	271.979.464,00		100.00 %	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bagian Kesra	100.00 %	215.991.564,00	---	100.00 %	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bagian Kesra	100.00 %	22.867.000,00	--	100.00 %	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Bagian Kesra	4.00 Dokumen	20.210.000,00	-	4.00 Dokumen	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Bagian Kesra	18.00 Laporan	4.092.000,00	-	18.00 Laporan	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Bagian Kesra	12.00 Laporan	8.818.900,00	---	12.00 Laporan	0,00
4 01 63	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat		100.00 %	3.415.447.500,00		100.00 %	0,00
4 01 63 01	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	3.374.013.500,00	-----	1.00 Kebijakan	0,00
4 01 63 02	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	umlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	20.224.500,00	-	1.00 Kebijakan	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 63 03	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	21.209.500,00		1.00 Kebijakan	0,00
BAGIAN PEREKONOMIAN								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata - rata out put kegiatan		100.00 persen	159.725.900,00		100.00 persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	136.726.000,00	----	100.00 persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Kabupaten Klungkung	90.00 persen	1.573.000,00	---	90.00 persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kabupaten Klungkung	9.00 dokumen	3.653.000,00	----	9.00 dokumen	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kabupaten Klungkung	23.00 laporan	1.333.000,00	----	23.00 laporan	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	16.440.900,00	----	100.00 persen	0,00
4 01 47	PROGRAM PENYEDIAAN DATA/INFORMASI PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian		100.00 persen	914.956.332,00		100.00 persen	0,00
4 01 47 01	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah komoditas yang harga terkendali	Kabupaten Klungkung	3.00 komoditas	422.704.832,00	-----	3.00 komoditas	0,00
4 01 47 02	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	5.00 kebijakan	292.708.500,00	-----	5.00 kebijakan	0,00
4 01 47 04	Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	1.00 Kebijakan	162.685.000,00	-----	1.00 Kebijakan	0,00
4 01 47 05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	1.00 kebijakan	36.858.000,00	-----	1.00 kebijakan	0,00
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian out put kegiatan		100.00 persen	3.453.394.093,00		100.00 persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasaran Aparatur Sekretariat daerah	Bagian ADM pembangunan	100.00 persen	3.216.328.093,00	-----	100.00 persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	Bagian ADM Pembangunan	4.00 dokumen	8.559.000,00	---	4.00 dokumen	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu	Bagian ADM Pembangunan	12.00 laporan	6.864.000,00	--	12.00 laporan	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Bagian ADM Pembangunan	12.00 lapoaran	221.643.000,00	----	12.00 lapoaran	0,00
4 01 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat		100.00 persen	467.049.904,00		100.00 persen	0,00
4 01 16 05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Masuk		50.00 Aspirasi			50.00 Aspirasi	
4 01 16 05		Jumlah Rekomendasi dalam Monitoring dan Evaluasi	Bagian ADM Pembangunan	50.00 Rekomendasi	467.049.904,00	----	50.00 Rekomendasi	0,00
4 01 56	PROGRAM PENATAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan		100.00 persen	63.655.550,00		100.00 persen	0,00
4 01 56 02	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Tersedianya buku satuan standar harga untuk perencanaan	Bagian ADM Pembangunan	50.00 buku	63.655.550,00	--	50.00 buku	0,00
KECAMATAN DAWAN								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		95.00 persen	879.223.596,00		95.00 persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Kecamatan Dawan	75.00 persen	780.916.112,00	-	75.00 persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase capaian disiplin aparatur	Kecamatan Dawan	90.00 persen	50.488.084,00	-	90.00 persen	0,00
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	persentase surat yang diarsipkan sesuai klarifikasi	Kecamatan Dawan	95.00 persen	17.900.000,00	-	95.00 persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	kecamatan dawan	9.00 buah	3.256.000,00	-	9.00 buah	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	persentase penyampaian laporan kinerja SKPD tepat waktu	kecamatan dawan	12.00 dokumen	3.000.000,00	-	12.00 dokumen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu		12.00 dokumen	23.663.400,00		12.00 dokumen	0,00
4 01 64	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Rata-rata capaian kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan		95.00 persen	1.926.816.000,00		95.00 persen	0,00
4 01 64 01	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		100.00 persen	5.576.000,00		100.00 persen	0,00
4 01 64 02	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	kecamatan dawan	2.00 kali	155.545.000,00	--	2.00 kali	0,00
4 01 64 03	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olahraga dan seni yang di pertandingkan		90.00 persen	110.500.000,00	----	90.00 persen	0,00
4 01 64 04	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase sekolah pelaksana UKS		90.00 persen	7.546.000,00	--	90.00 persen	0,00
4 01 64 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	4.780.000,00	--	95.00 persen	0,00
4 01 64 06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	dokumen rencana kerja pembangunan kecamatan		1.00 dokumen	7.089.000,00	--	1.00 dokumen	0,00
4 01 64 07	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi kecamatan		1.00 dokumen	5.204.000,00	--	1.00 dokumen	0,00
4 01 64 08	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik		12.00 bulan	1.590.130.000,00	0	12.00 bulan	0,00
4 01 64 09	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	cakupan kegiatan koordinasi yang di fasilitasi		100.00 persen	10.460.000,00	--	100.00 persen	0,00
4 01 64 10	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	cakupan pelanggaran perda yang ditangani		100.00 persen	4.240.000,00	--	100.00 persen	0,00
4 01 64 11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	data kerawanan sosial di kecamatan		3.00 dokumen	5.826.000,00	--	3.00 dokumen	0,00
4 01 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	19.920.000,00	--	95.00 persen	0,00
4 01 65	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	terlaksananya pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan		35.00 persen	34.201.000,00		50.00 persen	0,00
4 01 65 01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	persentase layanan sesuai SOP		90.00 persen	34.201.000,00	---	90.00 persen	0,00
4 01 66	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	terlaksananya koordinasi pemerintah umum di seksi pemberdayaan		35.00 perssem	239.871.000,00		50.00 perssem	0,00
4 01 66 01	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang tertib administrasi		12.00 desa	4.492.000,00	--	12.00 desa	0,00
4 01 66 02	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDesa tepat waktu		90.00 persen	75.583.000,00	--	90.00 persen	0,00
4 01 66 03	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang di ikuti		90.00 persen	5.686.000,00	--	90.00 persen	0,00
4 01 66 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	154.110.000,00	--	95.00 persen	0,00
KECAMATAN NUSA PENIDA								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		95.00 %	788.068.300,00		0.00 %	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	470.986.544,00	--	0.00 %	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	10.308.300,00	--	100.00 %	0,00
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	48.109.456,00	--	0.00 %	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	45.594.000,00	--	0.00 %	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	35.553.000,00	--	0.00 %	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	177.517.000,00	--	0.00 %	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 64	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan yang Dikoordinasikan		100.00 %	818.528.500,00		100.00 %	0,00
4 01 64 01	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	47.605.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 64 02	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	441.930.000,00	---	0.00 %	0,00
4 01 64 03	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenjar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	187.407.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 64 04	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Jumlah sekolah yang menjadi peserta lomba UKS	Kecamatan Nusa Penida	1.00 Sekolah	8.860.000,00	--	0.00 Sekolah	0,00
4 01 64 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	90.00 %	4.926.500,00	--	0.00 %	0,00
4 01 64 06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen rencana kerja pembangunan Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	14.890.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 64 07	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	7.485.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 64 09	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	22.877.500,00	--	0.00 %	0,00
4 01 64 10	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	Cakupan pelanggaran Perda yang ditangani	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	56.955.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 64 11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data kerawanan sosial di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	6.065.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Keterlibatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	19.527.500,00	-	0.00 %	0,00
4 01 65	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		100.00 %	54.265.000,00		100.00 %	0,00
4 01 65 01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan perijinan di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	54.265.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 66	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Tertib Administrasi		100.00 %	316.706.200,00		100.00 %	0,00
4 01 66 01	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	30.940.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 66 02	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	111.018.700,00	-	0.00 %	0,00
4 01 66 03	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	19.938.000,00	-	0.00 %	0,00
4 01 66 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	154.809.500,00	-	0.00 %	0,00
KECAMATAN BANJARANGKAN								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		100.00 Persen	968.963.216,00		0.00 Persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Banjarnagkan	96.00 Persen	769.779.612,00	0	0.00 Persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kecamatan Banjarnagkan	80.00 Persen	160.676.604,00	0	0.00 Persen	0,00
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	6.122.000,00	0	0.00 Persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	9.00 Dokumen	5.247.000,00	0	0.00 Dokumen	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	22.00 Dokumen	5.370.000,00	0	0.00 Dokumen	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	12.00 Dokumen	21.768.000,00	0	0.00 Dokumen	0,00
4 01 64	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan		100.00 Persen	604.038.000,00		0.00 Persen	0,00
4 01 64 02	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	Kecamatan Banjarnagkan	2.00 Kali	327.943.000,00	0	0.00 Kali	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 64 03	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	87.085.000,00		0,00	Persen
4 01 64 04	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	13.385.000,00		0,00	Persen
4 01 64 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	47.523.000,00		0,00	Persen
4 01 64 06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarnagaran	1.00 Dokumen	22.221.000,00		0,00	Dokumen
4 01 64 07	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	Kecamatan Banjarnagaran	2.00 Buku	4.474.000,00		0,00	Buku
4 01 64 08	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Banjarnagaran	12.00 Bulan	35.680.000,00		0,00	Bulan
4 01 64 09	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	17.629.000,00		0,00	Persen
4 01 64 11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	Kecamatan Banjarnagaran	2.00 Data	39.049.000,00		0,00	Data
4 01 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	9.049.000,00		0,00	Persen
4 01 65	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		100.00 Persen	51.203.000,00		0,00	Persen
4 01 65 01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Layanan Sesuai SOP	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	51.203.000,00		0,00	Persen
4 01 66	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi		100.00 Persen	221.301.500,00		0,00	Persen
4 01 66 01	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagaran	13.00 Desa	85.285.600,00		0,00	Desa
4 01 66 02	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	41.917.900,00		0,00	Persen
4 01 66 03	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	14.529.000,00		0,00	Persen
4 01 66 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	79.569.000,00		0,00	Persen
KECAMATAN KLUNGKUNG								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian ouput kegiatan		100.00 persen	856.516.550,00		100.00 persen	0,00
4 01 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Kantor Camat Klungkung	75.00 persen	598.929.350,00	-----	75.00 persen	0,00
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase capaian disiplin aparatur	Kantor Camat Klungkung	95.00 persen	163.052.000,00	-----	95.00 persen	0,00
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kantor Camat Klungkung	95.00 persen	25.037.500,00	-----	95.00 persen	0,00
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	9.00 buah	7.960.000,00	----	9.00 buah	0,00
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	12.00 dokumen	28.317.600,00	-----	12.00 dokumen	0,00
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	12.00 dokumen	33.220.100,00	-----	12.00 dokumen	0,00
4 01 64	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan		95.00 persen	297.714.950,00		95.00 persen	0,00
4 01 64 02	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari - hari besar yang diperingati	Kecamatan Klungkung	2.00 kali	56.645.000,00	-----	2.00 kali	0,00
4 01 64 03	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olah raga dan seni yang dipertandingkan	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	77.248.000,00	-----	90.00 persen	0,00
4 01 64 04	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Sekolah pelaksana UKS	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	20.259.000,00	-----	90.00 persen	0,00
4 01 64 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	18.751.000,00	-----	95.00 persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 64 06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen rencana kerja pembangunan kecamatan	Kecamatan Klungkung	1.00 dokumen	7.583.000,00	-----	1.00 dokumen	0,00
4 01 64 07	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan potensi Kecamatan	Kecamatan Klungkung	1.00 dokumen	4.325.950,00	-----	1.00 dokumen	0,00
4 01 64 09	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	11.845.000,00	-----	95.00 persen	0,00
4 01 64 11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data kerawanan sosial di Kecamatan	Kecamatan Klungkung	3.00 dokumen	96.618.000,00	-----	3.00 dokumen	0,00
4 01 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	4.440.000,00	-----	95.00 persen	0,00
4 01 65	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		75.00 persen	46.603.600,00		75.00 persen	0,00
4 01 65 01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan sesuai SOP	Kantor Camat Klungkung	90.00 persen	46.603.600,00	-----	90.00 persen	0,00
4 01 66	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib administrasi		90.00 persen	275.485.500,00		90.00 persen	0,00
4 01 66 01	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	Kecamatan Klungkung	18.00 desa/ kelurahan	24.737.500,00	-----	18.00 desa/ kelurahan	0,00
4 01 66 02	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	134.401.000,00	-----	90.00 persen	0,00
4 01 66 03	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	8.188.000,00	-----	90.00 persen	0,00
4 01 66 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	108.159.000,00	----	95.00 persen	0,00
KELURAHAN SEMARAPURA KAJA								
4 01 67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KELURAHAN SEMARAPURA KAJA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang di koordinasikan		100.00 Persen	364.076.606,00		0.00 Persen	0,00
4 01 67 01	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan layanan kesekretariatan kelurahan	Kelurahan Semarang Kaja	100.00 Persen	214.634.506,00	-----	0.00 Persen	0,00
4 01 67 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Jumlah hari-hari besar yang diperingati Cakupan koordinasi Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Kaja	2.00 kali 100.00 Persen	74.936.200,00	-----	0.00 kali 0.00 Persen	0,00
4 01 67 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Nasabah Bank Sampah Buku Profil Kelurahan Dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan	Kelurahan Semarang Kaja	35.00 KK 1.00 Buku 1.00 Dokumen	20.961.900,00	---	0.00 KK 0.00 Buku 0.00 Dokumen	0,00
4 01 67 06	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah cabang olah raga yang diikuti di Porcam Cakupan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semarang Kaja	2.00 cabang 100.00 Persen	53.544.000,00	----	0.00 cabang 0.00 Persen	0,00
KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN								
4 01 68	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang di koordinasikan di kelurahan		100.00 persen	369.958.166,00		100.00 persen	0,00
4 01 68 01	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	cakupan layanan kesekretariatan kelurahan	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	236.053.881,00	-----	100.00 persen	0,00
4 01 68 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	cakupan koordinasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi, jumlah hari besar yang diperingati jumlah hari-hari besar yang diperingati	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen 2.00 kali	50.882.260,00	-----	100.00 persen 2.00 kali	0,00
4 01 68 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	nasabah bank sampah buku profil keluraha dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan	kelurahan semarapura kangin	100.00 kk 1.00 buku 1.00 dokumen	27.293.890,00	-----	100.00 kk 1.00 buku 1.00 dokumen	0,00
4 01 68 06	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi jumlah cabang olah raga yang diikuti di porcam	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen 5.00 cabang	55.728.135,00	-----	100.00 persen 5.00 cabang	0,00
KELURAHAN SEMARAPURA KAUH								

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 73	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KELURAHAN SEMARAPURA KAUH	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan		100.00 Persentase	418.422.369,00		100.00 Persentase	0,00
4 01 73 01	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase	249.206.142,00		100.00 Persentase	0,00
4 01 73 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase 2.00 kali	82.661.677,00		100.00 Persentase 2.00 kali	0,00
4 01 73 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan di Kelurahan Buku Profil Kelurahan Jumlah Nasabah Bank Sampah Cakupan koordinasi Ekonomi dan Pembangunan yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	1.00 Dokumen 0.00 Buah 0.00 KK 0.00 Persentase	26.850.750,00		1.00 Dokumen 0.00 Buah 0.00 KK 0.00 Persentase	0,00
4 01 73 06	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti di PORCAM	Kecamatan Klungkung	100.00 Persentase 4.00 Cabor	59.703.800,00		100.00 Persentase 4.00 Cabor	0,00
KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH								
4 01 74	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan		100.00 persen	516.571.388,00		0.00 persen	0,00
4 01 74 01	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Tengah	100.00 Persen	214.274.544,00		0.00 Persen	0,00
4 01 74 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati Cakupan Koordinasi Pemerintahan dan Ketentraman yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Tengah	2.00 Kali 100.00 Persen	60.536.400,00		0.00 Kali 0.00 Persen	0,00
4 01 74 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Nasabah Bank Sampah Baru Buku Propil Kelurahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan	Kecamatan Klungkung	85.00 KK 1.00 Buku 1.00 Dokumen	31.615.700,00		0.00 KK 0.00 Buku 0.00 Dokumen	0,00
4 01 74 06	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti DiPorcam Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi		3.00 Cabang 100.00 Persen	210.144.744,00		0.00 Cabang 0.00 Persen	0,00
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD								
4 01 75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KELURAHAN SEMARAPURA KLOD	rata-rata capaian kinerja pemerintahan yang dikoordinasikan di kelurahan		100.00 persen	413.764.536,00		0.00 persen	0,00
4 01 75 01	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen	295.563.386,00		0.00 Persen	0,00
4 01 75 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban difasilitasi Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen 2.00 Kali	43.201.000,00		0.00 Persen 0.00 Kali	0,00
4 01 75 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Buku Profil Kelurahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan Nasabah Bank Sampah	Kelurahan Semarang Klod	1.00 Buku 1.00 Dokumen 150.00 KK	29.090.150,00		0.00 Buku 0.00 Dokumen 0.00 KK	0,00
4 01 75 06	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti di PORCAM	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen 4.00 Cabang Olah Raga	45.910.000,00		0.00 Persen 0.00 Cabang Olah Raga	0,00
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN								
4 01 76	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan		100.00 persen	429.550.752,00		100.00 persen	0,00
4 01 76 01	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	240.431.752,00		100.00 persen	0,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod	100.00 persen			0.00 persen	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 76 04	Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kangin	2.00 kali	67.429.000,00	-----	0,00 kali	0,00
		Buku profil kelurahan		1.00 buku			0,00 buku	
			Kelurahan	1.00			0,00	
4 01 76 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan Nasabah Bank Sampah	Semarang Klod	dokumen			0,00 dokumen	
			Kangin	0,00 KK	35.815.000,00	----	0,00 KK	0,00
			Kelurahan	100,00			0,00 persen	
4 01 76 06	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Semarang Klod	persen			0,00 persen	
		Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti di Porcam	Kangin	5,00 Cabor	85.875.000,00	-----	0,00 Cabor	0,00
BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata output kegiatan		95,00 %	326.815.875,00		95,00 %	0,00
		Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100,00			100,00	
4 01 09 01			Bag. Adm PBJ	persen	272.886.000,00	-----	0,00 persen	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		8,00			8,00	
4 01 09 04		Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu		dokumen	5.179.375,00	---	0,00 dokumen	0,00
				20,00			20,00	
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Bag. Adm. PBJ	Laporan	4.402.500,00	---	0,00 Laporan	0,00
				12,00			12,00	
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Bag. Adm PBJ	Laporan	44.348.000,00	---	0,00 Laporan	0,00
4 01 56	PROGRAM PENATAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasda		320,00 indeks	886.795.000,00		325,00 indeks	0,00
		Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		100,00			100,00	
4 01 56 01		Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	Bag. Adm. PBJ	persen	621.650.000,00	----	0,00 persen	0,00
		Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah		60,00 orang	190.000.000,00	----	60,00 orang	0,00
4 01 56 03		Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	Bag Adm PBJ	Laporan	75.145.000,00	----	60,00 Laporan	0,00
4 01 56 04				60,00			60,00	
BAGIAN ORGANISASI								
4 01 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		90,00 Persen	288.549.968,00		90,00 Persen	0,00
		Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		95,00 Persen	118.606.516,00	-----	95,00 Persen	0,00
4 01 09 01			Kabupaten Klungkung	95,00 Persen			95,00 Persen	0,00
		Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD		80,00 Persen	26.030.852,00	----	80,00 Persen	0,00
4 01 09 02		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	Dokumen	7.608.000,00	-----	0,00 Dokumen	0,00
				9,00			9,00	
4 01 09 04		Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		Dokumen	117.208.200,00	---	0,00 Dokumen	0,00
				23,00			23,00	
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	Dokumen	19.096.400,00	----	0,00 Dokumen	0,00
				12,00			12,00	
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	Dokumen	19.096.400,00	----	0,00 Dokumen	0,00
				12,00			12,00	
4 01 46	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik		80,00 Nilai	437.110.500,00		82,00 Nilai	0,00
		Buku Anjab dan ABK Tersedia Tepat Waktu		2,00			2,00	
		Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu		Dokumen			0,00 Dokumen	
4 01 46 01			Kabupaten Klungkung	Dokumen	194.374.500,00	-----	0,00 Dokumen	0,00
				1,00			0,00	
		Peraturan Bupati Tentang SOP Tersedia Tepat Waktu		Dokumen			0,00 Dokumen	
		Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu		6,00 Unit Kerja			7,00 Unit Kerja	
4 01 46 02		Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	Aksi	162.675.500,00	-----	6,00 Aksi	0,00
				5,00			6,00	
4 01 46 03	Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM	Laporan Capaian Penerapan SPM Kabupaten Klungkung Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	Dokumen	80.060.500,00	-----	0,00 Dokumen	0,00
				1,00			1,00	
4 01 58	PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi		80,00 Persen	75.478.700,00		80,00 Persen	0,00
		Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1,00			1,00	
4 01 58 01		Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	Dokumen	75.478.700,00	-----	0,00 Dokumen	0,00
				1,00			1,00	
4 01 59	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten		90,00 Persen	479.031.400,00		90,00 Persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 59 01	Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	2.00 Dokumen	204.128.200,00	----	2.00 Dokumen	0,00
4 01 59 02	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	1.00 Dokumen	274.903.200,00	----	1.00 Dokumen	0,00
4 02	PENGAWASAN				3.731.313.364,00			0,00
INSPEKTORAT								
4 02 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Presentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan		100.00 Persen	1.284.807.164,00		100.00 Persen	0,00
4 02 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Klungkung	90.00 Persen	465.969.400,00	-----	100.00 Persen	0,00
4 02 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	90.00 persen	564.034.864,00	-----	90.00 persen	0,00
4 02 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Presentase Surat Yang Dihilangkan Sesuai Klasifikasi	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	25.021.600,00	--	90.00 Persen	0,00
4 02 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	Kabupaten Klungkung	10.00 Dokumen	104.276.900,00	-----	10.00 Dokumen	0,00
4 02 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	25.00 Dokumen	96.558.600,00	-----	25.00 Dokumen	0,00
4 02 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kab. Klungkung	13.00 Laporan	28.945.800,00	-----	13.00 Laporan	0,00
4 02 18	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		86.00 Persen	1.548.701.900,00		86.00 Persen	0,00
4 02 18 01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	Kabupaten Klungkung	12.00 LHP	156.701.900,00	-----	12.00 LHP	0,00
4 02 18 02	Kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus		2.00 Laporan	234.901.000,00	-----	3.00 Laporan	0,00
4 02 18 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Klungkung	21.00 Laporan	556.468.000,00	-----	12.00 Laporan	0,00
4 02 18 04	Pelaksanaan Audit Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja		3.00 Laporan	62.068.900,00	-----	3.00 Laporan	0,00
4 02 18 05	Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan	Kab. Klungkung	12.00 Laporan	538.562.100,00	-	12.00 Laporan	0,00
4 02 19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penurunan jumlah temuan yang berulang-ulang		10.00 Persen	257.809.000,00		15.00 Persen	0,00
4 02 19 01	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Terselamatkan Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	7.00 Dokumen	31.625.800,00	-	7.00 Dokumen	0,00
4 02 19 02	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Reviu PA/PBJ Terselamatkan Tepat Waktu	Kab. Klungkung	4.00 Dokumen	20.425.800,00	-	4.00 Dokumen	0,00
4 02 19 03	Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan Terselamatkan Tepat Waktu	Kab. Klungkung	2.00 Dokumen	31.035.800,00	-	2.00 Dokumen	0,00
4 02 19 04	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Road Map Reformasi Birokrasi	Laporan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Kabupaten Klungkung	40.00 Laporan	87.935.800,00	-	40.00 Laporan	0,00
4 02 19 05	Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Presentase Perangkat Daerah Dengan Maturitas SPIP Level 3	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	86.785.800,00	-	100.00 Persen	0,00
4 02 20	PROGRAM PENINGKATAN PELEMBAGAAN PEMERINTAH YANG BERSIH	Persentase Capaian RAD PPK		100.00 persen	639.995.300,00		100.00 persen	0,00
4 02 20 01	Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi	Laporan RAD PPK	Kab. Klungkung	4.00 laporan	382.927.900,00	-----	4.00 laporan	0,00
4 02 20 02	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah PD Dengan Predikat Menuju WBK/WBBM	Kab. Klungkung	1.00 PD	83.139.500,00	-----	1.00 PD	0,00
4 02 20 03	Pencegahan dan Penanggulangan Pungutan Liar	laporan Pelaksanaan Kegiatan UP Pungli Tersedia Tepat Waktu	Kab. Klungkung	12.00 Laporan	173.927.900,00	-----	12.00 Laporan	0,00
4 03	PERENCANAAN				2.867.967.600,00			0,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
4 03 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan perangkat daerah.		95.00 persen	524.167.100,00		95.00 persen	0,00
4 03 09 01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.	Baperlitbang	100.00 persen	264.001.000,00	-----	100.00 persen	0,00
4 03 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Tingkat Disiplin Aparatur	Baperlitbang	75.00 persen	43.230.000,00	-----	75.00 persen	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 03 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Baperlitbang	85.00 persen	65.588.600,00	-----	85.00 persen	0,00
4 03 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tersusun tepat waktu	Baperlitbang	9.00 Dokumen	11.571.500,00	-----	8.00 Dokumen	0,00
4 03 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	Baperlitbang	23.00 laporan	119.501.000,00	-----	23.00 laporan	0,00
4 03 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Baperlitbang	13.00 laporan	20.275.000,00	-----	13.00 laporan	0,00
4 03 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase dokumen perencanaan PD Koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan kualitas baik		100.00 persen	565.254.000,00		100.00 persen	0,00
4 03 23 05	Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pendidikan dan kesehatan disampaikan tepat waktu.	Baperlitbang	75.00 persen	110.137.250,00	-	80.00 laporan	0,00
4 03 23 06	Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat disampaikan tepat waktu.	Baperlitbang	75.00 persen	344.224.000,00	-	80.00 laporan	0,00
4 03 23 07	Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu.	Baperlitbang	75.00 persen	110.892.750,00	-	80.00 laporan	0,00
4 03 34	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR	Persentase dokumen perencanaan PD koordinasi bidang PSDAIK dengan kualitas baik		100.00 persen	487.252.500,00		100.00 persen	0,00
4 03 34 01	Perencanaan Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang Perekonomian disampaikan tepat waktu.	Baperlitbang	75.00 persen	135.792.500,00	-	80.00 laporan	0,00
4 03 34 02	Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pertanian, perikanan dan lingkungan hidup tersusun tepat waktu.	Baperlitbang	75.00 persen	183.174.500,00	-	80.00 Dokumen	0,00
4 03 34 03	Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang penataan ruang dan infrastruktur disampaikan tepat waktu.	Baperlitbang	75.00 persen	168.285.500,00	-	80.00 Dokumen	0,00
4 03 36	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		100.00 %			100.00 %	
		Rata-rata Capaian Output Kegiatan RKPD		100.00 %	1.291.294.000,00		100.00 %	0,00
4 03 36 01	Kegiatan Penyusunan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Baperlitbang	86.00 %	208.884.500,00	-----	87.00 %	0,00
4 03 36 02	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Baperlitbang	100.00 Persen	569.464.500,00	-----	100.00 Persen	0,00
4 03 36 03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah tersusun tepat waktu	Baperlitbang	36.00 laporan	512.945.000,00	-----	36.00 laporan	0,00
4 04	KEUANGAN				5.280.744.517,00			0,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								
4 04 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Rata-rata capaian output kegiatan		100.00 %	1.287.113.072,00		0.00 %	0,00
4 04 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	BPKPD	12.00 bulan	818.531.964,00	-----	0.00 bulan	0,00
4 04 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah Laporan kepegawaian SKPD	BPKPD	15.00 laporan	195.825.000,00	-----	0.00 laporan	0,00
4 04 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	BPKPD	90.00 persen	81.466.108,00	-----	0.00 persen	0,00
4 04 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	BPKPD	10.00 dokumen	7.815.000,00	-----	0.00 dokumen	0,00
4 04 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	BPKPD	13.00 laporan	5.275.000,00	-----	0.00 laporan	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 04 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	BPKPD	49.00 laporan	178.200.000,00	-----	0,00 laporan	0,00
4 04 17	PROGRAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD		100.00 %	541.990.000,00		0,00 %	0,00
4 04 17 05	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Buku analisis standar belanja daerah	BPKPD	50.00 buku	28.195.000,00	-----	0,00 buku	0,00
4 04 17 07	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 1	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran 1 yang diverifikasi	BPKPD	34.00 buku	125.706.500,00	-----	0,00 buku	0,00
4 04 17 08	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 2	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran II yang diverifikasi	BPKPD	18.00 buku	228.647.500,00	-----	0,00 buku	0,00
4 04 17 09	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 3	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran III yang diverifikasi	BPKPD	32.00 buku	159.441.000,00	-----	0,00 buku	0,00
4 04 19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERBENDAHARAAN DAERAH	Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu		100.00 %	368.046.500,00		0,00 %	0,00
4 04 19 01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)	jumlah penerbitan SP2D	BPKPD	12000.00 dokumen	122.159.000,00	-----	0,00 dokumen	0,00
4 04 19 02	Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase verifikasi SPJ fungsional yang tepat waktu	BPKPD	100.00 Persen	102.937.500,00	-----	0,00 Persen	0,00
4 04 19 03	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan	Persentase penyampaian laporan yang tepat waktu	BPKPD	100.00 Persen	142.950.000,00	-----	0,00 Persen	0,00
4 04 20	PROGRAM PENDATAAN, PENATAAN DAN PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN DAERAH	Jumlah ketetapan pendapatan daerah		2189.00 ketetapan	640.375.000,00		0,00 ketetapan	0,00
4 04 20 01	Pendataan Pendapatan Daerah	Jumlah data obyek pendapatan daerah yang terdata	BPKPD	196.00 Berkas	145.420.000,00	-----	0,00 Berkas	0,00
4 04 20 02	Pengolahan Data Pendapatan Daerah	Jumlah berkas pajak yang memenuhi ketentuan untuk diproses	BPKPD	1993.00 Berkas	165.981.000,00	-----	0,00 Berkas	0,00
4 04 20 03	Penetapan Pendapatan Daerah	Jumlah data obyek pendapatan daerah yang diverifikasi		2189.00 berkas	328.974.000,00	---	0,00 berkas	0,00
4 04 21	PROGRAM PENAGIHAN, KEBERATAN, PENELITIAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan PAD		100.00 %	887.999.945,00		0,00 %	0,00
4 04 21 01	Penagihan Pendapatan Daerah	Persentase jumlah WP dan WR yang taan memenuhi kewajiban	BPKPD	100.00 %	570.971.500,00	-----	0,00 %	0,00
4 04 21 02	Keberatan Pendapatan Daerah	Persentase berkas keberatan yang ditindaklanjuti	BPKPD	100.00 %	164.971.945,00	-----	0,00 %	0,00
4 04 21 03	Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan PAD	BPKPD	100.00 %	152.056.500,00	-----	0,00 %	0,00
4 04 23	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD		100.00 %	715.045.000,00		0,00 %	0,00
4 04 23 01	Perencanaan dan Penggunaan BMD	Tersedianya buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	BPKPD	5.00 buku	90.290.000,00	----	0,00 buku	0,00
4 04 23 02	Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Persentase persetujuan pemusnahan yang ditindaklanjuti	BPKPD	100.00 persen	268.025.000,00	----	0,00 persen	0,00
		Buku daftar aset tetap		5.00 buku			0,00 buku	
		Buku daftar aset lainnya		5.00 buku			0,00 buku	
		Buku induk inventaris		5.00 buku			0,00 buku	
4 04 23 03	Penatausahaan dan Pengendalian BMD	Laporan persediaan dan laporan aset ekstrakontabel	BPKPD	1.00 laporan	356.730.000,00	---	0,00 laporan	0,00
4 04 24	PROGRAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	Persentase ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD		100.00 %	840.175.000,00		0,00 %	0,00
4 04 24 04	Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Lainnya	Persentase terbitnya laporan realisasi anggaran atas pendapatan tepat waktu	BPKPD	100.00 Persen	142.115.000,00	---	0,00 Persen	0,00
4 04 24 05	Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Lainnya	Persentase terbitnya laporan realisasi anggaran atas belanja tepat waktu	BPKPD	100.00 persen	201.600.000,00	-----	0,00 persen	0,00
4 04 24 06	Penyusunan Laporan Keuangan	Buku pertanggungjawaban APBD		100.00 Buku			0,00 Buku	
		Buku LKPD	BPKPD	30.00 buku	343.660.000,00	---	0,00 buku	0,00
4 04 24 07	Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Piutang Daerah	Laporan tindakan lanjut piutang daerah	BPKPD	100.00 Laporan	152.800.000,00	-----	0,00 Laporan	0,00
4 05	KEPEGAWAIAN				2.498.740.585,00			0,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
4 05 09	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95%		100.00 %	438.324.850,00		0,00 %	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 05 09 01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Sekretariat	100.00 %	316.795.000,00	-----	0,00 %	0,00
4 05 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	Sekretariat	100.00 %	72.431.500,00	-----	0,00 %	0,00
4 05 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	Sekretariat	100.00 %	6.587.850,00	----	0,00 %	0,00
4 05 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	Sekretariat	6.00 Dokumen	7.999.500,00	-----	0,00 Dokumen	0,00
4 05 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dok)	Sekretariat	21.00 Dokumen	2.027.000,00	----	0,00 Dokumen	0,00
4 05 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (Dok)	Sekretariat	12.00 Dokumen	32.484.000,00	----	0,00 Dokumen	0,00
4 05 15	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI KERJA DAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu (Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/ Karsu, Karpeg, dan Berita Acara Sumpah PNS		100.00 100	570.954.985,00		0,00 100	0,00
4 05 15 01	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Persentase SK pegawai naik pangkat yang selesai tepat waktu (%)	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan	100.00 %	218.800.485,00	-----	0,00 %	0,00
4 05 15 02	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	Persentase SK Pegawai Pensiun yang selesai tepat waktu (%)		100.00 %	142.500.000,00	-----	0,00 %	0,00
4 05 15 03	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Persentase layanan Kepegawaian tepat waktu (Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Karpeg dan Berita Acara Sumpah PNS	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan	100.00 %	209.654.500,00	-----	0,00 %	0,00
4 05 16	PROGRAM PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penurunan Kesalahan Data Pegawai		100.00 %	116.672.000,00		0,00 %	0,00
4 05 16 01	Updating database kepegawaian pada SIMPEG	Jumlah bulan terlaksananya updating data kepegawaian PNS (bulan)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	12.00 bulan	116.672.000,00	-	0,00 bulan	0,00
4 05 17	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Disiplin		100.00 %	338.531.000,00		0,00 %	0,00
4 05 17 01	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan		1.00 orang	338.531.000,00	-----	0,00 orang	0,00
4 05 18	PROGRAM PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Penurunan Kesalahan data pegawai		100.00 %	1.034.257.750,00		0,00 %	0,00
4 05 18 01	Penyusunan rencana pengembangan karir ASN	Persentase Jabatan yang terisi sesuai dengan Kompetensi (%)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	422.005.500,00	-----	0,00 %	0,00
4 05 18 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi (%)	Bidang Data, pengadaan dan Promosi	100.00 %	563.355.250,00	-----	0,00 %	0,00
4 05 18 03	Penyediaan data formasi pegawai	Persentase tersedianya data formasi pegawai (%)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	48.897.000,00	---	0,00 %	0,00
4 06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.544.095.100,00			0,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
4 06 16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase Kelulusan Diklat		100.00 %	4.544.095.100,00		0,00 %	0,00
4 06 16 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNSD yang lulus diklat Prajabatan	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	216.00 orang	2.055.690.000,00	-	0,00 orang	0,00
4 06 16 02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Pejabat struktural yang belum memiliki STTPP Diklatpim sesuai eselon	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	100.00 %	1.783.205.000,00	-----	0,00 %	0,00
4 06 16 04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Persentase Kelulusan Diklat Fungsional	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	50.00 %	705.200.100,00	-----	0,00 %	0,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4 07		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.481.737.450,00			0,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
4 07 15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN UNTUK KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan		80.00 persen	1.481.737.450,00		82.00 persen	0,00
4 07 15 02	Pengembangan Inovasi Masyarakat	Jumlah inovasi yang dikembangkan	Baperlitbang	2.00 buah	936.451.000,00	-----	2.00 dokumen	0,00
4 07 15 03	Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi	Jumlah Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Baperlitbang	2.00 dokumen	179.174.950,00	-----	2.00 dokumen	0,00
4 07 15 05	Penelitian mandiri untuk isu-isu aktual	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Baperlitbang	4.00 dokumen	165.586.500,00	-----	4.00 dokumen	0,00
4 07 15 07	Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Baperlitbang	2.00 Dokumen	200.525.000,00	-----	2.00 Dokumen	0,00
Total Nominal Tahun Ini					Rp649.708.543.719	Total Nominal Tahun Depan		641.805.864.230,52